

ISBN : 979-3566-55-8

# POSISI INDONESIA DALAM PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI BIDANG PERTANIAN

## Analisis Skenario Modalitas



Budiman Hutabarat  
M. Husein Sawit  
Helena J. Purba  
Sri Nuryanti  
Adi Setyanto  
Juni Hestina



PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
2006

**POSISI INDONESIA DALAM PERUNDINGAN  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI  
BIDANG PERTANIAN  
Analisis Skenario Modalitas**

Budiman Hutabarat  
M. Husein Sawit  
Helena J. Purba  
Sri Nuryanti  
Adi Setyanto  
Juni Hestina

**PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
2006**

## KATA PENGANTAR

Buku Posisi Indonesia dalam Perundingan Perdagangan Internasional di Bidang Pertanian (Analisis Skenario Modalitas) disusun dari salah satu laporan hasil penelitian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) TA. 2005 yang format dan sistematika penulisannya sudah disesuaikan sehingga memudahkan bagi pembaca untuk memahami substansi yang terkandung dalam buku ini. Laporan tersebut merupakan laporan penelitian terbaik pertama dari 13 laporan hasil penelitian PSEKP. Penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari 3 orang staf pengajar jurusan Sosek, Faperta-IPB dan seorang peneliti senior PSEKP. Sebagai apresiasi dan untuk menyebarkanluaskannya kepada pihak pengguna, maka PSEKP pada TA. 2006 menerbitkannya dalam bentuk buku ini. Saya menyampaikan selamat untuk peneliti dan semoga lebih giat lagi meningkatkan prestasinya.

Kajian kegiatan perdagangan bilateral dan multilateral dalam satu kelompok ekonomi negara maupun antar kelompok ekonomi telah banyak dilakukan. Kajian-kajian tersebut juga telah membahas isu-isu yang terjadi di pasar internasional, baik di forum regional semacam Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (PN2AT) atau *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *ASEAN Plus* maupun multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (OPD) atau *World Trade Organization* (WTO) yang dimulai sejak tahun 1994 berdasarkan kesepakatan Putaran Uruguay. Setelah Putaran Uruguay sampai saat ini telah banyak dilakukan perundingan-perundingan berikutnya baik lingkup bilateral maupun multilateral.

Selama perundingan pertanian di forum Komisi Pertanian di Jenewa sejak awal tahun 2000 sampai saat ini telah dihasilkan beberapa kerangka atau *framework* yang nantinya akan menjadi modalitas. Beberapa modalitas tersebut antara lain adalah Draft I Harbinson, Rumusan Gabungan atau *Blended Formula* dan Rumusan Berjenjang atau *Tiered Formula*. Di dalam Draft Harbinson terdapat rancangan pengurangan Kotak Jingga atau *Amber Box* sebesar 60% dari yang telah diikat (*bound*) dalam *Agregate Measurement Support* (AMS) selama 5 tahun.

Untuk itu perlu dilihat secara tajam dampak penentuan tarif, subsidi ekspor dan bantuan domestik serta dampak kesepakatan perdagangan wilayah terhadap posisi Indonesia baik dari kinerja sektor pertanian, aspek kesejahteraan masyarakat, maupun aspek ekspor dan impor Indonesia.

PSEKP menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Editor dan semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat dipakai sebagai salah satu rujukan bagi pengguna dalam upaya memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas pertanian di pasar dunia.

Bogor, September 2006

Kepala Pusat,

Dr. Tahlim Sudaryanto  
NIP. 080 035 289

## **KATA PENGANTAR DEWAN EDITOR**

Kami menyambut baik inisiatif Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) memberikan apresiasi menerbitkan judul penelitian terbaiknya dalam bentuk buku ini. Langkah ini sangat baik karena disamping memacu peneliti untuk meningkatkan kualitas hasil penelitiannya, juga sekaligus sebagai salah satu untuk mempercepat penyampaian hasil penelitian yang telah dilakukan PSEKP kepada pengguna.

Sesuai Surat Keputusan Kelapa Badan Litbang Pertanian No. 27/Kpts/OT.160/J/2/2006, Dewan Editor dibentuk untuk membantu menerbitkan buku ini. Kontribusi Dewan Editor dalam penerbitan buku ini hanya sebatas dalam penyusunan sistematika penampilan dan bahasa sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal substansi, Dewan Editor hanya memberi saran kepada penulis buku yang tidak mesti mereka terima dan laksanakan. Semua apresiasi yang mungkin patut diberikan dari buku ini sepenuhnya menjadi hak para penulisnya.

Dewan Editor mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang telah memberikan kepercayaan untuk mengedit buku ini. Dewan Editor sangat yakin tampilan akhir buku ini masih jauh dari sempurna, namun inilah hasil akhir optimal yang dapat dilakukan. Kepada para penulis Dewan Editor menyampaikan mohon maaf bila telah merepotkan atau mungkin terlalu lancang dalam melakukan editan atas naskah awal buku ini. Semua itu dilakukan dengan niat baik yang mungkin berguna bagi para penulis juga.

Demikian, semoga buku ini dapat memberi tambahan informasi dan pengetahuan bagi para pengguna, khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi dan langkah operasional pembangunan pertanian ke depan.

Dewan Editor

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
KATA PENGANTAR DEWAN EDITOR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN GRAFIK.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PERDAGANGAN BILATERAL.....	4
2.1. Kerangka Analisis.....	4
2.2. Perdagangan Indonesia-China.....	6
2.2.1. Perbandingan Ciri-Ciri Ekonomi Makro dan Produk Dagang.....	7
2.2.2. Kinerja dan Intensitas Perdagangan Produk Pertanian.....	10
2.2.3. Simulasi Dampak Liberalisasi Perdagangan Bilateral.....	18
2.3. Perdagangan Indonesia-Jepang.....	20
2.3.1. Perbandingan Ciri-Ciri Ekonomi Makro dan Produk Dagang.....	20
2.3.2. Kinerja dan Intensitas Perdagangan Produk Pertanian.....	23
2.3.3. Simulasi Dampak Liberalisasi Perdagangan Bilateral.....	28
2.4. Perdagangan Indonesia-Korea.....	29
2.4.1. Perbandingan Ciri-Ciri Ekonomi Makro dan Produk Dagang.....	30
2.4.2. Kinerja dan Intensitas Perdagangan Produk Pertanian.....	32
2.4.3. Simulasi Dampak Liberalisasi Perdagangan Bilateral.....	36

III.	PERDAGANGAN REGIONAL ASEAN DAN ASEAN-PLUS .....	38
3.1.	Kerangka Analisis .....	38
3.2.	Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian .....	42
3.3.	Kinerja Produksi Komoditas Pertanian yang Diperdagangkan.....	48
3.4.	Simulasi Dampak Liberalisasi Perdagangan .....	50
IV.	PERDAGANGAN MULTILATERAL.....	60
4.1.	Kerangka Analisis .....	60
4.2.	Perkiraan Bantuan Domestik Indonesia .....	67
4.3.	Fleksibilitas Pemilihan Produk Khusus ( <i>Special Product</i> ): Usulan Indonesia .....	75
4.3.1.	Posisi G-33 .....	77
4.3.2.	Posisi Indonesia.....	79
4.4.	Penurunan Tarif.....	92
4.4.1.	Profil Tarif (bound tariff) Negara Anggota G-33 ....	92
4.4.2.	Skenario Penurunan Tarif.....	99
4.5.	Analisis Simulasi dengan Modal Keseimbangan Umum ATPSM .....	106
4.5.1.	Dampak Resiprokal Berbagai Modalitas yang Diterapkan oleh Negara Pengekspor Utama ke Indonesia .....	106
4.5.2.	Dampak Berbagai Modalitas Terhadap Kinerja Ekspor, Impor, Produksi dan Konsumsi Komoditas Penting di Indonesia .....	109
V.	RANGKUMAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN .....	116
5.1.	Perdagangan Bilateral dan Regional .....	116
5.2.	Perdagangan Multilateral .....	121
	DAFTAR PUSTAKA .....	125
	LAMPIRAN .....	129

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Ciri Makroekonomi Indonesia dan China, 2003 .....	7
2. Perkembangan Nilai Impor dan Ekspor Total Indonesia, Nilai Impor dari Ekspor Total ke China, serta Pangsa Impor dari dan Ekspor ke China, 1996–2003 .....	9
3. Rata-rata Pangsa Volume dan Nilai Ekspor per Tahun dan Persentase Pertumbuhan Volume dan Nilai Ekspor per Tahun untuk Produk Pertanian yang Mengalami Surplus Perdagangan Bilateral dengan China .....	15
4. Dampak KPB Indonesia-China terhadap Kinerja Pertanian Indonesia .....	19
5. Dampak KPB Indonesia-China terhadap Distribusi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia .....	20
6. Perbandingan Ciri Makroekonomi Indonesia dan Jepang, 2003 .....	21
7. Perkembangan Nilai Impor dan Ekspor Total Indonesia, Nilai Impor dari Ekspor Total ke Jepang, serta Pangsa Impor dari dan Ekspor ke Jepang, 1996–2003 .....	22
8. Dampak KPB Indonesia-Jepang terhadap Kinerja Sektor Pertanian Indonesia .....	28
9. Dampak KPB Indonesia-Jepang terhadap Distribusi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia .....	29
10. Perbandingan Ciri Makroekonomi Indonesia dan Korea Selatan, 2003 .....	30
11. Perkembangan Total Nilai Impor dan Ekspor Indonesia, Nilai Impor dan Ekspor ke Korea Selatan, serta Pangsa Impor dan Ekspor ke Korea Selatan, 1996–2003 .....	31
12. Dampak KPB Indonesia–Korea Selatan terhadap Kinerja Pertanian Indonesia .....	37
13. Dampak KPB Indonesia–Korea Selatan terhadap Distribusi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia .....	37

---

14.	Pertumbuhan Rata-rata Nilai Ekspor Indonesia ke Asia tahun 1993-2003.....	43
15.	Tiga Komoditas Pertanian Ekspor Indonesia ke Berbagai Negara Tujuan dengan Pangsa Terbesar Tahun 1993, 1996-1997 .....	46
16.	Tiga Komoditas Pertanian Ekspor Indonesia ke Berbagai Negara Tujuan dengan Pangsa Terbesar Tahun 1998-2000	46
17.	Tiga Komoditas Pertanian Ekspor Indonesia ke Berbagai Negara Tujuan dengan Pangsa Terbesar Tahun 2001-2003 .....	47
18.	Pertumbuhan Produksi dan Kondisi Perdagangan Bilateral Produk Pertanian Indonesia dengan China, Jepang, dan Korea Selatan, 1996-2003 .....	49
19.	Dampak Liberalisasi Perdagangan Indonesia dengan ASEAN terhadap Produksi, Ekspor, dan Impor Indonesia..	51
20.	Dampak Liberalisasi Perdagangan Indonesia dengan ASEAN terhadap Perubahan Kesejahteraan .....	52
21.	Dampak KPB Indonesia dengan ASEAN/AFTA+3 terhadap Distribusi Kesejahteraan Indonesia dan Mitra Dagang .....	53
22.	Dampak KPB Indonesia/ASEAN dengan China terhadap Distribusi Kesejahteraan Indonesia dan Mitra Dagang .....	53
23.	Dampak KPB Indonesia/ASEAN dengan Jepang terhadap Distribusi Kesejahteraan Indonesia dan Mitra Dagang .....	54
24.	Dampak KPB Indonesia/ASEAN dengan Korea Selatan terhadap Distribusi Kesejahteraan Indonesia dan Mitra Dagang .....	55
25.	Usulan Jenjang dan Pemotongan Tarif K 20 .....	61
26.	Usulan Jenjang dan Pemotongan Tarif ACP .....	62
27.	Usulan Jenjang dan Pemotongan Tarif UE.....	62
28.	Usulan Jenjang dan Pemotongan Tarif Australia dan AS...	62
29.	Usulan Jenjang dan Pemotongan Bantuan Domestik K 20, Amerika Serikat, dan Uni Eropa .....	64

30.	Skema Penurunan Tarif menurut Usulan Harbinson .....	65
31.	Usulan Penurunan Bantuan Domestik .....	66
32.	Skenario Simulasi Penurunan Tarif menurut Usulan Harbinson dan K 20 .....	66
33.	Cakupan Jasa, Cakupan Data dan Tolok Ukur yang Digunakan untuk Menghitung Pelayanan Umum/PU atau <i>General Services/ GS</i> bagi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Indonesia.....	68
34.	Bantuan Dometik Indonesia dalam Kriteria Kotak Hijau 2001-2004 .....	72
35.	Bantuan Domestik Indonesia dalam Kriteria Kotak Hijau 1995-2000 .....	73
36.	Komoditas Terpilih sebagai PK berdasarkan Indikator Net Impor.....	81
37.	Komoditas Terpilih sebagai PK berdasarkan Indikator PDB Pertanian .....	83
38.	Komoditas Terpilih sebagai PK berdasarkan Indikator Konsumsi Kalori .....	84
39.	Komoditas Terpilih sebagai PK berdasarkan Indikator Konsumsi Protein.....	84
40.	Komoditas Terpilih sebagai SP berdasarkan Indikator Tenaga Kerja Pertanian .....	84
41.	Pemilihan PK dengan 5 Indikator.....	86
42.	Indikator yang digunakan dalam Penentuan PK dan <i>Threshold</i> -nya .....	88
43.	Ringkasan Hasil Analisa Indikator Kriteria Penentuan PK .	91
44.	Rataan Pos Tarif ( <i>Bound</i> ) pada K 33.....	92
45.	Lima Negara dengan Jumlah Pos Tarif ( <i>Bound</i> ) Terbanyak pada K 33 .....	92
46.	Lima Kelompok Komoditas ( <i>Chapter</i> ) dengan Jumlah Pos Tarif ( <i>Bound</i> ) Terbanyak pada K 33.....	93

---

47.	Persebaran Tarif ( <i>Bound</i> ) menurut Jenjang Tarif Usulan K 20 .....	95
48.	Negara-negara Anggota K 33 dengan Jumlah Pos Tarif ( <i>Bound</i> ) Terbanyak menurut Jenjang Tarif Usulan K 20 ....	95
49.	Lima Komoditas di Indonesia dengan Tarif Tertinggi menurut Jenjang Tarif Usulan K 20.....	96
50.	Perbandingan Hasil Skenario Penurunan Tarif menurut Jenjang Pos Tarif .....	106
51.	Dampak Beberapa Skenario terhadap Harga Dunia dan Distribusi Kesejahteraan .....	107
52.	Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Produksi Pertanian Indonesia.....	110
53.	Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Konsumsi Pertanian Indonesia.....	111
54.	Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Ekspor Pertanian Indonesia.....	112
55.	Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Impor Pertanian Indonesia.....	113
56.	Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Perubahan Kesejahteraan .....	115

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Dampak Terciptanya Perdagangan .....	39
2. Dampak Beralihnya Perdagangan.....	40
3. Rata-rata Nilai Persentase Komposisi Nilai Kotak Hijau Indonesia Tahun 1995-2000 .....	74
4. Rata-rata Nilai Persentase Komposisi Nilai Kotak Hijau Indonesia Tahun 2001-2004 .....	74
5. Perkembangan Nilai Kotak Hijau Indonesia Tahun 1995- 2004 Dalam Nilai Mata Uang Rupiah dan US Dollar .....	75

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>

## DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Lampiran Tabel	Halaman
1. Jadwal Penurunan Tarif Program EHP Bilateral Indonesia–China .....	130
2. Daftar Produk Spesifik Kode HS Empat Digit <i>Early Harvest Package</i> Indonesia–China <i>Free Trade Area</i> .....	130
3. Kelompok Produk Impor dari China ke Indonesia dengan Pangsa Pasar Terbesar, 1996–2003 .....	131
4. Kelompok Produk Ekspor Indonesia ke China dengan Pangsa Pasar Terbesar, 1996–2003 .....	131
5. Uraian Kelompok Produk Kode HS Empat Digit yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia dan China, 1996–2003.....	132
6. Perkembangan Indeks Grubel-Lloyd menurut Kode HS Empat Digit Kelompok Produk Pertanian yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia–China, 1996–2003.....	134
7. Kelompok Produk Impor dari Jepang ke Indonesia dengan Pangsa Pasar Terbesar, 1996–2003 .....	135
8. Kelompok Produk Ekspor Indonesia ke Jepang dengan Pangsa Pasar Terbesar, 1996–2003 .....	135
9. Uraian Kelompok Produk Kode HS Empat Digit yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia dan Jepang), 1996–2003.....	136
10. Perkembangan Indeks Grubel-Lloyd menurut Kode HS Empat Digit Kelompok Produk Pertanian yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia–Jepang, 1996–2003.....	139
11. Kelompok Produk Impor dari Korea Selatan ke Indonesia dengan Pangsa Pasar Terbesar, 1996–2003 .....	140
12. Kelompok Produk Ekspor Indonesia ke Korea Selatan dengan Pangsa Pasar Terbesar, 1996–2003 .....	141
13. Uraian Kelompok Produk Kode HS Empat Digit yang	

Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia dan Korea Selatan, 1996–2003.....	141
14. Perkembangan Indeks Grubel-Lloyd Menurut Kode HS Empat Digit Kelompok Produk Pertanian yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia–Korea Selatan, 1996–2003.....	143
15. Hasil Analisis Indikator Kriteria <i>Food Security</i> .....	144
16. Hasil Valuasi Penentuan Produk Khusus menurut Masing-masing Indikator pada Kriteria <i>Food Security</i> .....	145
17. Hasil Analisis Indikator Kriteria <i>Livelihood Security</i> pada Penentuan Produk Khusus.....	146
18. Hasil Valuasi Penentuan Produk Khusus berdasarkan Indikator-indikator pada Kriteria <i>Livelihood Security</i> .....	148

**DAFTAR LAMPIRAN GRAFIK**

Lampiran Grafik	Halaman
1. Grafik Dinamika Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Kelompok Produk HS Empat Digit Produk Pertanian yang Mendominasi Perdagangan Indonesia–China, 1996–2003.....	150
2. Grafik Dinamika Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Kelompok Produk HS Empat Digit Produk Pertanian yang Mendominasi Perdagangan Indonesia–Jepang, 1996–2003.....	154
3. Grafik Dinamika Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Kelompok Produk HS Empat Digit Produk Pertanian yang Mendominasi Perdagangan Indonesia–Korea Selatan, 1996–2003.....	158

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>

## I. PENDAHULUAN

Kajian kegiatan perdagangan bilateral dan multilateral dalam satu kelompok ekonomi negara maupun antar kelompok ekonomi telah banyak dilakukan. Kajian-kajian tersebut juga telah membahas isu-isu yang terjadi di pasar internasional, baik di forum regional semacam Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (PN2AT) atau *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *ASEAN Plus* maupun multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (OPD) atau *World Trade Organization* (WTO) yang dimulai sejak tahun 1994 berdasarkan kesepakatan Putaran Uruguay. Kesepakatan Putaran Uruguay sendiri adalah perjanjian perdagangan pertama yang juga mencakup pertanian, selain bukan-pertanian, diantara seluruh rangkaian kesepakatan umum mengenai tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade* = GATT) sejak tahun 1940-an.

Selama perundingan pertanian di forum Komisi Pertanian di Jenewa sejak awal tahun 2000 sampai dengan saat ini telah dihasilkan beberapa kerangka atau *framework* yang nantinya akan menjadi modalitas. Beberapa modalitas tersebut antara lain adalah Draft 1 Harbinson, Rumus Gabungan (RG) atau *Blended Formula* (BF) dan Rumus Berjenjang (RB) atau *Tiered Formula* (TF). Di dalam Draft Harbinson terdapat rancangan pengurangan Kotak Jingga atau *Amber Box* sebesar 60 persen dari yang telah diikat (*bound*) dalam *Aggregate Measurement Support* (AMS) selama 5 tahun.

Sebelum sidang Konferensi Tingkat Menteri V di Cancun Meksiko bulan September 2003, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE), dua anggota OPD dan merupakan adikuasa di bidang ekonomi dan militer di dunia, melakukan pertemuan dan membuat kesepakatan yang kemudian menghasilkan Rumus Gabungan (RG) atau *Blended Formula* (BF). RG adalah campuran Rumus-Putaran Uruguay (R-PU) atau *Uruguay Round-Formula* (UR-F), Rumus Swiss (RS) atau *Swiss Formula* (SF) dan liberalisasi penuh. Memang bahan dalam teks yang dibawa ke Cancun itu masih berupa kerangka kerja dan bukan rincian tentang modalitas. Apabila kerangka itu disetujui, maka kemudian baru melangkah untuk menyusun modalitas (Hutabarat *et al.*, 2005). Sampai saat ini telah ada beberapa usulan tentang modalitas penurunan, khususnya untuk tarif seperti usulan-usulan Kelompok 10 (K-10) atau G-10, K 20, *ACP* (*African, Caribbean, and Pacific*) *Countries*, UE, dan Australia serta AS yang masih harus melalui pembahasan lebih lanjut. Hal ini didasari oleh Pasal 20 dalam Perjanjian Pertanian (PP) atau *Agreement on Agriculture* (AoA) yang menyatakan “.....penurunan cepat dalam bantuan dan perlindungan yang menyebabkan perubahan mendasar adalah suatu proses yang terus berjalan, sehingga para anggota menyetujui bahwa perundingan untuk melanjutkan proses tersebut akan dimulai setahun sebelum masa pelaksanaannya.....” (“.....*substantial progressive reductions in support and*

*protection resulting in fundamental reform is an on going process, members agree that negotiations for continuing the process will be initiated one year before the implementation period.....*”) [dalam WTO, 2004a].

Untuk itu diperlukan informasi dan data tentang posisi danantisipasi dampak berbagai kebijakan dan kesepakatan perdagangan internasional terhadap komoditas dan sumber daya pertanian dalam negeri. Selain itu, Indonesia sebagai anggota OPD sama seperti negara-negara lain juga berkewajiban melaporkan komitmennya, khususnya dalam hal Bantuan Domestik atau *Domestic Support* untuk pertanian sebagaimana disepakati dalam PP. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan perhitungan BD untuk setiap unsur-unsur pendukungnya seperti dirinci dalam atau Annex 2-4 PP. Bersamaan dengan ini, sejak diterimanya konsep Produk Khusus (PK) atau *Special Product* (SP) dan Mekanisme Pengamanan Khusus (MPK) atau *Special Safeguard Mechanism* (SSM) bagi NB oleh Komisi Pertanian dalam sidangnya di Jenewa pada bulan Juli 2004, Indonesia juga perlu mengisinya untuk mengamankan komoditas pertaniannya sendiri dan komoditas pertanian kelompoknya, yaitu Kelompok 33 (K-33) atau Group 33 (G-33). Hal ini pun memerlukan kajian yang komprehensif dan mendalam agar benar-benar usulannya optimal dan kondusif bagi perkembangan sektor pertanian domestik.

Sementara itu, kesepakatan perdagangan bilateral dalam suatu kawasan (ASEAN, AFTA, ASEAN Plus) menunjukkan dinamika dan pertumbuhan yang semakin pesat pula dan seolah-olah bertolak belakang dengan semangat multilateralisme perdagangan yang telah dicanangkan hampir sepuluh tahun lalu itu.

Dalam forum AFTA, skema *Common Effective Preferential Tariff/CEPT* adalah pedoman pengurangan tarif regional dan menghapus hambatan bukan-tarif selama periode 15 tahun yang dimulai pada 1 Januari 1993. Produk CEPT meliputi seluruh produk industri (termasuk barang modal, produk olahan hasil pertanian dan produk lain). Sedangkan produk pertanian bukan-olahan dan jasa, yang tadinya tidak termasuk dalam kesepakatan ini diatur dalam mekanisme tersendiri di dalam forum ASEAN.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, meskipun hampir 140 negara telah menyetujui pemberlakuan perjanjian multilateral di berbagai bidang termasuk pertanian dengan terbentuknya OPD tahun 1994, pertumbuhan perjanjian perdagangan bebas bilateral/PPBB dan kawasan atau regional/PKPB atau PPBR atau *bilateral and regional free trade agreements* (BFTAs and RFTAs) tidak semakin surut. Perjanjian semacam ini banyak ditemukan di wilayah Asia, seperti yang dilakukan oleh Singapura dan Thailand dengan beberapa negara. Di lingkungan Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara/PNAT atau *the Association of South East Asian Nations* (ASEAN) telah berkembang suatu wacana PNAT ditambah Tiga/PNAT+3 atau ASEAN Plus Tiga/APT sebagai suatu tanggapan dari negara-negara kawasan Asia Timur untuk melakukan kerjasama ekonomi yang lebih mendalam, yang mengikutsertakan semua

negara-negara PNAT serta tiga negara Asia Timur Laut, yaitu Jepang, China, dan Korea Selatan. Belum lama berselang, PNAT telah menyepakati Perjanjian Kerjasama Ekonomi Menyeluruh atau *Comprehensive Economic Partnership Agreement* dengan China.

Untuk menganalisis data yang dihimpun dalam buku ini, penulis menggunakan pendekatan analisis yang berkisar pada kombinasi dari pendekatan deskriptif, ekonometrika dan simulasi pada data yang bersifat penampang lintang dan deret waktu. Analisis deskriptif dilakukan antara lain melalui bantuan tabulasi silang dan penentuan indeks Grubel-Lloyd (persamaan (1) di halaman 5).

Sistem persamaan dan simulasi (lihat persamaan (L1) – (L-7) pada lampiran, halaman 129) digunakan untuk melihat dampak penentuan tarif, subsidi ekspor dan bantuan domestik terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Regresi grafitasi (persamaan (2) dan (3), halaman 41) diterapkan untuk melihat dampak kesepakatan perdagangan wilayah terhadap ekspor dan impor Indonesia.

## II. PERDAGANGAN BILATERAL

### 2.1. Kerangka Analisis

Menurut Balassa and Bauwens (1984 dalam Kenen, 1989) negara yang menjalin kerjasama perdagangan umumnya mempunyai ciri sebagai berikut: (1) yang berpendapatan tinggi dan dapat terlibat perdagangan intraindustri, (2) yang berpendapatan rendah kurang terlibat perdagangan intraindustri, dan (3) negara yang berorientasi keluar akan semakin sedikit pembatasan perdagangannya, semakin besar porsi perdagangan industrinya. Sementara itu hubungan bilateral dapat dicirikan oleh semakin dekat jarak antar negara dan semakin menyatu masyarakatnya, cenderung membuat perdagangan intraindustri semakin berkembang. Ciri kelompok produk yang diperdagangkan oleh negara yang berdagang umumnya bersifat: (1) satu atau beberapa perusahaan dalam suatu industri kelompok produk tersebut akan terbuka peluang standardisasi atau diferensiasi, (2) standardisasi yang dialami cenderung mengarah spesialisasi daripada perdagangan intraindustri, dan (3) menghadapi kekuatan dominan dari sebagai lawan.

Kerjasama perdagangan Indonesia-China menimbulkan wacana adanya kesenjangan teknologi atau *technological gap* dan daur produksi atau *product cycle* (Postner, 1961 dalam Basri, 1991), mengingat adanya perbedaan latar belakang sosial ekonomi antara Indonesia dengan China yang demikian besar. Hal yang sama mungkin ditemukan juga dalam perdagangan Indonesia-Jepang atau Indonesia-Korea Selatan. Menurut Postner (1961 dalam Basri, 1991) hubungan bilateral yang di dalamnya terdapat kesenjangan teknologi dan daur produk akan menimbulkan suatu rangkaian inovasi dan imitasi yang mempengaruhi ekspor dari negara partner. Setelah produk baru berkembang dan mulai menguntungkan pasar domestik, perusahaan yang melakukan inovasi memperoleh keuntungan monopoli di pasar internasional akibat adanya *entry lag*. Keuntungan monopoli akan merangsang imitasi di negara lain, terutama kalau inovasi telah memasyarakat. Oleh karena itu, agar keunggulan ekspor tetap, negara inovator harus melanjutkan inovasi. Teori inovasi dan imitasi Postner ini secara implisit berkategori teori limpasan atau *spillover*. Teori limpasan dapat diartikan bahwa ekspor akan terjadi kalau konsumsi domestik telah terpenuhi. Kenyataannya pola limpasan tidak selalu terjadi. Kelemahan teori ini adalah tidak memberi pentahapan dari inovasi sampai imitasi dan lamanya proses tersebut. Teori daur produk menurut Kotler (1996) terbagi menjadi tahap pengenalan produk baru (pengenalan), produk pematangan, dan produk baku.

Hipotesa kesenjangan teknologi dan daur produk menekankan pentingnya peranan teknologi karena teknologi menentukan struktur industri dan menentukan pola perdagangan suatu negara. Proses pengalihan atau perpindahan teknologi dapat berlangsung lewat

penanaman modal asing oleh perusahaan multinasional, pembelian lisensi/patent, pinjaman luar negeri, dan pengintaian industrial. Pola perdagangan dua negara atau lebih yang berpartner dapat diamati dari perkembangan produksi, ekspor, dan impor (Chacoliades, 1990). Pola perkembangan perdagangan umumnya membentuk pola huruf V terbalik, yang dikenal dengan pola angsa terbang atau *flying geese pattern* (Akamatsu, 1962 dalam Basri, 1991).

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat betapa perlunya informasi dan data tentang dampak penurunan tarif tersebut terhadap komoditas dan sektor pertanian, komoditas yang rentan terhadap penurunan tarif, pihak yang mendapat manfaat lebih besar dengan adanya kesepakatan perdagangan bebas bilateral. Dalam hal ini dapat dinilai juga pihak di Indonesia yang mendapat manfaat lebih besar dari kebijakan dan kerjasama ekonomi tersebut, yaitu apakah akan mengutamakan surplus produsen, mengutamakan surplus konsumen, mengutamakan penerimaan negara atau meminimalkan kerugian sosial. Berbagai alternatif pilihan strategi terutama dari segi penentuan besaran tarif ini akan sangat berguna bagi para perunding Indonesia dalam kesepakatan perdagangan tersebut. Sehingga hasil perundingan nantinya diharapkan dampaknya relatif kecil bagi para produsen dan pelaku ekonomi di Indonesia karena telah terantisipasi segala konsekuensi dari kesepakatan pemberlakuan tarif dari komoditas tertentu.

Kinerja perdagangan bilateral dapat diamati dari nilai derajat intensitas perdagangan intra industri dengan indeks Grubel-Lloyd (Grubel and Lloyd, 1975 dalam Brulhart, 2002), yang secara matematis dirumuskan:

$$I_k = 1 - \frac{|X_{ijk} - X_{ikj}|}{X_{ijk} + X_{ikj}} \quad (1)$$

dengan  $X_{ijk}$  = nilai atau volume ekspor kelompok produk ke- $i$  dari negara ke- $j$ , ke negara ke- $k$ ,  $X_{ikj}$  = nilai atau volume ekspor kelompok produk ke- $i$  dari negara ke- $k$ , ke negara ke- $j$ ,  $I_k = 0$ , artinya terjadi perdagangan satu arah,  $I_k = 1$ , artinya terjadi perdagangan yang seimbang ( $X_{ijk} = X_{ikj}$ ).

Kajian peta perdagangan Indonesia-China, Indonesia-Jepang, dan Indonesia-Korea Selatan ini dilakukan dalam beberapa tahap. *Pertama*, identifikasi karakteristik negara Indonesia, China, Jepang, dan Korea Selatan, dan sebagai mitra kerja sama perdagangan. *Kedua*, identifikasi kelompok produk yang dominan diperdagangkan Indonesia dengan China, Jepang, dan Korea Selatan baik dari sisi impor maupun ekspor, dikelompokkan dalam sepuluh besar pangsa ekspor atau impor. *Ketiga*, menentukan kinerja perdagangan bilateral berdasarkan nilai derajat intensitas perdagangan intra industri menggunakan Persamaan (1). *Keempat*, menentukan pola aliran perdagangan bilateral berdasar nilai

indeks Grubel-Lloyd, cenderung satu arah atau dua arah aliran produk. *Kelima*, apabila indeks Grubel-Lloyd bernilai nol, selanjutnya ditelusuri dari besarnya volume dan nilai ekspor impor Indonesia pada kelompok produk tersebut untuk menentukan posisi perdagangan dalam kondisi surplus atau defisit. *Keenam*, menentukan besarnya pangsa volume dan nilai perdagangan bilateral setiap kelompok produk berdasarkan persentase volume dan nilai ekspor impor yang tercermin dari nilai indeks Grubel-Lloyd, yaitu nilai IGL dikalikan 100 persen. *Ketujuh*, mendeskripsikan kinerja perdagangan bilateral dari pencapaian besaran dan kecenderungan dari volume dan nilai ekspor maupun impor dari setiap kelompok produk yang dianalisa.

## 2.2. Perdagangan Indonesia – China

Seiring dengan pencapaian kesepakatan perdagangan bebas kawasan ASEAN dengan China, tercapai juga kesepakatan bilateral Indonesia-China untuk *free trade area* (kawasan perdagangan bebas). Kedua kesepakatan tersebut diimplementasikan dalam suatu program yang dikenal dengan *Early Harvest Package* (EHP), yaitu program penurunan tarif atas produk-produk spesifik yang disepakati secara bilateral Indonesia dengan China mulai 1 Januari 2004. Dalam tiga tahun tarif-tarif ini diturunkan secara bertahap, sehingga pada tahun 2006 menjadi 0 persen dan diberlakukan untuk kawasan perdagangan bebas Indonesia dengan China. Jadwal penurunan tarif EHP Indonesia-China dilaksanakan dengan tahapan EHP ASEAN-China (Lampiran Tabel 1). Produk yang memperoleh perlakuan penurunan tarif dalam rangka EHP bilateral Indonesia-China harus merupakan produk yang diimpor langsung dari China atau Indonesia. Indonesia memasukkan 46 pos tarif yang disepakati dan berasal dari sepuluh kelompok produk kode *Harmonized System* (HS) empat digit (Lampiran Tabel 2). Sepuluh kelompok produk tersebut terdiri dari dua kelompok produk pertanian primer, lima kelompok produk pertanian sekunder, dan tiga kelompok produk bukan pertanian. Perlakuan fasilitas preferensi tarif ini adalah berdasarkan asas timbal balik.

Berdasarkan jumlah kelompok produk yang penurunan tarifnya disepakati tersebut, yang tidak termasuk kelompok produk ekspor Indonesia yang selama ini mengalami diskriminasi tarif impor di China adalah produk kakao. Pemerintah Indonesia hanya menyertakan satu kelompok produk berbahan kakao, yaitu “kakao bubuk, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya” dan tidak termasuk kakao biji dan lima produk kakao lainnya seperti yang didaftarkan Pemerintah Malaysia dalam EHP ASEAN-China (Agroindonesia, 2005).

China merupakan salah satu negara besar dan mempunyai peranan besar dalam perekonomian Asia. Oleh karena itu, China dapat dipandang sebagai pasar yang sangat potensial untuk produk-produk promosi ekspor, sehingga diskriminasi tarif impor produk kakao Indonesia

(kakao *liquor*, kakao *butter*, dan kakao mentega) sangat merugikan bagi Indonesia. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa kesepakatan kerja sama tidak selalu lebih mempermudah dan menguntungkan bagi Indonesia dalam mengekspor produk ke negara mitra dagang. Selain itu setelah mengalami krisis, Indonesia mengalami kemunduran daya saing di pasar domestik maupun global, sementara China justru menjadi raksasa Asia yang menguasai pangsa ekspor dunia. Hal ini mungkin menjadi contoh kasus Beralihnya Perdagangan pada Bab sebelumnya. Padahal berdasarkan latar belakang perbedaan struktur sosial ekonomi kedua negara, program EHP bilateral Indonesia–China diharapkan mampu memberi keuntungan bagi Indonesia untuk memperbesar pangsa pasar ekspor, terutama komoditas hasil pertanian serta memperoleh buah dan sayuran segar dari China dengan harga murah. Ini akan menciptakan tantangan yang harus dihadapi oleh produsen di dalam negeri akibat kesepakatan bilateral Indonesia–China ini. Persaingan komoditas di pasar domestik akan timbul karena tarif yang diberlakukan Indonesia telah demikian rendah, sehingga produsen harus menghadapi lebih banyak serbuan impor dari produk pesaing baik dari negara lain maupun China. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pemetaan kinerja perdagangan bilateral Indonesia–China untuk mengkaji prospek ke depan bagi pasar produk Indonesia umumnya dan produk pertanian khususnya, baik di pasar domestik maupun pasar di China, sebagai implikasi program EHP bilateral Indonesia–China.

### 2.2.1. Perbandingan Ciri-Ciri Ekonomi Makro dan Produk Dagang

Sebagai mitra dagang bilateral Indonesia, China mempunyai ciri makroekonomi yang berbeda dengan Indonesia. Perbedaan latar belakang makroekonomi tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Ciri Makroekonomi Indonesia dan China, 2003

Kriteria	Indonesia	China
Pendapatan Nasional Bruto (US\$)	208,3	1.414,3
Pertumbuhan/Tahun		
- Produk Domestik Bruto	4,5	7,7
- Produk Domestik Bruto/Kapita	3,1	7,0
- Ekspor Barang dan Jasa	3,9	12,3
Struktur Ekonomi		
% dari Produk Domestik Bruto		
- Pertanian	16,6	14,6
- Industri	43,6	52,3
- Jasa	24,7	39,3
	39,9	33,1

Sumber: [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org), PDB berdasarkan harga konstan 1993.

Dari Tabel 1 di atas, tampak bahwa pada tahap awal tingkat kesiapan ekonomi Indonesia jauh di bawah China. Hal ini dapat mendatangkan tantangan di masa yang akan datang. Terutama terkait

dengan kinerja perdagangan. Perlu diingat juga bahwa meskipun China mengalami juga krisis, perekonomiannya masih mampu tumbuh dengan cepat, sehingga PDB-nya bertumbuh tiga kali lebih besar dari satu dekade sebelumnya, yaitu tahun 1993 (Feridhanusetyawan, 2003). Sementara itu, di bidang perdagangan, pertumbuhan ekspor Indonesia semakin lemah dan kehilangan daya saing di pasar internasional maupun domestik. Hal ini dicerminkan dari nilai impor dari tahun ke tahun yang meningkat. Belum lagi persaingan produk domestik terhadap serangan produk impor dalam pasar dalam negeri. Hal ini perlu diantisipasi, karena tujuan dari perdagangan luar negeri adalah meningkatkan mutu dan daya saing ekonomi nasional.

Selain tantangan di masa yang akan datang, tingkat pertumbuhan ekonomi China yang demikian pesat dengan jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial bagi Indonesia khususnya dan eksportir dunia. Terpilihnya China sebagai tuan rumah Olimpiade Dunia 2008 berimplikasi pada peningkatan impor kayu, produk kayu, gabus, kertas, bubur kertas, karet mentah, karet sintetis, besi, dan baja tidak saja dari Indonesia namun dari seluruh pengeksportir produk sejenis di dunia. Pembangunan infrastruktur jalan di bawah tanah, stadion megah, transportasi penghubung bandara baru dengan kereta api, jalan tol, dan jaringan kereta api yang menghubungkan India, China, dan Rusia berpengaruh terhadap peningkatan permintaan produk-produk di atas. Sehubungan dengan proyek-proyek tersebut, maka pasar raksasa China menyerap banyak komoditas lain, seperti bahan galian tambang logam dan bukan-logam. China menyerap 30 persen pasokan minyak dunia dan mengakibatkan harga minyak dunia bergejolak. Selain menyerap minyak, China juga menyerap 30 persen produk bijih besi dan 27 persen dari total produk baja dunia. Permintaan yang demikian besar tersebut menyebabkan kenaikan harga komoditas-komoditas tersebut di seluruh dunia.

Selain proyek fisik bukan-pertanian di atas, China juga sedang membangun dam Delta Sungai Yangtze untuk pertanian sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan mereka. Oleh karena itu, Indonesia harus dapat mengoptimalkan peluang pasar potensial di China. Namun, kita perlu menyadari bahwa meningkatkan ekspor ke China bukan perkara mudah. Selain harus bersaing dengan eksportir lain, produk buatan China juga semakin kompetitif. Seperti diketahui, dalam banyak produk industri, harga per unit produk China jauh di bawah harga per unit produk Indonesia. Tanpa antisipasi penawaran, produk Indonesia akan semakin susah menembus pasar China, bahkan sebaliknya, produk-produk China yang akan membanjiri pasar Indonesia.

Dari data ekspor dan impor Indonesia (BPS, 1996–2003), diketahui bahwa terdapat ragam kelompok produk baik yang dominan diimpor dari China maupun diekspor ke China dari Indonesia selama periode tersebut (Lampiran Tabel 3, Lampiran Tabel 4, dan Lampiran Tabel 5). Kelompok produk yang mempunyai pangsa sepuluh besar pertama berubah dari

tahun ke tahun baik untuk impor maupun ekspor. Artinya, total volume dan total nilai ekspor dan impor setiap kelompok produk bergejolak mengikuti pola kecenderungan tertentu. Sebanyak 48 kelompok produk baik yang diekspor dari Indonesia ke China maupun sebaliknya tidak semua merupakan produk pertanian primer atau olahan. Hanya sebanyak 29 kelompok produk yang merupakan produk pertanian. Volume dan nilai ekspor atau ekspornya juga mengalami gejolak dari tahun ke tahun mengikuti pola kecenderungan tertentu (Lampiran Grafik 1).

Fluktuasi volume dan nilai ekspor maupun impor produk secara individu pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh gejolak volume dan nilai ekspor atau impor totalnya (Tabel 2). Nilai impor Indonesia dari tahun 1996–2003 cenderung mengalami penurunan, dengan laju penurunan per tahun sebesar 1,50 persen. Hal ini dapat diartikan dua hal, pertama Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan produk di dalam pasar domestik dengan produk dalam negeri, atau sebaliknya Indonesia mengalami defisit anggaran, sehingga kemampuan daya belinya menurun. Secara parsial total nilai impor Indonesia dalam periode yang sama justru semakin meningkat dengan laju peningkatan per tahun sebesar 7,99 persen. Hal ini merupakan tantangan bagi Indonesia, mengingat pemerintah telah menyepakati EHP bilateral dengan China untuk menurunkan tarif impor, sehingga produk China akan lebih mudah masuk ke pasar Indonesia dan menjadi pesaing produk dalam negeri. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pangsa impor produk China di pasar Indonesia dari tahun 1996–2003 yang meningkat sebesar 9,47 persen per tahun.

Tabel 2. Perkembangan Nilai Impor dan Ekspor Total Indonesia, Nilai Impor dari Ekspor Total ke China, serta Pangsa Impor dari dan Ekspor ke China, 1996–2003

Tahun	Total Nilai Impor Indonesia (Juta USD)	Nilai Impor Indonesia dari China (Juta USD)	Pangsa Impor dari China (%)	Total Nilai Ekspor Indonesia (Juta USD)	Nilai Ekspor Indonesia ke China (Juta USD)	Pangsa Ekspor ke China (%)
1996	9.589.035.189	444.766.049	4,64	14.379.611.387	563.274.934	3,92
1997	8.548.987.131	459.748.077	5,38	14.260.736.551	749.466.568	5,26
1998	6.204.907.121	396.629.464	6,39	11.165.833.276	630.576.982	5,65
1999	7.307.002.355	663.960.087	9,09	12.455.026.450	715.043.755	5,74
2000	8.123.905.455	668.552.963	8,23	12.891.332.873	757.903.201	5,88
2001	7.425.741.069	535.706.266	7,21	11.913.624.737	736.464.164	6,18
2002	7.649.261.257	733.158.108	9,58	13.614.731.241	991.788.461	7,28
2003	7.910.916.752	729.729.395	9,22	14.624.092.099	1.396.574.278	9,55
<i>Growth (%/thn)</i>	-1,50	7,99	9,47	0,14	9,86	9,70

Sumber: Analisa Data Sekunder, 2005.

Secara umum, Indonesia mengalami penurunan daya saing di pasar dunia, terlihat dari rendahnya tingkat pertumbuhan nilai ekspor total dari tahun 1996–2003, yaitu sebesar 0,14 persen per tahun. Dari sisi bilateral perdagangan dengan China, Indonesia cukup optimis dalam merebut pangsa ekspor di negara raksasa Asia tersebut. Nilai ekspor Indonesia ke China dari tahun 1996–2003 mengalami pertumbuhan sebesar 9,86 persen per tahun dengan pertumbuhan pangsa ekspor sebesar 9,70 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa, secara global perdagangan Indonesia dengan China dalam kondisi surplus. Artinya, program EHP bilateral Indonesia–China memberi peluang pasar yang lebih besar bagi produk domestik untuk bersaing dengan produk sejenis dari eksportir dunia di pasar China. Kejadian defisit perdagangan yang dialami produk atau kelompok produk tertentu kemungkinan dapat diperbaiki oleh surplus produk atau kelompok produk yang lain, sehingga total neraca perdagangan Indonesia dengan China menjadi surplus. Penjelasan tentang kinerja ekspor dan impor tiap kelompok produk pertanian yang menunjukkan defisit atau surplus perdagangan secara individu dibahas dalam sub bagian selanjutnya.

### **2.2.2. Kinerja dan Intensitas Perdagangan Produk Pertanian**

Berdasarkan perkembangan volume dan impor kelompok produk baik yang diimpor dari China maupun diekspor ke China oleh Indonesia, dapat diketahui kinerja dan intensitas perdagangan kedua negara berdasarkan nilai indeks Grubel-Lloyd (IGL) menurut kode HS empat digit (Lampiran Tabel 6). Terdapat dua pola aliran barang, yaitu mayoritas barang dari China dengan satu arah aliran hampir sepanjang periode 1996–2003 (100 persen Indonesia defisit dagang dengan China) atau sesekali terjadi dua arah aliran, namun Indonesia mengalami defisit hampir 100 persen. Kedua, mayoritas aliran produk berasal dari Indonesia ke China, satu kelompok produk surplus 100 persen, dan kelompok produk yang lain terjadi dua arah aliran dengan surplus Indonesia kurang dari 100 persen.

Kelompok produk dengan mayoritas satu arah aliran produk dari China (100 atau hampir 100 persen Indonesia tergantung pasokan dari China) antara lain adalah HS 0502, 0703, 0805, 0808, 1001, 1005, 1006, 1101, 1201, 1202, 1702, 2401, 4011, 4012, dan 4104. Diantara kelompok produk dalam satu arah aliran dari China ke Indonesia tidak satu pun termasuk di dalam daftar produk EHP Indonesia–China. Oleh karena itu, intensitasnya masih dapat dibatasi dengan menerapkan tarif bea masuk di Indonesia sebagai langkah antisipatif terhadap banjir impor. Sementara kelompok kedua, dengan mayoritas aliran barang dari Indonesia ke China antara lain produk kode HS 0803, 1507, 1513, 1801, 4001, 4002, dan 4106. Kinerja dan intensitas perdagangan yang dibahas hanya mencakup kelompok produk pertanian (Lampiran Tabel 5).

### **Kelompok Produk Pertanian Defisit Perdagangan**

Dengan menggunakan kategori sebelumnya, maka kinerja dan intensitas perdagangan kelompok produk pertanian itu dapat dianalisa lebih lanjut. Pertama, perdagangan dengan mayoritas aliran barang berasal dari China, sehingga Indonesia kadang-kadang hanya satu atau dua tahun mempunyai pangsa volume/PV dan pangsa nilai/PN. Perdagangan kelompok produk HS 0502, yaitu bulu babi dan binatang lain untuk bahan sikat menunjukkan kinerja Indonesia selama 1996–2003 defisit 100 persen. Seperti ditunjukkan dalam grafik dinamika volume dan nilai ekspor impor, selama periode tersebut, kelompok produk HS 0502 hanya terdapat impor tanpa ada ekspor. Baik volume maupun nilai impornya cenderung mengalami penurunan, namun nilai impor cenderung lebih tinggi penurunannya.

Sementara kelompok produk kode HS 0703, yaitu bawang merah dan putih kinerjanya sangat memprihatinkan. Karena selama tahun 1996–2003 Indonesia hanya mencapai PN perdagangan saja selama dua tahun, yaitu tahun 2001 dan 2002 sebesar 0,01 persen. Pada tahun sebelum dan setelahnya, Indonesia sepenuhnya defisit dagang dari China. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi petani bawang domestik. Mengingat kualitas bawang impor dari China lebih diminati oleh konsumen karena ukuran buahnya yang lebih besar disertai harga yang lebih murah. Dari pengamatan di lapangan diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan produksi bawang domestik yang tidak mampu bersaing dengan bawang impor pada dasarnya disebabkan tidak adanya perbaikan bibit bawang unggul dan terbatasnya agro-ekosistem yang cocok dengan tanaman ini, serta sulitnya akses ke sentra-sentra produksi. Hal ini seperti ditemui pada kawasan penghasil bawang putih unggulan lokal di Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dikatakan oleh pemuka masyarakat setempat, yang merupakan perintis pembukaan lahan bawang putih Sembalun, tidak terdapat perbaikan pembibitan sejak tahun 1988. Hal ini menjadi pekerjaan rumah Departemen Pertanian, khususnya Direktorat Bina Produksi Tanaman Hortikultura. Volume impor cenderung terus mengalami peningkatan, sementara nilai impor berfluktuasi dan cenderung meningkat dengan persentase yang lebih rendah daripada volume.

Kelompok produk HS 0805, yaitu buah jeruk dan HS 0808, yaitu buah pir, menunjukkan fenomena bahwa Indonesia menikmati murahnya harga buah impor dari China, sehingga dalam kurun waktu 1996–2003 hanya pada tahun 1999 (PV sebesar 0,01 persen dan PN sebesar 0,10 persen) serta 2001 saja Indonesia mempunyai andil dalam perdagangan tersebut (PV sebesar 0,05 persen dan PN sebesar 0,14 persen). Selebihnya tergantung dari pasokan impor. Kasus membanjirnya jeruk dari China tersebut telah menimbulkan konflik dengan negara pengekspor jeruk lainnya, yaitu Pakistan karena perbedaan tarif bea masuk yang dikenakan. Akibat kejadian tersebut tarif bea masuk jeruk dari China telah direvisi dari nol menjadi 25 persen. Sementara untuk buah pir

selama periode tersebut Indonesia defisit impor 100 persen dari China. Baik jeruk maupun pir mengalami kecenderungan penurunan volume impor, namun untuk jeruk nilai impornya menunjukkan kecenderungan naik. Sementara untuk pir nilai impor cenderung menurun.

Perdagangan kelompok produk HS 1001, yaitu gandum dan meslin tidak jauh berbeda dengan jeruk. Karena dalam kurun waktu 1996–2003 Indonesia hanya mampu mengambil PN saja pada tahun 2002 sebesar 1,00 persen. Disadari sepenuhnya bahwa Indonesia merupakan negara pengimpor gandum karena agro-ekosistem Indonesia memang tidak sesuai untuk budidaya gandum, sehingga kebutuhan gandumnya harus dipenuhi dari impor. Impor gandum dari China memang tidak terjadi sepanjang tahun, volume dan nilai impornya pun cenderung mengalami penurunan, karena banyak negara yang juga mengeksport gandum ke pasar dunia dan banyak di antaranya adalah negara-negara maju yang memberikan subsidi kepada petaninya dalam jumlah yang sangat besar, yang oleh Organisasi Pangan Dunia/OPD atau World Trade Organization/WTO disebut sebagai Bantuan Domestik/BD atau Domestic Support/DS. Hal ini juga menjadi permasalahan tersendiri, paling tidak mengingat dua hal, yaitu: Pertama, perjuangan NB untuk mendesak NM mengurangi subsidi; dimana karena NB menduga bahwa membanjirnya produk pangan murah ke negara-negara mereka adalah karena besarnya subsidi ini dan dalam beberapa hal karena "bantuan pangan" yang sebetulnya tidaklah cuma-cuma, sehingga pengembangan produk pangan lokal menjadi lambat; dan Kedua, potensi kerentanan ketahanan pangan nasional dengan semakin tingginya ketergantungan NB seperti Indonesia kepada pasokan pangan dari luar, sehingga dalam jangka panjang sangat rentan terhadap gejolak harga dan produksi gandum di dunia. Peranan bahan pangan impor yang semakin kokoh di dalam negeri memang perlu mendapatkan perhatian, karena dapat menghambat atau menggantikan peranan bahan pangan lokal yang lebih sesuai dengan agro-ekosistem lokal. Kalau gandum, misalnya mempunyai keunggulan sebagai bahan pangan yang dapat diolah menjadi produk-produk pangan, maka ada dua pendekatan yang perlu dilakukan, yaitu melakukan terobosan teknologi dengan menciptakan varietas yang lebih cocok di daerah tropis atau mencari (eksplorasi) tanaman lokal lain yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diberikan oleh gandum untuk produk pangan. Pendekatan pertama pernah dilakukan di sekitar dataran tinggi Jawa Tengah dan dalam areal yang terbatas percobaan ini dikabarkan berhasil, tetapi sampai kini belum diketahui lagi kemajuannya, sedangkan cara upaya ke dua belum banyak diketahui.

Selain gandum, Indonesia juga banyak mengimpor jagung (HS 1005) dan beras (HS 1006) dari China. Selama periode 1996–2003 Indonesia mengalami defisit perdagangan 100 persen dengan China. Volume dan nilai impor jagung dari China cenderung mengalami peningkatan. Sementara volume dan nilai impor beras dari China cenderung mengalami penurunan. Selain mengimpor produk primer

gandum, Indonesia juga mengimpor produk olahannya, yaitu tepung gandum dan meslin (HS 1101). Selama tahun 1996–2003 terjadi dua arah aliran produk pada tahun 2003 saja, dimana Indonesia mampu mengambil PV sebesar 0,06 persen dan PN sebesar 0,07 persen. Indonesia banyak mengimpor gandum dalam bentuk biji dan mengolahnya dalam industri hilir di pasar domestik. Namun, baik volume maupun nilai impor tepung gandum setelah tahun 2000 cenderung mengalami penurunan.

Selain beras, gandum, dan produk gandum, selama tahun 1996–2003 Indonesia juga mengalami defisit perdagangan dalam kelompok produk HS 1201, yaitu kacang kedelai serta HS 1202, yaitu kacang tanah. Impor kacang kedelai mengalami kenaikan drastis baik volume maupun nilainya pada tahun 1999. Namun sebelum dan setelah tahun 1999, volume dan nilainya rendah dan cenderung mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2001 dan 2003 Indonesia tidak mengimpor tetapi justru mengekspor, meskipun volume dan nilainya jauh lebih rendah dari pangsa impor kacang kedelai China di Indonesia. Sementara untuk kacang tanah, volume dan nilainya bergejolak dan keduanya cenderung menurun. Perdagangan kacang tanah hanya terjadi dua arah aliran produk pada tahun 2000 (PV sebesar 0,58 persen dan PN sebesar 1,78 persen) serta pada tahun 2003 (PV sebesar 0,42 persen dan PN sebesar 0,55 persen). Produk berbahan kacang umumnya menggunakan tambahan bahan pemanis untuk memperbaiki rasa dan penampilan. Beberapa waktu yang lalu terbetik di media massa bahwa industri kacang berpemanis gula banyak yang dilarikan ke China karena kenaikan tarif bea masuk gula tinggi, sementara bahan dengan tambahan gula justru lebih murah, sehingga investor memilih mengekspor produk olahan kacang dengan tambahan gula ke Indonesia daripada mengekspor bahan-bahan dasar secara terpisah. Diperkirakan, karena kejadian tersebut, terjadi penurunan volume dan nilai impor secara drastis setelah tahun 2002.

Perdagangan kelompok produk HS 1702, yaitu gula berbahan selain tebu menunjukkan kinerja yang hampir sama. Sepanjang 1996–1998 Indonesia mengalami defisit dagang 100 persen dari China, namun pada tahun 1999 menunjukkan tingkat ketergantungan impor yang lebih rendah. Hal itu ditunjukkan dengan mencapai PV sebesar 54,81 persen dan PN sebesar 61,94 persen. Saat itu, impor gula dari China mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun 1998 dan 1999. Impor gula dari China mencapai volume dan nilai terendah pada tahun 2000, dan mengalami kenaikan, meskipun lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya dengan kecenderungan naik. Seiring dengan dinamika impor gula dari China, setelah tahun 2000 Indonesia menunjukkan pangsa dagang yang bergejolak pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2001 (PV sebesar 74,09 persen dan PN sebesar 17,02 persen), pada tahun 2002 (PV sebesar 8,30 persen dan PN sebesar 7,91 persen). Akhirnya pada tahun 2003 kembali defisit perdagangan dari China 100 persen dan terjadi satu arah aliran barang dari China.

Kelompok produk HS 2401, yaitu tembakau mempunyai kinerja sangat buruk. Selama periode 1996–2003, Indonesia hanya mampu memperoleh pangsa dagang yang sangat kecil, yaitu pada tahun 2000 (PV sebesar 0,20 persen dan PN sebesar 0,35 persen), tahun 2001 (PV sebesar 0,15 persen dan PN sebesar 0,22 persen), dan tahun 2003 (PV sebesar 0,16 persen dan PN sebesar 0,32 persen). Kondisi ini mungkin akan lebih buruk, mengingat saat ini komoditas tembakau tidak di-prioritaskan, sehingga sulit untuk memperbaiki kinerja perdagangannya.

Kelompok produk HS 4011, yaitu ban bertekanan baru dari karet serta HS 4012, yaitu ban bertekanan bekas yang divulkanisir dengan bahan karet alam meskipun keduanya tidak menunjukkan surplus perdagangan, namun relatif lebih baik, khususnya HS 4011, karena sepanjang tahun menunjukkan pangsa perdagangan. Sementara untuk HS 4012 hanya tiga tahun saja menunjukkan pangsa dagang, yaitu pada tahun 2000–2002. Volume dan nilai impor kedua jenis ban dari China mengalami puncaknya pada tahun 2000. Namun, setelah tahun 2000 volume dan nilai impor ban baru dari karet cenderung menurun, dengan persentase penurunan volume yang lebih besar. Sementara ban bekas setelah mengalami penurunan, sejak tahun 2002 kembali mengalami peningkatan baik volume maupun nilai impornya.

Kelompok produk HS 4104, yaitu jangat atau kulit dari hewan jenis lembu merupakan produk ternak yang banyak didatangkan dari China ke Indonesia, meskipun defisit dagang Indonesia tidak mencapai 50 persen. Bahkan dalam kelompok produk surplus perdagangan, sebaliknya Indonesia mengalami surplus perdagangan dari China 100 persen hampir sepanjang 1996–2003 untuk HS 4106, yaitu jangat atau kulit hewan dari hewan selain lembu.

### ***Kelompok Produk Pertanian Surplus Perdagangan***

Dari sejumlah komoditas dengan mayoritas aliran barang dari Indonesia ke China, sayangnya kelompok produk HS 0803, yaitu pisang hanya menunjukkan surplus dagang selama lima tahun (1996–2000), padahal sebagai negara tropis Indonesia merupakan negara penghasil pisang yang besar. Selanjutnya pada tahun 2001–2003 justru Indonesia yang mengimpor 100 persen pisang dari China, meskipun volumenya jauh lebih kecil dari ekspor Indonesia (kurang dari satu persen). Sebelum tahun 1999, volume dan nilai ekspor pisang ke China cenderung meningkat, namun pada tahun 2000 mengalami penurunan dan relatif stabil sampai dengan tahun 2003 (Tabel 3).

Meskipun Indonesia menunjukkan defisit dagang kacang kedelai dari China, namun Indonesia menunjukkan surplus dagang untuk kelompok produk HS 1507, yaitu minyak kacang kedelai. Artinya, industri hilir yang berkembang di Indonesia mempunyai ketergantungan bahan baku dari produk asing, salah satunya dari China. Hal ini menunjukkan kerentanan kondisi usaha domestik, mengingat besarnya pengaruh

gejolak nilai tukar dan ketatnya persaingan dagang dalam dunia usaha. Sayangnya, agro-ekosistem di Indonesia tidak sesuai untuk budidaya kacang kedelai, sehingga permintaannya harus dipenuhi dari impor. Hal ini terbukti pada perkembangan volume dan nilai ekspor minyak kedelai Indonesia ke China yang tidak berkesinambungan. Volume dan nilai ekspor minyak kedelai tertinggi tercapai pada tahun 1997, setelah tahun 1997 tidak terdapat ekspor lagi sampai dengan tahun 2003 terdapat ekspor lagi dengan volume dan nilai yang sangat kecil.

Tabel 3. Rata-rata Pangsa Volume dan Nilai Ekspor per Tahun dan Persentase Pertumbuhan Volume dan Nilai Ekspor per Tahun untuk Produk Pertanian yang Mengalami Surplus Perdagangan Bilateral dengan China

Kode HS Produk	Periode	Volume Ekspor		Nilai Ekspor	
		Rata-rata Pangsa (%)	Pertumbuhan (%/tahun)	Rata-rata Pangsa (%)	Pertumbuhan (%/tahun)
0803	1996-2000	56,28	-38,75	63,73	-55,26
1507	1996-1997	64,81	118,19	61,42	144,08
1511	1996-2003	9,30	8,91	9,98	3,49
1513	1996-2003	5,39	35,83	5,24	32,77
1801	1996-2003	3,65	-13,94	3,59	-17,86
2905	1996-2003	16,51	16,27	17,30	16,30
4001	1996-2003	3,98	12,11	3,67	13,76
4106	1996-2003	24,39	-16,59	19,28	-13,40

Sumber: Analisa Data sekunder, (2005).

Selain industri minyak kacang kedelai, industri minyak nabati yang lain, yaitu minyak kelapa sawit (HS 1511) dan minyak kelapa (kopra), dan inti kelapa sawit (HS 1513<sup>1</sup>) beserta turunannya (produk sekunder industri hilir), yaitu gliserol (HS 1520), dan sorbitol (HS 2905) yang merupakan produk tersier industri hilir menunjukkan kinerja ekspor yang cukup mengembirakan. Hal ini dibuktikan dengan kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan kelapa yang menunjukkan surplus 100 persen sepanjang 1996–2003. Baik volume maupun nilai ekspor minyak kelapa sawit mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Bahkan volume dan nilai kedua produk tersebut mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2003. Keadaan tersebut di atas cukup mengembirakan dan harus dipertahankan, mengingat Indonesia merupakan pengeksport terbesar kedua dunia (Sawit dan Rusastra, 2005) untuk CPO dan terbesar pertama

<sup>1</sup> Termasuk di dalam daftar produk spesifik EHP Indonesia – China.

dunia (Alamsyah, 2005) untuk buah kelapa. Dengan dimasukkannya komoditas ini dalam agenda EHP Indonesia–China, maka produk berbasis kelapa dan kelapa sawit dari Indonesia ke China akan lebih mudah masuk pasar China. Oleh karena itu, industri hilir berbasis kelapa dan kelapa sawit di dalam negeri harus mempertahankan keunggulannya, agar mampu meraih pasar yang lebih besar. Selain itu, kebijakan mengutamakan ekspor dalam bentuk CPO dan buah kelapa tidak menguntungkan dalam jangka panjang, karena tidak memberi insentif nilai tambah di dalam negeri.

Selain mempunyai kinerja ekspor produk primer berupa minyak kelapa sawit dan minyak kelapa, Indonesia juga menunjukkan kinerja ekspor yang baik ke China yang berasal dari industri hilir kedua komoditas tersebut. Komoditas tersebut termasuk dalam kelompok produk HS 1520, yaitu gliserol dan HS 2905, yaitu alkohol asiklik. Salah satu jenis alkohol asiklik tersebut berupa sorbitol yang merupakan produk turunan (produk tersier) dari industri pengolahan minyak nabati. Selama tahun 1996–2003 kinerja ekspor ke China produk industri turunan dari produk pertanian tersebut mengalami kecenderungan kenaikan volume dan nilai ekspor. Namun volume ekspor mempunyai persentase kenaikan yang lebih besar dibandingkan nilai ekspornya.

Selain minyak nabati, Indonesia juga banyak mengekspor kelompok produk HS 1801, yaitu biji kakao ke China. Kinerja perdagangan komoditas tersebut cukup baik dan hampir selama 1996–2003 Indonesia menunjukkan surplus 100 persen. China hanya tiga kali memperoleh pangsa dagang, yaitu pada tahun 1998, 2001, dan 2003. Namun, pangsa dagang China kurang dari satu persen. Komoditas biji kakao merupakan salah satu komoditas promosi ekspor. Kakao sebagian besar diekspor dalam bentuk biji asalan (Hadi *et al.*, 2004), dengan pangsa ekspor biji kakao terbesar adalah Amerika Serikat, selama 1996–2002 pangsa ekspor biji kakao ke AS berfluktuasi sebesar 37 persen, 48 persen, 36 persen, 41 persen, dan 31 persen. Penurunan pangsa ekspor biji kakao ke AS tersebut berhubungan dengan tercapainya kesepakatan EHP ASEAN dan AFTA+3. Selain memperoleh keringanan bea masuk antar negara ASEAN dan tiga negara Asia Timur, biaya transportasi ke negara tujuan ekspor di kawasan Asia tentunya lebih murah dibandingkan ke AS. Selama ini, kakao yang berasal dari Indonesia mengalami diskriminasi tarif bea masuk di China dibandingkan kakao dari Malaysia, terutama produk kakao bubuk, kakao mentega, dan kakao pasta. Produk yang sama dari Malaysia hanya dikenakan tarif bea masuk 5 persen, sementara dari Indonesia sampai dengan 20 persen. Oleh karena itu, diperlukan negosiasi tarif bea masuk biji kakao dan produk kakao Indonesia ke China, dengan menyertakan komoditas-komoditas tersebut dalam EHP Indonesia–China, agar pangsa dagang ke China lebih besar, mengingat kinerja ekspornya cukup baik.

Kinerja kelompok produk HS 4001, yaitu karet alam terlihat cukup baik. Meskipun mengalami gejala volume dan nilai ekspor, selama

periode 1996–2003 terlihat kecenderungan kenaikan volume dan nilai ekspor. Bahkan Indonesia meraih pangsa dagang dengan surplus 100 persen pada tahun 1996 dan 1997. Selanjutnya, Indonesia selalu surplus dari China dan hampir mencapai 100 persen sampai tahun 2003. Sehubungan dengan keberadaan China sebagai salah satu produsen otomotif di Asia, selain mengimpor karet alam dari Indonesia, China juga banyak mengimpor karet sintetik yang berasal dari minyak bumi (HS 4002) dari Indonesia. Kinerja perdagangan karet sintetik turut dibahas karena terkait erat sebagai substitusi produk alaminya, yaitu karet alam.

Sepanjang tahun 1996–2003 secara umum Indonesia memperoleh pangsa dagang yang menggembirakan. Besarnya PV dan PN masing-masing tahun adalah: 4,35 persen dan 3,57 persen (1996), 83,23 persen dan 99,06 persen (1997), 47,59 persen dan 62,00 persen (1998), 63,49 persen dan 74,72 persen (1999), 57,59 persen dan 75,71 persen (2000), 85,12 persen dan 66,14 persen (2001), 95,31 persen dan 79,56 persen (2002), serta 66,31 persen dan 85,09 persen (2003). Meskipun tidak surplus 100 persen, tetapi setidaknya Indonesia menguasai volume dan nilai perdagangan karet sintetik sampai 50 persen dari China. Kondisi ini menunjukkan bahwa China merupakan pasar potensial karet alam dan sintetik dari Indonesia. Hal ini tercermin dari kinerja perdagangan kedua kelompok produk di negara tersebut. Posisi China sebagai produsen otomotif merupakan salah satu indikator sebagai pengimpor karet alam dan sintetik utama, bahkan untuk karet sintetik tercapai volume dan nilai ekspor maksimal pada tahun 2003. Sementara untuk karet alam volume dan nilai ekspor maksimal tercapai pada tahun 2001. Baik karet alam maupun sintetik menunjukkan kecenderungan peningkatan volume dan nilai ekspor ke China. Selain karet alam dan sintetik, China juga banyak mengimpor ban bertekanan baru dengan bahan karet alam dan ban bertekanan bekas yang divulkanisir dengan karet alam dari Indonesia, meskipun keduanya tidak menunjukkan surplus dagang dengan China.

Selain produk berbahan nabati, produk berbahan dasar hewani dalam kelompok produk HS 4106, yaitu jangat atau kulit dari hewan selain lembu juga mempunyai pangsa pasar yang baik di China. Kinerja perdagangan hampir sepanjang 1996–2003 mengalami surplus 100 persen. Apabila Indonesia banyak mendatangkan jangat dan kulit dari jenis lembu dari China, maka sebaliknya Indonesia mengeksport jangat dan kulit dari hewan selain lembu ke China. Namun, setelah mencapai volume dan nilai ekspor tertinggi pada tahun 1996, terjadi penurunan drastis baik volume maupun nilai ekspor, bahkan pada tahun 2003 telah terjadi impor produk yang sama. Namun, gejala perkembangan volume dan nilai ekspor jangat ke China menunjukkan kecenderungan akan meningkat.

Selain produk-produk pertanian yang dibahas kinerja dan intensitas perdagangannya seperti di atas, terdapat beberapa kelompok produk bukan-pertanian yang mempunyai pangsa pasar yang baik di China. Produk tersebut meliputi HS 0306 (krustasea sebagai produk

perikanan), HS 2915 (asam organik tunggal), HS 2917 (asam organik majemuk), HS 3204 (pewarna organik sintetik), dan HS 4407 (balok kayu sebagai produk kehutanan). Meskipun tidak termasuk kelompok produk pertanian, produk HS 2905, yaitu alkohol asiklik khususnya sorbitol telah dibahas kinerja dan intensitas perdagangannya. Karena merupakan produk industri yang berbahan baku produk pertanian, sehingga merupakan industri hilir/tersier dari produk pertanian. Komoditas Indonesia yang mempunyai pangsa cukup dominan di China meliputi produk-produk perikanan, kehutanan, industri galian alami, dan industri bahan kimia (lihat Lampiran Tabel 5). Meskipun tidak mendominasi, terdapat beberapa produk pertanian yang mempunyai pangsa pasar yang cukup baik di China, yaitu minyak dan lemak nabati sebesar 16,67 persen, dan produk kopi, teh, coklat, dan rempah-rempah pangsa mencapai 14,41 persen. Terkait dengan proyek raksasanya, pada tahun 2004 impor bubuk kertas China dari Indonesia menempati 13,55 persen pangsa pasarnya di China. Sementara untuk kertas dan kertas karton serta olahannya pangsa di China mencapai 7,28 persen.

Berdasarkan pengamatan di atas, dapat disimpulkan bahwa posisi perdagangan bilateral Indonesia-China yang dilatarbelakangi ciri makroekonomi yang berbeda telah menunjukkan masih adanya kesenjangan teknologi dan daur produk. Kesenjangan teknologi tercermin dari adanya produk impor Indonesia dari China berupa produk mentah/primer, dan diekspor kembali ke China dalam bentuk semi-olahan dan olahan dan daur produk terjadi di dua negara mitra. Pola perdagangan Indonesia baik impor maupun ekspor (Lampiran Grafik 1) sebagian besar menunjukkan kecenderungan umum, yaitu membentuk pola huruf V terbalik atau angsa terbang.

### **2.2.3. Simulasi Dampak Liberalisasi Perdagangan Bilateral**

Kawasan Perdagangan Bebas/KPB atau *Free Trade Area/FTA* dalam suatu kawasan atau suatu kawasan dengan satu negara tertentu berkembang pesat saat ini. Banyak negara yang telah melakukan kerjasama perdagangan secara bilateral mendapatkan keuntungan yang nyata. Demikian juga harapan yang digantungkan Indonesia dalam memulai KPB dengan tiga negara besar di Asia Timur, yaitu China, Jepang dan Korea Selatan. Kebijakan ini tidak secara tiba-tiba muncul, namun dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kerjasama bilateral antar kedua negara yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Seperti diuraikan dalam subbagian terdahulu, skema penurunan tarif bea masuk antara Indonesia dan China dirangkum dalam suatu program *Early Harvest Package/EHP* yang mengatur tarif untuk produk-produk tertentu dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2004 dan dalam tiga tahun diturunkan secara bertahap, sehingga pada tahun 2006 menjadi nol persen.

Dalam penelitian ini, dampak KPB bilateral Indonesia dengan China ditujukan kepada komoditas utama yang diekspor Indonesia, yaitu minyak kelapa, minyak kedelai, biji kakao, dan pisang segar. Namun sangat disayangkan komoditas biji kakao dan pisang segar belum diatur dalam EHP tersebut, sedangkan tarif bea masuk komoditas minyak kelapa dan minyak kedelai ke China di dalam EHP memang telah nol persen. Apabila kebijakan ini diterapkan kepada komoditas minyak kelapa, maka akan berdampak langsung kepada turunnya volume ekspor Indonesia akibat turunnya harga di tingkat produsen, sehingga produksi juga turun sedikit sebesar 0,39 persen (Tabel 4). Turunnya volume ekspor ini lebih disebabkan oleh turunnya harga di tingkat produsen, produksi yang ada lebih banyak dipasarkan di dalam negeri. Di dalam negeri, konsumen diuntungkan dengan turunnya harga sebesar 2,3 persen. Hal sebaliknya berlaku bagi komoditas minyak kedelai, penghapusan tarif bea masuk justru menyebabkan kenaikan harga baik di tingkat konsumen maupun produsen sehingga produksi di dalam negeri juga meningkat. Namun, kenaikan produksi ini malah menyebabkan menurunnya volume ekspor minyak kedelai Indonesia ke China sebesar 1,02 persen. Secara keseluruhan KPB ini tidak banyak mempengaruhi kinerja produksi minyak kedelai di dalam negeri.

Tabel 4. Dampak KPB Indonesia –China terhadap Kinerja Pertanian Indonesia

Komoditas	Perubahan	Perubahan	Perubahan	Perubahan
	Harga Konsumen (%)	Harga Produsen (%)	Produksi (%)	Ekspor (%)
Minyak kelapa	- 2,3	- 2,18	-0,39	-89,00
Minyak kedelai	0,80	0,85	0,15	- 1,02
Biji Kakao	- 1,37	- 0,06	- 0,03	0,46
Pisang segar	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Penurunan harga konsumen di dalam negeri mendatangkan keuntungan bagi konsumen Indonesia dengan meningkatnya surplus sebesar 28,56 juta dolar AS, dan berdampak buruk bagi produsen minyak kelapa di dalam negeri karena berkurangnya surplus sebesar 26,60 persen. Kenaikan surplus konsumen masih lebih besar dibanding turunnya surplus produsen, sehingga secara total masih berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia yang ditunjukkan oleh bertambahnya penerimaan pemerintah sebesar 1,64 juta dolar AS (Tabel 5). Kondisi yang berbeda terjadi pada komoditas minyak kedelai, surplus konsumen dan penerimaan pemerintah menurun, namun surplus produsen dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Tampaknya kebijakan ini lebih berpihak kepada produsen dan efektif bila dilaksanakan karena manfaat yang diterima oleh produsen jauh lebih besar (18,71 persen) dibanding kerugian yang diderita oleh konsumen domestik (8,69 persen).

Tabel 5. Dampak KPB Indonesia-China terhadap Distribusi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia (dalam juta AS\$)

Komoditas	Surplus Konsumen	Surplus Produsen	Kesejahteraan total	Penerimaan Pemerintah
Minyak kelapa	28,56	- 26,60	0,31	1,64
Minyak kedelai	- 8,69	18,71	9,70	- 0,32
Biji Kakao	1,65	0,27	0,01	- 1,33
Pisang segar	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

### 2.3. Perdagangan Indonesia – Jepang

Kerjasama perdagangan diberbagai kawasan telah sangat luas dan berkembang. Indonesia termasuk salah satu negara yang membuka pasarnya melalui kerjasama regional dan internasional. Kerjasama internasional diikuti oleh Indonesia melalui forum OPD yang telah banyak menghasilkan kerangka dan kebijakan-kebijakan perdagangan. Untuk kerjasama regional Indonesia, sebagai anggota dalam ASEAN yang telah berdiri selama 37 tahun telah menjalin juga kerjasama lain dengan negara-negara di luar anggota ASEAN.

Hubungan kerjasama ASEAN dengan negara-negara kawasan khususnya Asia Timur semakin meningkat, yang tercermin dalam proses kerjasama ASEAN+3. Sebagaimana diketahui perekonomian ASEAN sangat tergantung pada perdagangan dan investasi yang berasal dari luar kawasan ASEAN, seperti AS dan UE, serta Asia Timur, terutama China, Jepang, dan Korea Selatan yang merupakan tiga negara ekonomi kuat di wilayah ini dan yang tergabung dalam ASEAN+3. Kesepakatan *free trade area* (kawasan perdagangan bebas) merangsang terbentuknya kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Jepang, seperti tertuang dalam *Economic Partnership Agreement/EPA* atau Perjanjian Kerjasama Ekonomi/PKE. PKE ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2007 dalam bidang yang disepakati, yaitu industri manufaktur, elektronika, otomotif, pendidikan, dan pertanian. Untuk pertanian Indonesia perlu mengantisipasi pengembangan produk-produk potensial yang dapat diperdagangkan dengan Jepang, mengingat besarnya sumbangan sektor pertanian terhadap perolehan devisa. Dalam PKE ini tentu yang menjadi perhatian antara lain adalah kemungkinan pengusulan penurunan tarif pada produk pertanian dari kedua belah pihak.

#### 2.3.1. Perbandingan Ciri-ciri Ekonomi Makro dan Produk Dagang

Kondisi makroekonomi Indonesia dan Jepang sangat jauh berbeda, seperti antara lain ditunjukkan oleh tingkat pendapatan nasional, dimana tingkat pendapatan nasional Indonesia jauh lebih rendah dibanding Jepang (Tabel 6). Indonesia adalah negara berkembang sementara Jepang termasuk negara maju. Struktur perekonomian yang memberi sumbangan terbesar terhadap pendapatan nasional Jepang adalah dari sektor industri

dan jasa, sedangkan pertanian hanya memberikan kontribusi yang sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa Jepang adalah salah satu negara industri termaju di Asia, sementara penyumbang terbesar tingkat pendapatan nasional Indonesia adalah sektor pertanian dan jasa, sehingga Indonesia masih tergolong negara berkembang agraris. Hal ini dapat mendatangkan tantangan dan memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perolehan devisa melalui peningkatan ekspor pertanian, karena Jepang adalah salah satu pasar yang potensial dalam produk-produk pertanian, industri, dan perikanan. PKE sendiri direncanakan untuk meliputi berbagai hal, termasuk perdagangan barang (langkah-langkah tarif dan bukan-tarif, peraturan asal produk, dan perbaikan perdagangan), prosedur pabean, perdagangan sektor jasa, penanaman modal, pergerakan individu, penyediaan barang pemerintah, hak-hak kepemilikan intelektual dan kebijakan daya saing.

Tabel 6. Perbandingan Ciri Makroekonomi Indonesia dan Jepang, 2003

Kriteria	Indonesia	Jepang
Pendapatan Nasional Bruto (US\$)	179,9	4.794,2
Pertumbuhan/Tahun		
- Produk Domestik Bruto	2,0	1,2
- Produk Domestik Bruto/Kapita	0,7	0,9
- Ekspor Barang dan Jasa	2,1	4,3
Struktur Ekonomi		
% dari Produk Domestik Bruto	17,3	2,1
- Pertanian	40,6	34,9
- Industri	23,3	23,1
- Jasa	42,1	63,0

Sumber: [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org), PDB berdasarkan harga konstan 1994.

### Kelompok Produk yang Mendominasi Perdagangan Bilateral

Dari data yang dipublikasikan BPS secara teratur, diketahui bahwa terdapat berbagai ragam kelompok produk dominan baik yang diimpor dari Jepang maupun diekspor ke Jepang dari Indonesia selama periode tahun tersebut (Lampiran Tabel 7 dan Lampiran Tabel 8). Kelompok produk yang mempunyai pangsa sepuluh besar pertama berubah-ubah dari tahun ke tahun baik untuk impor maupun ekspor. Artinya, volume dan nilai ekspor dan impor total setiap kelompok produk bergejolak mengikuti pola kecenderungan tertentu. Sebanyak 60 kelompok produk baik yang diekspor dari Indonesia ke Jepang maupun sebaliknya tidak semua merupakan produk pertanian primer atau olahan. Kelompok produk tersebut terbagi dalam 18 kelompok produk pertanian, 6 produk perikanan dan kelautan, 11 produk kimia dan 16 produk industri (Lampiran Tabel 9).

Sebanyak 29 kelompok produk yang mendominasi perdagangan antara Indonesia dengan Jepang mengalami gejolak volume dan nilai ekspor serta impor dari tahun ke tahun selama periode 1996–2003

mengikuti pola kecenderungan tertentu (Lampiran Grafik 2). Gejolak volume dan nilai ekspor maupun impor produk secara individu pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh gejolak volume dan nilai ekspor atau impor totalnya (Tabel 7).

Tabel 7. Perkembangan Nilai Impor dan Ekspor Total Indonesia, Nilai Impor dari Ekspor Total ke Jepang, serta Pangsa Impor dari dan Ekspor ke Jepang, 1996–2003

Tahun	Total Nilai Impor Indonesia (Juta USD)	Nilai Impor Indonesia dari Jepang (Juta USD)	Pangsa Impor dari Jepang (%)	Total Nilai Ekspor Indonesia (Juta USD)	Nilai Ekspor Indonesia ke Jepang (Juta USD)	Pangsa Ekspor ke Jepang (%)
1996	9.589.035.189	953.154.974	9,94	14.379.611.387	10.692.033.888	74,36
1997	8.548.987.131	881.155.408	10,31	14.260.736.551	3.050.082.591	21,39
1998	6.204.907.121	549.455.011	8,86	11.165.833.276	1.913.228.275	17,13
1999	7.307.002.355	762.530.911	10,44	12.455.026.450	2.281.730.636	18,32
2000	8.123.905.455	682.009.291	8,40	12.891.332.873	2.426.643.915	18,82
2001	7.425.741.069	550.520.029	7,41	11.913.624.737	2.246.745.399	18,86
2002	7.649.261.257	485.151.543	6,34	13.614.731.241	2.246.726.838	16,50
2003	7.910.916.752	465.420.885	5,88	14.624.092.099	2.175.270.742	14,87
<i>Growth (%/thn)</i>	-1,50	-9,65	-8,15	0,14	-14,44	-14,58

Sumber: Analisa Data Sekunder, 2005.

Nilai impor Indonesia cenderung mengalami penurunan sebesar 1,50 persen per tahun. Hal ini mungkin disebabkan dua hal: kebutuhan domestik dapat dipenuhi dari produksi domestik atau daya beli nasional menurun. Penyebab pertama memberikan gambaran positif bahwa Indonesia secara relatif telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi penyebab kedua tentu perlu mendapat perhatian. Total nilai impor dan pangsa impor Indonesia dari Jepang mengalami penurunan masing-masing sebesar 9,65 dan 8,15 persen per tahun. Artinya, ketergantungan Indonesia terhadap Jepang cenderung mengalami penurunan. Secara agregat ekspor Indonesia selama periode 1996–2003 mengalami pertumbuhan sebesar 0,14 persen per tahun. Namun dalam perdagangan bilateral dengan Jepang, ekspor Indonesia pada periode tersebut mengalami penurunan sebesar 14,44 persen per tahun dengan diikuti penurunan pangsa ekspor sebesar 14,58 persen per tahun. Hal ini merupakan tantangan besar bagi produk domestik untuk bersaing dengan produk sejenis dari pengekspor dunia.

### 2.3.2. Kinerja dan Intensitas Perdagangan Produk Pertanian

Berdasarkan hasil analisa perkembangan volume dan nilai ekspor dan impor produk yang diperdagangkan antara Indonesia dengan Jepang

yang menggunakan indeks Gruebel-Lloyd (IGL) menurut kode HS empat digit (lihat Lampiran Tabel 10) diketahui 13 kelompok produk pertanian yang mendominasi sepuluh besar ekspor-impor. Ketiga belas kelompok produk tersebut adalah produk kode HS 0901, 1006, 2901, 2902, 2905, 2907, 2915, 2916, 2917, 2922, 2929, 2933, dan 4001.

Dengan mengelompokkannya ke dalam kelompok defisit dan surplus perdagangan diperoleh produk pertanian (HS 1006), produk olahan pertanian (HS 1702), produk olahan perkebunan (HS 4002, 4009, dan 4016). Sementara kelompok surplus perdagangan meliputi produk pertanian (HS 0704, 0709, 0714, 0901, 0902, 0904, 0910, 1005, 1511, 1703, dan 4001), disamping olahan tanaman pangan (HS 1806), produk olahan makanan (HS 1902), produk perikanan (HS 0303, 0305 dan 0306) dan produk olahan perikanan (HS 1604). Kinerja dan intensitas masing-masing kelompok produk akan dibahas menurut jenis kinerja perdagangannya sebagai berikut.

### ***Kelompok Produk Pertanian Defisit Perdagangan***

Kelompok produk pertanian HS 1006 (beras) mengalami defisit ekspor dan perdagangan eksportnya hanya terjadi pada tahun 1997, 1999, dan 2002, selebihnya tidak terjadi perdagangan sama sekali. Jumlah volume impor yang diperdagangkan cukup tinggi, tetapi terjadi penurunan pertumbuhan volume dan nilai impor masing-masing sebesar 37,75 dan 25,45 persen per tahun. Impor terbesar dilakukan pada tahun 1999 sebesar 400 persen dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih negara pengimpor beras.

Produk olahan pertanian HS 1702 (gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa, dan fruktosa murni kimiawi), dalam bentuk padat mengalami defisit perdagangan. Ekspor hanya dilakukan pada tahun 1996, 1999-2002, tidak terjadi setiap tahun dan cenderung menurun, sedangkan impor tetap ada setiap tahun. Pertumbuhan impor pada volume dan nilai naik masing-masing sebesar 11,15 dan 8,48 persen per tahun. Hal ini menunjukkan masih tergantungnya produksi Indonesia terhadap impor. Untuk itu Indonesia perlu melakukan pengembangan produksi dan peningkatan produktivitas tebu bagi daerah-daerah yang memiliki agro-ekosistem yang sesuai.

Tahun 1998, pada kelompok produk olahan perkebunan HS 4002 (karet sintetis yang diperoleh dari minyak) tidak terjadi ekspor. Perdagangan ekspor dimulai pada tahun 2000-2003 dan meningkat secara perlahan setiap tahunnya. Meskipun terjadi peningkatan volume ekspor tetapi pengaruhnya tidak nyata terhadap besaran volume impor. Indonesia tetap mengalami defisit perdagangan selama periode 1996-2003. Volume impor Indonesia terhadap Jepang cukup besar, akan tetapi terjadi penurunan pertumbuhan volume dan nilai impor masing-masing sebesar 15,80 persen dan 15,61 persen per tahun. Kondisi ini dapat

diartikan bahwa ketergantungan impor Indonesia akan karet sintetik dari Jepang mengalami penurunan.

Selain HS 4002, produk olahan lainnya yang mengalami defisit perdagangan adalah HS 4009 (tabung, pipa, dan selang dari karet divulkanisasi, selain karet keras dengan atau tanpa alat kelengkapannya misalnya, penghubung, siku, flensa) dan HS 4016 (barang lain dari karet, divulkanisasi selain karet keras). Perdagangan HS 4009 meningkat secara positif setiap tahunnya. Pertumbuhan volume dan nilai impornya masing-masing sebesar 11,04 dan 11,47 persen per tahun. Dibandingkan dengan kegiatan perdagangan ekspornya, defisit Indonesia akan produk olahan HS 4009 adalah 100 persen. HS 4016 pada perdagangan Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar 75 persen. Perdagangan dilakukan dalam dua arah. Pertumbuhan impor pada volume dan nilai cenderung positif, masing-masing sebesar 16,24 dan 19,50 persen per tahun. Pertumbuhan volume dan nilai ekspor juga positif masing-masing sebesar 30,00 dan 26,23 persen per tahun. Namun demikian besaran volume dan nilai impor lebih tinggi dari ekspor. Perdagangan yang defisit akan produk ini menggambarkan bahwa Indonesia masih sangat tergantung industri olahan perkebunan dari pasar Jepang.

### **Kelompok Produk Pertanian Surplus Perdagangan**

Kelompok produk HS 0704, yaitu kubis, bunga kol, kohlrabi, kale, dan brassica sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin mengalami peningkatan volume ekspor sebesar 37,75 persen per tahun. Peningkatan ini menaikkan nilai ekspor sebesar 39,46 persen per tahun. Perdagangan HS 0704 hanya terjadi satu arah. Untuk itu pangsa pasar produk ini tetap perlu dikembangkan mengingat pangsa pasar Jepang sangat potensial untuk produk pertanian dan agro-ekosistem Indonesia juga sangat mendukung perkembangan produk hortikultura.

Produk hortikultura lainnya yang mengalami peningkatan nyata terdapat pada kelompok produk HS 0709 (sayuran lainnya, segar, atau dingin). Volume dan nilai ekspornya meningkat masing-masing sebesar 45,33 dan 41,93 persen per tahun. Perdagangan produk ini hanya terjadi satu arah, yaitu ekspor. Peningkatan volume ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2003, naik sebesar 0,54 persen dari tahun sebelumnya. Untuk itu Indonesia perlu untuk tetap meningkatkan ekspor produk ini terlebih dalam hal mutu agar tidak kalah bersaing dengan produk negara lain seperti Thailand.

HS 0714 (ubi kayu) mengalami peningkatan volume dan nilai ekspor masing-masing sebesar 11,22 dan 18,77 persen per tahun. Ekspor terbesar terjadi pada tahun 2002 dengan kenaikannya yang lebih dari 100 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk impornya dilakukan dari tahun 1998-2003 dan besarnya tidak terlalu besar. Untuk masa-masa mendatang Indonesia perlu mengembangkan dan

meningkatkan ekspor ubi kayu ini mengingat tanaman ini adalah tanaman yang sangat ekonomis dan masih memiliki lahan yang potensial.

Kelompok produk HS 0901 (kopi, digonseng atau dihilangkan kafeinnya), Indonesia mengalami surplus ekspor. Perdagangan ini terjadi dalam dua arah. Untuk jumlah volume ekspor yang diperdagangkan sangat besar, akan tetapi pertumbuhan volume dan nilai ekspornya mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,98 dan 14,17 persen per tahun. Jumlah impor yang diperdagangkan pada komoditas ini sangat kecil dibandingkan volume impor. Akan tetapi terjadi pertumbuhan pada volume dan nilai impornya masing-masing sebesar 97,60 dan 59,29 persen per tahun. Pangsa pasar Jepang terhadap komoditas ini masih potensial. Untuk itu Indonesia tetap perlu meningkatkan produksinya, agar konsistensi surplus ekspor berkesinambungan.

Kelompok produk HS 0902 (teh, diberi rasa maupun tidak) mengalami peningkatan volume dan nilai ekspor masing-masing sebesar 6,28 dan 1,79 persen per tahun. Perdagangan mencapai 100 persen selama tahun 1996-2003 dan dilakukan dua arah. Untuk impor pertumbuhannya meningkat sebesar 18,01 persen per tahun, dan nilainya sebesar 20,94 persen. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan meningkatkan mutu teh ekspor dari dalam negeri.

HS 0904 (lada dari genus pepper; kering atau dihancurkan atau buah yang digiling dari genus capsicum atau dari genus pimenta) mengalami surplus perdagangan dan hanya dilakukan satu arah. Akan tetapi pertumbuhan ekspornya cenderung menurun. Penurunan volume dan nilai ekspor masing-masing sebesar 0,12 dan 13,54 persen per tahun. Penurunan terjadi pada tahun 1998-1999 dan 2001, tetapi kembali lagi meningkat pada tahun berikutnya. Penurunan terjadi disebabkan kurang banyaknya minat petani dalam menanam komoditas ini, akibat perawatan tanamannya yang sulit dan modal tanamnya yang tinggi.

Kelompok produk HS 0910 [jahe, saffron, turmeric (curcuma), thyme, daun salam, kari dan rempah-rempah lainnya surplus ekspor]. Perdagangan HS 0910 ini terjadi dua arah. Untuk ekspor terjadi penurunan pertumbuhan pada volume dan nilai ekspor yang diperdagangkan masing-masing sebesar 21,87 dan 10,72 persen per tahun. Sementara impor Indonesia akan produk ini mengalami peningkatan volume dan nilai sebesar 15,61 dan 27,82 persen per tahun, meskipun dari segi volume impornya masih tergolong kecil dibandingkan ekspor. Penurunan ekspor terjadi pada tahun 1998-2003, hal ini disebabkan terjadinya krisis yang melanda perekonomian Indonesia.

Jumlah volume ekspor kelompok produk HS 1005 (jagung) cukup tinggi dibandingkan impor hingga mengalami surplus, dan perdagangan dilakukan hanya satu arah. Akan tetapi terjadi penurunan pertumbuhan pada volume dan nilai ekspornya masing-masing sebesar 2,89 dan 5,85 persen per tahun. Penurunan terendah terjadi pada tahun 1998, yaitu sebesar 100 persen dari tahun sebelumnya, akan tetapi kembali

mengalami peningkatan lebih dari 100 persen pada tahun 1999. Kegiatan perdagangan pada impor hanya sebesar 5 persen dari ekspor dan volume yang diperdagangkan tidak mencolok.

Kelompok produk HS 1511, yaitu minyak kelapa sawit dan fraksinya mengalami surplus ekspor selama periode 1996–2003 dan perdagangannya hanya satu arah. Namun pertumbuhan volume dan nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 4,71 dan 11,70 persen per tahun. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2003 mencapai lebih dari 100 persen dari tahun sebelumnya.

Kinerja perdagangan kelompok produk HS 1703, yaitu tetes hasil dari ekstraksi atau permurnian gula mengalami surplus ekspor. Akan tetapi pada tahun 2003 terjadi penurunan yang mencolok dari tahun sebelumnya. Penurunan pertumbuhan yang cenderung negatif terhadap volume dan nilai terjadi masing-masing sebesar 90,04 dan 64,20 persen per tahun. Ini menunjukkan semakin menurunnya kinerja produksi tanaman tebu di Indonesia.

Produk perkebunan yang mengalami surplus perdagangan adalah HS 4001 (karet alam, balata, getah perca, gayule, chicle, dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip). Volume dan nilai ekspor meningkat masing-masing sebesar 12,07 dan 7,11 persen per tahun. Perdagangan terjadi dua arah, tetapi volume dan nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan impor. Impor juga mengalami pertumbuhan pada volume dan nilainya masing-masing sebesar 22,59 dan 3,53 persen per tahun. Pangsa pasar ekspor menunjukkan perkembangan yang positif, mengingat Jepang adalah negara industri yang sangat membutuhkan produk karet ini sebagai salah satu bahan dasar pembuatan otomotif.

Kelompok produk olahan tanaman pangan yang mengalami surplus perdagangan adalah HS 1806 (coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao). Volume dan nilai ekspor meningkat masing-masing sebesar 60,46 dan 26,73 persen per tahun. Pertumbuhan ekspor terbesar terjadi pada tahun 2003, yaitu naik sebesar 50 persen dari tahun sebelumnya. Pada komoditas ini perdagangan terjadi dua arah, akan tetapi pada impor cenderung terjadi penurunan pertumbuhan pada volume dan nilai impor masing-masing sebesar 42,14 dan 43,79 persen per tahun. Dari hasil di atas dapat digambarkan bahwa coklat adalah salah satu produksi perkebunan Indonesia yang memiliki potensi pasar di Jepang. Untuk tetap melakukan perdagangan berkesinambungan perlu dilakukan pola tanam yang baik untuk meningkatkan produktivitas coklat.

Kelompok produk HS 1902 (pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spageti, makaroni, mie, *lasagna*, *gnocchi*, *ravioli*, *cannelloni*, *couscous*) adalah produk olahan yang mengalami surplus perdagangan. Perdagangan dilakukan dalam dua arah. Volume ekspor dan nilai cenderung mengalami penurunan, yaitu masing-masing sebesar 14,41 dan 7,58

persen per tahun. Sedangkan untuk volume dan nilai impor naik masing-masing sebesar 27,34 dan 27,54 persen per tahun. Ini menunjukkan bahwa terjadi ketergantungan pangsa impor Indonesia terhadap produk Jepang.

Produk perikanan yang surplus perdagangan adalah kelompok HS 0303 (ikan beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang). Surplus perdagangan mencapai 100 persen. Namun dari segi pertumbuhan volume dan nilainya terjadi penurunan masing-masing sebesar 14,12 dan 12 persen per tahun. Perdagangan produk ini terjadi dua arah. Besaran volume dan nilai impor tidak mencolok dibandingkan ekspor dan pertumbuhannya cenderung negatif.

HS 0305 (ikan, kering, asin atau dalam air garam, ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar, dan pellet dari ikan yang layak untuk dikonsumsi manusia) mengalami surplus perdagangan dan dilakukan dalam dua arah. Akan tetapi pertumbuhan ekspor mengalami pertumbuhan yang cenderung negatif. Pertumbuhan volume dan nilai ekspor masing-masing sebesar 4,44 dan 6 persen per tahun. Sedangkan impor mengalami pertumbuhan volume dan nilai masing-masing sebesar 40,09 dan 9,64 persen per tahun.

Kelompok produk HS 0306 (krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, kering, asin atau dalam air garam) juga mengalami surplus perdagangan sebesar 100 persen dan perdagangan dilakukan dalam dua arah. Akan tetapi, pertumbuhannya juga cenderung negatif. Penurunan pertumbuhan volume dan nilai ekspor masing-masing sebesar 1,51 dan 6 persen per tahun.

Produk perikanan yang mengalami surplus perdagangan adalah HS 1604 (ikan diolah atau diawetkan, kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan). Pertumbuhan volume dan nilai ekspornya meningkat masing-masing sebesar 4,06 dan 2,04 persen per tahun. Perdagangan produk ini terjadi dua arah, dimana volume dan nilai impor juga meningkat masing-masing sebesar 28,04 dan 27,04 persen per tahun. Ini menunjukkan bahwa Jepang merupakan pangsa produk perikanan yang potensial. Untuk itu Indonesia selayaknya meningkatkan perdagangan dalam produk ini mengingat lahan dan sumber daya perikanan dan kelautan yang tersedia untuk produk ini sangat luas.

Dari pembahasan di muka, diketahui posisi perdagangan bilateral Indonesia–Jepang yang dilatarbelakangi karakteristik makro ekonomi yang berbeda, Jepang merupakan negara industri pengolah produk pertanian maupun bukan-pertanian, sedangkan Indonesia adalah negara agraris yang menghasilkan produk bahan mentah yang diekspor ke Jepang, sehingga kesenjangan teknologi jelas ada seperti dicerminkan oleh banyaknya produk ekspor Indonesia ke Jepang dalam bentuk primer dan diimpor kembali ke Indonesia telah dalam bentuk olahan. Jepang yang menguasai teknologi lebih tinggi daripada Indonesia mengalami daur

produk dengan melakukan serangkaian inovasi yang mempengaruhi ekspor dari Indonesia sebagai negara mitranya. Apabila industri sejenis di Indonesia tidak berkembang, maka Jepang akan memperoleh keuntungan berganda dalam perdagangan ini dan di pasar internasional akibat *entry lag*.

### 2.3.3. Simulasi Dampak Liberalisasi Perdagangan Bilateral

Kesepakatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang telah dimulai sejak awal tahun 2005 dalam Perjanjian Kerjasama Ekonomi/PKE atau *Economic Partnership Agreement/EPA*. Apabila tarif bea masuk nol persen atas komoditas ekspor kopi (yang telah diolah) diberlakukan di Jepang, berdampak buruk bagi kinerja produksi sektor pertanian Indonesia. Volume ekspor kopi Indonesia langsung menurun sebesar 9 persen akibat penurunan produksi sebesar 2,54 persen (Tabel 8). Konsumen dalam negeri justru diuntungkan dengan penurunan harga sebesar 3,56 persen. Tampaknya kebijakan ini kurang efektif karena tidak memberikan insentif bagi produsen/pengusaha kopi di dalam negeri.

Tabel 8. Dampak KPB Indonesia-Jepang terhadap Kinerja Sektor Pertanian Indonesia

Komoditas	Perubahan Harga Konsumen (%)	Perubahan Harga Produsen (%)	Perubahan Produksi (%)	Perubahan Ekspor (%)
Kopi	- 3,56	- 2,11	- 2,54	- 9,01
Ubi Kayu	- 1,21	- 0,91	- 0,27	- 0,38
Minyak kelapa	- 2,34	- 2,20	- 0,41	- 91,57

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Penerapan KPB Indonesia dengan Jepang untuk komoditas ubi kayu dan minyak kelapa memberi arah dampak yang sama seperti pada komoditas kopi di atas. Tampaknya KPB ini tidak memberikan dampak yang positif bagi kinerja sektor pertanian Indonesia. Pengamatan dan tinjau ulang terhadap kebijakan KPB ini diperlukan segera mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terutama terhadap penurunan volume ekspor minyak kelapa yang sangat drastis, yaitu sebesar 91,57 persen.

Seperti hasil simulasi terhadap kinerja sektor pertanian, KPB komoditas minyak kelapa memberikan dampak yang paling besar terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat. Konsumen sangat diuntungkan dengan penambahan surplus sebesar 29 persen (Tabel 9), sedangkan produsen di dalam negeri merugi dengan kehilangan surplus sebesar 27 persen. Namun, KPB untuk komoditas kopi dan ubi kayu memberikan keuntungan baik kepada produsen maupun konsumen di dalam negeri, sebaliknya untuk penerimaan pemerintah menjadi berkurang dari ekspor ketiga komoditas tersebut.

Tabel 9. Dampak KPB Indonesia-Jepang terhadap Distribusi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia (dalam juta AS\$)

Komoditas	Surplus	Surplus	Kesejahteraan	Penerimaan
	Konsumen	Produsen	Total	Pemerintah
Kopi	4,40	5,81	2,22	- 0,81
Ubi Kayu	1,72	1,46	0,18	- 0,24
Minyak kelapa	29,00	- 27,04	0,32	- 1,64

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

## 2.4. Perdagangan Indonesia – Korea Selatan

Perubahan era perdagangan telah terjadi di semua kawasan, baik di tingkat regional maupun internasional. Setiap negara dituntut untuk menyiapkan diri guna bersaing di pasar yang lebih terbuka dan dengan tingkat persaingan tinggi pada tingkat internasional. Untuk itu Indonesia telah menyertakan diri sebagai salah satu anggota yang meratifikasi kesepakatan perdagangan dunia, atau lebih dikenal dengan OPD. Sementara itu, di tingkat regional telah terbangun kerjasama ASEAN yang berumur lebih lama daripada keikutsertaan Indonesia dengan organisasi lainnya, yang bersama anggota lain berupaya meningkatkan mutu kerjasama, khususnya dalam bidang perdagangan dengan saling membuka pasar. Perwujudan pembukaan kawasan pasar bebas regional tersebut dikenal dengan istilah ASEAN *free trade area*, yang disingkat AFTA. Selangkah lebih maju, semua negara anggota ASEAN menjalin kerjasama dengan negara tetangga ASEAN untuk mencapai kesepakatan perdagangan bebas di kawasan ASEAN *plus 3* (ASEAN+3). ASEAN+3 merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dengan tiga negara Asia Timur, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Selain di bawah naungan ASEAN+3, baik ASEAN dengan China maupun Indonesia dengan China telah terjalin juga kerjasama perdagangan dan dikenal dengan *Early Harvest Package* (EHP). Program tersebut merupakan kesepakatan penurunan tarif atas produk-produk spesifik yang disepakati.

Namun, bentuk kerjasama yang diwadahi ASEAN+3 antara Indonesia dengan Korea Selatan belum menyentuh kesepakatan penurunan tarif di antara kedua pihak. Oleh karena itu, kajian peta perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan dilakukan untuk mengetahui peluang dan tantangan dari kesepakatan kerjasama tersebut, khususnya bagi produk pertanian Indonesia.

Kerjasama ASEAN+3 merupakan kerangka kerja yang lebih besar dari ASEAN, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat lebih besar bagi anggotanya, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini mengingat sebagian besar negara ASEAN belum pulih dari guncangan krisis ekonomi yang terjadi pada 1997–1999. Perekonomian ASEAN sangat tergantung pada perdagangan dan investasi di luar kawasan ASEAN, terutama dari kawasan Asia sendiri, antara lain Korea Selatan yang merupakan salah satu NB yang mempunyai perkembangan industri, teknologi, dan ekonomi yang tinggi.

### 2.4.1. Perbandingan Ciri-ciri Ekonomi Makro dan Produk Dagang

Sama seperti dua negara sebelumnya yang disebutkan di atas, Indonesia jelas mempunyai latar belakang ekonomi yang relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan. Tingkat pendapatan nasional per kapita Korea Selatan relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan dari ciri perekonomian Korea Selatan yang lebih didominasi oleh industri daripada pertaniannya, sehingga peningkatan nilai tambahnya lebih jelas. Sebaliknya nilai tambah sektor pertanian Indonesia hanya sedikit memberi sumbangan terhadap pendapatan nasional. Oleh karena itu, perbedaan latar belakang tersebut dapat mendatangkan tantangan di masa yang akan datang, mengingat dengan semakin terbukanya pasar dan berubahnya pola hidup ke kehidupan modern, sehingga diduga produk industri Korea Selatan akan membanjiri pasar Indonesia (Tabel 10).

Tabel 10. Perbandingan Ciri Makroekonomi Indonesia dan Korea Selatan, 2003

Kriteria	Indonesia	Korea Selatan
Pendapatan Nasional Bruto (US\$)	208,3	605,3
Pertumbuhan/Tahun		
- Produk Domestik Bruto	4,5	3,1
- Produk Domestik Bruto/Kapita	3,1	2,5
- Ekspor Barang dan Jasa	3,9	15,7
Struktur Ekonomi		
% dari Produk Domestik Bruto	16,6	3,2
- Pertanian	43,6	34,6
- Industri	24,7	23,4
- Jasa	39,9	62,2

Sumber: [www.worldbank.org/](http://www.worldbank.org/) PDB berdasarkan harga konstan 1993.

Sesuai dengan motivasi awal kerjasama dalam ASEAN+3, maka Indonesia harus dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ada dari kerjasama tersebut. Selain itu, Indonesia harus lebih proaktif dan berupaya memperbaiki dan menghilangkan kelemahan dalam menghadapi tantangan kerjasama dengan Korea Selatan.

### **Kelompok Produk yang Mendominasi Perdagangan Bilateral**

Berdasarkan hasil olahan data ekspor dan impor Indonesia yang dipublikasikan BPS secara berkala, diketahui beberapa kelompok produk baik yang dominan diimpor dari Korea Selatan maupun diekspor ke Korea Selatan dari Indonesia selama periode tersebut (Lampiran Tabel 11 dan Lampiran Tabel 12). Kelompok produk yang mempunyai pangsa sepuluh besar pertama bervariasi dari tahun ke tahun baik untuk impor maupun ekspor. Artinya, volume dan nilai ekspor dan impor total setiap kelompok produk bergejolak mengikuti pola kecenderungan tertentu. Sebanyak 36 kelompok produk baik yang diekspor dari Indonesia ke Korea Selatan maupun sebaliknya tidak semua merupakan produk pertanian primer atau olahan. Produk yang diperdagangkan kedua negara tersebut terbagi

dalam 15 kelompok produk dalam empat digit kode *Harmonized System* (Lampiran Tabel 13). Kelima belas kelompok produk tersebut terbagi menjadi satu kelompok produk perikanan dan kelautan, 15 kelompok produk mineral dan industri kimia, 13 kelompok produk pertanian, dan 7 kelompok produk hasil hutan.

Sebanyak 13 kelompok produk pertanian yang diperdagangkan antara Indonesia dengan Korea Selatan mengalami gejolak volume dan nilai ekspor serta impor dari tahun ke tahun selama periode 1996–2003 mengikuti pola kecenderungan tertentu (Lampiran Grafik 3). Gejolak volume dan nilai ekspor maupun impor produk secara individu pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh gejolak volume dan nilai ekspor atau impor totalnya (Tabel 11).

Tabel 11. Perkembangan Total Nilai Impor dan Ekspor Indonesia, Nilai Impor dan Ekspor ke Korea Selatan, serta Pangsa Impor dan Ekspor ke Korea Selatan, 1996–2003

Tahun	Total Nilai Impor Indonesia (Juta USD)	Nilai Impor Indonesia dari Korea Selatan (Juta USD)	Pangsa Impor dari Korea Selatan (%)	Total Nilai Ekspor Indonesia (Juta USD)	Nilai Ekspor Indonesia ke Korea Selatan (Juta USD)	Pangsa Ekspor ke Korea Selatan (%)
1996	9.589.035.189	533.537.621	5,56	14.379.611.387	782.124.572	5,44
1997	8.548.987.131	478.455.896	5,60	14.260.736.551	573.909.842	4,02
1998	6.204.907.121	339.527.077	5,47	11.165.833.276	287.465.883	2,57
1999	7.307.002.355	343.167.879	4,70	12.455.026.450	430.752.638	3,46
2000	8.123.905.455	518.101.005	6,38	12.891.332.873	438.887.424	3,40
2001	7.425.741.069	446.867.554	6,02	11.913.624.737	421.328.202	3,54
2002	7.649.261.257	358.247.712	4,68	13.614.731.241	399.634.039	2,94
2003	7.910.916.752	254.454.802	3,22	14.624.092.099	491.057.426	3,36
<i>Growth (%/thn)</i>	-1,50	-6,42	-4,92	0,14	-4,65	-4,78

Sumber: Analisa Data Sekunder, 2005.

Nilai impor Indonesia dari tahun 1996–2003 cenderung mengalami penurunan, dengan laju penurunan per tahun sebesar 1,50 persen. Hal ini berarti Indonesia semakin mampu memenuhi sendiri kebutuhan produk di pasar domestik, atau mengalami defisit anggaran, sehingga daya beli menurun. Total nilai impor Indonesia dari Korea Selatan dalam periode yang sama mengalami penurunan sebesar 6,42 persen per tahun disertai penurunan pangsa impor sebesar 4,92 persen per tahun. Artinya, ketergantungan Indonesia terhadap produk Korea Selatan cenderung mengalami penurunan. Secara agregat ekspor Indonesia selama periode 1996–2003 mengalami pertumbuhan sebesar 0,14 persen per tahun. Namun dalam perdagangan bilateral dengan Korea Selatan, ekspor Indonesia pada periode tersebut mengalami penurunan sebesar 4,65

persen per tahun dengan diikuti penurunan pangsa ekspor sebesar 4,78 persen per tahun.

#### **2.4.2. Kinerja dan Intensitas Perdagangan Produk Pertanian**

Berdasarkan hasil analisa perkembangan volume dan nilai ekspor dan impor produk yang diperdagangkan antara Indonesia dengan Korea Selatan yang menggunakan indeks Grubel-Lloyd (IGL) menurut kode HS empat digit (Lampiran Tabel 14) diketahui tiga belas kelompok pertanian yang mendominasi sepuluh besar ekspor impor. Ketiga belas kelompok produk tersebut adalah produk kode HS 0714, 0901, 1513, 1701, 1703, 2106, 2302, 2306, 4001, 4002, 4005, 4010, dan 4104.

Dengan memilahnya ke dalam kelompok defisit atau surplus sesuai dengan metodologi, kelompok defisit perdagangan meliputi produk perkebunan (HS 1701, 4002, 4005, dan 4010), produk olahan (HS 2106), dan produk peternakan (HS 4104). Sementara kelompok surplus perdagangan meliputi produk tanaman pangan (HS 0714), produk perkebunan (HS 0901, 1513, 1703, dan 4001), produk samping olahan tanaman pangan (HS 2302 dan 2306).

#### **Kelompok Produk Pertanian Defisit Perdagangan**

Kelompok produk HS 1701, yaitu gula tebu atau gula bit dan sukrosa kimiawi mengalami defisit selama periode 1996–2003. Meskipun selalu memperoleh pangsa volume dan nilai perdagangan, namun pangasanya selalu kurang dari 50 persen selama periode tersebut, dan hanya terjadi pada tahun 1997–2003 saja. Volume impor mengalami penurunan sebesar 15,82 persen per tahun, sementara nilai impor menurun sebesar 24,35 persen per tahun. Impor gula dari Korea Selatan mencapai volume dan nilai tertinggi pada tahun 1996, setelah itu bergejolak dengan kecenderungan menurun baik volume maupun nilainya. Demikian juga dengan ekspor gula sejenis dari Indonesia ke Korea Selatan, setelah keadaan relatif stabil pada tahun 1997–1999, volume dan nilai ekspornya menurun drastis.

Kinerja perdagangan kelompok produk HS 2106, yaitu olahan makanan yang tidak dirinci menunjukkan defisit 100 persen dari tahun 1996–1999. Pada tahun berikutnya Indonesia menunjukkan adanya pangsa volume dan nilai perdagangan, namun kurang dari 10 persen. Peningkatan volume dan nilai impor terjadi masing masing sebesar 19,50 persen per tahun dan 18,53 persen per tahun. Bahkan volume dan nilai impor tertinggi dicapai pada tahun 2003 dan keduanya cenderung meningkat.

Meskipun Indonesia banyak mengekspor karet sintetik ke China, ternyata Indonesia juga banyak mengimpor produk yang sama, yaitu kelompok produk HS 4002 (karet sintetik yang diperoleh dari minyak) dari Korea Selatan. Selama periode 1996–2003, Indonesia memperoleh pangsa volume dan nilai perdagangan, namun kurang dari 25 persen. Meskipun

terjadi peningkatan volume impor sebesar 1,28 persen per tahun, tetapi nilai impor menurun sebesar 2,26 persen per tahun. Volume impor tertinggi tercapai pada tahun 2000, namun nilai impor tertinggi dicapai pada tahun 1996. Hal ini sejalan dengan kecenderungan penurunan volume dan nilai impor karet sintetik dari Korea Selatan ke Indonesia. Meskipun Indonesia selalu memperoleh pangsa perdagangan, namun selalu kurang dari sepuluh persen, sehingga mengalami defisit perdagangan.

Demikian juga dengan kelompok produk HS 4005, yaitu karet campuran, Indonesia menunjukkan kinerja defisit perdagangan. Namun seiring dengan penurunan volume dan nilai impor karet campuran setelah mencapai volume dan nilai impor tertinggi pada tahun 1996, Indonesia menunjukkan kinerja yang membaik. Bahkan pada tahun 2002 pangsa volume dan nilai perdagangan Indonesia meningkat tajam dari kurang dari satu persen melonjak menjadi 75,25 persen dan pada tahun 2003 mencapai 35,61 persen. Akibatnya adalah adanya penurunan volume impor masing-masing sebesar 25,06 persen per tahun dan 29,08 persen per tahun. Hal tersebut tercermin dari kecenderungan volume dan nilai impor karet sintetik yang menurun.

Selain produk primer dan olahan, produk karet yang mengalami defisit perdagangan adalah kelompok produk HS 4010 (ban atau *belting* pengangkut dari karet yang divulkanisasi). Indonesia bahkan mengalami defisit 100 persen pada tahun 1996, 1998, dan 1999. Namun setelah tahun 1999, Indonesia mampu meraih pangsa perdagangan dan perdagangan terjadi dua arah dengan pangsa yang seimbang. Pada tahun 2000, pangsa perdagangan Indonesia menurun sampai 50 persen. Volume impor menurun sebesar 17,33 persen per tahun, sementara nilai impor menurun sebesar 28,03 persen per tahun. Baik volume maupun nilai ekspor dan impor keduanya menunjukkan kecenderungan menurun.

Selain sebagai negara produsen otomotif, Korea Selatan selama ini juga dikenal sebagai eksportir produk peternakan, berupa kulit atau jangat yang berasal dari hewan jenis lembu. Indonesia menunjukkan kinerja defisit perdagangan kelompok produk HS 4104, yaitu jangat atau kulit dari hewan jenis lembu, meskipun perdagangan terjadi dua arah. Indonesia selalu memperoleh pangsa perdagangan kurang dari 10 persen. Terjadi peningkatan volume ekspor sebesar 21,89 persen per tahun dan nilai ekspor sebesar 15,55 persen per tahun. Sementara impor menunjukkan penurunan volume impor sebesar 20,51 persen per tahun dan nilai impor sebesar 20,83 persen per tahun. Volume dan nilai impor mencapai nilai tertinggi pada tahun 1996, setelah tahun 1996 terus mengalami penurunan.

### **Kelompok Produk Pertanian Surplus Perdagangan**

Kelompok produk HS 0714, yaitu ubi kayu menunjukkan kinerja yang mengkhawatirkan. Meskipun selama 1996–2003 selalu mengalami surplus 100 persen, namun terjadi penurunan volume ekspor sebesar

103,89 persen per tahun dan nilai ekspor sebesar 101,21 persen per tahun. Volume dan nilai ekspor tertinggi tercapai pada tahun 1998, selanjutnya mengalami penurunan dan pangsaanya kurang dari sepuluh persen. Selain Indonesia, di kawasan Asia terdapat negara lain produsen ubi kayu, yaitu Thailand dan China. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan daya saing baik dari sisi mutu maupun harga agar surplus perdagangan dapat senantiasa tercapai dan potensi pasar yang telah diperoleh tetap dapat mempertahankan.

Kinerja perdagangan kelompok produk HS 0901, yaitu kopi digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak menunjukkan surplus perdagangan hampir mencapai 100 persen selama 1996–2003. Namun intensitasnya bergejolak dan perdagangan cenderung terjadi dua arah. Ekspor kopi ke Korea Selatan mencapai volume dan nilai tertinggi pada tahun 1999, setelah tahun 1999 bergejolak dengan kecenderungan mengalami penurunan volume dan nilai ekspor. Volume dan nilai ekspor mengalami penurunan masing-masing sebesar 6,71 persen per tahun dan 24,94 persen per tahun. Selain terjadi penurunan ekspor, Indonesia menunjukkan peningkatan volume impor kopi dari Korea Selatan sebesar 67,73 persen per tahun dan nilai sebesar 51,83 persen per tahun. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan mutu kerja dan produk industri kopi di dalam negeri agar mampu mempertahankan dan memperoleh pasar potensial di dalam negeri maupun di pasar internasional.

Seperti halnya perdagangan dengan China, Indonesia juga menunjukkan kinerja surplus perdagangan dalam kelompok produk HS 1513, yaitu minyak kelapa (kopra), inti kelapa sawit atau *babassu* dan fraksinya dengan Korea Selatan. Volume dan nilai ekspor minyak kelapa ke Korea Selatan tertinggi tercapai pada tahun 1997, setelah tahun 1997 bergejolak dan pada tahun 2003 mencapai volume ekspor sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 1997, namun nilainya hanya setengah dari tahun 1997. Indonesia selama 1996–2003 mengalami surplus 100 persen, sementara Korea Selatan hanya memperoleh pangsa perdagangan pada tahun 1997, 2002, dan 2003 dengan pangsa kurang dari satu persen.

Kelompok produk lain yang mengalami surplus adalah produk HS 1703, yaitu tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula. Indonesia mempunyai banyak pabrik gula, terutama di Pulau Jawa. Tetes merupakan produk samping dari industri pengolahan tebu menjadi gula. Tetes tebu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri alkohol dan bahan bakar spiritus. Ekspor tetes tebu ke Korea Selatan mencapai volume dan nilai tertinggi pada tahun 1997, setelah tahun 1997 bergejolak dan cenderung menurun baik volume maupun nilai ekspornya. Meskipun demikian, Indonesia hampir selalu mengalami surplus 100 persen terhadap Korea Selatan, sehingga pangsa volume dan nilai perdagangan tetes tebu Korea Selatan selalu kurang dari sepuluh persen.

Selain tetes tebu, kelompok produk HS 2302, yaitu sekam, dedak, dan residu lainnya yang merupakan produk samping dari industri

pengolahan serealia (misalnya pengolahan jagung, padi, gandum, tanaman polongan, dan serealia lainnya) juga menunjukkan kinerja perdagangan surplus terhadap Korea Selatan. Setelah mencapai volume dan nilai ekspor tertinggi pada tahun 1996, selanjutnya bergejolak dengan kecenderungan terjadi kenaikan volume dan nilai ekspor residu setelah tahun 2003. Selama 1996–2003 selalu terjadi perdagangan dua arah, namun pangsa dagang Indonesia hampir mencapai 100 persen.

Selain residu pengolahan serealia, Indonesia juga mengekspor residu yang berasal dari pengolahan minyak nabati selain minyak kedelai dan kacang tanah, yang tergolong dalam kelompok produk HS 2306, yaitu bungkil dan residu padat lainnya. Selama 1996–2003 Indonesia selalu mengalami surplus hampir mencapai 100 persen, dan pangsa perdagangan Korea Selatan kurang dari lima persen. Sejak tahun 1996 volume dan nilai ekspor bergejolak dan menunjukkan kecenderungan menurun. Residu pengolahan serealia dan minyak nabati merupakan bahan yang kaya akan zat gizi, terutama protein, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku pakan hewan ternak. Seperti telah dibahas di muka, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang banyak menghasilkan produk ternak, terutama kulit dan jangat hewan jenis lembu. Oleh karena itu, Korea Selatan membutuhkan banyak bahan baku pakan ternak untuk memenuhi kebutuhan pakan di sektor peternakan.

Sebagaimana China, Korea Selatan juga merupakan produsen otomotif di kawasan Asia. Hal ini berdampak pada kebutuhan pasokan karet untuk memenuhi produksi otomotif setempat. Salah satunya diimpor dari Indonesia berupa kelompok produk HS 4001, yaitu karet alam, balata, getah perca. Kinerja perdagangan karet alam dengan Korea Selatan cukup baik. Selama periode 1996–2003 Indonesia selalu mengalami surplus perdagangan hampir 100 persen, pangsa perdagangan Korea Selatan bahkan kurang dari satu persen. Meskipun demikian perdagangan terjadi dua arah. Volume dan nilai ekspor tertinggi tercapai pada tahun 1997 setelah tahun 1997 menurun sampai volume dan nilai ekspor terendah pada tahun 2001, setelah tahun 2001 menunjukkan kecenderungan terjadi peningkatan volume maupun nilai ekspor karet alam.

Selain kelompok produk pertanian dalam bentuk primer maupun olahan sekunder yang telah dibahas kinerja dan intensitas perdagangannya di muka, terdapat beberapa produk industri yang merupakan produk hilir pertanian (produk tersier) maupun produk dari sektor lain yang mempunyai pangsa perdagangan yang cukup baik di Korea Selatan. Produk industri yang merupakan produk pertanian tersier termasuk dalam kelompok HS 2905, yaitu alkohol asiklik, khususnya sorbitol. Indonesia selama tahun 1996–2003 selalu mengalami surplus perdagangan dari Korea Selatan di atas 75 persen. Bahkan setelah tahun 1998 terjadi lonjakan volume dan nilai ekspor, sehingga mencapai volume dan nilai ekspor tertinggi yang bertahan selama dua tahun, yaitu tahun

1999 dan 2000. Setelah tahun 2000 terjadi penurunan dan pada tahun 2003 kembali menunjukkan kecenderungan akan terjadi kenaikan baik volume maupun nilai ekspor alkohol asiklik ke Korea Selatan pada tahun berikutnya.

Selain perdagangan produk pertanian primer maupun turunannya, terdapat perdagangan produk yang berasal dari luar sektor pertanian, antara lain adalah produk perikanan, kehutanan, industri galian alami, dan industri bahan kimia (Lampiran Tabel 13). Produk perikanan yang banyak diekspor berupa kelompok produk HS 0303, yaitu ikan. Volume dan nilai ekspor produk ikan cenderung mengalami penurunan. Produk kehutanan yang banyak diekspor Indonesia berupa kelompok produk HS 4402, 4407, 4409, 4411, 4412, 4413, dan 4418, yaitu kayu dan produk kayu olahan (bahan bangunan yang terbuat dari kayu, kayu lapis). Produk hasil hutan selama tahun 1996–2003 mengalami surplus perdagangan hampir 100 persen dan menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan volume dan nilai ekspor ke Korea Selatan. Sementara kelompok produk galian berupa semen (HS 2523) banyak diimpor Indonesia dari Korea Selatan. Kinerja perdagangan semen menunjukkan kecenderungan penurunan volume dan nilai impor dari Korea Selatan ke Indonesia. Produk dari sektor industri kimia yang menghasilkan senyawa hidrokarbon, alkohol, dan pupuk dari Indonesia, sebagian besar menunjukkan kinerja perdagangan yang surplus dengan kecenderungan akan mengalami peningkatan baik volume maupun nilai eksportnya. Bahkan pangsa perdagangannya hampir mencapai 100 persen selama 1996–2003.

Perbedaan ciri makroekonomi Indonesia dan Korea Selatan yang melatarbelakangi perdagangan bilateral keduanya tidak dapat dihindari juga menunjukkan adanya kesejangan teknologi, dimana Korea Selatan lebih dominan sebagai negara industri pengolah baik dari sektor pertanian maupun bukan-pertanian. Sementara Indonesia cenderung berperan sebagai negara penghasil bahan mentah dari produk pertanian dan diekspor ke Korea Selatan. Hal ini tercermin dari sebagian besar komoditas ekspor berupa produk primer, baik kategori produk utama maupun produk samping. Hal ini ditunjukkan pula oleh defisit perdagangan Indonesia yang sebagian besar berupa produk olahan.

### **2.4.3. Simulasi Dampak Liberalisasi Perdagangan Bilateral**

Kesepakatan kerjasama ekonomi dalam KPB antara Indonesia dengan Korea Selatan saat ini masih dalam tahap peninjauan. Apabila kebijakan ini diterapkan melalui penghapusan tarif bea masuk komoditas kopi yang telah diproses di Indonesia kemudian diekspor ke Korea Selatan, akan berdampak negatif kepada kinerja pertanian Indonesia. Volume ekspor kopi Indonesia akan menurun seiring dengan merosotnya produksi dalam negeri akibat anjloknya harga di tingkat produsen (Tabel 12). Hal yang sama juga terjadi bila KPB untuk komoditas ekspor

Indonesia, yaitu minyak kelapa diberlakukan. Namun, besaran dampak akibat KPB tersebut jauh lebih besar, terutama terhadap harga produsen dan volume ekspor. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak perlu terburu-buru untuk melakukan KPB minyak kelapa dengan Korea Selatan.

Tabel 12. Dampak KPB Indonesia–Korea Selatan terhadap Kinerja Pertanian Indonesia

Komoditas	Perubahan Harga Konsumen (%)	Perubahan Harga Produsen (%)	Perubahan Produksi (%)	Perubahan Ekspor (%)
Kopi	- 1,21	- 0,91	- 0,27	- 3,88
Ubi Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00
Minyak kelapa	- 2,51	- 2,39	- 0,43	- 98,32

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Pemberlakuan KPB untuk komoditas kopi ini lebih lanjut berdampak positif terhadap konsumen, produsen, dan masyarakat luas, namun sedikit memberikan pengaruh negatif terhadap turunnya penerimaan pemerintah, yaitu sebesar 0,24 persen (Tabel 13). Konsumen menikmati keuntungan dan memperoleh surplus melalui harga pembelian yang lebih murah.

Tabel 13. Dampak KPB Indonesia–Korea Selatan terhadap Distribusi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia (dalam juta AS\$)

Komoditas	Surplus Konsumen	Surplus Produsen	Kesejahteraan total	Penerimaan Pemerintah
Kopi	1,72	1,46	0,18	- 0,24
Ubi Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00
Minyak kelapa	31,19	- 29,16	0,39	- 1,64

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

KPB untuk komoditas ubi kayu yang diekspor Indonesia ke Korea Selatan tidak memberi pengaruh yang berarti baik terhadap kinerja sektor pertanian maupun terhadap distribusi kesejahteraan, yang ditunjukkan oleh nilai nol. Oleh karena itu, sekali lagi Indonesia tidak perlu terlalu berambisi untuk melakukan KPB tersebut.

### III. PERDAGANGAN REGIONAL ASEAN DAN ASEAN-PLUS

#### 3.1. Kerangka Analisis

Perundingan perdagangan kawasan menyangkut persetujuan sejumlah kecil negara yang ingin menciptakan perdagangan bebas di antara sesamanya dan pada saat yang sama memberlakukan hambatan perdagangan pada negara di luar kawasannya. Hal ini telah terjadi sejak lama, misalnya antara sesama anggota UE dan antara AS dan Kanada, dan akhir-akhir ini di wilayah Asia Timur seperti disebutkan dalam Pendahuluan.

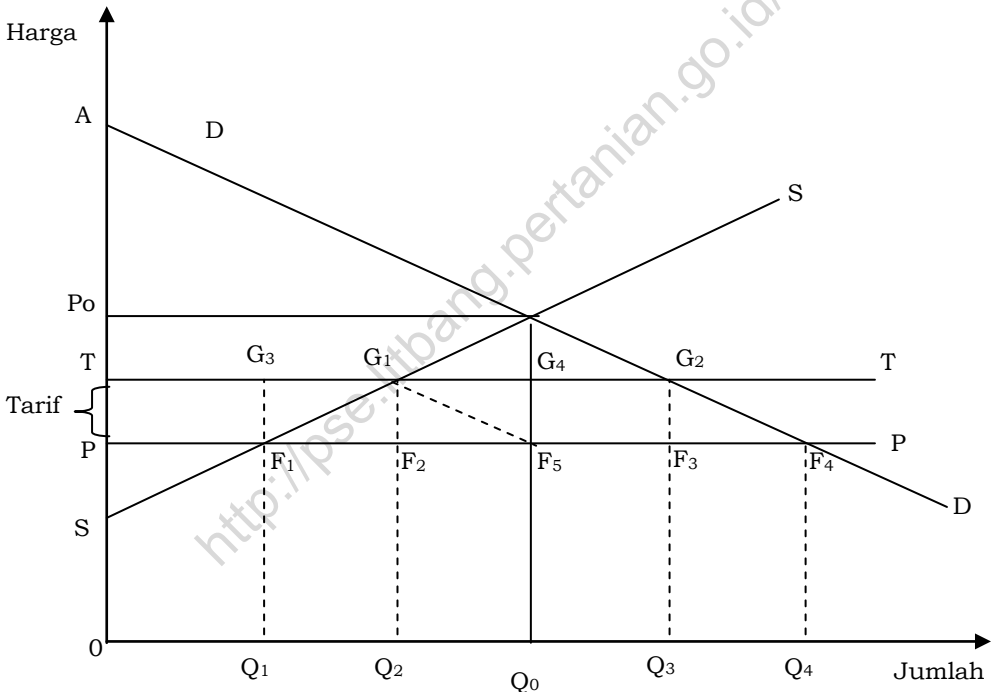
Perjanjian perdagangan terbatas atau *preferential trade agreement*/PTA mempunyai beberapa bentuk mulai dari keterpaduan ekonomi yang paling longgar sampai yang paling kuat, yaitu: kelompok perdagangan terbatas, wilayah perdagangan bebas, kesamaan pabean, pasar bersama, dan kesatuan ekonomi.

Kelompok perdagangan terbatas terjadi apabila dua atau lebih negara sepakat mengurangi bea masuk impor semua komoditas (kecuali jasa permodalan) satu sama lain, yaitu apabila mereka sepakat memiliki kesamaan tarif. Wilayah perdagangan bebas terjadi dua atau lebih negara menghapus semua bea masuk impor (dan semua pembatasan jumlah impor) dalam perdagangan semua komoditas di antara sesamanya (kecuali jasa permodalan), tetapi tetap memberlakukan tarif pada negara-negara lainnya. Hal ini akan menimbulkan masalah pengawasan karena adanya pembelokan impor atau *trade deflection*. Untuk menghindarinya anggota kelompok ini harus dapat membedakan secara efektif antara barang yang berasal dari anggota lainnya dan yang dari luar kelompok. Kesatuan kepabeanan terjadi apabila dua atau beberapa negara menghapus semua bea masuk impor untuk semua barang yang mereka perdagangkan bersama-sama (kecuali jasa permodalan) dan apabila menerapkan skedul tarif bersama untuk semua impor barang dari negara di luar kelompok.

Pasar bersama terjadi apabila dua atau lebih negara membentuk kepabeanan bersama dan apabila membolehkan perpindahan semua faktor produksi di antara mereka. Jadi, pasar bersama menghapus semua pembatasan perdagangan untuk perdagangan bersama dan juga menetapkan tarif eksternal bersama. Kesatuan ekonomi terjadi apabila dua atau lebih negara membentuk pasar bersama dan meningkat untuk penyatuan kebijakan fiskal, moneter, dan sosioekonomi.

Sepanjang yang diketahui dan diberitakan dalam media massa dalam beberapa waktu yang lalu kerjasama ekonomi di antara sesama anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara/PNAT dan antara PNAT dengan China, Jepang, dan Korea Selatan (PNAT Plus 3 atau +3), masih dalam tahap paling longgar, yaitu pengaturan perdagangan terbatas dalam arti penurunan bea masuk impor untuk semua barang yang berasal dari anggota kelompok.

Seiring dengan diberlakukannya AFTA untuk kawasan ASEAN, telah pula dibentuk suatu Kawasan Perdagangan Bebas/KPB atau *Free Trade Area/FTA* antara ASEAN dengan tiga negara besar dan berpengaruh di Asia Timur, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Khusus KPB Indonesia dengan China, telah diratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi dengan Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2004 dengan menerapkan tarif bea masuk dalam rangka *Early Harvest Package* ASEAN-China menjadi 0 persen tahun 2006 untuk produk-produk tertentu. Oleh karena itu, masih menjadi pertanyaan apakah pembentukan kelompok perdagangan terbatas ini mendukung perdagangan bebas atau sebaliknya mendukung pembatasan perdagangan?. Apakah pengaturan perdagangan terbatas meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya, yaitu negara-negara yang termasuk dalam PNAT dan China, Jepang dan Korea Selatan?.



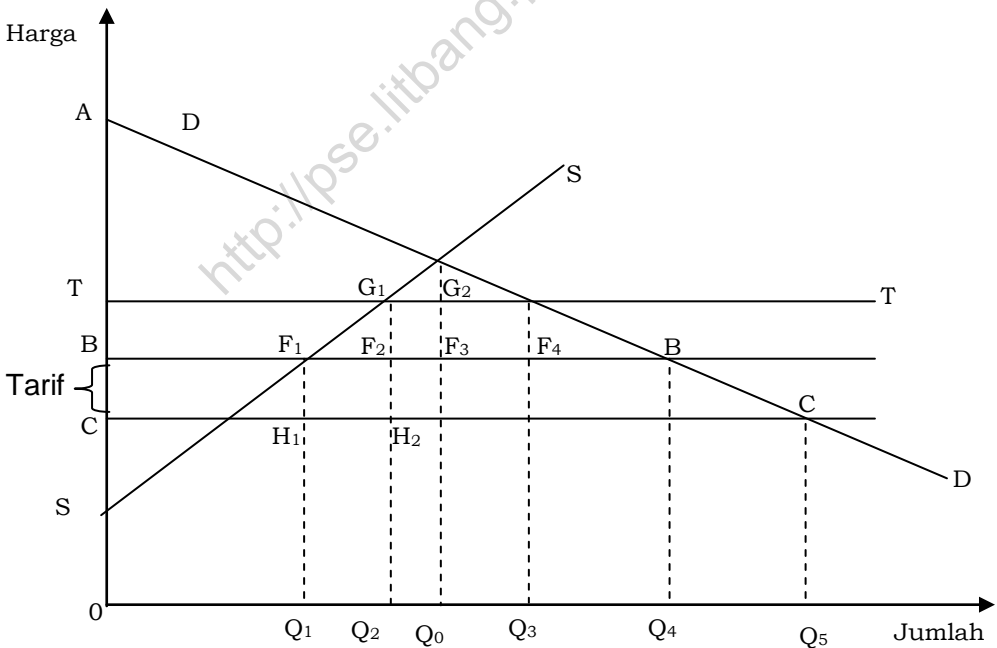
Gambar 1. Dampak Terciptanya Perdagangan

Melalui pendekatan analisa keseimbangan parsial, perjanjian perdagangan terbatas dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu (1) terciptanya perdagangan atau *trade creation* dan (2) beralihnya perdagangan atau *trade diversion*. Pada kasus (1), yaitu Tercipta Perdagangan (Gambar 1), ambil misalnya garis *DD* adalah kurva permintaan (untuk suatu komoditas tertentu, *X*) negara A, dan *SS* adalah kurva penawaran untuk *X*. Kita anggap kurva penawaran negara B adalah elastis tidak terhingga, seperti digambarkan sebagai garis

mendatar  $PP$ . Kalau A menerapkan tarif bagi komoditas yang diproduksi B, diperoleh garis datar  $TT$ . Sebelum adanya pemotongan tarif, negara A mengkonsumsi  $OQ_3$  dengan  $OQ_2$  dihasilkan produsen domestik A dan  $Q_2Q_3$  diimpor dari B. Kotak persegi empat  $G_1F_2F_3G_2$  adalah penerimaan tarif negara A. Apa yang terjadi kalau tarif diturunkan? Konsumsi negara A meningkat ke  $OQ_4$ , produksinya menurun ke  $OQ_1$  dan impor meningkat ke  $Q_1Q_4$  dan penerimaan tarif hilang. Konsumen A mendapat manfaat dari penurunan tarif, tetapi seberapa besar? Sebesar kotak  $PF_4G_2T$ , tetapi tidak semuanya itu merupakan manfaat bersih negara A.

Manfaat total dari terciptanya perdagangan ditunjukkan Gambar 1 sebagai penjumlahan area dua segitiga  $F_1F_2G_1$  dan  $F_3F_4G_2$ . Itu tergantung dari tiga parameter: (1) tarif awal di negara A, (2) elastisitas penawaran produksi pada titik  $G_1$  dan (3) elastisitas permintaan di negara A.

Pada kasus (2), yaitu Beralih Perdagangan (Gambar 2), anggap bahwa sebelum adanya pengaturan perdagangan terbatas negara A mengimpor komoditas Y dari negara yang lebih efisien C (bukan negara anggota kelompok). Namun, setelah terbentuknya kelompok tersebut negara A mengimpor Y dari mitranya, negara B yang merupakan anggota kelompok, meskipun kalah efisien dari C, tetapi dapat menjual Y ke negara A dengan harga yang lebih murah dari negara C karena negara A memberikan tarif yang lebih tinggi bagi komoditas dari negara C.



Gambar 2. Dampak Beralihnya Perdagangan

Misalnya garis  $DD$  dan  $SS$  adalah kurva permintaan dan kurva penawaran (untuk suatu komoditas tertentu,  $X$ ) negara A. Garis datar  $BB$

dan CC menggambarkan kurva penawaran elastis tidak terhingga masing-masing negara B dan C. Kita anggap biaya produksi rata-rata C ( $OC$ ) lebih rendah dari B ( $OB$ ). Kalau A menerapkan tarif bagi komoditas yang diproduksi C, diperoleh garis datar  $TT$ . Sebelum adanya pemotongan tarif, negara A mengkonsumsi  $OQ_3$  dengan  $OQ_2$  dihasilkan produsen domestik A dan  $Q_2Q_3$  diimpor dari C. Kotak persegi empat  $G_1H_1H_2G_2$  adalah penerimaan tarif negara A. Apa yang terjadi kalau A dan B berada dalam suatu kelompok perdagangan terbatas dan tarif diturunkan?. A akan mengimpor komoditas  $Y$  dari B, karena lebih murah ( $OB < OT$ ). Konsumsi negara A meningkat ke  $OQ_4$ , produksinya menurun ke  $OQ_1$  dan impor meningkat ke  $Q_1Q_4$  dan penerimaan tarif hilang. Surplus konsumen negara A meningkat sebesar  $TBF_4G_2T$ , tetapi surplus produsen menurun sebesar area  $TBF_1G_1$ .

Kesepakatan perdagangan bebas PNAT dan APEC 2020 mengarahkan bahwa pada saat perdagangan bebas diberlakukan, besarnya tarif maksimal adalah 5 persen. Dalam kerangka tersebut, pemerintah Indonesia melakukan pengurangan tarif impor secara gradual sehingga pada saat diberlakukannya kesepakatan perdagangan bebas ini, besarnya tarif berbagai jenis komoditas maksimal adalah 5 persen. Namun demikian, penentuan tarif komoditas pertanian tersebut belum memperhitungkan dan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap surplus produsen, surplus konsumen, penerimaan pemerintah, dan kerugian atau keuntungan sosialnya.

Metoda gravitas (Cheng dan Wall, 2005) dilakukan sebagai patokan untuk melakukan pendugaan pengaruh berbagai isu kebijakan yang berkaitan dengan kelompok perdagangan dan distorsi perdagangan antara beberapa negara secara berpasangan. Model ini pertama kali digunakan dalam perdagangan dunia oleh Tinbergen (1962 dalam Wall, 1999) dan Poynohen (1963 dalam Wall, 1999), tetapi memiliki sejarah panjang dalam ilmu-ilmu sosial. Model ini telah umum dilakukan sebagai model dasar untuk menduga pengaruh berbagai isu kebijakan, yang mencakup pengelompokan perdagangan kawasan, penyatuan mata uang, kelompok politik, hak-hak paten, dan berbagai gangguan perdagangan (lihat Aitken, 1973; Brada dan Mendez, 1983; Bikker, 1987; Sanso *et al.*, 1993; McCallum, 1995, Frankel, 1997; Wei dan Frenkel, 1997; Kalbasi, 2005; Balistreri dan Hillberry, 2005).

Dalam bentuk yang paling sederhana, model ini menghipotesakan bahwa volume ekspor ( $X_{ij}$ ) antar dua negara yang bermitra merupakan fungsi meningkat pendapatan nasionalnya dan fungsi menurun dari jarak antar keduanya. Lebih khusus lagi dengan mengambil  $Y_i$  dan  $Y_j$  sebagai lambang pendapatan nasional negara  $i$  dan  $j$  dan  $D_{ij}$  adalah jarak antar keduanya, arus barang dari negara  $i$  ke negara  $j$  dapat ditulis dalam bentuk log-linier sebagai berikut:

$$\ln X_{ij} = \alpha \text{ ASEAN} + \beta \ln Y_i + \gamma \ln Y_j - \delta \ln D_{ij}, \quad (2)$$

$$\ln X_{ij} = \alpha_1 \text{ ASEAN} + \alpha_2 \text{ AFTA} + \alpha_3 \text{ ASEAN} * \text{ AFTA} + \beta \ln Y_i + \gamma \ln Y_j - \delta \ln D_{ij}, \quad (3)$$

dimana  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  dan  $\delta$  adalah konstanta yang bernilai positif, ASEAN adalah peubah boneka yang bernilai 1 untuk anggota ASEAN dan nol selainnya, dan AFTA adalah peubah boneka yang bernilai 1 pada masa saat dan setelah berlakunya AFTA dan nol untuk selainnya. Dengan menggunakan data penampang-lintang mitra perdagangan antara negara-negara ASEAN dan antara negara ASEAN dengan China, Jepang, dan Korea Selatan pada suatu tahun tertentu atau digabung dalam beberapa tahun dan mengukur jarak antar negara (biasanya antar ibukota), parameter  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , dan  $\delta$  dapat diduga dan kesamaan dan perbedaan dugaan parameter ini untuk berbagai kelompok negara akibat kebijakan perdagangan atau kawasan perdagangan bebas dapat diuji.

Sampai saat ini Perjanjian dan Kerjasama ASEAN/AFTA Plus masih terus diperundingkan dan akan memakan waktu lama untuk merealisasikannya. Dan apabila terealisasi, untuk mengetahui pengaruhnya pun membutuhkan waktu yang lama. Terkait dengan upaya ini, China telah lebih awal melakukan pendekatan dengan pihak ASEAN dan dengan negara-negara anggotanya. Pendekatan ini disusul oleh Jepang dan terakhir Korea Selatan tetapi semua negara masih melakukan pemantauan dan analisa manfaatnya. Dari perspektif analisa, hal yang dapat dilakukan adalah melihat apakah pengelompokan negara-negara itu akan menunjukkan perbaikan dalam perolehan nilai ekspor produk pertaniannya. Dalam hal ini ada 3 (tiga) hipotesa yang dapat diuji, yaitu:

- (1) Perdagangan produk pertanian Indonesia di kawasan ASEAN berbeda dari kawasan lain di Asia,
- (2) Perdagangan produk pertanian Indonesia sejak waktu berlakunya AFTA, yaitu tahun 2002 berbeda dari waktu sebelumnya,
- (3) Perdagangan produk pertanian Indonesia sejak waktu berlakunya AFTA, yaitu tahun 2002 di kawasan ASEAN berbeda dari waktu sebelumnya.

### **3.2. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian**

Perekonomian ASEAN sangat tergantung pada perdagangan dan investasi di luar kawasan ASEAN, terutama dari Amerika Serikat, dan Uni Eropa, tetapi yang lebih penting lagi adalah tiga negara di kawasan Asia yang bukan-ASEAN, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan yang tergabung dalam ASEAN+3. Ketiga negara ini mempunyai kekuatan ekonomi di kawasan Asia. Pencapaian kesepakatan kerjasama perdagangan Indonesia dengan tiga negara ini, merupakan bagian dari kerjasama AFTA Plus 3 (ASEAN+3). Kesepakatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama guna memulihkan kinerja ekonomi dan perdagangan luar negeri pasca krisis yang dialami oleh sebagian besar negara di Asia. Oleh karena itu, kerangka kerjasama ASEAN+3 merupakan mekanisme pertahanan keuangan guna memperkuat perekonomian dan saling ketergantungan satu sama lain yang menguntungkan, sehingga diharapkan berdampak positif bagi setiap anggota (Tay *et al.*, 2000).

Di dalam perdagangan pertanian negara-negara Asia (termasuk negara-negara ASEAN) yang menjadi tujuan ekspor Indonesia adalah Jepang, Hongkong, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, China, Mongolia, Macao, Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, dan Vietnam (17 negara). Nilai ekspor produk pertanian Indonesia [sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian pertanian/PP atau *Agreement on Agriculture/AoA* yang telah disepakati dalam forum organisasi perdagangan dunia/OPD (HS empat digit)] ke semua negara di atas mengalami gejolak setiap tahun, dari AS\$ 860 juta tahun 1993, menjadi AS\$ 1,4 milyar 1998, kemudian AS\$ 1,3 milyar tahun 2001 dan meningkat menjadi AS\$ 2,02 milyar tahun 2003.

Negara tujuan ekspor Indonesia yang mengalami *trend* pertumbuhan yang terus meningkat sepanjang tahun berturut-turut adalah Vietnam (dengan laju 33% per tahun), Laos (32%), Filipina (21%), China (19%), Thailand (18%), Brunei Darussalam (15%), Hongkong (9%), Singapura (5%), dan Myanmar (4%), sedangkan nilai ekspor ke Jepang, Korea (Utara dan Selatan), Taiwan, dan Kamboja mengalami penurunan (Tabel 14). Tampaknya bagi Indonesia, perdagangan di kawasan ASEAN lebih potensial dikembangkan dibanding ke negara-negara di kawasan Asia Timur.

Tabel 14. Pertumbuhan Rata-rata Nilai Ekspor Indonesia ke Asia tahun 1993-2003

Negara Tujuan Ekspor	Nilai Rata-rata Ekspor (juta AS\$)	Pertumbuhan (%)
Vietnam	218,89	33,98
Laos *	0,44	32,16
Filipina	397,73	21,55
China	1.786,32	19,78
Thailand	468,83	18,33
Brunei Darussalam	45,10	15,26
Malaysia	2.965,42	10,06
Hongkong	841,83	9,29
Singapura	3.240,86	5,33
Myanmar	118,87	4,09
Jepang	1.557,79	-3,92
Korea Selatan	716,45	-4,82
Korea Utara	4,25	-45,84
Taiwan	370,95	-6,68
Kamboja	327,63	-5,02
Mongolia**	4,42	186,21
Macao ***	2,05	161,85

Sumber: Data Eskpor Indonesia, BPS berbagai tahun (diolah)

Keterangan: \* Data tahun 1998 dan 2001 tidak ada

\*\* Perdagangan dengan Indonesia baru mulai tahun 1999 dan

\*\*\* 1997

Namun dari semua negara tujuan ekspor, Jepang merupakan negara pengimpor terbesar hingga saat ini, sehingga menjadi salah satu negara penyumbang devisa negara terbesar. Hal ini disadari oleh Jepang, sehingga pada awal tahun 2005 yang lalu mereka mendekati pemerintah untuk mengembangkan suatu kerja sama ekonomi bilateral dengan ditandatanganinya suatu memorandum kesepakatan perdagangan bebas bilateral antara Jepang dan Indonesia awal 2005 lalu. Oleh karena itu, khusus untuk Jepang ekspor pertanian Indonesia masih potensial untuk dikembangkan dan perlu diperbaiki apalagi dengan telah disepakatinya suatu memorandum kesepakatan perdagangan bebas bilateral tersebut.

Negara tujuan ekspor Indonesia yang mempunyai nilai terbesar berdasarkan jumlah total dari tahun 1993-2003 adalah Singapura (AS\$ 3,24 milyar), Malaysia (AS\$ 2,97 milyar), China (AS\$ 1,79 milyar), Jepang (AS\$ 1,56 milyar), dan Hongkong (AS\$ 0,84 milyar). Berdasarkan rata-rata nilai ekspor selama rentang 10 tahun itu, negara yang paling banyak mengimpor adalah Kamboja (AS\$ 2,19 juta), China (AS\$ 1,86 juta), Singapura (AS\$ 0,96 juta), Malaysia (AS\$ 0,91 juta), dan Jepang (AS\$ 0,64 juta). Sedangkan apabila dilihat dari ragam produk pertanian yang diekspor secara kumulatif, negara yang mengimpor jenis terbanyak adalah Singapura (3.391 jenis), Malaysia (3.266 jenis), Jepang (2.431 jenis), Hongkong (2.107 jenis), dan China (957 jenis). Oleh karena itu, jelaslah terlihat adanya korelasi positif antara kekonsistenan mengimpor suatu negara dengan jenis produk yang tetap, yaitu: kekonsistenan mengimpor dalam jangka waktu yang teratur dan jenis produk yang tetap memberikan nilai kumulatif ekspor Indonesia yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memelihara kekonsistenan pasokan tersebut, melalui kebijakan perdagangan dan ekonomi yang konsisten pula. Apabila hal ini terganggu, prospek ekspor pertanian akan terganggu pula.

Tampaklah juga bahwa di dalam skema liberalisasi AFTA (berlaku sejak 1 Januari 2003 dan dipercepat menjadi 1 Januari 2002), hanya Malaysia dan Singapura di kawasan ASEAN yang memberikan arti penting bagi perekonomian Indonesia, sedangkan di luar ASEAN yang mungkin adalah Jepang dan Hongkong.

Dinamika perkembangan nilai ekspor Indonesia dapat disarikan sebagai berikut: pada tahun 1993 nilai ekspor Indonesia terbesar adalah ke negara Singapura (30,31%), Malaysia (22,25%), dan Jepang (18,7%), tahun 1996: Singapura (23,41%), Malaysia (18,42%), dan Jepang (18,21%), tahun 1997: Singapura (21,57%), China (18,38%), dan Malaysia (17,72%), tahun 1998: Malaysia (27,63%), Singapura (24,98%), dan Jepang (12,68%), tahun 1999: Singapura (26,85%), Malaysia (20,35%), dan China (13,94%), tahun 2000: Singapura (27,91%), Malaysia (19,84%), dan China (13,11%), tahun 2001: Singapura (27,07%), Malaysia (21,49%), dan China (12,18%), tahun 2002: Singapura (26,17%), Malaysia (24,74%), dan China (14,06%), dan tahun 2003: Malaysia (28,67%), China (20,97%), dan Singapura (19,39%). Urutan ke empat dan ke lima adalah Jepang dan Hongkong.

Berbagai negara tujuan di kawasan ASEAN yang diurut berdasarkan rataan pangsa nilai ekspor Indonesia dari yang terbesar ke yang terkecil adalah Singapura (25,29%), Malaysia (22,35%), Thailand (3,48%), Filipina (2,89%), Vietnam (2,47%), dan Myanmar (2,32%); sedangkan di luar kawasan ASEAN adalah China (12,76%) Jepang (12,56%), Hongkong (6,37%), Korea Selatan (5,68%), dan Kamboja (3,15%). Tampaklah juga bahwa secara rataan perdagangan dengan Singapura dan Malaysia memberikan arti penting bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, kekonsistenan kebijakan di dalam negeri sangat diperlukan di dalam merumuskan pola perdagangan bilateral di kawasan ASEAN. Mitra dagang Indonesia di luar ASEAN yang konsisten dan mempunyai potensi tinggi adalah China dan terutama Jepang.

Komoditas atau kelompok produk pertanian yang diekspor oleh Indonesia beragam dan spesifik, tergantung kepada negara tujuan (Tabel 15, Tabel 16, dan Tabel 17). Terlihat pada tabel-tabel itu banyaknya jenis produk (komoditas) yang diekspor ke masing-masing negara di Asia, sehingga rataan pangasanya tidak ada yang melebihi 75 persen. Pangsa tertinggi ditempati oleh minyak kelapa, yaitu sebesar 71 persen tahun 1997. Khusus untuk ASEAN, komoditas yang paling banyak dieskpor oleh Indonesia dan mempunyai *trend* yang meningkat adalah babi hidup (25,11%), dan minyak sawit (51,29%) untuk tujuan Singapura. Di luar ASEAN, kelompok produk yang mempunyai pangsa terbesar dan cenderung meningkat setiap tahun adalah minyak kelapa (termasuk minyak kopra) dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,5 persen per tahun dengan tujuan China. Hal ini merupakan potensi dan peluang yang dapat digunakan Indonesia untuk terus meningkatkan produksi kelapa dalam negeri (dari hulu hingga hilir), sehingga dengan demikian ekspor minyak kelapa ke China juga akan semakin meningkat di masa mendatang, mengingat besarnya dan meningkatnya kebutuhan konsumsi dan industri pengolahan di China sejalan dengan perkembangan ekonominya. Namun, hal yang penting juga diantisipasi adalah mengenai daya saing minyak kelapa domestik ini dan kemungkinan penurunan harganya di pasar global dengan diliberalisasikannya perdagangan bilateral Indonesia dan China.

Komoditas yang cenderung menurun nilai eksportnya adalah biji kakao (12% per tahun), lada (0,1% per tahun), dan cerutu (6,13% per tahun). Penurunan nilai ekspor biji kakao ini terkait dengan adanya diskriminasi tarif bea masuk/BM produk sejenis yang diekspor Malaysia ke China khususnya, dan negara ASEAN pada umumnya. Hal tersebut terjadi karena biji kakao Indonesia belum masuk dalam agenda *Early Harvest Package* (EHP) ASEAN maupun EHP ASEAN dengan China, sementara untuk biji kakao dari Malaysia telah dimasukkan dalam kedua EHP tersebut. Bahkan Malaysia lebih banyak mengimpor biji kakao segar dari Indonesia dan kemudian mengolah serta mengekspor hasil olahannya ke negara-negara yang selama ini menjadi pasar ekspor Indonesia. Ini memang merupakan hadiah dari kelebihan inovasi dan intuisi pengusaha dan industriawan Malaysia yang mampu melihat dan memanfaatkan

adanya peluang upaya dalam peta perdagangan antar berbagai negara yang kompleks. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian bagi petani, pengusaha dan industriawan kakao di dalam negeri. Tidak itu saja, secara tidak langsung negara juga akan dirugikan karena penerimaan dari pajak akan berkurang dan pertumbuhan serta perputaran roda ekonomi akan terhambat. Untuk itu, semua pemangku kepentingan pada komoditas ini harus sepakat menghasilkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan masyarakat dalam negeri.

Tabel 15. Tiga Komoditas Pertanian Ekspor Indonesia ke Berbagai Negara Tujuan dengan Pangsa Terbesar Tahun 1993, 1996-1997 (%)

Tujuan Ekspor	1993	1996	1997
ASEAN:			
Singapura	Lada (8,19)	Biji kakao (19,37)	Lada (23,31)
	Cerutu (7,91)	Lada (12,08)	Kelapa (7,64)
	Babi hidup (6,10)	Minyak klp sawit (5,90)	Minyak klp sawit (5,94)
Malaysia	Minyak kelapa (47,95)	Minyak kelapa (33,92)	Minyak kelapa (46,29)
	Cerutu (13,65)	Cerutu (20,35)	Cerutu (14,80)
AFTA +3:			
China	Minyak kelapa (30,66)	Minyak kelapa (39,60)	Minyak kelapa (71,51)
	Minyak nabati (28,14)	Pisang segar (10,20)	Minyak kopra (4,94)
Jepang	Kopi (38,52)	Kopi (48,51)	Kopi (51,05)
	Alkohol asiklik(6,13)	Alkohol asiklik(3,91)	Alkohol asiklik(8,99)
Hongkong	Produk lain dari hewan (21,76)	Produk lain dari hewan (17,05)	Produk lain dari hewan (32,02)
	Kembang gula (6,34)	Kembang gula (10,62)	Kembang gula (30,15)

Sumber: Data Ekspor Indonesia berbagai tahun, BPS (diolah)

Tabel 16. Tiga Komoditas Pertanian Ekspor Indonesia ke Berbagai Negara Tujuan dengan Pangsa Terbesar Tahun 1998-2000 (%)

Tujuan Ekspor	1998	1999	2000
ASEAN:			
Singapura	Biji kakao (24,81)	Lada (28,47)	Lada (19,03)
	Lada (22,21)	Biji kakao (11,58)	Minyak klp sawit (18,66)
	Minyak atsiri (6,97)	Minyak klp sawit (7,04)	
Malaysia	Minyak kelapa (32,05)	Minyak kelapa (25,96)	Cerutu (22,72)
	Jagung (10,93)	Cerutu (16,45)	Minyak kopra (16,91)
AFTA +3:			
China	Minyak kelapa (53,06)	Minyak kelapa (58,24)	Minyak kelapa (61,16)
	Biji kakao (10,59)	Ubi kayu (6,63)	Minyak kopra (8,)
Jepang	Kopi (58,30)	Kopi (51,58)	Kopi (42,95)
	Alkohol asiklik(6,84)	Etil Alkohol (7,16)	Alkohol asiklik (9,90)
Hongkong	Produk lain dari hewan (42,68)	Produk lain dari hewan (24,60)	Produk lain dari hewan (26,90)
	Kembang gula (25,58)	Kembang gula (5,81)	Minyak nabati (14,45)

Sumber: Data Ekspor Indonesia berbagai tahun, BPS (diolah)

Tabel 17. Tiga Komoditas Pertanian Ekspor Indonesia ke Berbagai Negara Tujuan dengan Pangsa Terbesar Tahun 2001-2003 (%)

Tujuan Ekspor	2001	2002	2003
<b>ASEAN:</b>			
Singapura	Minyak kelapa (19,21)	Minyak klp sawit (25,52)	Minyak klp sawit (30,08)
	Lada (11,68)	Biji kakao (12,50)	Biji kakao (12,77)
Malaysia	Biji kakao (25,48)	Minyak kelapa (25,82)	Biji kakao (35,62)
	Cerutu (20,36)	Minyak kopra (10,04)	Minyak kelapa (24,89)
<b>AFTA +3:</b>			
China	Minyak kelapa (71,51)	Minyak kelapa (53,06)	Minyak kelapa (53,06)
	Minyak kopra (4,94)	Biji kakao (10,59)	Biji kakao (10,59)
Jepang	Kopi (36,48)	Kopi (33,12)	Kopi (33,46)
	Alkohol asiklik(10,18)	Sekam (10,99)	Alkohol asiklik (8,39)
Hongkong	Produk lain dari hewar (26,97)	Minyak klp sawit (24,17)	Produk lain dari hewar (27,57)
	Minyak nabati (11,73)	Produk lain dari hewar (22,51)	Minyak nabati (20,05)

Sumber: Data Ekspor Indonesia berbagai tahun, BPS (diolah)

Hal yang menarik juga dicatat adalah terjadinya ekspor minyak kelapa sawit (dengan fraksinya) selama 6 tahun berturut-turut (1993-1998) dan tahun 2003 dan jagung tahun 2003 ke Malaysia dan merupakan produk yang memiliki pangsa yang besar dalam nilai ekspor, tetapi keberlanjutannya agaknya tidak terjamin. Sepanjang produksi domestik minyak sawit dan jagung ini dibutuhkan oleh konsumen (rumah tangga dan industri) domestik dan lebih menguntungkan bagi perekonomian nasional, fenomena ini tentu diharapkan. Namun, kalau hal ini terjadi karena kekurangan pasokan dari produksi dalam negeri, langkah-langkah perbaikannya perlu dilakukan. Oleh karena itu, perdagangan ekspor minyak sawit ini perlu lebih dicermati dan daya saingnya ditingkatkan, mengingat Malaysia juga sebagai produsen utama kelapa sawit di dunia. Seperti telah disampaikan berbagai kalangan di berbagai fora, kekonsistenan kebijakan pengembangan produksi dan pengolahan serta perdagangan hasil pertanian mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian domestik.

Pola perdagangan ekspor Indonesia menurut komoditas ke ASEAN sejak tahun 1993 -2003 adalah hampir homogen. Komoditas yang paling besar nilai ekspornya berturut-turut adalah lada, biji kakao, cerutu, dan babi hidup dengan tujuan ekspor ke Singapura; minyak kelapa, cerutu, dan biji kakao ke Malaysia. Sedangkan untuk tujuan ke negara bukan-ASEAN, komoditas yang nilai ekspornya terbesar berturut-turut adalah kopi, etil alkohol, dan sekam (dedak) ke Jepang; minyak kelapa, pisang segar, dan biji kakao ke China; minyak nabati, produk lain yang dapat dimakan berasal dari hewan, dan kembang gula ke Hongkong. Khusus ekspor ke Hongkong, komoditasnya adalah produk olahan, sedangkan ke negara lain berimbang antara produk primer dan olahan.

Pangsa nilai ekspor kopi ke Jepang sepanjang tahun terus mengalami peningkatan, dari 38,53 persen tahun 1993 menjadi 51,05 persen tahun 1997 dan mencapai puncaknya sebesar 58,30 persen (*booming* akibat depresiasi nilai tukar rupiah), tetapi menurun pada tahun 1999 sampai 2003 menjadi 33,46 persen. Sebaliknya dengan pangsa nilai ekspor minyak kelapa ke China, di awal tahun 1993-1999 menempati urutan pertama, namun terus menurun hingga tahun 2003. Bentuk komoditas yang diekspor oleh Indonesia ke negara-negara ASEAN didominasi oleh produk primer, sedangkan ke luar ASEAN berbentuk primer dan olahan.

### **3.3. Kinerja Produksi Komoditas Pertanian yang Diperdagangkan**

Sejak tercapai kesepakatan perjanjian perdagangan bebas bilateral/PPBB dan kawasan atau regional/PKPB atau PPBR AFTA/AFTA Plus, beberapa produk pertanian yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia ada yang mengalami peningkatan kinerja, namun tidak sedikit juga yang mengalami penurunan kinerja dan bahkan menjadi defisit dalam neraca perdagangannya. Diantara tiga negara Asia Timur yang menjadi pasangan perdagangan bilateral Indonesia, masing-masing menunjukkan produk pertanian tertentu yang mendominasi perdagangan selama 1996–2003. Fluktuasi volume dan nilai serta dinamika kinerja perdagangan tidak selalu hanya dipengaruhi oleh nilai tukar dari kedua negara yang melakukan perdagangan. Faktor tersebut hanya merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi dinamika perdagangan luar negeri secara keseluruhan. Faktor internal yang lebih penting dan menentukan kinerja perdagangan adalah tersedianya pasokan bahan baku, khususnya produksi komoditas di dalam negeri. Untuk itu ada baiknya melihat pertumbuhan produksi produk pertanian yang mendominasi sepuluh besar dalam nilai ekspor–impor antara Indonesia dengan China, Jepang, dan Korea Selatan (Tabel 18).

Berdasarkan Tabel 18, tampak bahwa produk pertanian yang mengalami defisit memang kurang didukung oleh ketersediaan produksi domestik yang mencukupi. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhannya yang demikian kecil atau bahkan negatif. Sebagai contoh pertumbuhan produksi bawang putih, padi/beras, dan gula tebu. Kebutuhan konsumsi domestik ketiga produk tersebut masih harus dipenuhi dari impor karena ketiganya mengalami penurunan atau pertumbuhan produksinya tidak seimbang dengan pertumbuhan konsumsi selama periode 1996–2003. Pertumbuhan produksi tiga contoh produk pertanian yang mengalami defisit tersebut masing-masing sebesar 17,64 persen per tahun (bawang putih), 0,53 persen per tahun (padi/beras), dan 2,40 persen per tahun (gula tebu). Sebaliknya dengan produk pertanian yang mengalami surplus perdagangan, misalnya biji kakao, kelapa, dan minyak buah sawit ketiganya menunjukkan pertumbuhan yang positif selama periode 1996–2003, masing-masing sebesar 3,70 persen per tahun, 2,63 persen per tahun, dan 10,88 persen per tahun.

Tabel 18. Pertumbuhan Produksi dan Kondisi Perdagangan Bilateral Produk Pertanian Indonesia dengan China, Jepang, dan Korea Selatan, 1996-2003

Komoditas (Mt)	Pertumbuhan produksi (%/tahun)	Kondisi Perdagangan Bilateral dengan		
		China	Jepang	Korea Selatan
Bawang Merah	2,58	D	TT	TT
Bawang Putih	-17,64	D	TT	TT
Bayam	-2,78	TT	TT	TT
Biji Kakao	3,70	S	S	TT
Cengkeh	6,86	TT	TT	TT
Daging Ayam	4,56	TT	TT	TT
Daging Babi	-3,71	TT	D	TT
Daging Sapi	-2,44	TT	TT	TT
Daging Sapi dan Lembu	0,19	TT	TT	TT
Gula Tebu	-2,40	D	D	TT
Inti Sawit	11,82	S	D	S
Jagung	1,41	D	D	TT
Jahe	11,94	TT	D	TT
Jamur Mushroom	1,45	TT	D	TT
Jeruk	9,61	D	TT	TT
Kacang Tanah	0,99	D	D	TT
Kambing dan Domba	10,03	TT	TT	TT
Karet Alam	4,95	S	S	S
Kayu Manis	7,93	TT	TT	TT
Kedelai	-12,96	D	TT	TT
Kelapa	2,63	S	D	S
Kentang	-0,81	TT	TT	TT
Kopi	7,80	TT	D	S
Kubis	-4,51	TT	S	TT
Lada Putih dan Hitam	4,16	TT	D	TT
Mangga	8,69	TT	TT	TT
Mentimun	-3,19	TT	S	TT
Minyak Buah Sawit	10,88	S	TT	S
Minyak Sawit	10,81	S	D	S
Nanas	6,44	TT	TT	TT
Padi, Beras	0,53	D	S	TT
Panili	3,38	TT	D	TT
Pepaya	7,23	TT	TT	TT
Pisang	6,05	S	TT	TT
Teh	-0,32	TT	S	TT
Tembakau	0,41	D	S	TT
Terung	-2,75	TT	TT	TT
Tomat	1,81	TT	TT	TT
Ubi Jalar	-0,61	TT	TT	TT
Ubi Kayu	1,88	TT	S	S
Wortel	3,39	TT	TT	TT

Sumber: www. <http://faostat.fao.org/>, diolah (2005).

Keterangan: S = Surplus; D = Defisit; TT = Tidak termasuk sepuluh besar ekspor-impor

### 3.4. Simulasi Dampak Liberalisasi Perdagangan

Perdagangan bebas di kawasan ASEAN yang disebut dengan *ASEAN Free Trade Area/ AFTA* telah disetujui dalam KTT ASEAN di Singapura tahun 1992 dan telah berjalan sejak tahun 1993. Tujuan dari AFTA ini adalah untuk meningkatkan perdagangan intra ASEAN dan pendayagunaan secara bersama sumber daya dari masing-masing negara anggota ASEAN. Pada awalnya, target implementasi penuh AFTA adalah pada 1 Januari 2008 dengan cakupan hanya produk industri, namun pada saat sidang Menteri Ekonomi ASEAN tahun 1994, diputuskan untuk mempercepat implementasi penuh AFTA menjadi 1 Januari 2003 dengan cakupan termasuk produk hasil pertanian. Oleh karena itu, sejak tahun 1993 masing-masing negara anggota ASEAN telah membuat program penurunan tarif melalui penyampaian *Legal Enactment* yang dikeluarkan setiap tanggal 1 Januari. Di Indonesia, *Legal Enactment* tersebut berbentuk SK Menteri Keuangan tentang *Common Effective Preferential Tariff of AFTA/CEPT-AFTA*.

Skema penurunan tarif bea masuk dalam CEPT menegaskan bahwa semua tarif bea masuk untuk barang ekspor baik barang industri maupun produk olahan pertanian di dalam negara-negara anggota ASEAN sampai dengan tahun 2005 harus menjadi nol persen (CIE, 1997), kecuali untuk produk beras dan gula yang dikategorikan sebagai daftar sensitif tinggi atau *Highly Sensitive List/HSL*. Indonesia masih dapat menerapkan tarif yang berlaku bagi negara terbanyak (*Most Favorite Nations/MFN*) sampai tahun 2010. Oleh karena itu, dalam simulasi model ATPSM versi 3 (UNCTAD, 2005) dilakukan analisa perdagangan bebas antara Indonesia dengan ASEAN apabila tarif bea masuk sebesar nol persen diberlakukan.

Penerapan kawasan perdagangan bebas (KPB) atau *Free Trade Area/FTA* antara Indonesia dengan ASEAN disimulasi hanya kepada beberapa komoditas tertentu. Analisa ditujukan kepada komoditas utama (yang mempunyai pangsa ekspor terbesar) yang diekspor Indonesia ke negara ASEAN, yaitu komoditas kelapa (termasuk minyak kelapa), jagung dan cerutu (Tabel 14-Tabel 16). Selain ketiga komoditas tersebut, masih ada komoditas lada, minyak kelapa sawit, dan babi hidup yang juga mempunyai pangsa ekspor yang besar, namun tidak terdapat dalam model ATPSM versi 3. Khusus untuk komoditas minyak kelapa sawit tidak merupakan suatu komoditas khusus di dalam model ATPSM, tetapi menjadi salah satu dari sebelas komoditas dalam kelompok minyak biji-bijian (*oilseeds tropical*).

Apabila tarif bea masuk menjadi nol persen yang diterapkan pada tahun 2005 atas komoditas ekspor kelapa dan minyak kelapa dari Indonesia ke negara-negara ASEAN, maka produksi dalam negeri langsung menurun sebesar 3,39 persen (Tabel 19). Penurunan harga ekspor menyebabkan kurangnya kegairahan produsen untuk melakukan produksi kelapa dan minyak kelapa (termasuk minyak kelapa sawit) yang akhirnya menurunkan volume ekspor Indonesia atas komoditas yang bersangkutan dalam angka yang sangat besar, yaitu 91,42 persen dan

impor minyak dari biji-bijian akan meningkat sebesar 7 persen. Para pengambil kebijakan perdagangan harus secara cermat dan hati-hati di dalam merencanakan dan memutuskan perdagangan bebas dengan ASEAN, produsen kelapa dan minyak kelapa harus dilindungi. Potensi lahan dan produksi yang telah ada selama ini sebaiknya dilindungi, mengingat salah satu tujuan ekspor minyak kelapa Indonesia adalah Malaysia dan Singapura seperti yang telah disebut di atas yang memiliki jarak yang sangat dekat dengan Indonesia. Peningkatan mutu daya saing mutlak diperlukan.

Tabel 19. Dampak Liberalisasi Perdagangan Indonesia dengan ASEAN terhadap Produksi, Ekspor, dan Impor Indonesia

Komoditas	Perubahan		
	Produksi (%)	Ekspor (%)	Impor (%)
Kelapa dan Minyak kelapa ( <i>Oilseeds tropical</i> )	- 3,39	- 91,42	7,02
Biji kakao ( <i>Cocoa beans</i> )	0,11	0,65	8,42
Jagung ( <i>Maize</i> )	0,08	105	- 0,12
Cerutu ( <i>Tobacco processed</i> )	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Keterangan: dalam kurung adalah nama komoditas menurut ATPSM.

Pemberlakuan tarif bea masuk oleh negara-negara ASEAN atas produk ekspor biji kakao Indonesia sepertinya tidak banyak memberikan dampak negatif bagi kinerja produksi dan ekspor Indonesia. Perubahan yang berarti terjadi pada kenaikan impor komoditas biji kakao (sebesar 8,42 persen). Ternyata Indonesia selain mengekspor juga melakukan impor atas komoditas biji kakao. Hal yang sangat berbeda terjadi pada komoditas ekspor cerutu.

Penerapan perdagangan bebas tidak memberikan arti penting bagi kinerja perdagangan Indonesia yang ditunjukkan oleh angka nol baik untuk produksi, ekspor maupun impor. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu terlalu berambisi untuk melakukan liberalisasi atas komoditas biji kakao. Seperti yang telah dijelaskan di muka, Indonesia menghadapi masalah yang serius dengan Malaysia, dimana Malaysia mengimpor biji kakao segar dari Indonesia kemudian mengolah dan mengekspornya ke negara-negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. Perbaikan teknologi dan inovasi bagi pengusaha biji kakao sangat mendesak diperlukan, agar upaya biji kakao Indonesia tetap ada di pasar ASEAN.

Perubahan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan negara-negara ASEAN akibat pemberlakuan perdagangan bebas antara Indonesia dan ASEAN ditunjukkan oleh Tabel 20. Hasil analisa simulasi ditujukan kepada komoditas pertanian secara agregat. Penerapan liberalisasi ini

memberikan keuntungan bagi konsumen dan kerugian bagi produsen di seluruh negara anggota ASEAN, namun secara total memberikan dampak positif bagi semuanya. Bagi Indonesia, kebijakan ini lebih berfihak kepada konsumen karena mendatangkan keuntungan sebesar 1,06 milyar dolar AS, dan kerugian bagi produsen sebesar 762 juta dolar AS. Keuntungan yang diperoleh konsumen lebih besar daripada kerugian yang dialami oleh produsen dalam negeri. Apabila pemerintah ingin melindungi produsen dalam negeri atas produk pertanian yang diekspor, sebaiknya selektif dalam menentukan komoditas yang diikutsertakan dalam skema penurunan tarif. Dari seluruh negara anggota ASEAN dampak yang paling besar diperoleh Filipina, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya sebesar 155,58 juta dolar AS.

Singapura merupakan negara tujuan ekspor Indonesia yang sangat potensial di lingkungan ASEAN selain Malaysia, namun ATPSM belum memasukkan Singapura sebagai salah satu negara cakupan di dalam model simulasinya. Sangat disayangkan, dalam analisa ini Tim Peneliti tidak dapat melihat lebih jauh dampak liberalisasi ini terhadap perekonomian mitra dagang utama kita tersebut.

Tabel 20. Dampak Liberalisasi Perdagangan Indonesia dengan ASEAN terhadap Perubahan Kesejahteraan (dalam AS \$ Juta)

Negara	Surplus Konsumen	Surplus Produsen	Kesejahteraan Total
Indonesia	1.062,88	- 762,43	72,60
Malaysia	641,27	- 88,86	76,80
Brunei	23,53	- 7,09	2,38
Darussalam			
Filipina	1.815,00	-1.329,18	155,58
Laos	58,70	- 44,76	8,75
Vietnam	449,99	- 400,97	42,14
Thailand	883,38	- 577,20	82,02
Myanmar	790,68	- 625,21	152,33

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa agar dapat bersaing di pasar global maka suatu negara harus membuka pasarnya. Pendapat ini banyak yang mendukung dan banyak pula yang menentangnya, tergantung kepada tujuan perdagangan dari suatu negara. Tidak selamanya perdagangan bebas tersebut mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, ada negara yang menutup diri dan melindungi produk domestiknya dapat maju dalam perdagangan. Untuk ini dibutuhkan suatu analisa yang komprehensif di dalam menentukan strategi perdagangan.

Apabila KPB antara Indonesia dengan ASEAN termasuk ketiga negara (AFTA+3) dilakukan secara sekaligus, maka dampaknya (dalam arah dan besaran) akan sama baik kepada produsen, konsumen maupun semua masyarakat untuk semua negara (Tabel 21). Kebijakan ini kurang efektif bagi Indonesia, karena mendatangkan kerugian bagi kesejahteraan

masyarakat, demikian juga halnya dengan China. Liberalisasi ini hanya menguntungkan kepada negara Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea Selatan, dan tidak berarti sama sekali kepada negara Laos, Thailand, dan Myanmar.

Tabel 21. Dampak KPB Indonesia dengan ASEAN/AFTA+3 terhadap Distribusi Kesejahteraan Indonesia dan Mitra Dagang (dalam AS\$)

Negara	Surplus Konsumen	Surplus Produsen	Kesejahteraan Total
<b>Indonesia</b>	-7.632,00	-7.632,00	-7.632,00
Malaysia	237,00	237,00	237,00
Brunei Darussalam	6.812,13	6.812,13	6.812,13
Filipina	0,82	0,82	0,82
Laos	0,00	0,00	0,00
Vietnam	0,44	0,44	0,44
Thailand	0,00	0,00	0,00
Myanmar	0,00	0,00	0,00
<b>Jepang</b>	64.880,07	64.880,07	64.880,07
<b>China</b>	-19.746.115	-19.746.115	-19.746.115
<b>Korea Selatan</b>	318.931	318.931	318.931

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Sama seperti hasil simulasi sebelumnya, penerapan KPB Indonesia/ASEAN dengan hanya China saja berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara total baik bagi negara-negara yang terkait (Tabel 22). Demikian juga bagi konsumen produk pertanian di China, mendapatkan manfaat seperti ditandai dengan surplus konsumen yang bertanda positif. Penurunan tarif bea masuk ke China menyebabkan harga yang diterima oleh konsumen di China menjadi lebih murah. Sebaliknya, produsen-produsen di sebagian besar negara dirugikan kecuali Malaysia. Kerugian yang dialami oleh produsen masih lebih rendah daripada keuntungan yang diterima oleh konsumen.

Tabel 22. Dampak KPB Indonesia/ASEAN dengan China terhadap Distribusi Kesejahteraan Indonesia dan Mitra Dagang (dalam Juta AS\$)

Negara	Surplus Konsumen	Surplus Produsen	Kesejahteraan Total
<b>Indonesia</b>	682,28	- 436,77	17,67
Malaysia	504,11	77,30	105,80
Brunei Darussalam	21,89	- 6,76	1,08
Filipina	1.591,00	- 1.118,26	142,49
Laos	49,67	- 36,43	1,89
Vietnam	282,96	- 236,83	8,06
Thailand	626,27	- 312,54	89,58
Myanmar	712,98	- 550,75	149,09
<b>China</b>	30.685,61	- 23.795,16	2.468,49

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Penerapan KPB antara Indonesia termasuk ASEAN dengan hanya Jepang saja, secara keseluruhan berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik bagi negara pengimpor (Jepang) maupun bagi pengeksport (Indonesia/ASEAN). Kebijakan ini juga meningkatkan surplus konsumen di negara pengeksport, tetapi berdampak negatif bagi konsumen di Jepang (Tabel 23). Penghapusan tarif bea masuk ke Jepang menyebabkan harga ekspor Indonesia dan negara ASEAN menjadi lebih murah, sehingga berdampak buruk bagi produsen di Indonesia dengan menurunnya surplus produsen sebesar 762,43 juta dolar AS. Apabila Indonesia ingin melindungi produsen petani di dalam negeri, maka kebijakan ini tidak menjadi pilihan. Negara yang paling dirugikan dengan kebijakan ini adalah Filipina dan yang mengalami kerugian paling sedikit adalah negara Brunei Darussalam. Besarnya dampak KPB Indonesia/ASEAN dengan China lebih kecil daripada dampak KPB Indonesia/ASEAN dengan Jepang, baik dilihat dari surplus konsumen atau surplus produsen, tetapi dari kesejahteraan total hasilnya berbeda beda tergantung pada negara mitranya. Misalnya, untuk Indonesia kesejahteraan totalnya lebih rendah, tetapi untuk Malaysia lebih besar.

Tabel 23. Dampak KPB Indonesia/ASEAN dengan Jepang terhadap Distribusi Kesejahteraan Indonesia dan Mitra Dagang (dalam Juta AS\$)

Negara	Surplus Konsumen	Surplus Produsen	Kesejahteraan Total
<b>Indonesia</b>	1.062,87	- 762,43	72,60
Malaysia	641,27	- 88,86	76,80
Brunei Darussalam	23,53	- 7,09	2,37
Filipina	1.815,01	- 1.329,18	155,58
Laos	58,70	- 44,76	8,75
Vietnam	449,99	- 400,96	42,14
Thailand	883,38	- 577,20	82,02
Myanmar	790,68	- 625,21	152,32
<b>Jepang</b>	-120,74	76,32	58,66

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Apabila perdagangan bebas tanpa tarif (tarif menjadi nol persen) diterapkan antara Indonesia dan ASEAN dengan Korea Selatan menyebabkan harga ekspor dari negara ASEAN termasuk Indonesia menjadi lebih murah di negara pengimpor sehingga merugikan produsen karena berkurangnya insentif harga di dalam melakukan produksi dan memberikan keuntungan bagi konsumen karena membeli dengan harga yang lebih murah (Tabel 24). Bagi Indonesia, keuntungan yang diterima konsumen masih lebih besar daripada kerugian yang dialami produsen,

sehingga secara total masih memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Tabel 24. Dampak KPB Indonesia/ASEAN dengan Korea Selatan terhadap Distribusi Kesejahteraan Indonesia dan Mitra Dagang (dalam Juta AS\$)

Negara	Surplus Konsumen	Surplus Produsen	Kesejahteraan Total
<b>Indonesia</b>	1.045,87	- 747,28	70,74
Malaysia	633,77	- 82,35	75,80
Brunei Darussalam	23,43	- 7,06	2,30
Filipina	1.797,78	- 1.313,78	153,76
Laos	58,17	- 44,32	8,66
Vietnam	443,08	- 394,63	41,47
Thailand	868,75	- 561,53	83,06
Myanmar	788,52	- 623,37	152,01
<b>Korea Selatan</b>	4.270,12	- 1.110,32	1.595,53

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Kehilangan surplus-surplus pada berbagai skenario di atas yang dialami oleh produsen Indonesia tersebut bila tidak diantisipasi secara cepat akan menimbulkan kurangnya kegairahan produsen/petani melakukan upaya taninya. Bahkan sangat mungkin terjadi apabila penataan atau revitalisasi pertanian tidak dilakukan, posisi sektor pertanian Indonesia sebagai pengekspor di pasar dunia akan semakin tersisih. Beberapa pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia telah melakukan upaya perbaikan struktur dan infrastruktur pertanian dan bantuan-bantuan lainnya untuk melindungi dan meningkatkan daya saing produsen/petani. Misalnya, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan atas komoditas jeruk siam Banjar yang merupakan komoditas unggulan nasional sejak tahun 1998.

Dari pengamatan Tim Peneliti di lapangan pertengahan Mei 2005 yang lalu, program Pemda dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas jeruk siam Banjar yang dituangkan dalam SK Bupati Barito Kuala (Batola) No. 359 tahun 2003 telah berjalan. SK tersebut menetapkan daerah penghasil jeruk siam Banjar sebagai Kawasan Rintisan Agropolitan Padi Berbasis Jeruk. Langkah kongkrit dari SK tersebut diperjelas dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang berisi rencana operasional perlindungan jeruk siam Banjar. Di dalam juklak tersebut dikemukakan bahwa Pemda membantu petani untuk hal-hal sebagai berikut: (a) Meningkatkan pemberian fasilitas perbenihan mulai dari sub sistem produksi/penyediaan, sertifikasi dan pengawasan sampai

kepada sub sistem distribusi dan penggunaan benih bermutu dengan lebih memberdayakan seluruh pelaku/kelembagaan perbenihan; (b) Melakukan penilaian intensif dalam rangka peningkatan penerapan teknologi produksi yang baik melalui: sosialisasi penerapan praktek budidaya jeruk yang baik atau *Good Farming Practices*/GFP dan asistensi dan monitoring kegiatan pra tanam, pascatanam sampai dengan panen dan pascapanen; (c) Meningkatkan kegiatan fasilitasi untuk mempermudah petani mengakses permodalan melalui: sosialisasi dan apresiasi peluang dan cara mendapatkan modal, temu upaya, asistensi, dan monitoring kegiatan: upaya pemupukan modal kelompok, pengelolaan BLM dan BPLM (Bantuan Pinjaman langsung Masyarakat), penyerapan KKP maupun kredit UKM, dan penyerapan modal upaya dari lembaga keuangan bukan-Bank/Kemitraan; dan (d) Revitalisasi penyuluhan, melalui langkah-langkah: lokakarya sistem penyuluhan, sosialisasi dan apresiasi hasil lokakarya, pelatihan tenaga penyuluh, dan asistensi dan monitoring pelaksanaan penyuluhan.

Hasil uji hipotesa yang menyimpulkan bahwa perdagangan produk pertanian Indonesia baik di kawasan maupun di luar kawasan ASEAN tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Hasil dugaan regresi gravitas adalah:

$$\begin{aligned} \text{Neks} = & (0,04) * \text{ASEAN} + (0,01) * \text{PDBKapLain} + (0,16) * \text{PopLain} + \\ & 0,50 \qquad \qquad \qquad (1,00) \qquad \qquad \qquad (9,85^{***}) \\ & (1,80) * \text{PopInd} + (-0,01) * \text{Jarak} \\ & (14,31^{***}) \qquad \qquad \qquad (-0,88) \end{aligned}$$

Catatan: Neks adalah nilai ekspor pertanian Indonesia; ASEAN adalah peubah boneka untuk negara anggota ASEAN; PDBKapLain adalah PDB negara tujuan ekspor per kapita harga tetap; PopLain dan PopInd adalah populasi negara tujuan ekspor dan Indonesia; Jarak adalah jarak antar ibukota negara.

Semua koefisien menunjukkan tanda yang sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hanya koefisien populasi yang menunjukkan tanda yang nyata secara statistik. Koefisien-koefisien yang nyata secara statistik menunjukkan bahwa dengan peningkatan populasi negara tujuan sebesar 1 persen, nilai ekspor pertanian Indonesia akan meningkat sebesar 0.16 persen dan peningkatan populasi Indonesia sebesar 1 persen akan menyebabkan peningkatan nilai ekspor produk pertanian Indonesia sebesar 1.80 persen. Jelaslah dari hasil ini, faktor pendorong ekspor pertanian Indonesia saat ini masih didominasi oleh populasi, baik di Indonesia maupun di negara tujuan. Apakah hal ini berimplikasi bahwa untuk meningkatkan nilai ekspor produk pertanian domestik, populasi harus ditingkatkan?. Belum tentu!. Untuk itu masih perlu dilakukan kajian lebih komprehensif lagi.

Uji hipotesa (2) memberikan hasil sebagai berikut:

$$\text{Neks} = (-0,08) * \text{ASEAN} + (-0,36) * \text{AFTA} + (0,33) * (\text{ASEAN} * \text{AFTA}) + \\ (-0,89) \qquad \qquad (-5,51^{***}) \qquad \qquad (3,75^{***})$$

$$(0,01) * \text{PDBKapLain} + (0,17) * \text{PopLain} + \\ (0,96) \qquad \qquad (10,19^{***})$$

$$(1,87) * \text{PopInd} + (-0,05) * \text{Jarak} \\ (14,76^{***}) \qquad \qquad (-0,58)$$

Catatan: Neks, PDBKapLain, PopLain, PopInd, dan Jarak adalah peubah yang telah didefinisikan sebelumnya; ASEAN adalah peubah boneka untuk anggota ASEAN bernilai 1 dan bukan ASEAN bernilai 0; dan AFTA adalah peubah boneka untuk AFTA sejak tahun 2002 bernilai 1 dan 0 untuk tahun-tahun sebelumnya.

Sama seperti hasil sebelumnya, tanda-tanda koefisien sesuai dengan yang diharapkan dan peubah populasi sangat nyata dan peubah boneka ASEAN dan jarak tidak nyata secara statistik. Namun, yang menarik adalah tanda dan koefisien peubah boneka AFTA dan kombinasinya dengan peubah boneka ASEAN yang kedua-duanya sangat nyata. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dengan berlakunya kesepakatan AFTA nilai ekspor produk pertanian Indonesia lebih rendah dari sebelum adanya kesepakatan itu tetapi nilai ekspor sejak AFTA di kawasan ASEAN meningkat dibandingkan dari waktu sebelumnya atau waktu sejak AFTA tetapi di luar kawasan ASEAN.

Sebagai pengembangan hipotesa (2), selanjutnya menarik pula melihat perkembangan ekspor produk pertanian Indonesia di kawasan ASEAN sejak berlakunya kesepakatan AFTA. Regresi gravitas memberikan hasil berikut:

$$\text{Neks} = (-0,05) * \text{AFTA} + (-0,10) * \text{PDBKapLain} + (0,16) * \text{PopLain} + \\ (-0,87) \qquad \qquad (-3,25^{***}) \qquad \qquad (5,99^{***})$$

$$(2,84) * \text{PopInd} + (-0,64) * \text{Jarak} \\ (11,47^{***}) \qquad \qquad (-4,29^{***})$$

Catatan: Neks, PDBKapLain, PopLain, PopInd, Jarak, dan AFTA adalah peubah yang telah didefinisikan sebelumnya.

Hasil ini menunjukkan pengamatan yang menarik, yaitu koefisien peubah boneka AFTA dan PDBKapLain bertanda negatif dan koefisien PDBKapLain dan Jarak sangat nyata secara statistik. Implikasi dari tanda peubah boneka AFTA yang negatif telah disinggung pada uraian sebelumnya, meskipun untuk kasus ini tidak nyata secara statistik. Tetapi implikasi tanda negatif peubah PDBKapLain tidak lain tidak bukan adalah bahwa peningkatan pendapatan per kapita di negara-negara

ASEAN menyebabkan nilai ekspor pertanian Indonesia menurun. Hal ini tidak bertentangan dengan hasil-hasil sebelumnya, apalagi mengingat batasan waktu yang telah diberikan, yaitu sejak tahun 2002. Artinya, sejak tahun 2002 dengan peningkatan pendapatan per kapita di negara anggota ASEAN sebesar 1 persen menyebabkan nilai ekspor produk pertanian Indonesia menurun sebesar 0.097 persen. Jadi, meskipun *trend* nilai ekspor pertanian ke kawasan ASEAN meningkat sejak 1993-2003, tetapi sejak tahun 2002 peningkatan pendapatan di kawasan ini mendorong nilai ekspor pertanian untuk turun. Hal ini perlu dicermati dan untuk itu diperlukan lebih banyak data dan informasi lagi.

Pengembangan hipotesa (2) berikutnya adalah melihat perkembangan ekspor produk pertanian Indonesia ke kawasan Asia Timur (secara agregat), dan ke masing-masing negara penting seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Hasil regresi gravitasi berturut-turut adalah sebagai berikut:

*Ekspor Produk Pertanian ke Asia Timur:*

$$\begin{aligned} \text{Neks} = & (-0,29) * \text{AFTA} + (-0,01) * \text{PDBKapLain} + (0,07) * \text{PopLain} + \\ & (-4,34^{***}) \quad (-0,25) \quad (2,38^{**}) \\ & (0,59) * \text{PopInd} + (0,83) * \text{Jarak} \\ & (1,28) \quad (2,58^{***}) \end{aligned}$$

*Ekspor Produk Pertanian ke China:*

$$\begin{aligned} \text{Neks} = & (0,57) * \text{AFTA} + (-2,46) * \text{PDBKapLain} + (7,42) * \text{PopLain} + \\ & (1,85) \quad (-1,46) \quad (0,88) \\ & (-4,23) * \text{PopInd} \\ & (-0,32) \end{aligned}$$

*Ekspor Produk Pertanian ke Jepang:*

$$\begin{aligned} \text{Neks} = & (0,14) * \text{AFTA} + (16,03) * \text{PDBKapLain} + (-22,28) * \text{PopLain} + \\ & (0,88) \quad (3,17^{***}) \quad (-2,00^{**}) \\ & (-2,80) * \text{PopInd} \\ & (-0,90) \end{aligned}$$

*Ekspor Produk Pertanian ke Korea Selatan:*

$$\begin{aligned} \text{Neks} = & (-0,39) * \text{AFTA} + (-2,65) * \text{PDBKapLain} + (26,93) * \text{PopLain} + \\ & (-2,35^{**}) \quad (-1,56) \quad (1,67) \\ & (-12,84) * \text{PopInd} \\ & (-1,15) \end{aligned}$$

Hasil-hasil di atas menunjukkan bahwa ekspor produk pertanian Indonesia ke Asia Timur secara agregat dan ke Korea Selatan justru menurun secara mencolok setelah diberlakukannya AFTA, tetapi tidak ke China dan Jepang. Bahkan peningkatan pendapatan di Korea Selatan menyebabkan penurunan impor produk pertaniannya dari Indonesia, sebaliknya dengan Jepang. Namun, pertumbuhan populasi di Jepang menyebabkan penurunan impor mereka dari Indonesia. Jadi, ekspor produk pertanian ke China dan Jepang meningkat setelah berlangsungnya AFTA, dan dari peningkatan pendapatan di wilayah ini Jepang menunjukkan prospek yang baik dalam peningkatan impor, sementara China dan Korea Selatan tidak potensial. Sebaliknya dari pertumbuhan populasi, China dan Korea Selatan menunjukkan prospek pasar ekspor yang baik, sementara Jepang tidak. Pertumbuhan populasi di Jepang memang sangat rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Asia.

Dari perkembangan nilai ekspor Indonesia ke negara-negara Asia sepanjang tahun dapat diketahui bahwa nilai ekspor dari tahun 1999-2002 lebih rendah secara nyata dibanding tahun-tahun lainnya. Sementara dari perkembangan tujuan ekspor diperoleh bahwa nilai ekspor ke Korea (Utara dan Selatan), Mongolia, Macao, Myanmar, dan Brunei Darussalam lebih tinggi secara nyata dibanding dengan negara lain. Sebaliknya nilai ekspor ke China, Thailand, Singapura, Filipina, dan Malaysia lebih rendah dan nyata dibanding dengan negara lain. Namun, peningkatan produk domestik bruto per kapita Indonesia dan negara tujuan (harga tetap) ternyata tidak banyak meningkatkan nilai ekspor pertanian Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan volume ekspor ke berbagai negara di Asia tersebut, perlu dijajaki pasar-pasar potensial yang saat ini masih belum berkembang seperti Korea (Utara dan Selatan), Mongolia, Macao, dan Brunei Darussalam.

## IV. PERDAGANGAN MULTILATERAL

### 4.1. Kerangka Analisis

Upaya ke arah liberalisasi perdagangan yang berjalan saat ini terjadi melalui paling sedikit dua mekanisme, yaitu pendekatan multilateral dan pendekatan kawasan. Ada yang berpendapat bahwa upaya pertama dapat terwujud melalui beberapa tahapan setelah upaya yang pertama tercapai. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pendekatan yang ke dua tidak mungkin mendukung upaya yang pertama atau bahkan mengalihkan tujuan yang pertama.

Seperti diketahui upaya multilateral telah berjalan dalam waktu yang sangat panjang melalui berbagai tahapan perundingan internasional. Tujuan perundingan internasional ini adalah menurunkan tarif dan hambatan bukan-tarif perdagangan komoditas internasional. Terhitung sejak tahun 1945 telah terjadi delapan (8) kali perjanjian perdagangan multilateral. Lima perjanjian pertama serupa dengan negosiasi bilateral sejajar, dimana suatu negara bernegosiasi dengan sejumlah negara mitranya sekaligus secara berpasangan. Misalnya, apabila Jerman menawarkan pemotongan tarif yang menguntungkan Perancis dan Italia, Jerman dapat meminta kedua negara tersebut melakukan hal yang sama.

Perundingan yang ke enam yang disebut Putaran Kennedy berakhir tahun 1967, yang menghasilkan penurunan tarif 50 persen untuk semua pos tarif bagi negara industri utama kecuali bagi negara-negara yang tarifnya tidak berubah. Dalam penutupannya, putaran ini berhasil menurunkan tarif rata-rata sebesar 35 persen (Krugman dan Obstfeld, 2000). Putaran Tokyo, perundingan ke tujuh, yang berlangsung dalam kerangka kerja *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) diakhiri pada April 1979, menurunkan tarif dengan suatu rumus yang lebih rumit dari rumus yang digunakan dalam Putaran Kennedy berdasarkan kelompok komoditas yang luas bukan atas pertimbangan produk-per-produk. Pada putaran ini pemotongan tarif yang disepakati mencapai 31 persen untuk Amerika Serikat (AS), 27 persen untuk Uni Eropa (UE), 28 persen untuk Jepang, dan 34 persen untuk Kanada (Chacoliades, 1990). Tetapi kebanyakan pemotongan ini berlangsung delapan tahun sejak Januari 1980. Selanjutnya, putaran ini berhasil membuat suatu aturan untuk mengawasi semakin berkembangnya hambatan bukan-tarif, seperti pengekangan ekspor sukarela dan persetujuan badan pemasaran. Akhirnya pada tahun 1994, perundingan ke delapan yang disebut Putaran Uruguay berhasil menelurkan beberapa perjanjian, seperti Perjanjian Pertanian (PP) atau *the Agreement on Agriculture* (AoA).

Pada saat ini tarif impor (*applied*) yang berlaku di Indonesia adalah besaran-besaran yang diusulkan dalam *LOI* (*Letter of Intent*) antara pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (DMI) atau *International Monetary Fund* (IMF) bagi beragam komoditas. Sementara itu

dengan akan berakhirnya masa berlaku PP yang dihasilkan OPD tahun 1994, maka perlu dipersiapkan analisa kritis mengenai skema-skema modalitas penurunan tarif, bantuan domestik, dan subsidi ekspor yang dilakukan Indonesia dan beberapa mitra dagangnya, sebagaimana diamanatkan dalam PP OPD 1994.

Pada perundingan Komisi Pertanian di bulan Juli 2004 di Jenewa, yang menghasilkan Paket Juli 2004, telah tersurat bahwa modalitas penurunan bantuan domestik dan tarif akan mengikuti Rumus Berjenjang (RB) atau *Tiered Formula* (TF) dan sampai saat ini belum diketahui bagaimana bentuk pasti jenjang-jenjang tarif yang diharapkan. Tentu saja, hal ini akan mengundang perdebatan yang sangat tajam seperti perundingan modalitas pada masa-masa sebelumnya yang akhirnya untuk sementara mengesampingkan rumus-rumus yang dikembangkan sebelumnya, seperti Rumus Putaran Uruguay (R-PU) atau *Uruguay Round-Formula* (UR-F), Rumus Swiss (RS) atau *Swiss Formula* (SF), atau Rumus Gabungan (RG) atau *Blended Formula* (BF).

Sampai saat ini berbagai kelompok atau koalisi negara telah mengajukan berbagai usulan, tetapi belum menuju suatu titik temu yang pasti. Kelompok 20 (K-20) atau (G-20) mengusulkan penurunan tarif secara linier dan jumlah jenjang rentang tarif yang sama bagi negara berkembang (NB) dan negara maju (NM), yaitu 4 (empat), tetapi dengan rentang tarif dan penurunan yang berbeda. Untuk NB, K-20 mengajukan usulan seperti dicantumkan dalam Tabel 25.

Tabel 25. Usulan Jenjang dan Pemotongan Tarif K-20

Negara Berkembang (NB)		Negara Maju (NM)	
Jenjang Pemotongan	(%)	Jenjang Pemotongan	(%)
0<T<=30	25	0<T<=20	45
30<T<=80	30	20<T<=50	55
80<T<=130	35	50<T<=70	65
T>130	40	T>70	75

Selain itu K 20 juga mengusulkan adanya "*tariff capping*", yaitu nilai tertinggi tarif untuk semua pos tarif yang ada, sebesar 150 persen bagi NB dan 100 persen bagi NM. Kelompok ACP mengusulkan pemotongan tarif yang juga bersifat linier, tetapi dengan jenjang dan pemotongan yang sama bagi NB dan NM, sebagai tertera dalam Tabel 26.

UE mengajukan usul jenjang yang sama, tetapi pemotongan tarif bagi NB yang berbeda dengan K 20 dan bagi NM, UE mengajukan usul penurunan yang lebih luwes di tiap jenjang dengan menggunakan mekanisme pivot dari rumus linier. Saat ini UE mengajukan penurunan yang lebih rendah dari K 20 (Tabel 27).

Tabel 26. Usulan Jenjang dan Pemotongan Tarif ACP

Negara Berkembang (NB)		Negara Maju (NM)	
Jenjang Pemotongan	(%)	Jenjang Pemotongan	(%)
0<T<=50	15	0<T<=20	15
50<T<=100	20	20<T<=50	20
100<T<=150	25	50<T<=80	25
T>150	30	T>80	30

Tabel 27. Usulan Jenjang dan Pemotongan Tarif UE

Negara Berkembang (NB)		Negara Maju (NM)	
Jenjang Pemotongan	(%)	Jenjang Pemotongan	(%)
0<T<=30	20	0<T<=30	35
40<T<=80	30	30<T<=60	45
80<T<=130	40	60<T<=90	50
T>130	50	T>90	60

Australia dan Amerika Serikat/AS menerima usulan tentang banyaknya jenjang tarif sebanyak 4, tetapi tidak menerima usulan rentang dan pemotongan tarif yang berasal dari UE. Kedua negara ini mengajukan jenjang, rentang, dan pemotongan tarif yang sama, selain itu juga sama bagi NB dan NM. Kesamaan jenjang, rentang, dan penurunan tarif bagi NB dan NM ini ditentang Brazil, India, dan UE. Namun, AS juga mengusulkan pemotongan tarif maksimal untuk setiap jenjang (Tabel 28).

Tabel 28. Usulan Jenjang dan Pemotongan Tarif Australia dan AS

Negara Berkembang (NB)		Negara Maju (NM)	
Jenjang Pemotongan	(%)	Jenjang Pemotongan	(%)
0<T<=20	55	0<T<=20	55-65
20<T<=40	65	20<T<=40	65-75
40<T<=60	75	40<T<=60	75-85
T>60	85	T>60	85-95

Untuk bantuan domestik, tiga kotak yang mendapat perhatian utama adalah Kotak Jingga atau *Amber Box*, Kotak Hijau atau *Green Box*, dan Kotak Biru atau *Blue Box*. Untuk pertanian, semua kebijakan bantuan domestik yang mempengaruhi produksi dan perdagangan dimasukkan dalam Kotak Jingga, dan yang seharusnya tidak mengganggu atau hanya sedikit mempengaruhi perdagangan dikelompokkan dalam Kotak Hijau, serta bantuan langsung dari pemerintah kepada petani atau peternak yang diberikan dalam rangka program pengurangan produksi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 PP OPD, semua bantuan domestik harus dikurangi kecuali bantuan yang memenuhi syarat yang dinyatakan dalam Pasal ini dan dalam Lampiran 2 PP. Tekad pemotongan ini bagi semua negara anggota harus dinyatakan dalam *Total Aggregate*

*Measurement of Support/Total AMS dan "Annual and Final Bound Commitment Levels".*

Modalitas Kotak Jingga dengan mengikuti AMS akan diturunkan dari tingkat ikatan terakhirnya sebesar 60 persen selama 5 tahun untuk NM dan sebesar 40 persen selama 10 tahun untuk NB. Hak NM untuk mengecualikan suatu tingkat minimal bantuan dari tekad penurunannya akan dikurangi setengahnya dari 5 persen nilai produksi pertanian menjadi 2,5 persen selama 5 tahun. NB akan tetap mendapatkan haknya sebesar 10 persen nilai produksi pertanian dengan tambahan keluwesan, termasuk hak untuk mencatatkan kredit dari setiap bantuan negatif yang berkaitan dengan suatu produk tertentu ke tingkat *de minimis* yang tidak diperuntukkan bagi produk tertentu (WTO, 2004a).

Dalam hal Kotak Hijau berbagai pandangan juga muncul dari yang menginginkan subsidi ini diizinkan tanpa batas sepanjang memenuhi kriteria penerapannya sampai yang berpandangan bahwa meskipun tujuannya tidak berkaitan dengan tingkat produksi dan harga saat ini, tetapi sesungguhnya mengganggu perdagangan dengan mendorong peningkatan produksi dan menurunkan harga dunia. Oleh karena itu, pihak ini menghendaki adanya alat kuantitatif untuk mengukur apakah suatu kebijakan tidak mengganggu perdagangan atau produksi dan mematok pengeluaran Kotak Hijau. NB memandang bahwa meskipun suatu program Kotak Hijau mungkin saja tidak mengganggu, pengaruh kumulatif dari sejumlah besar dana yang dikeluarkan sesungguhnya mengganggu pasar.

Tentang Kotak Biru juga terdapat pandangan yang berbeda. Sejumlah NM dan NB menginginkan agar Kotak Biru ini dihapus (memindahkannya ke Kotak Jingga). Sambil kotak ini mengalami penurunan, mereka mengusulkan tambahan pengetatan, karena mereka melihat Kotak Biru adalah sebagai langkah sementara atau peralihan untuk membantu negara yang memberikan subsidi beralih dari subsidi Kotak Jingga ke kotak ini (WTO, 2004a). Sebaliknya, ada yang berpandangan bahwa Kotak Biru harus dipertahankan meskipun beberapa anggota siap untuk membahas perubahannya dengan alasan bahwa gangguannya pada pasar lebih kecil daripada Kotak Jingga dan membantu mempermudah terjadinya perubahan kebijakan.

Kemudian Paket Juli 2004 mencatat bahwa: (1) semua NM akan melakukan pemotongan cukup besar dalam tingkat bantuan domestiknya yang mengganggu pasar, (2) AMS Total akhir (Kotak Jingga) yang diikat dan tingkat *de minimis* yang diizinkan juga akan mengalami pemotongan cukup besar dan untuk Kotak Biru, ia akan dipatok pada nilai tertinggi sebagaimana dirumuskan dalam Alinea 15 [Kotak Biru tidak akan lebih besar dari 5 persen dari rata-rata nilai produksi pertanian total anggota selama periode bersejarah dan periode bersejarah ini akan ditentukan dalam perundingan], (3) landasan penurunan AMS Total ditambah *de minimis* yang diizinkan dan Kotak Biru yang disepakati akan mengikuti Rumus Berjangjang (RB).

Untuk bantuan domestik, K 20, AS, dan UE mengusulkan adanya 3 (tiga) jenjang dan rentang bantuan domestik bagi NM yang sama, tetapi pemotongan bantuan domestiknya berbeda-beda. Namun, ketiga kelompok ini sepakat bahwa bantuan domestik yang tinggi mengalami penurunan yang lebih tinggi (Tabel 29).

Tabel 29. Usulan Jenjang dan Pemotongan Bantuan Domestik K 20, Amerika Serikat, dan Uni Eropa

Jenjang bantuan domestik (juta dolar AS)	Pemotongan (%)		
	K 20	Amerika Serikat	Uni Eropa
BD>60	80	75	70
0<BD≤60	75	53	60
BD≤10	70	31	50

Dalam pilar subsidi dan persaingan ekspor tercakup banyak sekali aspek yang sifatnya berbeda antara satu dan yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 PP, subsidi ekspor yang harus diturunkan antara lain adalah: (a) bantuan subsidi langsung pemerintah atau lembaganya berupa bayaran natura, kepada perusahaan, industri, produsen pertanian, koperasi atau asosiasi produsen, atau lembaga pemasaran, (b) penjualan atau penampungan stok hasil pertanian yang tidak dikomersialkan untuk tujuan ekspor oleh pemerintah atau lembaganya dengan harga di bawah harga barang yang sama di dalam negeri, (c) pendanaan untuk ekspor hasil pertanian demi kegiatan pemerintah, (d) pemberian subsidi untuk mengurangi biaya pemasaran ekspor produk pertanian, (e) pembiayaan angkutan di dalam negeri dan pengapalan untuk ekspor, dan (f) subsidi produk pertanian yang termasuk dalam produk ekspor.

Berkaitan dengan subsidi dan persaingan ekspor, masih terdapat perbedaan yang tajam antara NB dan NM, sesama NB, dan sesama NM. Banyak negara menyatakan bahwa berbagai bentuk subsidi ekspor perlu diperketat, seperti bantuan pangan atau *food aid*, kredit ekspor bersubsidi, asuransi, dan perdagangan oleh perusahaan pemerintah. Namun, mereka belum sepakat tentang apakah bentuk-bentuk di atas mempunyai pengaruh sebesar subsidi langsung. Beberapa NB yang kecil berpendapat bahwa subsidi ekspor harus dihapus, tetapi dalam waktu yang lebih panjang untuk membantu mereka melakukan penyesuaian menghadapi perubahan karena biaya impor mereka akan lebih tinggi.

Dalam Kerangka Juli 2004 dikatakan bahwa semua bentuk subsidi ekspor harus dihilangkan pada waktu yang dapat dipercaya. Penghapusan ini akan dilakukan sejajar dengan semua jenis subsidi, termasuk yang ada pada kredit ekspor yang dibantu pemerintah, bantuan pangan, dan monopoli ekspor yang diawasi pemerintah. Sebagai penerapan Perlakuan Khusus dan Berbeda, NB memperoleh keringanan dalam antara lain waktu yang lebih panjang, dan mereka dapat melanjutkan subsidi angkutan dan pemasaran (Pasal 9.4 PP) "untuk masa yang tepat, dan

akan dirundingkan”, di luar waktu berakhirnya subsidi utama. Pada saat yang sama, apabila anggota menghapus unsur kredit dan asuransi bersubsidi, mereka harus mampu menghindari dampak negatifnya bagi negara-negara kurang berkembang dan pengimpor pangan.

Usulan yang masuk saat ini untuk persaingan ekspor adalah dari K 20, UE, dan AS. K 20 mengusulkan adanya penghapusan subsidi ekspor sebelum 2010, UE mengajukan usul penghilangan seluruh subsidi ekspor jika tercapai *“full parallelism”*, dan AS menginginkan: (i) penghapusan subsidi ekspor untuk semua produk pada 2010 dan lebih cepat pada produk tertentu, (ii) program kredit ekspor pemerintah agar sesuai dengan sistem kredit komersial untuk menghindari subsidi ekspor, (iii) pajak ekspor diferensial dihentikan. Untuk butir yang terakhir ini banyak NB yang tidak menerimanya, seperti tercermin dalam Kerangka Agustus 2004 yang termasuk dalam Isu-isu Lain pada Butir 49 yang memuat: *“Issues of interest but not agreed: sectoral initiatives, differential export taxes, GIs”* (WTO, 2004b).

Modalitas penurunan tarif, bantuan domestik, dan subsidi ekspor sampai saat ini belum dapat ditentukan karena adanya perbedaan pandangan yang tajam baik antara NB dan NM, sesama NB, dan sesama NM, sehingga masih tetap dirundingkan sampai saat ini. Oleh karena itu, Tim Peneliti menggunakan simulasi dari berbagai skenario seperti dikemukakan dalam uraian berikut ini. Skema penurunan tarif yang disimulasi mengikuti usulan yang telah dibuat oleh Harbinson/*Harbinson Proposal* (Poonyth, 2003), dengan menetapkan penurunan tarif secara berjenjang menurut rentang tarif untuk NM 3 jenjang dan NB 4 jenjang, seperti ditampilkan dalam Tabel 30.

Tabel 30. Skema Penurunan Tarif menurut Usulan Harbinson

Jenjang	Pemotongan (%)	Minimal pemotongan (%)
	Negara Maju (NM)	
Tarif > 90	60	45
15 < tarif ≤ 90	50	35
Tarif < 15	40	25
	Negara Berkembang (NB)	
Tarif > 120	40	30
60 tarif ≤ 120	35	25
20 < tarif ≤ 60	30	20
Tarif < 20	25	15

Sumber: [www.wto.org](http://www.wto.org), document number TN/AG/W/1/Rev.

Sedangkan perlakuan terhadap pilar Bantuan Domestik/BD atau *Domestic Support/DS* disimulasi menurut tiga skenario, yaitu Usulan Kelompok 20/K 20, Usulan Amerika Serikat/AS, dan Usulan Uni Eropa/UE, yang masing-masing terdiri atas 3 jenjang/*tier* untuk NM dan NB. Berdasarkan hasil beberapa kali pembicaraan dan penelusuran dari berbagai pertemuan, Tim Peneliti mendapat informasi tentang berbagai usulan penurunan BD seperti yang ditampilkan pada Tabel 31.

Tabel 31. Usulan Penurunan Bantuan Domestik (%)

Jenjang/tier BD	Usulan K 20		Usulan AS		Usulan UE	
	NM	NB	NM	NB	NM	NB
BD > 60	80	53	75	50	70	47
10 BD ≤ 60	75	50	53	35	60	40
BD ≤ 10	70	47	31	21	50	33

Sumber: Hasil beberapa pertemuan Komisi Pertanian, 2005

Namun, paket ATPSM tidak menyediakan format untuk penurunan BD berdasarkan jenjang seperti pada pilar akses pasar. Oleh karena itu, Tim Peneliti melakukan analisa simulasi untuk NM dan NB berdasarkan penurunan BD secara rata-rata dan dimodifikasi sehingga terdapat 7 skenario sebagai berikut: (1) NM menurunkan BD 75 persen, NB tetap; (2) NM menurunkan BD 53 persen, NB tetap; (3) NM menurunkan BD 60 persen, NB tetap; (4) NM menurunkan BD 100 persen, NB tetap; (5) NM dan NB menurunkan BD 75 persen dan 50 persen; (6) NM dan NB menurunkan BD 53 persen dan 35 persen; dan (7) NM dan NB menurunkan BD 60 persen dan 40 persen. Sedangkan pilar subsidi ekspor/SE atau *Export Subsidies/ES* tidak dilakukan penurunan baik untuk NM maupun NB.

Tabel 32. Skenario Simulasi Penurunan Tarif menurut Usulan Harbinson dan K 20

Skenario	Pemotongan Tarif Berdasarkan			
	Negara Maju		Negara Berkembang	
	Jenjang	Pemotongan (%)	Jenjang	Pemotongan (%)
<b>Harbinson 1*</b>				25
Tanpa pemotongan	15	40	20	30
SE dan BD	90	50	60	35
		60	120	40
<b>Harbinson 2*</b>				25
Dengan pemotongan	15	40	20	30
SE(NM=80%; NB=70%)	90	50	60	35
BD(NM=60%; NB=20%)		60	120	40
	20	45		25
<b>Usulan K 20**</b>	50	55	30	30
	75	65	80	35
		75	130	40

Keterangan: \* Sumber: Handbook ATPSM Versi 3 ([www.unctad.org](http://www.unctad.org))

\*\* Sumber: Laporan Pertemuan Cairns Group dan G-20 di Jenewa, September 2005.

Berbagai usulan modalitas telah diajukan selama perundingan di forum OPD yang bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan perdagangan dunia yang lebih adil, baik oleh NM dan NB. Namun, usulan ini tidak terlepas dari keinginan dan kepentingan untuk melindungi masyarakat di negara atau kelompoknya sendiri. Salah satu usulan yang

diajukan untuk menjadi modalitas dalam skema penurunan tarif, bantuan domestik/BD dan subsidi ekspor/SE adalah usulan Harbinson yang juga digunakan Tim Peneliti untuk melakukan kajian simulasi. Selain itu terdapat juga Usulan K 20 dengan tiga jenjang penurunan tarif dengan tingkat pemotongan yang lebih besar kepada NM tanpa penurunan BD dan SE. Skenario alternatif kebijakan tersebut dirinci seperti pada Tabel 30. Skenario-skenario tersebut digunakan untuk mensimulasi dan menganalisa dampaknya terhadap kinerja ekspor, impor, produksi, dan impor komoditas penting Indonesia.

#### 4.2. Perkiraan Bantuan Domestik Indonesia

Seperti telah dijelaskan di muka, dalam PP yang termasuk dalam klasifikasi Kotak Hijau/KH atau *Green Box/GB* adalah jenis bantuan yang tidak berpengaruh atau walaupun ada sangat kecil pengaruhnya terhadap gangguan perdagangan, sehingga bantuan jenis ini tidak perlu dikurangi. Bentuk-bentuk Bantuan Domestik/BD atau *Domestic Support/DS* yang masuk dalam KH adalah:

- (i) Pelayanan Umum (*general services*) seperti *research, pest and disease control, extension and marketing services*, dan *infrastructure*;
- (ii) *Stock* penyangga pangan (*stockholding for food security*);
- (iii) Bantuan pangan dalam negeri untuk masyarakat yang memerlukan (*domestics food aid for the needy*);
- (iv) Pembayaran langsung terhadap produsen (*direct payment to producers that are "decoupled" from production*);
- (v) Asuransi pendapatan dan program jaring pengaman social (*income insurance and safety net programmes*);
- (vi) Bantuan darurat (*disaster relief*);
- (vii) Program penyesuaian structural (*structural adjustment programmes*); dan
- (viii) Program bantuan lingkungan hidup dan bantuan daerah (*environment and regional assesstace programmes*).

Dalam kenyataannya tidak semua negara anggota OPD mengembangkan atau mempunyai keseluruhan (delapan) komponen KH tersebut. Oleh karena itu, dalam perhitungan BD sektor pertanian Indonesia yang masuk dalam KH adalah untuk empat komponen saja. Keempat komponen KH yang dimiliki oleh Indonesia adalah:

- (i) Pelayanan Umum (*general services*);
- (ii) *Stok* penyangga pangan (*stockholding for food security*);
- (iii) Bantuan pangan dalam negeri untuk masyarakat yang memerlukan (*domestics food aid for the needy*); dan
- (iv) Bantuan darurat (*disaster relief*).

Untuk menghitung besarnya Pelayanan Umum (PU) atau *General Services* (GS), data yang digunakan seharusnya mencakup seluruh Pengeluaran Pemerintah (pusat dan daerah) yang digunakan untuk memberikan pelayanan atau keuntungan buat sektor pertanian atau sektor pedesaan. Perlu dicatat bahwa bantuan jenis itu tidak diterima oleh petani atau konsumen secara individu, dan tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani atau penerimaan konsumen secara individu; meskipun hal itu dapat saja berpengaruh terhadap produksi dan konsumsi suatu produk pertanian. Berdasarkan hal itu maka cakupan BU untuk pertanian dan pedesaan sangatlah luas, dan hampir tidak mungkin mengumpulkan data dan melakukan perhitungan secara tepat. Oleh karena itu, dalam perhitungan BU untuk pertanian dan pedesaan dilakukan pendekatan dengan menggunakan data anggaran pembangunan dari pusat. Data tersebut bersumber dari Departemen Keuangan c.q. Sub Direktorat Pembiayaan Anggaran I, Direktorat Pembiayaan Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan. Adapun cakupan jasa-jasa dan cakupan data yang digunakan dalam perhitungan BU bagi pembangunan pertanian dan pedesaan seperti terinci pada Tabel 33.

Tabel 33. Cakupan Jasa, Cakupan Data dan Tolok Ukur yang Digunakan untuk Menghitung Pelayanan Umum/PU atau *General Services/GS* bagi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Indonesia

No	Cakupan jasa <sup>1</sup>	Cakupan data <sup>1</sup>	Kode Tolok Ukur <sup>2</sup>	
1	Penelitian ( <i>Research</i> )	Penelitian umum, penelitian yang terkait dengan program lingkungan, programer penelitian yang terkait dengan produk tertentu penelitian yang terkait dengan peningkatan produksi pertanian ( <i>general research, research in connection with environmental programs, research programmers relating to particular products, research relating to improve agricultural production</i> )	1306, 2205, 2603, 3315, 4340, 5203, 6102, 6301, 6330, 6501,	1334, 2227, 3210, 4338, 5201, 5206, 6201, 6310, 6410, 6601
2	Pengendalian Hama dan penyakit ( <i>Pest and disease control</i> )	Pengendalian hama dan penyakit umum dan produk khusus seperti peringatan dini, karantina dan eradikasi ( <i>general and product specific pest and disease control measures such as early warning systems, quarantine and eradication</i> )	0401, 1335, 4338, 5102, 5203, 6301, 7101	1205, 2227, 4340, 5201, 5206, 6601,
3	Pelatihan ( <i>Training</i> )	Fasilitas pelatihan umum dan khusus (Sekolah pertanian) <i>general and specialist training facilities (Agriculture schools)</i>	2205, 2603, 3315, 5102, 5201, 5206, 6601,	2227, 3210, 4225, 5121, 5203, 6410, 7120

Tabel 33. Lanjutan

No	Cakupan jasa <sup>1</sup>	Cakupan data <sup>1</sup>	Kode Tolok Ukur <sup>2</sup>	
4	Bimbingan dan Penyuluhan ( <i>Extension and advisory</i> )	Provisi yang berarti memfasilitasi transfer informasi dan hasil penelitian kepada produsen dan konsumen ( <i>the provision of means to facilitate the transfer of information and the results of research to producers and consumers</i> )	0401, 1321, 1335, 2227, 3210, 3403, 4340, 5102, 5203, 5225, 6501, 7101	1205, 1324, 2205, 2603, 3315, 3419, 4352, 5201, 5206, 6340, 6601,
5	Inspeksi atau Pengawasan ( <i>Inspection</i> )	Pelayanan inspeksi umum dan yang berkaitan dengan produk khusus yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan konsumsi dan grading atau untuk tujuan standarisasi ( <i>general inspection services and the inspection of particular products for health, safety, grading or standardization purposes</i> )	2205, 2603, 4340, 5203, 6301, 7101	2227, 3315, 5201, 5206, 6601,
6	Promosi dan Pemasaran ( <i>Marketing and promotion</i> )	Informasi pasar, saran dan promosi yang berkaitan dengan produk khusus, tetapi tidak termasuk pengeluaran untuk tujuan yang tidak dapat dispesifikasi yang dapat digunakan oleh penjual untuk mengurangi harga jual atau yang berkaitan erat dengan manfaat ekonomi langsung yang dikeluarkan ( <i>market information, advice and promotion relating to particular products but excluding expenditure for unspecified purposes that could be used by sellers to reduce their selling price or confer a direct economic benefit to purchases</i> )	0401, 3315, 5201, 5206, 6601, 7120	2608, 5121, 5203, 6201, 7101,
7	Prasarana atau Infrastruktur ( <i>Infrastructure</i> )	Jaringan listrik, jalan dan arti lain dari transport, pasar dan fasilitas pelabuhan (terminal barang), fasilitas air bersih, waduk dan jaringan irigasi, dan pekerjaan infrastruktur sehubungan dengan program lingkungan. Pada kasus keseluruhan pengeluaran adalah yang langsung pada provisi atau hanya pengerjaan konstruksi kapital saja dan harus tidak termasuk provisi subsidi pada fasilitas pertanian kecuali untuk tujuan retikulasi pada penggunaan fasilitas publik umum. Hal ini tidak termasuk subsidi untuk biaya operasional atau pengenaan biaya pada pengguna. ( <i>electricity reticulation, road and other means of transport, market and port facilities, water supply facilities, dams and drainage schemes, and infrastructural works associated with environmental programmes. In all cases the expenditure shall be directed to the provision or construction of capital works only, and shall be exclude the subsidized provision of on farm facilities other than for the reticulation of generally available public utilities. It shall not include subsidies to inputs or operating costs, or preferential user charges</i> )	1102, 1321, 1337, 2603, 3210, 3310, 3403, 3415, 3418, 3434, 4212, 4225, 4340, 5203, 6601	1205, 1324, 2205, 3203, 3302, 3402, 3408, 3417, 3419, 4208, 4214, 4303, 5201, 5206,

Keterangan

1. Sumber: AoA WTO
2. Sumber: Data Base Anggaran Pembangunan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan

Catatan:

1. Data yang dianalisa hanya mencakup pengeluaran pembangunan pusat (dana APBN) dalam bentuk Rupiah Murni, sehingga tidak termasuk Proyek Hubungan Luar Negeri (PHLN) maupun Proyek Bantuan Luar Negeri (BLN).
2. Di sini hanya dicantumkan code tolok ukur kegiatan, padahal di dalamnya masih mengandung sub tolok ukur dan kegiatan. Sehingga dapat terjadi code tolok ukur yang sama akan masuk dalam lebih dari satu cakupan services, karena dalam satu code tolok ukur tersebut mengandung sub tolok ukur atau jenis kegiatan yang tercakup dalam jenis services yang berbeda-beda.
3. Nilai masing-masing dari cakupan services merupakan penjumlahan dari nilai-nilai masing-masing code tolok ukur yang tercakup di dalam setiap cakupan services.

Komponen lain yang masuk dalam BD sektor pertanian terdiri dari *Public Stockholding*, *Domestic Food Aid*, dan *Disaster Payment*. Untuk menghitung ketiga komponen BD tersebut sepenuhnya menggunakan data yang bersumber dari BULOG dengan metoda perhitungan sebagai berikut (Sawit *et al.*, 2003):

1. *Public Stockholding* (PS)

$$PS = (TIS * (i_1 - i_2)) * FP \quad (4)$$

dimana:

*PS* = *Public Stock Holding* (Kg)

*TIS* = *Total Iron Stock* (Kg)

*i1* = *Market Interest Rate* (%)

*i2* = *BULOG Interest Rate* (%)

*FP* = *Floor Price* (Rp./ Kg)

2. *Domestik Food Aid* (DFA)

$$DFA = TSMOP * (PP1 - PP2) \quad (5)$$

dimana:

*DFA* = *Domestic Food Aid* (Rp)

*TSMOP* = *Total Special Market Operation of Product* (Kg)

*PP1* = *Market Price of Product* (Rp./ Kg)

*PP2* = *Product Price for Special Market Operation* (Rp./ Kg)

3. *Disaster Payment* (DP)

$$DP = NBOPK + NBDS + NBP \quad (6)$$

dimana:

*DP* = *Disaster of Payment* (Rp)

*NBOPK* = Nilai Bantuan Operasi Pasar Khusus Korban Bencana Alam/Pengungsi (Rp)

*NBDS* = Nilai Bantuan Departemen Sosial untuk Korban Bencana Alam/Pengungsi (Rp)

*NBP* = Nilai Bantuan untuk Korban Bencana Alam/Pengungsi Dalam Negeri (Rp)

Telah menjadi kewajiban setiap anggota OPD melaporkan besaran Bantuan Domestiknya di bidang pertanian kepada kantor pusat OPD di Jenewa, Swiss, sebagai suatu bagian dari pelaksanaan PP. Indonesia telah setiap tahun, sejak tahun 2001 melakukan perhitungan besaran Bantuan Domestik ini dan telah disampaikan kepada pihak yang berkompeten sebagai juru bicara pemerintah di forum besar itu, yaitu Departemen Perdagangan dan untuk ini akan melakukan hal yang sama menghitung Bantuan Domestik untuk tahun 2004, seperti yang dilaporkan dan di analisa di subbagian ini.

Pada tahun 2001, nilai Pelayanan Umum/PU atau *General Services/GS* Indonesia mencapai Rp. 1,22 Trilyun, dimana pada tahun tersebut dana penelitian mencapai Rp. 21,16 Milyar, dana pengendalian hama dan penyakit Rp. 1,57 Milyar, dana pelatihan Rp.16,44 milyar, bimbingan dan penyuluhan Rp. 346,93 Milyar, dana inspeksi dan pengawasan Rp. 9,81 Milyar, dana promosi dan pemasaran Rp. 79,57 Milyar dan infrastruktur Rp. 744,44 Milyar. Pada tahun 2002 pengeluaran pembangunan meningkat menjadi Rp. 1,27 Trilyun yang disertai penurunan pada pengendalian hama dan penyakit, bimbingan dan penyuluhan, inspeksi dan pengawasan, promosi dan pemasaran, dan infrastruktur. Pendanaan pembangunan meningkat pada penelitian dan pelatihan. Pada tahun 2003, nilai PU pertanian Indonesia mencapai Rp. 1,61 Trilyun meningkat dibanding tahun 2001 dan 2002. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya nilai-nilai pendanaan dari 7 kelompok PU jika dibandingkan tahun 2002. Adapun rincian masing-masing pendanaan adalah dana penelitian mencapai Rp. 129,51 Milyar, dana pengendalian hama dan penyakit Rp. 8,29 Milyar, dana pelatihan Rp. 129,37 Milyar, bimbingan dan penyuluhan Rp. 364,47 Milyar, dana inspeksi dan pengawasan Rp. 10,61 Milyar, dana promosi dan pemasaran Rp. 56,17 Milyar, dan infrastruktur Rp. 912,15 Milyar.

Hasil perhitungan PU tahun 2004 menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2004, nilai PU Rp. 1.799,25 Milyar yang terdiri dari dana penelitian mencapai Rp. 155,25 Milyar, dana pengendalian hama dan penyakit Rp. 9,80 Milyar, dana pelatihan Rp.119,30 Milyar, bimbingan dan penyuluhan Rp. 395,28 Milyar, dana inspeksi dan pengawasan Rp. 16,02 Milyar, dana promosi dan pemasaran Rp. 66,60 Milyar dan dan infrastruktur Rp.1.037,01 Milyar (Tabel 34). Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan dan PU untuk pertanian Indonesia meningkat pada tahun 2004, dibandingkan tahun 2003, kecuali pada dana untuk pelatihan yang menurun dari Rp.129,37 Milyar menjadi Rp.119,30 Milyar.

Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah dalam bantuan pangan dalam negeri (*Domestic Food Aid*) dan stok penyangga pangan (*Public Stockholding*) menunjukkan peningkatan dari tahun 2001 ke tahun 2004. Namun demikian, bantuan darurat menunjukkan penurunan dalam periode yang sama. Jumlah dana bantuan pangan dalam negeri untuk yang memerlukan pada tahun 2001 tersebut adalah sebesar Rp. 2,85

Trilyun, pada tahun 2002, sebesar Rp. 4,1 Trilyun, pada tahun 2003 sebesar Rp. 4,82 Trilyun dan untuk tahun 2004 terjadi sedikit peningkatan, yaitu sekitar Rp. 5 Milyar menjadi Rp. 4,83 Trilyun. Sementara itu untuk stok penyangga pangan mencapai Rp. 2,1 Trilyun pada tahun 2001 dan 2002, namun pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp. 2,42 Trilyun. Pada tahun 2004 dana ini tidak meningkat dibanding tahun 2003, yaitu tetap Rp. 2,42 Trilyun. Sedangkan dana bantuan pangan darurat terus menurun jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2001 dana ini mencapai Rp. 254,81 Milyar, maka pada tahun 2002 menurun menjadi Rp. 176,60 Milyar, Rp. 74,76 Milyar, dan Rp. 30,46 Milyar pada tahun 2002, 2003, dan 2004. Pada akhir tahun 2004 atau awal tahun 2005, terjadi bencana alam nasional di Provinsi NAD. Oleh karena itu, kemungkinan pada tahun 2005 akan terjadi peningkatan dana bantuan pangan darurat ini jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 34. Bantuan Domestik Indonesia dalam Kriteria Kotak Hijau 2001-2004

Kriteria	Nilai Moneter /Tahun (Rp. Milyar )			
	2001	2002	2003	2004
1. Pelayanan Umum	1.219,93	1.269,72	1.610,56	1.799,25
a. Penelitian	21,16	92,66	129,51	155,25
b. Pengendalian Hama dan Penyakit	1,57	3,87	8,29	9,80
c. Pelatihan	16,44	82,55	129,37	119,30
d. Bimbingan dan Penyuluhan	346,93	315,67	364,47	395,28
e. Inspeksi atau Pengawasan	9,81	5,79	10,61	16,02
f. Promosi dan Pemasaran	79,57	53,08	56,17	66,60
g. Prasarana atau Infrastruktur	744,44	716,10	912,15	1.037,01
2. Bantuan Pangan Domestik	2.850,41	4.104,18	4.822,91	4.827,04
3. Bantuan Darurat Bencana Alam <sup>2</sup>	254,81	176,60	74,76	30,46
4. Stock Penyangga Pangan <sup>2</sup>	2.102,23	2.102,23	2.422,23	2.422,23
Total	6.427,38	7.652,73	8.930,46	9.078,98
5. Nilai Tukar (Rp/US \$) <sup>3</sup>	10.261,00	9.311,00	8.577,00	8.928,00
6. Kotak Hijau (juta US \$)	626,39	821,90	1.041,21	1.016,91

Keterangan:

<sup>1</sup>Sumber: Tabel Lampiran 1 s/d Lampiran 7

<sup>2</sup>Sumber: Tabel Lampiran 8 s/d Lampiran 11

<sup>3</sup>Sumber: Exchange Rate Asian Development Bank (ADB), 2004 dan 2005.

Secara keseluruhan besaran BD untuk pertanian Indonesia pada tahun 2001 adalah sekitar Rp. 6,43 Trilyun meningkat menjadi Rp. 7,65 Trilyun pada tahun 2002, Rp. 8,93 Trilyun pada tahun 2003 dan mencapai Rp. 9,08 Trilyun pada tahun 2004 (Tabel 32). Berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap AS \$ pada tahun 2001 sebesar Rp. 10.261,00 per

AS \$, pada tahun 2002 sebesar Rp. 9.311,00 per AS \$, pada tahun 2003 sebesar Rp. 8.577,00 per AS \$ dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 8.928.00 per AS \$ maka secara berurutan nilai Kotak Hijau pertanian Indonesia tahun 2001 hingga 2004 adalah AS \$ 626,39 Juta, AS \$ 821,90 Juta, AS \$1.041,21 Juta, dan AS \$ 1.016,91 Juta. Data ini menunjukkan bahwa jika pada 2001–2003 nilai Kotak Hijau terus menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2004 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

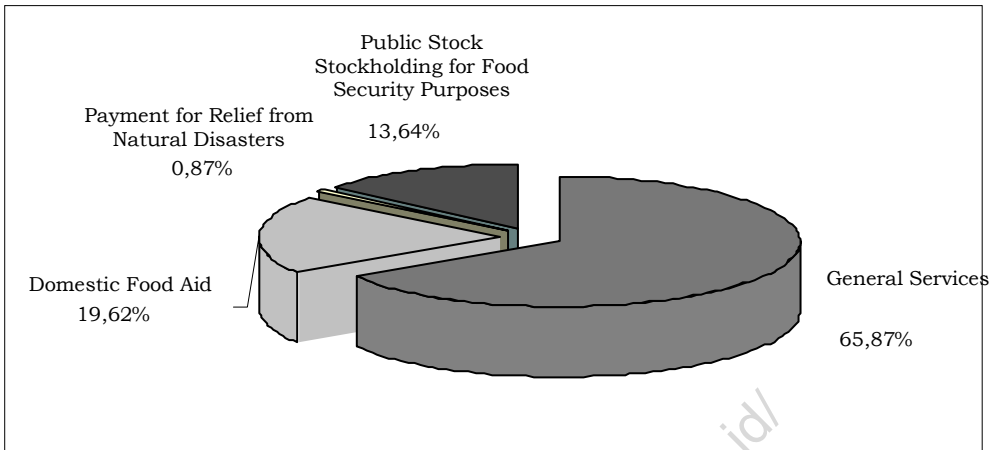
Jika dibandingkan nilai notifikasi Indonesia di OPD untuk BD periode 1995–2000 (Tabel 35), hasil analisa tersebut (periode 2001–2004) menunjukkan peningkatan lebih dari 3 kali lipat. Nilai BD pada tahun 1995 hanya sekitar AS \$ 178 juta, 1996 mencapai AS \$ 191 juta, 1997 mencapai ASS \$ 209 juta, tahun 1999 mencapai AS \$ 133 juta, 1999 mencapai AS \$ 207 juta dan tahun 2000 mencapai AS \$ 168 juta.

Jika dilihat dari komposisi komponen rata-rata pada periode 1995–2000 nilai pelayanan umum (*General Services*) atau GS adalah 65,87 persen, bantuan pangan dalam negeri untuk masyarakat yang memerlukan (*Domestics Food Aid for the Needy*) atau Domestic Food Aid atau DFA adalah 19,62 persen, bantuan darurat (*Payment for Relief from Natural Disaster*) atau PRND 0,87 persen dan stock penyangga pangan (*Public Stockholding for Food Security Purposes*) atau PSFSP 13,64 persen (Gambar 3). Pada periode 2001–2004 terlihat adanya perubahan komposisi dengan rata-rata untuk PU 18,38 persen, DFA 51,74 persen, PRND 1,67 persen, dan PSFSP 28,20 persen (Gambar 4). Hal ini menunjukkan bahwa relatif terhadap nilai KH, nilai PU menurun pada periode 2001–2004 dibandingkan periode 1995–2000, namun untuk DFA, PRND, dan PSFSP menunjukkan peningkatan pada periode 2001–2004 jika dibandingkan rata-rata periode 1995–2000. Hal ini menunjukkan dalam periode 1995–2000 dan 2001–2004, komposisi nilai KH untuk pertanian Indonesia mengalami perubahan. Namun demikian dari segi nilai nominalnya terus menunjukkan peningkatan (Gambar 5).

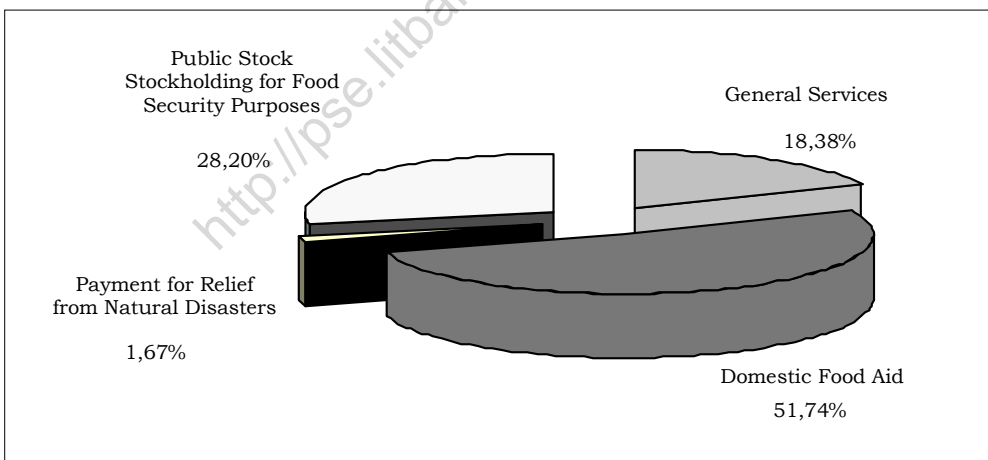
Tabel 35. Bantuan Domestik Indonesia dalam Kriteria Kotak Hijau 1995–2000

No	Kriteria	Nilai Moneter/Tahun (Milyar Rp.)					
		1995	1996	1997	1998	1999	2000
1.	Pelayanan Umum	366,00	407,00	557,00	622,00	826,00	1.056,50
2.	Bantuan Pangan Domestik	0,00	0,00	0,00	411,00	425,60	305,50
3.	Bantuan Darurat Bencana Alam <sup>2</sup>	2,70	4,00	4,80	11,80	14,80	12,70
4.	Stock Penyangga Pangan <sup>2</sup>	32,00	38,30	55,50	264,50	346,50	57,00
	Total	400,70	449,30	617,30	1.309,30	1.612,90	1.431,70
5.	Nilai Tukar (Rp/US \$) <sup>3</sup>	2.252,83	2.347,33	2.951,75	9.874,58	7.808,92	8.534,42
6.	Kotak Hijau (juta US \$)	177,87	191,41	209,13	132,59	206,55	167,76

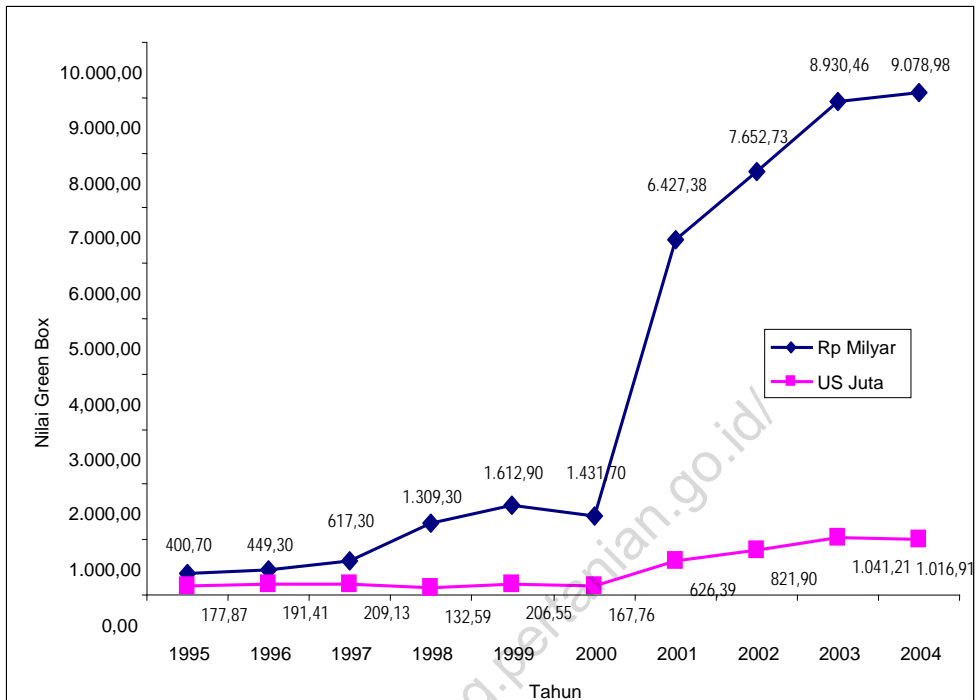
Sumber: Indonesia's Notification to the WTO on DS dalam Sawit dkk (2003).



Gambar 3. Rata-rata Nilai Persentase Komposisi Nilai Kotak Hijau Indonesia Tahun 1995-2000



Gambar 4. Rata-rata Nilai Persentase Komposisi Nilai Kotak Hijau Indonesia Tahun 2001-2004



Gambar 5. Perkembangan Nilai Kotak Hijau Indonesia Tahun 1995–2004 Dalam Nilai Mata Uang Rupiah dan US Dollar.

#### 4.3. Fleksibilitas Pemilihan Produk Khusus (*Special Product*) : Usulan Indonesia<sup>2</sup>

Negara berkembang telah melaksanakan reformasi perdagangan produk pertanian sesuai dengan Perjanjian Pertanian OPD, sejak persetujuan itu diimplementasi pada Januari 1995. Setelah melaksanakannya, NB merasa bahwa kemiskinan yang dominan di pedesaan semakin sulit dikurangi, ditambah lagi dengan redupnya pembangunan pedesaan serta semakin lemahnya ketahanan pangan. Hal itu terkait dengan perilaku subsidi, baik subsidi domestik maupun ekspor yang dilakukan oleh banyak NM, dan hal ini memang diizinkan dalam PP OPD. Sejak tahun 2000, berbagai usulan telah dilakukan oleh NB agar PP disempurnakan. Diantaranya yang terpenting adalah usulan tentang *Development Box* dan *Food Security Box*. Usulan tersebut ternyata belum berhasil disepakati dalam berbagai Konferensi Tingkat Menteri (KTM), terutama KTM IV di Doha.

<sup>2</sup> Telah disampaikan sebagai bahan masukan bagi Departemen Pertanian oleh Sawit, M.H. dkk. (2005) dalam seminar di Puslitbang Sosek Pertanian, Bogor pada tanggal 27 Juni 2005 dengan judul "Fleksibilitas Pemilihan Special Product (SP) Usulan Indonesia : mampukah mencapai sasarannya?".

Salah satu kelemahan yang melekat pada negara berkembang adalah mereka cenderung berjuang sendiri-sendiri, dan kurang kompak. Ketidakkompakan ini tentu telah diperparah lagi oleh politik adu domba yang sering dilakukan oleh sejumlah NM terhadap NB. Namun, sejak NB membuat kelompok sendiri seperti Kelompok 33/K-33 dan Kelompok 20 atau K-20, kekuatan NB mulai diperhitungkan oleh NM, terutama negara yang paling berpengaruh, yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Salah satu hasil dari perjuangan negara berkembang adalah mendapat perlakuan khusus dalam Akses Pasar. Perlakuan khusus tersebut berupa Produk Khusus atau *Special Product* dan Mekanisme Pengamanan Khusus/MPK atau *Special Safeguard Mechanism*, yang kemudian masuk dalam kerangka kerja Paket Juli (*the July framework*) tahun 2004. Paket Juli ini dijadikan dasar untuk penyusunan modalitas dan hal lainnya. Dalam para 41 dari paket Juli<sup>3</sup> dinyatakan sebagai berikut:

*Developing country Members will have the flexibility to designate an appropriate number of products as Special Products, based on criteria of food security, livelihood security and rural development needs. These products will be eligible for more flexible treatment. The criteria and treatment of these products will be further specified during the negotiation phase and will recognize the fundamental importance of Special Products to developing countries.*

Oleh karena itu, tujuan PK adalah adanya fleksibilitas dalam reformasi perdagangan, sehingga NB lebih mampu menyesuaikan diri dalam upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan yang erat kaitannya dengan *livelihood security* dan pembangunan pedesaan. Fleksibilitas tersebut menjadi penting, mengingat PP, khususnya perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment*, S&DT) yang diberikan kepada NB belum membuahkan keseimbangan seperti yang diharapkan. Demikian juga sejumlah ketentuan dalam PP masih memungkinkan NM terus melakukan subsidi domestik dan subsidi ekspor. Akibatnya adalah NB sulit untuk bersaing, meskipun di dalam negeri sendiripun. Hal tersebut telah berpengaruh buruk terhadap petani miskin di banyak NB.

Untuk itu, Tim Peneliti membahas pemilihan PK yang lebih luwes dan mampu mencapai tujuan dan sasarannya, sebagaimana tersurat dalam Paket Juli 2004. Analisa diutamakan pada usulan Indonesia, seperti yang disampaikan dalam KTM K-33 di Jakarta pada tanggal 11–12 Juni 2005 yang lalu.

#### **4.3.1. Posisi G-33**

Negara berkembang telah mengeluarkan sejumlah usulan tentang pemilihan PK yang diajukan oleh 12 anggota pada Sidang Khusus atau *Special Session* dalam Komisi Pertanian (KP) atau *Committee on Agriculture*

<sup>3</sup> WTO (2004), "Decisions Adopted by the General Council on 1 August 2004", WT/L/579.

(CoA), OPD di Jenewa tanggal 20 Maret 2003. Keduabelas NB itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kelompok negara K-33 yang sekarang telah bertambah menjadi 44 negara (saat Laporan ini ditulis)<sup>4</sup>. Dalam usulan itu, NB menginginkan indikator PK haruslah sederhana, mudah dilaksanakan serta mempertimbangkan aspek ketersediaan data. Mereka mengusulkan agar digunakan indikator kombinasi antara *number-base approach* dan *self-selection*. Kepada NB diberikan, misalnya sejumlah x% pos tarif untuk PK, dan kemudian mereka dibebaskan untuk memilih komoditas sesuai dengan pertimbangan politik dan ekonomi masing-masing negara.

K-33 kemudian melangkah lebih jauh lagi dalam penyusunan kriteria tersebut, seperti yang disampaikan pada pertemuan KP-OPD di Jenewa, tanggal 3 Juni 2005 (JOB(05)/91)<sup>5</sup>. Kriteria umum di bawah ini dibuat atas dasar utama *food security and livelihood security*, dan *rural development*, yaitu:

- *The importance of a product for subsistence strategies of the rural poor and small and vulnerable farmers;*
- *The importance that a product may represent as a source of livelihood for the population in a disadvantage region;*
- *The significance of a crop or product for consumption profile of the country or for specific communities within a country;*
- *The potential structural effects of an import substitute in the consumption profile of the country;*
- *The contribution of a product to the economy as a whole, including from the perspective of GDP, employment and food procurement; and*
- *The role that a product may play in the wider domestic policy context of the country concerned, etc.*

NB beranggapan bahwa sangatlah sulit untuk membuat satu gugus indikator umum untuk pemilihan PK yang berlaku untuk semua anggotanya. Demikian juga membuat batasan jumlah (*threshold level*) untuk setiap kemungkinan indikator guna menampung perbedaan, juga akan menimbulkan kesulitan yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam pemilihan PK diperlukan perlakuan fleksibilitas maksimal, sebagai unsur penting dalam pemilihan PK untuk NB sesuai dengan bunyi Paragraf 41, kerangka kerja Paket Juli. Hal itu tidak berarti bahwa pemilihan akan dilakukan secara sembarang (*arbitrary*), karena pijakan kriteria dasar telah ada, yaitu ketahanan pangan atau *food security*, keamanan

---

<sup>4</sup> Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Botswana, China, Cote d'Ivoire, Congo, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Korea, Madagascar, Mauritius, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, The Philippines, Peru, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Trinidad and Tobago, Turki, Uganda, Venezuela, Zambia, and Zimbabwe.

<sup>5</sup> WTO (2005), "G33 Proposal on Special Products", Committee on Agriculture, JOB(05)/91.

pendapatan atau *livelihood security*, dan pembangunan pedesaan atau *rural development* telah ada.

Selanjutnya, K-33 sepakat bahwa dalam penentuan PK agar dihindari penggunaan metoda kuantitatif<sup>6</sup>, karena hal itu dianggap dapat memasung fleksibilitas, sehingga dapat memperlemah posisi negara berkembang itu sendiri. Kekhawatiran itu seharusnya tidak perlu terjadi asalkan NB melakukan riset terlebih dahulu sebelum menolaknya.

Pada tanggal 11–12 Juni 2005 di Jakarta, kelompok K-33 telah melaksanakan pertemuan Tingkat Menteri yang dihadiri hampir setengah dari 44 negara anggotanya. Tujuan pertemuan itu adalah mempertegas sikap dan memperkecil perbedaan sehingga perjuangan di Jenewa akan lebih kompak, khususnya dalam menghadapi bulan Juli 2005 dan KTM VI WTO di Hongkong, Desember 2005. Hasil pertemuan itu kemudian menjadi komunike bersama antar Menteri K-33<sup>7</sup>. Dalam komunike tersebut, sebagian butir-butir kesepakatan tersebut mempertegas kembali<sup>8</sup> apa yang telah disampaikan di Jenewa awal Juni yang lalu atau posisi selama ini yang terus disuarakan oleh K-33.

Filipina<sup>9</sup> dalam *statement* Tingkat Menteri di Jakarta tanggal 11 Juni 2005 yang lalu, membuat indikator sederhana yang lebih rinci lagi pada masing-masing kriteria untuk PK, yaitu:

**A. Food Security Criteria**, dengan indikatornya antara lain:

- *Strategic food commodities and staples, or staples consumed by at least a \_\_\_% of the national or regional population*
- *Or those food commodities belonging a basket considered essential to food security as may be enshrined in a country's law(s) and statutes*
- *Any agricultural product the income derived from which determines to a large extent the food security and subsistence of farm families in a sector or region*

**B. Livelihood Security Criteria**, dengan indikatornya:

- *Proportion of poor, subsistence or resource poor farmers dependent on cultivation of the product, at national or regional scale*

---

<sup>6</sup> Indonesia pernah mengajukan proposal pemilihan SP kombinasi antara metoda kuantitatif dan metoda sederhana, ternyata belum mendapat tempat di G-33, lihat tulisan M. Husein Sawit dkk (2004), "Penyaringan SP dengan Metoda I/O untuk Indonesia", laporan no.3(rev.1), Oktober 2004.

<sup>7</sup> Lihat G-33 Ministerial Communique, adopted in Jakarta, 12 Juni 2005.

<sup>8</sup> Lihat antara lain: "G33 Proposal on Special Products", JOB(05)/91, Committee on Agriculture, Special Session (3 June 2005); "G33 Proposal on Special Safeguard Measures", JOB(05)/92, Committee on Agriculture, Special Session (3 June 2005); dan "G-33 Views on the Market Access Pillar", JOB(04)/65, Committee on Agriculture, Special Session (1 June 2004)

<sup>9</sup> SP and SSM: State of Play, Outstanding Issues, lead discussion paper by the Philippines, G-33 Ministerial Meeting, Jakarta June, 11 – 12, 2005.

- *Proportion hectarage or some other indicator of relative sector/sub sector size to national and regional aggregate.*
- *Average or a threshold proportion of farmers or farm households below some poverty or income level threshold, the thresholds can either be domestic statistically generated or internationally accepted threshold (eq, FAO)*
- *Proportion or contribution to employment at the national or regional levels*
- *Indicators of threat to rural livelihood security- products whose import competition, inclusive of close substitute, are recipients of trading distorting domestic support*

**C. Rural Development Criteria**, dengan indikatornya:

- *Contribution of the sector or product to national or regional agriculture GVA/ GDP and its growth rate*
- *Products the production systems of which dominate the agriculture economy of particular defined sectors of the population such as indigenous peoples and threatened/vulnerable groups that are the focus of government preferential option development programs, including peace and reconciliation initiatives to protect social stability and order*
- *Product clearly identified in a country's development programs and statutes as critical and strategic to national development or development of a region within the country.*

Indikator yang diajukan oleh Filipina tersebut disambut secara bulat oleh anggota K 33 yang lain, demikian juga Indonesia. Untuk proposal ini juga diperlukan kajian tersendiri untuk merumuskannya secara empiris.

**4.3.2. Posisi Indonesia**

Seperti yang telah disebutkan di atas, setiap NB diminta untuk merancang metoda pemilihan PK yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggotanya. Namun rancangan tersebut harus tetap berpijak pada tujuan dasar, yaitu ketahanan pangan, *livelihood security* dan pembangunan pedesaan. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia mengambil inisiatif untuk membuat kriteria pemilihan PK dengan cara yang lebih fleksibel, bukan dengan metoda kuantitatif. Pada pertemuan di Jakarta Indonesia mengusulkan empat indikator yang dapat dipakai untuk keperluan pemilihan SP, yaitu:

- (1) *Share of the product in total agricultural production is more than 5%; OR/AND*
- (2) *Share of the product in total calorie or protein domestic consumption more than 5%; OR/AND*
- (3) *Share of the product in total agricultural employment more than 5%; AND*
- (4) *The product is net imported or its export value is less than 5% of total world export.*

Indonesia belum sampai pada penentuan produk/komoditas PK sesuai dengan indikator yang telah disampaikan pada pertemuan Tingkat Menteri K-33<sup>10</sup>. Oleh karena itu, di bawah ini dicoba menggali berapa banyak PK yang dapat dipilih sesuai dengan indikator seperti yang telah disebut di atas. Indikator ke-4 adalah indikator amat penting dalam pemilihan tersebut, dan dalam makalah ini hanya dipusatkan pada *net import*, dengan pertimbangan ketersediaan datanya. Apabila indikator ke-4 terpilih, kemudian ditambah dengan salah satu dari indikator ke-1, atau ke-2, atau ke-3, maka produk tersebut layak diperlakukan sebagai PK. Khusus indikator ke-2, dirinci lagi dalam dua kelompok, yaitu kalori atau protein.

Data yang digunakan untuk menguji ke-4 indikator tersebut adalah berasal dari BPS yang dipakai dalam penyusunan I/O tahun 2000 dan data Susenas 2003. Kedua jenis data ini dipilih karena paling lengkap, sehingga tidak perlu mencarinya secara terpilah-pilah. Sedangkan data perdagangan tahun 2000-2002 diperoleh dari BPS (Statistik Ekspor dan Impor).

Proses penyaringan dilakukan dalam beberapa tahap analisa dan merupakan pengembangan dari metoda yang digunakan oleh Tim Peneliti pada tahun 2004 (lihat Hutabarat *et al.*, 2004). Tahap pertama, dihitung komoditas/produk pertanian yang menjadi *net import* rata-rata periode terakhir 2000-2002. Apabila produk/komoditas *net import* dirinci dalam HS 4 digit, maka tersaring 84 jenis produk *net importir* (Tabel 36). Hampir seluruhnya adalah berupa pangan, termasuk di dalamnya buah-buahan dan sayuran, daging, susu/keju, dan makanan jadi.

Tabel 36. Komoditas Terpilih sebagai PK berdasarkan Indikator Net Impor

No	Komoditas/Produk Olahan	Kode HS 4 Digit
1	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin	0201

<sup>10</sup> Statement tertulis Menteri Pertanian RI, *Discussion Brief on SP and SSM*, yang disampaikan pada pertemuan Tingkat Menteri di Jakarta tanggal 11 Juni 2005. Indikator itu masih ada kaitannya dengan Non Paper by Indonesia, "Specific Modalities input on Special Products" yang disampaikan at G-33 Countries Meeting in Geneva, 8 Desember 2003. Bahan ini, hampir seluruhnya diambil dari P.Simatupang (2003), "Justifikasi dan Metoda Penetapan Komoditas Strategis". Sayang makalah tersebut tidak pernah dibahas/didiskusikan secara terbuka, dan ternyata langsung diadopsi oleh Pemerintah Indonesia.

2	Daging binatang jenis lembu, beku	0202
3	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku	0204
4	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal, atau hinnie, segar, dingin atau beku	0206
5	Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas	0209
6	Daging dan sisanya yang dapat dimakan	0210
7	Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	0401
8	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	0402
9	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir	0403
10	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	0404
11	Mentega dan lemak lainnya yang diperoleh dari susu	0405
12	Keju dan dadih susu	0406
13	Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar atau kering, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau tidak	0408
14	Madu alam	0409
15	Bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran lainnya, segar atau dingin	0703
16	Selada dan chicory, segar atau dingin	0705
17	Wortel, lobak china, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin	0706
18	Sayuran polongan, dikupas atau tidak, segar atau dingin	0708
19	Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku	0710
20	Sayuran kering, utuh atau potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut	0712
21	Sayuran polongan kering, dikupas, dikuliti, atau dibelah maupun tidak	0713
22	Buah jeruk, segar atau kering	0805
23	Anggur, segar atau kering	0806
24	Apel, pir, dan quince, segar	0808
25	Aprikot, ceri, persik (termasuk nektarin), plum dan sloe, segar	0809
26	Buah lainnya, segar	0810
27	Buah dan buah bertempurung, diawetkan sementara tetapi tidak cocok untuk untuk konsumsi langsung	0812
28	Cengkeh (utuh, bunga dan tangkai)	0907
29	Biji adas manis, badian, adas pedas, ketumbar, jintan hitam atau jintan	0909
30	Barli	1003
31	Oat	1004
32	Beras	1006
33	Butiran sorghum	1007
34	Buckwheat, millet, dan biji canary, serealia lainnya	1008
35	Tepung gandum atau tepung meslin	1101
36	Menir, tepung kasar, dan pelet serealia	1103
37	Butir serealia dikerjakan secara lain, kecuali beras, lembaga serealia, utuh, diigiling, dipipihkan, atau ditumbuk	1104

Tabel 36. Lanjutan

No	Komoditas/Produk Olahan	Kode HS 4 Digit
38	Tepung, tepung kasar, bubuk, serpih, butir dan pelet kentang	1105
39	Malt, digongseng maupun tidak	1107
40	Pati, inulin	1108
41	Gluten gandum, kering maupun tidak	1109
42	Kacang kedelai, pecah maupun tidak	1201
43	Kacang tanah	1202
44	Biji bunga matahari, pecah maupun tidak	1206

45	Tepung halus dan tepung kasar dari biji atau buah yang mengandung minyak, selain tepung moster	1208
46	Kerucut buah hop	1210
47	Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas	1501
48	Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri, atau kambing	1502
49	Lard stearin, minyak lard, oleo stearin, minyak oleo dan minyak tallow	1503
50	Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui, dimurnikan maupun tidak	1504
51	Wool grease dan zat lemak turunannya (termasuk lanolin)	1505
52	Lemak dan binatang lainnya serta fraksinya, dimurnikan maupun tidak	1506
53	Minyak kedelai dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak	1507
54	Minyak kacang tanah dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak	1508
55	Minyak zaitun dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak	1509
56	Minyak lain dan fraksinya, diperoleh semata-mata dari zaitun, dimurnikan maupun tidak	1510
57	Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak	1511
58	Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak	1512
59	Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak	1513
60	Minyak lobak, colza atau moster dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak	1514
61	Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba)	1515
62	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya	1516
63	Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya	1518
64	Daging, sisanya daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan	1602
65	Gula tebu atau gula bit dan sukrosanya, murni kimiawi, dalam bentuk padat	1701
66	Gula lainnya	1702
67	Tetes dari hasil ekstraksi atau pemurnian gula	1703
68	Ekstrak malt, olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati	1901
69	Makanan olahan yang diperoleh dengan cara mengembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal	1904
70	Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat	2002
71	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat	2004
72	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat	2005
73	Ragi	2102
74	Sop dan kaldu serta olahannya	2104
75	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak	2105
76	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	2106
77	Air, termasuk air mineral dan air soda mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa	2202
78	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat	2204
79	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya	2208

Tabel 36. Lanjutan

No	Komoditas/Produk Olahan	Kode HS 4 Digit
80	Cuka dan pengganti cuka diperoleh dari asam asetat	2209
81	Tepung, tepung kasar dan pelet dari daging atau sisanya, dari ikan, krustasea, moluska, atau invertebrata air lainnya, tidak untuk dikonsumsi manusia	2301
82	Endapan minuman fermentasi; kerak minuman fermentasi	2307
83	Tembakau belum dipabrikasi dan sisa tembakau	2401
84	Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi	2403

Sumber: Statistik Ekspor-Impor tahun 2000-2002, BPS (diolah).

Tahap kedua, dipilih produk/komoditas yang pangsaanya terhadap PDB pertanian 5 persen atau lebih. Dari indikator ini, maka terpilih 12 komoditas/produk yang memenuhi indikator tersebut (Tabel 37). Produk tersebut adalah beras, kapuk, kelapa, tembakau, buah-buahan, unggas, sayuran, makanan/minuman lainnya, minyak hewani/nabati, jagung, ubi jalar, dan daging.

Tabel 37. Komoditas Terpilih sebagai PK berdasarkan Indikator PDB Pertanian

No	Komoditas/Produk Olahan	Pangsa terhadap Total GDP Pertanian (%)
1	Padi dan beras	28,80
2	Kapuk bersih dan benang	21,41
3	Kelapa dan kopra	14,35
4	Tembakau dan tembakau olahan	12,52
5	Buah-buahan	12,18
6	Unggas dan hasil-hasilnya	9,67
7	Sayur-sayuran	7,23
8	Makanan lainnya dan minuman beralkohol	6,25
9	Minyak hewani dan minyak nabati	5,57
10	Jagung dan pakan ternak	5,51
11	Ubi jalar dan umbi-umbian lainnya	5,31
12	Ternak dan hasil-hasilnya kecuali susu segar dan daging/jeroan sejenisnya dan daging olahan/awetan	5,24

Sumber: Tabel Input-Output Indonesia tahun 2000 (diolah).

Tahap ketiga, dipilih produk/komoditas pertanian yang memenuhi indikator konsumsi kalori 5 persen atau lebih. Hasilnya adalah terpilih 4 produk yang memenuhi syarat sebagai calon PK, yaitu beras, kelapa, kelapa sawit, dan gula (Tabel 38).

Tahap keempat, dipilih produk/komoditas pertanian yang memenuhi indikator konsumsi protein 5 persen atau lebih. Hasilnya terpilih hanya 3 produk yang memenuhi syarat sebagai calon PK, yaitu beras, kedelai dan unggas (Tabel 39).

Tabel 38. Komoditas Terpilih sebagai PK berdasarkan Indikator Konsumsi Kalori

No	Komoditas/Produk Olahan	Pangsa terhadap Kalori (%)
1	Padi dan beras	51,60
2	Kelapa dan kopra	7,11
3	Kelapa sawit	5,59
4	Tebu dan gula	5,58

Sumber: Data Susenas tahun 2003 (olahan).

Tabel 39. Komoditas Terpilih sebagai PK berdasarkan Indikator Konsumsi Protein

No	Komoditas/Produk Olahan	Pangsa terhadap Total Protein (%)
1	Padi dan Beras	44,59
2	Kedelai dan Olahannya	9,66
3	Unggas dan Hasil-hasilnya	6,06

Sumber: Data Susenas tahun 2003 (olahan).

Tahap kelima, dipilih produk/komoditas pertanian yang menyerap tenaga kerja terhadap *total agriculture employment* 5 persen atau lebih. Produk yang terpilih sejumlah 5 jenis, yaitu beras, sayuran, buah-buahan, ubijalar, dan jagung (Tabel 40).

Tahap terakhir, penggabungan semua indikator (tahap pertama sampai dengan tahap kelima) di atas seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 38. Terdapat 12 produk/komoditas yang berhak mendapatkan PK sesuai dengan indikator seperti yang telah di bahas di muka, yaitu: beras, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan, gula, tembakau, daging ternak besar, unggas, minyak hewani/nabati, makanan lainnya/minuman beralkohol, dan kapuk/benang.

Tabel 40. Komoditas Terpilih sebagai SP berdasarkan Indikator Tenaga Kerja Pertanian

No	Komoditas/Produk Olahan	Pangsa terhadap Total Tenaga Kerja Pertanian (%)
1	Padi dan Beras	28,79
2	Sayur-sayuran	13,92
3	Buah-buahan	12,25
4	Ubi jalar dan Umbi-umbian lainnya	6,43
5	Jagung dan Pakan Ternak	5,92

Sumber: Tabel Input-Output Indonesia tahun 2000 (olahan)

Fleksibilitas pemilihan PK usulan Indonesia berdasarkan beberapa kriteria seperti diuraikan pada subbagian terdahulu menghasilkan banyak sekali kemungkinan produk yang memenuhi syarat. Proses penyaringan dilakukan dalam beberapa tahap analisa. Tahap pertama, dilakukan dengan menghitung komoditas/produk pertanian yang menjadi *net import* rata-rata periode terakhir 2000-2002 (menggunakan data Input-Output Indonesia 2002). Apabila produk/komoditas ini dirinci dalam HS 4 digit, maka tersaring 84 jenis produk. Hampir seluruhnya adalah berupa pangan, termasuk di dalamnya buah-buahan dan sayuran, daging, susu/keju, dan makanan jadi.

Tahap kedua, memilih produk/komoditas yang pangasanya terhadap GDP pertanian 5 persen atau lebih. Dari indikator ini, terpilih 12 komoditas/produk yang sesuai. Produk tersebut adalah beras, kapuk,

kelapa, tembakau, buah-buahan, unggas, sayuran, makanan/minuman lainnya, minyak hewani/nabati, jagung, ubijalar, dan daging. Tahap ketiga, memilih produk/komoditas pertanian yang memenuhi indikator konsumsi kalori 5 persen atau lebih. Hasilnya terpilih 4 produk yang memenuhi syarat sebagai calon PK, yaitu beras, kelapa, kelapa sawit, dan gula. Tahap keempat, memilih produk/komoditas pertanian yang memenuhi indikator konsumsi protein 5 persen atau lebih. Hasilnya terpilih hanya 3 produk, yaitu beras, kedelai, dan unggas. Tahap kelima, memilih produk/komoditas pertanian yang menyerap tenaga kerja terhadap tenaga kerja pertanian total 5 persen atau lebih. Produk yang terpilih ada lima jenis: beras, sayuran, buah-buahan, ubijalar, dan jagung. Tahap terakhir, penggabungan semua indikator yang merupakan penggabungan tahap pertama sampai dengan tahap kelima. Hasilnya adalah 12 produk/komoditas yang berhak mendapatkan PK sesuai dengan indikator seperti yang telah di bahas di muka, yaitu: beras, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan, gula, tembakau, daging ternak besar, unggas, minyak hewani/nabati, makanan lainnya/minuman beralkohol, dan kapuk/benang (lihat penjelasan sebelumnya dan Sawit *et al.*, 2005).

Setelah pertemuan K 33 di Jakarta pada 11-12 Juni 2005 yang lalu disepakati beberapa alternatif indikator dari tiga kriteria *food security*; *livelihood security* dan *rural development*. Indonesia telah mengambil inisiatif untuk pemilihan SP yang lebih fleksibel, bukan dengan metoda kuantitatif. Pada tanggal 22 Agustus 2005, diadakan rapat di Departemen Pertanian untuk membahas indikator dari masing-masing kriteria SP. Dalam rapat tersebut dirumuskan setidaknya 40 calon indikator yang terdiri dari 12 indikator untuk kriteria *food security*, 14 indikator untuk kriteria *livelihood security* dan 14 indikator untuk *rural development*. Sebagai tindak lanjut dari adanya list indikator tersebut, Tim Peneliti memilih indikator yang kemungkinan dapat dipakai dalam penentuan SP secara lebih rinci dan sederhana terutama yang berkaitan dengan ketersediaan data kuantitatif karena yang bersifat kualitatif disiapkan oleh Tim Lainnya dari Departemen Pertanian. Hasil rapat tim memutuskan untuk mencoba menggunakan 5 indikator untuk kriteria *food security*, 7 indikator kriteria *livelihood security* dan 7 indikator untuk kriteria *rural development*. Rincian indikator untuk masing-masing kriteria tertera pada Tabel 41.

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>

Hasil analisa penentuan berdasarkan indikator pada Tabel 42 dari masing-masing kriteria menunjukkan bahwa untuk kriteria *food security* terjaring 23 komoditas, kemudian untuk kriteria *livelihood security* terjaring 36 komoditas atau kelompok komoditas dan untuk kriteria *rural development* terjaring 32 komoditas (lihat Lampiran Tabel 15, 16, dan 17).

Tabel 42. Indikator yang digunakan dalam Penentuan PK dan *Threshold*-nya

No	Kriteria/Indikator	Threshold	Keterangan
<b>I. Food Security</b>			
1.	<i>Strategic food commodities and staples, or staples consumed by at least a ___% of the national or regional population</i>	2%	Nilai 2 % konsumsi adalah setara dengan konsumsi sekitar 5 juta jiwa
2.	<i>Self Sufficiency Ratio</i>	75%	Self Sufficiency Rata-rata yang ingin dicapai pemerintah Indonesia (berdasarkan RPJM) adalah 90 %. Namun demikian dalam kajian minimal self sufficient pangan perlu dilindungi dari banjir impor. Angka untuk komoditas pangan bervariasi dari sekitar 55 % hingga 95 %, sehingga diusulkan dipakai angka tengah, yaitu 75 %.
3.	<i>Contribution of product to total calorie requirement at national level</i>	1%	Nilai 1 % konsumsi adalah setara dengan konsumsi sekitar 2,5 juta jiwa. Untuk memperoleh nilai tonase tinggal mengalikan konsumsi per kapita pola pangan harapan (PPH)
4.	<i>Contribution of product to total protein requirement at national level</i>	1%	Nilai 1 % konsumsi adalah setara dengan konsumsi sekitar 2,5 juta jiwa Untuk memperoleh nilai tonase tinggal mengalikan konsumsi per kapita pola pangan harapan (PPH)
5.	<i>Impor Dependency Ratio</i>	2%	Nilai 2 % konsumsi adalah setara dengan konsumsi sekitar 5 juta jiwa. Untuk mendapatkan tonase tinggal mengalikan konsumsi per kapita saat ini.
<b>II. Livelihood Security</b>			
1.	<i>Value of product in a particular region as a percentage of the region's agricultural GDP</i>	2%	Nilai 2 % kontribusi adalah sebesar Rp. 1,08 Trilyun untuk produk pertanian segar (Raw Material), Rp. 8,21 Trilyun untuk komoditas agroindustri dan Rp. 9,29 Trilyun untuk segar ditambah olahan.
2.	<i>Share of labor force employed in a particular sector</i>	2%	Nilai 2 % adalah setara dengan 831 ribu tenaga kerja pertanian, 134 ribu tenaga kerja pengolahan hasil pertanian dan 965 ribu orang tenaga kerja pertanian dan olahannya.
3.	<i>Absolute number of persons employed in the production of particular product either within a region or national level</i>	>50.000 Org	Nilai ini merupakan justifikasi dari jumlah tenaga kerja rata-rata komoditas pertanian segar dan komoditas olahan. Perlindungan diperlukan untuk setiap komoditas yang mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 50 ribu orang.

Tabel 42. Lanjutan

No	Kriteria/Indikator	Threshold	Keterangan
<b>I. Food Security</b>			
4.	<i>% of agricultural land under cultivation of assigned to the crops or livestock in a region or at the national level</i>	2%	Nilai 2 % lahan adalah setara dengan 701 ribu Ha lahan budidaya komoditas, untuk ternak setara dengan 20 juta ekor unggas dan 815 ribu untuk ruminansia.
5.	<i>Area hectare per worker production take place in units less than X ha – for instance 5 Ha</i>	< 5 Ha	Penguasaan lahan pertanian diperkenan 5 Ha untuk Jawa dan 10 Ha untuk luar Jawa berdasarkan UUPA 1960. Penguasaan kurang dari 5 Ha harus dilindungi.
6.	<i>Total area under cultivation of a particular product/ total number of heads of livestock at the national and regional level or proportion of hectareage of some other indicator of relative sector/ sub sector size to national or regional aggregate</i>	2%	Nilai 2 % lahan adalah setara dengan 701 ribu Ha lahan budidaya komoditas, untuk ternak setara dengan 20 juta ekor unggas dan 815 ribu untuk ruminansia.
7.	<i>Contribution of small farmers to total output of a particular product</i>	45%	Nilai 45 persen adalah rata-rata untuk penguasaan skala kecil pertanian segar dan olahan.
<b>III. Rural Development</b>			
1.	<i>Income generation : value of output in overall agriculture/ share in Agriculture GDP at national or regional and its growth rate</i>	2%	Nilai 2 % kontribusi adalah sebesar Rp. 1,08 Trilyun untuk produk pertanian segar (Raw Material), Rp. 8,21 Trilyun untuk komoditas agroindustri dan Rp. 9,29 Trilyun untuk segar ditambah olahan.
2.	<i>Value of backward linkage (production cost except labor) attributed to product in a give region/ at national level as a percentage of the agricultural GDP of the region or country. Also referred to Power Dispersion Index</i>	> 1	Nilai Standard untuk penentuan komoditas unggulan berdasarkan analisa I-O
3.	<i>Potential of forward linkage (contribution to value added industries)/ multiplier effects. Also referred to as Sensitive Dispersion</i>	> 1	Nilai Standard untuk penentuan komoditas unggulan berdasarkan analisa I-O
4.	<i>Value of Forward and Backward Linkage</i>	> 1,8	Nilai ini merupakan penjumlahan dari backward dan forward linkage berdasarkan analisa I-O. Nilai 1,8 diambil mengingat 0,9 dari nilai backward atau forward linkage adalah mendekati 1

Tabel 42. Lanjutan

No	Kriteria/Indikator	Threshold	Keterangan
1.	<i>Food Security</i>		
5.	<i>Contribution of small farmers to total output of a particular product</i>	45%	Nilai kontribusi rata-rata skala kecil 45,09 persen pertanian segar dan olahan.
6.	<i>Agricultural value added per worker</i>	< Rp. 10 Jt	Nilai ini setara dengan nilai UMR dan Nilai Standard kemiskinan minimal USD 3 per hari atau USD 1000 per kapita per tahun
7.	<i>Absolute number of persons employed in the production of particular product either within a region or national level</i>	>50.000 Org	Nilai ini merupakan justifikasi dari jumlah tenaga kerja rata-rata komoditas pertanian segar dan komoditas olahan. Perlindungan diperlukan untuk setiap komoditas yang mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 50 ribu orang.

Pemilihan PK didasarkan atas gabungan dari kriteria *food security criteria*, *livelihood security criteria* dan *rural development criteria* atau ketiga kriteria tersebut. Adapun komoditas yang memenuhi gabungan dari ketiga kriteria tersebut adalah 20 komoditas; seperti yang tersaji pada Tabel 43. Ke duapuluh komoditas tersebut adalah: Padi; Jagung; Kedelai; Kacang Tanah; Cabe Merah Besar, Keriting dan Rawit; Tomat; Kentang; Pisang; Jeruk; Sayuran dan Buah-buahan lainnya; Kelapa; Kelapa sawit; Kopi; Cengkeh; Tanaman Rempah dan Obat; Kapuk, Kapas dan Tanaman Serat; Tanaman Pertanian Lainnya; Ternak Kecuali Susu Segar; Susu Segar; Unggas dan hasil-hasilnya. Hasil ini sedikit berbeda dari apa yang dihasilkan oleh Tim Peneliti dengan metoda I/O nya pada tahun 2004 (lihat Hutabarat *et al.*, 2004) dan dari kriteria di atas.

Isu pemilihan dan penentuan produk khusus/PK telah juga ditanggapi oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. Misalnya, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sejalan dengan tiga kerangka landasan pentingnya keberadaan produk khusus pertanian, maka Pemda Sulawesi Selatan mencanangkan program "Gerbang Mas". Program Gerbang Mas merupakan kependekan Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan yang diluncurkan pada awal tahun 2005 untuk 11 komoditas pangan dan peternakan di setiap kabupaten yang menjadi sentra produksi komoditas yang bersangkutan. Guna mendukung ketahanan pangan, pembangunan pedesaan, dan ketahanan rumah tangga pedesaan, maka komoditas yang ditetapkan dalam program Gerbang Mas merupakan komoditas yang mayoritas diupayakan oleh petani setempat. Tanaman pangan yang diprioritaskan meliputi padi dan jagung dengan sentra produksi padi di Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrenreng Rappang, Pinrang dan Luwu, sedangkan sentra produksi jagung di Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Takalar, Sinjai, dan Jeneponto. Program Gerbang Mas tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan mutu beras serta jagung, sehingga dapat berdaya saing dengan beras dan jagung impor. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan Sulawesi Selatan menjadi daerah lumbung beras bagi wilayah Indonesia Timur,

sehingga ketahanan pangan dan rumah tangga di kawasan timur Indonesia dapat terjaga kemantapannya melalui pasokan yang diperoleh dan dikelola dari sumber daya setempat.

Tabel 43. Ringkasan Hasil Analisa Indikator Kriteria Penentuan PK

No	Komoditas	Kriteria			Kombinasi
		(1)	(2)	(3)	(1) + (2) + (3)
1	Padi	*	*	*	*
2	Jagung	*	*	*	*
3	Gandum	*			
4	Padi-padian lainnya	*	*		
5	Ubikayu	*	*		
6	Ubi Jalar dan Umbi-umbian Lainnya		*	*	
7	Kedelai	*	*	*	*
8	Kc. Tanah	*	*	*	*
9	Kc. Hijau, Kc. Merah dan Kc.-kacangan lainnya		*		
10	Cabe Merah Besar, Keriting dan Rawit	*	*	*	*
11	Tomat	*	*	*	*
12	Bawang Merah, Bawang Putih dan Bawang Daun		*	*	
13	Kentang	*	*	*	*
14	Kol/Kubis		*	*	
15	Pisang	*	*	*	*
16	Mangga		*	*	
17	Jeruk	*	*	*	*
18	Nenas		*	*	
19	Durian		*	*	
20	Sayuran dan Buah-buahan lainnya	*	*	*	*
21	Kelapa	*	*	*	*
22	Kelapa sawit	*	*	*	*
23	Tebu		*	*	
24	Karet		*	*	
25	Kopi	*	*	*	*
26	Teh		*	*	
27	Kakao		*	*	
28	Jambu Mete		*	*	
29	Cengkeh	*	*	*	*
30	Tembakau		*	*	
31	Tanaman Rempah dan Obat	*	*	*	*
32	Kapuk, Kapas dan Tanaman Serat	*	*	*	*
33	Tanaman Pertanian Lainnya	*	*	*	*
34	Ternak Kecuali Susu Segar	*	*	*	*
35	Susu Segar	*	*	*	*
36	Unggas dan hasil-hasilnya	*	*	*	*
37	Hasil Peternakan lainnya		*		
Jumlah		23	36	32	20

Keterangan: (1). Kriteria Food Security; (2). Kriteria Livehood; (3). Kriteria Rural Development

#### 4.4. Penurunan Tarif

##### 4.4.1. Profil Tarif (Bound Tariff) di Negara Anggota G-33

Sebagaimana diketahui bahwa sejumlah negara-negara berkembang yang sangat peduli pada fasilitas Produk Khusus/PK atau *Special Products/SP* dan Mekanisme Pengamanan Khusus/MPK atau *Special Safeguard Mechanism/SSM* terhimpun dalam suatu kelompok informal K 33 yang diharapkan dapat mendesak kepentingannya di dalam forum negosiasi. Namun, untuk merumuskan suatu atau beberapa usulan tentang modalitas penurunan tarif yang dapat diterima semua anggota, ada baiknya kita mengetahui secara garis besar bagaimana sebenarnya wajah tarif tersebut, seperti yang diuraikan dalam subbab ini.

Sampai pada akhir bulan Agustus 2005, jumlah anggota kelompok K 33 telah mencapai 44 negara yang tersebar di tiga benua-benua: Asia, Afrika, dan Amerika. Dari ke 44 negara tersebut tercatat ada sejumlah 16.540 pos tarif dengan rata-rata 63,96 persen dan berkisar dari 0 persen sampai dengan 887,4 persen (Tabel 44).

Lima negara dengan jumlah pos tarif terbesar adalah Indonesia (1.341 pos tarif), Korea Selatan (1.239) China (977 pos tarif), Guatemala (812), dan El Salvador (764) [Tabel 45], sebaliknya dua negara dengan jumlah pos tarif terkecil adalah Nikaragua (35 pos tarif), dan Mongolia (94) dan sebanyak duabelas negara memiliki pos tarif yang jumlahnya sama sebanyak 217, yaitu Kongo, Republik Dominika, Guyana, Honduras, Jamaika, Kenya, Sri Lanka, Madagaskar, Mozambik, Nigeria, Senegal, dan Tanzania.

Tabel 44. Rataan Pos Tarif (*Bound*) pada K 33

Statistik	Nilai
Banyak pos tariff	16.540
Nilai terkecil (persen)	0
Nilai terbesar (persen)	887,4
Rataan (persen)	63,96

Tabel 45. Lima Negara dengan Jumlah Pos Tarif (*Bound*) Terbanyak pada K 33

Negara	Jumlah Pos Tarif	Rentang Tarif (%)	Rataan Tarif (%)
Indonesia	1.341	0,00-210,0	48,02
Korea Selatan	1.239	1,80-887,4	58,40
China	977	0,00-74,0	19,28
Guatemala	812	10,0-257,0	49,14
El Salvador	764	20,0-164,4	40,83

Di lima negara dengan jumlah pos tarif terbesar dan kisaran besarnya tarif adalah: 0 persen-210 persen dengan rata-rata 48,02 persen untuk Indonesia; 1,8 persen-887 persen dengan rata-rata 58,40 persen untuk Korea Selatan; 0 persen-74 persen dengan rata-rata 19,28 persen

untuk China; 10 persen–257 persen dengan rata-rata 49,19 persen untuk Guatemala; dan 20 persen–164,4 persen, dengan rata-rata 40,83 persen untuk El Salvador. Pada dua negara dengan jumlah pos tarif terkecil, kisaran besarnya tarif adalah 60 persen–200 persen, dengan rata-rata 73,43 persen untuk Nikaragua, 5 persen sampai 75 persen, dengan rata-rata 19,15 persen untuk Mongolia. Selanjutnya dari 12 negara yang memiliki jumlah pos tarif yang sama (251 pos tarif), semuanya mempunyai tarif yang sama untuk ke 217 pos tarif tersebut, hanya saja besarnya berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Kalau diurut dari tarif yang terkecil sampai terbesar adalah Kongo, Senegal, dan Madagaskar sebesar 30 persen; Honduras, sebesar 35 persen; Republik Dominika, 40 persen; Sri Lanka, 50 persen; Jamaika, Kenya, dan Guyana, 100 persen; Tanzania, 120 persen dan Nigeria, 150 persen.

Kelompok komoditas (pada 2 digit atau *chapter*, lihat Lampiran Tabel 18), jumlah pos tarif terbesar adalah kelompok 15 (lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk disosiasinya; lemak olahan yang dapat dimakan; malam hewani atau malam nabati) dengan jumlah pos tarif sebanyak 1.426 atau sekitar 8,62 persen, dan jumlah total pos tarif, diikuti kelompok 7 (sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan) dengan 1.188 jumlah pos tarif (7,18%); kelompok 12 (biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir, biji dan buah; tanaman industri atau tanaman obat; jerami dan makanan ternak) yang memiliki 1.096 pos tarif (6,63%); kelompok 8 (buah dan biji/kacang yang dapat dimakan; kulit dan buah jeruk dan melon) dengan 1.077 pos tarif (6,51%); dan kelompok 20 (olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman) dengan 1.010 pos tarif (6,11%) [Tabel 46]. Dengan kata lain ke 5 kelompok ini memiliki 5.797 pos tarif, atau 35,05 persen dari jumlah total pos tarif. Kelompok komoditas dengan jumlah pos tarif terkecil adalah kelompok 29 (bahan kimia organik) dengan hanya 82 pos tarif, atau 0,5 persen; kelompok 38 (aneka produk kimia) dengan 83 pos tarif, atau 0,5 persen; kelompok 43 dengan 103 pos tarif, 0,62 persen; kelompok 53 dengan 118 pos tarif, 0,71 persen; dan kelompok 52 dengan 139 pos tarif 0,89 persen. Kelima kelompok ini hanya memiliki 525 pos tarif, atau 3,17 dari total seluruh pos tarif.

Selanjutnya dari Tabel 43 terlihat bahwa Kelompok 7 memiliki rata-rata tarif tertinggi (71,3%), diikuti Kelompok 8 (63,6%), Kelompok 20 (56,8%), dan Kelompok 15 (55,8%).

Tabel 46. Lima Kelompok Komoditas (*Chapter*) dengan Jumlah Pos Tarif (*Bound*) Terbanyak pada K 33

Negara	Jumlah Pos Tarif	Rentang Tarif (%)	Rataan Tarif (%)
Kelompok 15	1.426	0,0-300,0	55,81
Kelompok 7	1.188	0,0-887,4	71,32
Kelompok 12	1.096	0,0-754,0	58,80
Kelompok 8	1.077	0,0-250,0	63,64
Kelompok 20	1.010	0,0-150,0	56,76

Tiga negara yang memiliki jumlah pos tarif terbesar di kelompok 15 adalah Turki (108 pos tarif), Korea (106 pos tarif), Indonesia (97 pos tarif). Tiga negara dengan jumlah pos tarif terbesar di kelompok 7 masing-masing adalah China (90 pos tarif), Indonesia (81 pos tarif), Korea (78 pos tarif). Di kelompok 12, tiga negara dengan pos tarif terbanyak adalah China (103 pos), Indonesia (78 pos) dan Turki (72 pos); dan di kelompok 8 adalah Indonesia (82 pos), China (78 pos), El Salvador (61 pos); di kelompok 20 empat negara dengan jumlah terbesar adalah Indonesia (116 pos), Korea (90 pos), China, dan Panama (masing-masing 75 pos).

Dari lima kelompok komoditas dengan jumlah pos tarif terbanyak, besarnya tarif adalah: 0 persen–300 persen, dengan rata-rata 69,32 persen untuk kelompok 15; 0 persen–887,4 persen, dengan rata-rata 67,88 persen untuk kelompok 7; 0 persen–754,3 persen, rata-rata 58,80 persen untuk kelompok 8; dan 0 persen–150 persen, rata-rata 56,76 persen untuk kelompok 20. Selanjutnya, lima kelompok komoditas dengan jumlah pos tarif terkecil mempunyai besaran tarif: 0 persen–150 persen, dengan rata-rata 68,59 persen untuk kelompok 29; 0 persen–150 persen, rata-rata 67,09 persen untuk kelompok 38; 0 persen–150 persen, rata-rata 57,04 persen untuk kelompok 43; 0 persen–150 persen, rata-rata 55,60 persen untuk kelompok 53; dan 2 persen–150 persen, rata-rata 64,99 persen untuk kelompok 52.

Untuk mengkaji lebih lanjut profil tarif ini, ada baiknya juga untuk mengelompokkan tarif ke dalam selang nilai tertentu, sesuai dengan apa yang dibahas dalam sidang-sidang komisi pertanian yang diusulkan sebelumnya, khususnya tentang pengelompokan yang berdasarkan jenjang (*tier*) dan atau “*threshold*” atau “*band*”. Sampai saat ini telah banyak usulan tentang banyaknya jenjang dan batas nilai tarif suatu jenjang. Setiap usulan ini tentu akan memberikan konfigurasi jumlah dan rata-rata tarif yang berbeda-beda satu sama lain. K 20 dan Uni Eropa untuk negara berkembang (NB) mengusulkan pengelompokan tarif sebanyak 4 jenjang, yaitu: Jenjang 1,  $T \leq 30$ ; Jenjang 2,  $30 < T \leq 80$ ; Jenjang 3,  $80 < T \leq 130$ ; dan Jenjang 4,  $T > 130$ .

Banyaknya pos tarif yang termasuk pada Jenjang 1 adalah 4.889 pos, atau 29,56 persen dari seluruh tarif di K 33, dengan kisaran dari 0 persen–30 persen, dan rata-rata 18,99 persen. Ke dalam kelompok 2 terdapat sejumlah 5.745 pos tarif (34,73%) yang berkisar dari 30,8 persen–80 persen dan rata-rata 45,16 persen. Pada kelompok 3 terdapat 4.797 pos tarif (29,00%) dengan kisaran dari 81 persen–130 persen dan rata-rata 103,92 persen. Kelompok 4 mempunyai pos tarif sejumlah 1.109 pos tarif (6,71%) dengan selang dari 130,4 persen–887,4 persen dan rata-rata 186,91 persen (Tabel 47).

Lima negara dengan pos tarif terbanyak di Jenjang 1 adalah China dengan 855 pos tarif (17,49 persen); Korea 826 pos (16,90%); Turki, 341 pos (6,97%); Panama, 306 pos (626 persen); dan Filipina, 250 pos (5,11%) (Tabel 48). Sedangkan beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Antigua, Benia, Belize, Barbados, Kuba, Republik

Dominika, Guyana, Honduras, Jamaika, Kenya, Saint Lucia, Sri Lanka, Mozambik, Mauritius, Nigeria, Nicaragua, Trinidad dan Tabago, Tanzania, Nganda, Saint Vincent, dan Zambia.

Tabel 47. Persebaran Tarif (*Bound*) menurut Jenjang Tarif Usulan K 20

Jenjang Tarif	Jumlah Pos Tarif	Rentang Tarif (%)	Rataan Tarif (%)
T=<30	4.889 (29,56)	0,0-30,0	18,99
30<T=<80	5.745 (34,73)	30,8-80,0	45,16
80<T=<130	4.797 (29,00)	81,0-130,0	103,92
T>130	1.109 (6,71)	130,4-887,4	186,91

Keterangan: (angka dalam kurung) menunjukkan persentase terhadap jumlah tarif total di setiap jenjang.

Tabel 48. Negara-negara Anggota K 33 dengan Jumlah Pos Tarif (*Bound*) Terbanyak menurut Jenjang Tarif Usulan K 20

Kelompok/Chapter	Negara	Jumlah pos tariff	Selang tariff (%)	Rataan tariff (%)
T=<30	China	855 (17,49)	0,0-30,0	15,30
30<T=<80	Indonesia	1250 (21,76)	35,0-70,0	42,78
80<T=<130	Pakistan	671 (13,99)	100,0- 100,0	100,00
T>130	India	249 (22,45)	150,0- 300,0	165,66

Keterangan: (angka dalam kurung) menunjukkan persentase terhadap jumlah tarif total di setiap jenjang.

Di Jenjang 2, enam negara dengan pos tarif terbanyak adalah Indonesia dengan 1250 pos tarif (21,76%); Guatemala, 694 pos tarif (12,08 peren); El Salvador, 504 pos (8,77%); Filipina, 503 persen (8,76%); Korea dan Turki masing-masing dengan 305 pos tarif (5,31%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Antigua, Barbadas, Congo, Guyana, Jamaika, Kenya, Saint Lucia, Madagaskar, Mozambik, Nigeria, Pakistan, Senegal, Suriname, Trinidad dan Tobago, Tanzania, Saint Vincent, dan Zimbabwe.

Di Jenjang 3, lima negara dengan jumlah pos tarif terbanyak adalah Pakistan, dengan 671 pos tarif (13,99%); India, 323 pos (6,73%); St. Lucia, 278 (5,80%); St. Vincent, 273 pos (5,69%); dan Bagize, 262 pos (5,46%). Sedangkan negara-negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Pantai Gading, ongo, Kuba, Republik Dominika, Honduras, Haiti, Sri Lanka, Madagaskar, Nigeria, Peru, Filipina, Senegal, Suriname, Uganda, Zimbabwe, China, dan Mongolia.

Pada Jenjang 4, dengan kisaran tarif lebih besar dari 130 persen, lima negara dengan jumlah pos arif terbanyak adalah India dengan 249 pos tarif (22,45%); Nigeria, 217 pos (19,57%); Zimbabwe, 215 pos (19,39%); Korea, 91 pos (8,21%); dan Indonesia, 55 pos tarif (4,96%). Persebaran pos tarif dan kelompok komoditas dapat pula ditelusuri untuk setiap jenjang tarif seperti diperlihatkan Table 49.

Tabel 49. Lima Komoditas di Indonesia dengan Tarif Tertinggi menurut Jenjang Tarif Usulan K 20

Jenjang Tarif	Kelompok/ <i>Chapter</i>	Jumlah Pos Tarif	Rataan Tarif (%)
T=<30	Kelompok 13 dan 23	Masing-masing 1	30,00
30<T=<80	Kelompok 22	16	55,63
80<T=<130	Kelompok 17	14	95,00
T>130	Kelompok 4	12	210,00

Khusus di Indonesia, lima komoditas dengan rata-rata tarif tertinggi di Jenjang 1 adalah komoditas 13 (lak; getah, damar dan sap serta ekstrak nabati lainnya) dan 23 (residu dan sisa dari industri makanan; olahan makanan hewan) dengan rata-rata sebesar 30 persen dan masing-masing hanya 1 pos tarif; komoditas 10 (serealia), 35 (zat albumina; pati dimodifikasi; enzim) dan 52 (kapas) dengan rata-rata sebesar 27 persen dan jumlah pos tarif berturut-turut 5, 3 dan 1. Selanjutnya beberapa komoditas yang tidak memiliki pos tarif sama sekali di kelompok ini adalah komoditas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 33, 38, 41, 43, 50, 51, dan 53.

Di jenjang 2, semua komoditas memiliki pos tarif. Lima komoditas dengan rata-rata tarif tertinggi di Indonesia adalah komoditas 22 (minuman, alkohol dan cuka) dengan rata-rata 55,63 persen dan sejumlah 16 pos dan kisaran dari 40 persen–70 persen; komoditas 20 (olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman) dengan rata-rata 48,45 persen dan sejumlah 116 pos dan kisaran 40 persen–60 persen; komoditas 8 (buah dan biji/kacang yang dapat dimakan; kulit dari buah jeruk dan melon) dengan rata-rata 47,20 persen dan sejumlah 82 pos dan kisaran 40 persen–60 persen; komoditas 7 (Sayuran dan akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan) dengan rata-rata 46,42 persen dan sebanyak 81 pos dan kisaran 40 persen–60 persen; komoditas 2 (daging dan sisa daging yang dapat dimakan) yang mempunyai rata-rata 45,94 persen dan sebanyak 64 pos tarif dengan kisaran 40 persen–50 persen. Nilai rata-rata tarif terkecil adalah 40 persen yang dimiliki oleh beberapa komoditas antara lain 1, 4, 5, 10–19, 16–18, 23–25, 33, 35, 38, 41, 43, dan 50–53.

Pada jenjang 3, hanya komoditas 17 (gula dan kembang gula) yang memiliki pos tarif, yaitu sebanyak 14, yang semuanya bernilai 95 persen. Selainnya, tidak memiliki pos tarif sama sekali. Sedangkan pada Jenjang 4 hanya 3 komoditas yang memiliki pos tarif, yaitu kelompok 4 (produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain) dengan nilai 210 persen untuk semua pos tarif yang berjumlah 12; kelompok 10 (sereal) dengan nilai 160 persen untuk pos tarif yang berjumlah 8; dan kelompok 22 (minuman alkohol dan cuka) dengan nilai 150 persen untuk semua pos tarif yang berjumlah 35. Sisanya, tidak memiliki pos tarif sama sekali.

Untuk Indonesia sendiri, sebagian besar (lebih dari 90 persen dari jumlah seluruh tarifnya) berada di jenjang 2, hanya sedikit (kurang dari 5 persen) yang berada di jenjang 4 dan sedikit sekali (di bawah 1%) berada di jenjang 1 dan jenjang 3. Rataan tarif di jenjang 1 adalah 24.1 persen; di jenjang 2, 42.8 persen; di jenjang 3, 95.0 persen; dan di jenjang 4, 164.6 persen. Dalam perpektif ini jelaslah bahwa ada beberapa komoditas yang memang sebaiknya dipertahankan memiliki tarif yang tinggi dan sebahagian lagi memang dapat disarankan untuk masuk dalam kelompok penurunan tarif yang lebih cepat. Namun, pertimbangannya haruslah jelas dan diperkirakan dampak dan manfaatnya baik langsung maupun tidak langsung dan untuk jangka pendek atau jangka panjang harus dikaji, karena memang pertimbangan untuk masing-masing komoditas akan berbeda-beda. Hambatan tarif merupakan instrumen kebijakan yang paling tersedia saat ini bagi Indonesia. Kebijakan tarif ini dapat menangkal semakin derasnya arus dan konsumsi barang impor dan pada saat yang sama memberi pendapatan bagi pemerintah, tetapi sisi negatifnya adalah munculnya perdagangan yang menyimpang dari hukum, penyelundupan dan korupsi. Dalam kaitan ini, pengenaan tarif yang tinggi bagi kelompok 22, misalnya tidak akan menimbulkan masalah karena secara etika kita tidak menginginkan konsumsi komoditas ini semakin meningkat mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Untuk komoditas 4 pertimbangannya mungkin berbeda, yaitu justru kita menginginkan masyarakat semakin mudah memperoleh komoditas ini, sehingga barangkali pengenaan tarif tinggi mungkin kurang tepat.

Usulan yang disampaikan oleh Australia dan Amerika Serikat/AS tentang penjenjangan pos tarif adalah sebagai berikut: jenjang 1,  $T \leq 20$ ; jenjang 2,  $20 < T \leq 40$ ; jenjang 3,  $40 < T \leq 60$ ; dan jenjang 4,  $T > 60$ . Banyaknya pos tarif yang termasuk dalam jenjang 1 adalah 2.879 atau sekitar 17,41 persen dari jumlah pos tarif total di K 33 yang berkisar dari 0 persen–20 persen dan rata-rata 12,53 persen. Di jenjang 2 banyaknya pos tarif adalah 5.949 atau sekitar 35,97 persen dari jumlah pos tarif total yang berkisar dari 20,2 persen–40 persen dan rata-rata 35,42 persen; di jenjang 3 terdapat 1.340 pos tarif atau 8,10 persen dari jumlah pos tarif dengan kisaran 40,5 persen–60 persen dan rata-rata 52,62 persen; di jenjang 4 terdapat sebanyak 6.378 pos tarif atau 38,56 persen dari jumlah

pos tarif total yang mempunyai kisaran dari 60,3 persen–887,4 persen dan rata-rata 116,17 persen.

Lima negara yang mempunyai pos tarif terbanyak di jenjang 1 adalah China dengan 586 pos tarif (20,35%); Korea, 571 pos (19,83%); Turki dan Panama masing-masing 281 pos tarif (9,76%); dan Pantai Gading, 238 pos (8,27%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Antigua, Benin, Belize, Kongo, Kuba, Republik Dominika, Guyana, Honduras, Jamaika, Kenya, St Lucia, Sri Lanka, Madagaskar, Mozambik, Mauritius, Nigeria, Nikaragua, Pakistan, Peru, Senegal, Tanzania, Uganda, St Vincent, Zambia, dan Zimbabwe.

Untuk jenjang 2, lima negara dengan jumlah pos tarif terbanyak adalah Indonesia dengan 1.037 pos tarif atau 17,43 persen dari pos tarif di kelompok ini; El Salvador, 603 pos (10,14%); Filipina, 517 pos (8,69%); Korea Selatan 343 pos (5,77%); dan China, 329 pos (5,53%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif di kelompok ini adalah Antigua, Benin, Belize, Barbados, Guyana, Jamaika, Kenya, St Kitts dan Nevis, St. Lucia, Sri Lanka, Mozambik, Nigeria, Nikaragua, Suriname, Trinidad dan Tobago, Tanzania, St. Vincent, dan Zambia.

Pada jenjang 3, lima negara dengan jumlah pos terbanyak adalah Indonesia yang mempunyai 224 pos tarif (16,72%); Benin, 201 pos (15,0%); Korea Selatan, 183 pos (13,60%); Turki, 149 pos (11,12%); dan Filipina, 91 pos (6,79%). Beberapa negara yang tidak memiliki pos tarif sama sekali adalah Antigua, Belize, Barbados, Pantai Gading, Kongo, Kuba, Republik Dominika, Grenada, Guyana, Honduras, Jamaika, Kenya, St Lucia, Madagaskar, Mozambik, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Peru, Senegal, Suriname, Trinidad dan Tobago, Tanzania, St Vincent, dan Zimbabwe.

Di jenjang 4, lima negara dengan jumlah pos terbanyak adalah Pakistan yang memiliki 685 pos (10,74%); India, 574 pos (8,94%); St Lucia, 309 pos (4,84%); St Vincent, 302 pos (4,24%); St Kitts dan Nevis, 279 pos (4,73%). Sedangkan yang tidak memiliki pos tarif sama sekali adalah Kongo, Kuba, Republik Dominika, Honduras, Haiti, Sri Lanka, Madagaskar, Filipina, Senegal, Suriname.

Di Indonesia, hanya terdapat satu komoditas (*chapter*), yaitu kelompok 11 dengan empat pos tarif di jenjang 1 menurut usulan Australia dan Amerika Serikat, dengan nilai tarif yang sama 9,00 persen. Sedangkan di jenjang 2, lima komoditas dengan jumlah pos tarif terbanyak adalah kelompok 15 (lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk disosiasinya; lemak olahan yang dapat dimakan; malam hewani atau malam nabati) dengan jumlah 93 pos dengan rata-rata 39,84 persen dalam selang 35 persen–40 persen diikuti oleh kelompok 12 (biji dan buah mengandung minyak; bermacam-macam butir, biji dan buah; tanaman industri atau tanaman obat; jerami; dan makanan ternak) dengan jumlah 78 pos dengan rata-rata 39,04 persen, berkisar dari 27

persen–40 persen, kelompok 20 dengan jumlah 67 pos (olahan dari sayuran, buah, biji/kacang atau bagian lain dari tanaman) dan rata-rata 40 persen karena bernilai sama, kelompok 11 (produk industri penggilingan; malt; pati; inulin; gluten gandum) dan 14 (bahan anyaman nabati; produk nabati tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain) masing-masing berjumlah 61 pos dan rata-rata 40 persen dan bernilai sama.

Di jenjang 3, Indonesia memiliki lima komoditas dengan pos tarif terbanyak, yaitu kelompok 20 dengan 49 pos yang bernilai sama, yaitu 50 persen, kelompok 7 dengan 48 pos yang berkisar antara 50 persen–60 persen dan rata-rata 50,83 persen, kelompok 8 dengan 42 pos dengan kisaran 50 persen–60 persen dan rata-rata 54,05 persen, kelompok 2 (daging dan sisa daging yang dapat dimakan) dengan 39 pos yang bernilai sama 50 persen, dan kelompok 9 (kopi, teh dan rempah-rempah) dengan 16 pos dalam kisaran 50 persen–60 persen dengan rata-rata 55 persen.

Di jenjang 4 Indonesia hanya memiliki 4 kelompok (digit 2) yang memiliki pos tarif, yaitu kelompok 22 (minuman, alkohol, dan cuka) dengan sebanyak 42 pos dalam selang 70 persen -150 persen dengan rata-rata 136,67 persen, kelompok 17 (gula dan kembang gula) dengan jumlah 14 pos dengan nilai tarif yang sama 95 persen, kelompok 4 (produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain) dengan 12 pos dengan nilai tarif yang sama 210 persen dan kelompok 10 yang memiliki 8 pos tarif dengan nilai yang sama, 160 persen.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, usulan Uni Eropa tentang "band" dan "threshold" atau penjenjangan tarif sama seperti K 20, namun berbeda dalam rumus penurunan tarifnya.

#### 4.4.2. Skenario Penurunan Tarif

Sampai kini telah banyak usulan modalitas penurunan tarif (*bound tariff*) yang menjadi implementasi kesepakatan dalam pilar akses pasar. Sampai saat tercapainya kesepakatan di bulan Juli 2004 yang tertuang dalam paket Juli 2004 tercatat ada tiga macam usulan, yaitu: 1) Metoda Harbinson/Rumus Uruguay, 2) Rumus Swiss (*Swiss Formula*), dan 3) Rumus Berjenjang (*Tiered Formula*). Sementara itu, sejak Juli 2004 rumus-rumus tersebut mulai diimplementasikan melalui usulan-usulan yang dikenal dengan: (1) Usulan K 20, (2) Usulan Australia, (3) Usulan Amerika Serikat, (4) Usulan Uni Eropa yang berbeda satu sama lain. Seperti dikemukakan sebelumnya, K 20 mengusulkan 4 jenjang (*threshold* atau *band*) untuk seluruh pos tarif untuk NB dengan kisaran sebagai berikut: jenjang 1,  $T \leq 30$  persen; jenjang 2,  $30 \text{ persen} < T \leq 80$  persen; jenjang 3,  $80 \text{ persen} < T \leq 130$  persen; dan jenjang 4,  $T > 130$  persen, sedangkan penurunan tarifnya diusulkan secara garis lurus ("*linear cut*") dan dilakukan melalui dua skenario, sebagai berikut:

1. Skenario a: Jenjang 1 diturunkan 25 persen  
Jenjang 2 diturunkan 30 persen  
Jenjang 3 diturunkan 35 persen  
Jenjang 4 diturunkan 40 persen
2. Skenario b: Jenjang 1 diturunkan 45 persen  
Jenjang 2 diturunkan 55 persen  
Jenjang 3 diturunkan 65 persen  
Jenjang 4 diturunkan 75 persen

Untuk negara maju K 20 mengajukan usulan penurunan tarif yang berbeda menurut jenjang (5 buah) dan tingkat penurunannya, sebagai berikut: jenjang 1,  $T \leq 20$  persen; jenjang 2,  $20 \text{ persen} < T \leq 40$  persen; jenjang 3,  $40 \text{ persen} < T \leq 60$  persen; jenjang 4,  $60 \text{ persen} < T \leq 80$  persen; dan jenjang 5,  $T > 80$  persen. Tingkat penurunannya dilakukan secara garis lurus dan tingkat penurunan tarif bagi tarif yang tinggi lebih besar daripada tingkat penurunan tarif bagi tarif yang rendah. Sampai saat ini K 20 belum mempunyai usul yang nyata untuk penurunan tarif itu.

Usulan pengurangan tarif dari Australia dan Amerika Serikat menetapkan jenjang pos tarif yang sama dan berjumlah 4 dan untuk NB dan NM juga sama, yaitu: jenjang 1,  $T \leq 20$  persen; jenjang 2,  $20 \text{ persen} < T \leq 40$  persen; jenjang 3,  $40 \text{ persen} < T \leq 60$  persen; dan jenjang 4,  $T > 60$  persen. Namun, tingkat pengurangan tarif di setiap jenjang dari usulan Australia dan Amerika Serikat berbeda:

1. Usulan Australia : Jenjang 1 diturunkan 55 persen  
Jenjang 2 diturunkan 65 persen  
Jenjang 3 diturunkan 75 persen  
Jenjang 4 diturunkan 85 persen
2. Usulan Amerika Serikat: Jenjang 1 diturunkan antara 55–65 persen  
Jenjang 2 diturunkan antara 65 -75 persen  
Jenjang 3 diturunkan antara 75–85 persen  
Jenjang 4 diturunkan antara 85–90 persen

Uni Eropa (UE) juga telah mengajukan usul penurunan dan jenjang tarif yang berbeda antara NB dan NM. Jenjang pos tarif usulan UE untuk NB sama seperti yang diusulkan K 20, yaitu: jenjang 1,  $T \leq 30$  persen; jenjang 2,  $30 \text{ persen} < T \leq 80$  persen; jenjang 3,  $80 \text{ persen} < T \leq 130$  persen; dan jenjang 4,  $T > 130$  persen, tetapi tingkat penurunannya adalah:

- Jenjang 1 diturunkan 20 persen
- Jenjang 2 diturunkan 30 persen
- Jenjang 3 diturunkan 40 persen

Jenjang 4 diturunkan 50 persen

Untuk NM, UE mengajukan usul sebagai berikut: jenjang 1,  $T \leq 30$  persen; jenjang 2,  $30 \text{ persen} < T \leq 60$  persen; jenjang 3,  $60 \text{ persen} < T \leq 90$  persen; dan jenjang 4,  $T > 90$  persen dengan tingkat penurunan tarifnya adalah:

Jenjang 1 diturunkan 20 persen

Jenjang 2 diturunkan 45 persen

Jenjang 3 diturunkan 50 persen

Jenjang 4 diturunkan 60 persen

### **Usulan K 20**

Dengan penurunan tarif sebesar 25 persen pada Jenjang 1, secara umum rata-rata tarif berubah dari 18,99 persen menjadi 14,24 persen dengan selang dari 0 persen sampai 22,5 persen; sedangkan penurunan tarif pada jenjang 2 sebesar 30 persen menyebabkan rata-rata tarif berubah dari 45,16 persen menjadi 31,61 persen dengan kisaran 21,56 persen–56 persen; penurunan 35 persen pada jenjang 3 menyebabkan rata-rata tarif berubah dari 103,92 persen menjadi 67,55 persen yang berkisar dari 52,65 persen–84,5 persen; dan penurunan tarif sebesar 40 persen pada jenjang 4 menyebabkan rata-rata tarif berubah dari 186,91 persen menjadi 112,14 persen yang berkisar dari 78,24 persen–532,44 persen.

China dengan jumlah pos tarif terbanyak di jenjang 1 mengalami penurunan tarif dari rata-rata 15,30 persen menjadi 11,48 persen yang berkisar dari 0 persen–22,5 persen; Korea Selatan pada urutan nomor 2 dalam jumlah pos tarif mengalami penurunan tarif dari rata-rata 17,03 persen menjadi 12,77 persen dengan kisaran 1,35 persen–22,5 persen; Turki mengalami penurunan tarif dari 14,60 persen menjadi 10,95 persen, yang berkisar dari 0 persen–22,5 persen; Panama mendapatkan penurunan tarif dari 12,01 persen menjadi 9,01 persen dalam selang 0,75 persen–22,5 persen dan Filipina mendapatkan penurunan tarif dari 20,30 persen menjadi 15,23 persen dalam selang 2,25 persen–22,5 persen. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari 29,19 persen menjadi 18,10 persen, yang berkisar antara 6,75 persen–20,25 persen.

Di jenjang 2, Indonesia yang memiliki pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 42,78 persen menjadi 29,95 persen pada kisaran 29,5 persen–49 persen; diikuti masing-masing oleh Guatemala yang mendapatkan penurunan tarif dari 40,51 persen menjadi 28,36 persen dalam kisaran 24,5 persen–52,5 persen; El Salvador dengan penurunan tarif dari 43,12 persen menjadi 30,18 persen dalam selang 24,5 persen–55,3 persen; Filipina dengan penurunan tarif dari 41,03 persen menjadi 28,72 persen pada kisaran 24,5 persen–42 persen; dan Korea Selatan mendapatkan penurunan tarif dari 47,68 persen menjadi 33,38 persen dalam selang dari 22,05 persen–50,4 persen.

Pakistan dengan jumlah pos tarif terbanyak di jenjang 3 mengalami penurunan tarif dari 100 persen menjadi 65 persen, diikuti masing-masing oleh India yang mendapatkan penurunan tarif dari 99,54 persen menjadi 64,70 persen dalam selang 55,25 persen–65 persen; St Lucia dengan penurunan tarif dari 106,28 persen menjadi 69,08 persen dalam selang 65 persen–84,5 persen; St Vincent mengalami penurunan tarif dari 105,29 persen menjadi 68,44 persen dalam kisaran dari 65 persen–84,5 persen; dan Belize dengan penurunan tarif dari 101,80 persen menjadi 66,17 persen yang berada dalam kisaran 65 persen–71,5 persen. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari 95,0 persen menjadi 61,75 persen untuk semua pos tarif sebanyak 14 di jenjang itu.

Pada kelompok 4, India yang memiliki jumlah pos tarif yang tertinggi mendapatkan penurunan tarif dari 165,66 persen menjadi 99,40 persen dalam selang dari 150 persen–300 persen, diikuti Nigeria dengan penurunan tarifnya dari 150 persen menjadi 90 persen; Zimbabwe dengan tarif yang menurun dari 150 persen menjadi 90 persen; Korea Selatan dengan tarifnya yang menurun dari 463,22 persen menjadi 277,93 persen yang ada pada kisaran dari 86,4 persen–532,44 persen; Indonesia yang menurunkan tarifnya dari 169,55 persen menjadi 98,73 persen, yang ada pada selang dari 150 persen–210 persen.

### ***Usulan Australia dan Amerika Serikat (tingkat minimal)***

Penurunan tarif sebesar 55 persen di jenjang 1 secara umum menyebabkan penurunan rata-rata tarif dari 12,54 persen menjadi 5,64 persen dengan kisaran dari 0 persen–9 persen, sedangkan penurunan tarif sebesar 65 persen di jenjang 2 menyebabkan penurunan rata-rata tarif dari 35,42 persen menjadi 12,40 persen dengan kisaran dari 7,07 persen–14 persen; penurunan tarif sebesar 75 persen di jenjang 3 menyebabkan rata-rata tarif menurun dari 52,62 persen menjadi 13,15 persen dalam rentang tarif dari 10,1 persen–15 persen; penurunan tarif sebesar 85 persen di jenjang 4 menyebabkan rata-rata tarif menurun dari 116,17 persen menjadi 17,43 persen dalam rentang tarif dari 9,05 persen–133,11 persen.

China yang memiliki pos tarif terbanyak di jenjang 1 mendapatkan penurunan tarif dari 10,81 persen menjadi 4,87 persen dalam selang 0 persen–9 persen, diikuti oleh Korea Selatan dengan penurunan tarif dari 12,74 persen menjadi 5,72 persen dalam kisaran 8,81 persen–9 persen; Turki mengalami penurunan tarif dari 12,32 persen menjadi 5,59 persen, pada kisaran 0–9 persen; Panama dari 10,79 persen menjadi 4,83 persen dalam selang 0,45 persen–9 persen dan Pantai Gading dari 14,07 persen menjadi 6,33 dalam selang 1,8 persen–6,75 persen. Indonesia mengalami penurunan tarif dari 12,4 persen menjadi 4,1 persen dengan nilai yang sama untuk sebanyak 4 pos tarif.

Pada jenjang 2, Indonesia dengan tarif terbanyak mengalami penurunan tarif dari 39,76 persen menjadi 13,92 persen dalam selang

9,45 persen–14 persen disusul oleh El Salvador dari 35,70 persen menjadi 12,50 persen dalam selang 8,75 persen–14 persen; Filipina dari 37,25 persen menjadi 13,04 persen, yang ada pada kisaran dari 8,75 persen–14 persen; Korea Selatan dari 28,84 persen menjadi 10,10 persen pada kisaran 7,35 persen–14 persen; dan China dari 26,84 persen sampai 9,39 persen dalam selang 7,07 persen–14 persen.

Dalam jenjang 3, Indonesia dengan pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 54,71 persen menjadi 13,68 persen dalam selang 11,25 persen–15 persen disusul Benin dari 60 persen menjadi 15 persen yang semuanya sama bagi 201 pos tarif; Korea dari 49,85 persen menjadi 12,46 persen, yang berkisar dari 10,13 persen–13,5 persen; Turki dari 51,12 persen menjadi 12,78 persen dan berkisar dari 10,13 persen–15 persen; dan Filipina dari 49,07 persen menjadi 12,27 persen pada kisaran 1,25 persen–15 persen.

Pakistan sebagai negara dengan pos tarif terbanyak di jenjang 4 mengalami penurunan tarif dari 101,09 persen menjadi 10,11 persen dalam selang 10 persen–15 persen diikuti India dari 128,14 persen–12,81 persen dalam kisaran 7,5 persen–30 persen; St Lucia dari 111,91 persen menjadi 11,19 persen yang ada pada kisaran 10 persen–25 persen; St Vincent dari 110,97 persen menjadi 11,10 persen dalam selang 10 persen–25 persen; dan St Kitts dan Nevis dari 108,56 persen menjadi 10,86 persen dalam rentang 9,3 persen–25 persen. Bagi Indonesia terjadi penurunan tarif dari 143,0 persen menjadi 21,5 persen dalam rentang nilai tarif dari 10,5 persen–31,5 persen.

Selain itu Amerika Serikat juga mengusulkan penurunan tarif secara radikal dimana pos tarif di jenjang 1 dengan penurunan 65 persen; di jenjang 2 dengan penurunan 75 persen; di jenjang 3 dengan penurunan 85 persen; dan di jenjang 4 dengan penurunan 90 persen. Dengan menerapkan skenario ini maka di jenjang 1 terjadi penurunan rata-rata tarif dari 12,53 persen menjadi 4,39 persen dengan selang antara 0 persen–7 persen; di jenjang 2 terjadi penurunan rata-rata tarif dari 35,42 persen menjadi 8,86 persen dengan selang antara 5,05 persen–10 persen; di jenjang 3 terjadi penurunan rata-rata tarif dari 52,62 persen menjadi 7,89 persen dengan selang dari 6,075 persen–9 persen; di jenjang 4 terjadi penurunan rata-rata tarif dari 116,17 persen menjadi 11,62 persen dalam rentang tarif dari 6,03 persen–88,74 persen.

Dengan penurunan yang radikal ini, China dengan pos tarif terbanyak di jenjang 1, mengalami penurunan tarif dari 10,81 persen menjadi 3,78 persen dengan kisaran dari 0 persen–7 persen disusul Turki dari 12,74 persen menjadi 4,46 persen pada selang 0,63 persen–7 persen; Panama dari 10,74 persen menjadi 3,76 persen yang ada pada kisaran 0,35 persen–7 persen; Pantai Gading dari 14,07 persen menjadi 4,93 persen dalam kisaran 1,4 persen–5,25 persen. Untuk Indonesia terjadi penurunan tarif dari 12,4 persen menjadi 3,15 persen untuk semua pos tarif.

Indonesia dengan pos tarif terbanyak di jenjang 2 mendapatkan penurunan tarif dari 39,76 persen menjadi 9,94 persen dalam kisaran 6,75 persen–10 persen, diikuti El Salvador dari 35,70 persen menjadi 8,93 persen yang ada pada kisaran 6,25 persen–10 persen; Filipina dari 37,25 persen menjadi 9,31 persen dalam selang 6,25 persen–10 persen; Korea dari 28,84 persen menjadi 7,12 persen dalam kisaran 5,25 persen–10 persen; China dari 26,84 persen menjadi 6,71 persen yang ada pada kisaran 5,05 persen–10 persen.

Indonesia yang pada jenjang 3 juga mempunyai pos tarif terbanyak dalam skenario radikal ini mengalami penurunan tarif dari 54,71 persen menjadi 8,21 persen, yang berada dalam kisaran 6,75 persen–9 persen; diikuti Benin dari 60 persen menjadi 9 persen untuk semua pos tarif; Korea dari 49,85 persen menjadi 7,48 persen dengan kisaran 6,08 persen–8,1 persen; Turki dari 51,12 persen menjadi 7,67 persen pada kisaran 6,08 persen–0 persen; Filipina dari 49,07 persen menjadi 7,36 persen.

Dalam jenjang 4 dimana Pakistan mempunyai pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 101,09 persen menjadi 15,16 persen yang ada dalam kisaran 15 persen–30 persen disusul India dari 128,14 persen menjadi 19,22 persen dalam kisaran 11,25 persen–45 persen; St Lucia dari 111,91 persen menjadi 16,79 persen dalam selang 15 persen–37,5 persen; St Vincent dari 110,97 persen menjadi 11,94 persen yang ada pada selang dari 10,5 persen–12 persen; dan St Kitts dan Nevis dari 108,56 persen menjadi 16,28 persen dalam kisaran 13,95 persen–37,5 persen. Bagi Indonesia terjadi penurunan tarif dari 143,0 persen menjadi 14,30 persen dalam kisaran 7 persen–21 persen.

### ***Usulan Uni Eropa (UE)***

Penurunan tarif sesuai dengan usulan UE menyebabkan pos tarif di jenjang 1 berubah dari 18,99 persen menjadi 15,19 persen yang berada dalam kisaran 0 persen–24 persen; di jenjang 2 berubah dari 45,16 persen menjadi 31,61 persen dengan kisaran 21,56 persn–56 persen; di jenjang 3 berubah dari 103,92 persen menjadi 62,35 persen dalam kisaran 48,6 persen–78 persen; dan di jenjang 4 berubah dari 186,91 persen menjadi 93,45 persen, yang ada dalam kisaran 65,2 persen–443,7 persen.

Pada jenjang 1 dimana China mempunyai pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 15,30 persen menjadi 12,24 persen dalam kisaran 0 persen–24 persen, diikuti oleh Korea Selatan dari 17,03 persen menjadi 13,62 persen yang terbentang dari 1,44 persen–24,0 persen; Turki dari 14,60 persen menjadi 11,68 persen dalam bentang tarif dari 0 persen–24,0 persen; Panama dari 12,01 persen menjadi 9,61 persen dalam bentangan tarif dari 0,8 persen–24,0 persen; dan Filipina dari 20,30 persen menjadi 16,24 persen dalam rentang tarif dari 2,4 persen–24,0 persen. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari 24,14 persen menjadi 19,31 persen dalam rentangan dari 7,2 persen–24,0 persen.

Selanjutnya, di jenjang 2 yang menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan pos tarif terbanyak mengalami penurunan tarif dari 42,8 persen menjadi 29,9 persen dalam rentang tarif dari 24,5 persen–49,0 persen, disusul masing-masing oleh Guatemala dari 40,5 persen menjadi 28,4 persen dalam rentang tarif antara 24,5 persen–52,5 persen; El Salvador dari 43,1 persen menjadi 30,2 persen dalam rentang tarif dari 24,5 persen–55,3 persen; Filipina dari 41,0 persen menjadi 28,7 persen dalam selang antara 24,5–42,0 persen; dan Korea Selatan dari 47,7 persen menjadi 33,4 persen dalam rentang tarif 22,1 persen–50,4 persen.

Di jenjang 3 yang menempatkan Pakistan sebagai negara dengan pos tarif terbanyak mendapatkan penurunan tarif dari 100 persen menjadi 60 persen untuk semua pos tarif yang ada sebanyak 671, diikuti India dari 99,54 persen menjadi 59,72 persen dalam rentang tarif dari 51 persen–60 persen; St Lucia dari 106,28 persen menjadi 63,77 persen dengan rentang tarif dari 60 persen–78 persen; St Vincent dari 105,29 persen menjadi 63,18 persen dalam selang antara 60 persen–78 persen; dan Belize dari 101,80 persen menjadi 61,08 persen dalam selang 60 persen–66 persen. Indonesia sendiri mengalami penurunan tarif dari 95,0 persen menjadi 57 persen untuk semua pos tarif (sebanyak 14) di jenjang ini.

India dengan jumlah pos tarif terbanyak, 249 pos di jenjang 4 mendapatkan penurunan tarif dari 165,66 persen menjadi 82,83 persen dalam rentang dari 75 persen–150 persen disusul oleh Nigeria dari 150 persen menjadi 75 persen yang sama untuk semua pos tarif sebanyak 217; Zimbabwe dari 150 persen menjadi 75 persen juga untuk seluruh pos tarif sebanyak 215; Korea Selatan dari 463,22 persen menjadi 231,61 persen dalam rentangan 72 persen–443,7 persen; Indonesia dari 164,55 persen menjadi 82,27 persen dalam rentang 75 persen–105 persen.

Dengan menerapkan jenjang dan rentang tarif serta skenario penurunan tarif yang diusulkan berbagai kelompok negara di atas, dapat disimpulkan bahwa usulan dari Australia dan AS memberikan hasil penurunan tarif yang sangat drastis dibandingkan dengan usulan UE apalagi K 20 di setiap jenjang baik bagi Indonesia maupun K 33. Selain itu usulan Australia dan AS memberikan arah penurunan tarif yang berbeda antara jenjang 1 dan jenjang yang lain dimana pada jenjang 1 usulan Australia dan AS ini menyebabkan rata-rata tarif setelah penurunan di Indonesia lebih rendah dari pada di K 33, sedangkan di jenjang 2, Jenjang 3, dan Jenjang 4 rata-rata tarif Indonesia setelah diturunkan masih lebih tinggi daripada rata-rata tarif di K 33. Sedangkan usulan K 20 dan UE memberikan rata-rata tarif setelah penurunan di jenjang 1 lebih tinggi di Indonesia daripada di K 33 dan di jenjang 2, jenjang 3, dan jenjang 4 selalu lebih rendah daripada di K 33. Berhubung NB, terutama yang ada dalam K 33 masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam memodernisasikan ekonominya, maka usulan Australia dan AS ini agaknya akan lebih berisiko daripada usulan UE apalagi usulan K 20. Oleh karena itu, dengan memperbandingkan hasil-hasil tersebut usulan K

20 ini adalah lebih baik bagi Indonesia dan juga K 33 untuk disetujui. Kalau tidak, K 33 perlu mengkaji usulan penurunan tarif yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan ciri dan kerawanan sektor pertanian dan komoditas-komoditas pertanian andalannya di negara-negara anggota (Tabel 50). Jadi, penetapan penurunan tarif dan sasaran komoditasnya perlu dikaji secara mendalam untuk mengantisipasi dampaknya terhadap agribisnis komoditas, petani yang terlibat dan masyarakat secara luas.

Tabel 50. Perbandingan Hasil Skenario Penurunan Tarif menurut Jenjang Pos Tarif

Jenjang	K33			Indonesia		
	Selang Tarif (%)	Rataan Tarif (%)		Selang Tarif (%)	Rataan Tarif (%)	
		Lama	Baru		Lama	Baru
<b>Jenjang 1</b>						
K 20	0,0-22,5	19,0	14,2	6,8-20,3	24,1	18,1
UE	0,0-24,0	19,0	15,2	7,2-24,0	24,1	19,3
Australia/AS1	0,0-9,0	12,5	5,64	4,1-4,1	12,4	4,1
AS2	0,0-7,0	12,5	4,4	3,2-3,2	12,4	3,2
<b>Jenjang 2</b>						
K 20	21,6-56,0	45,2	31,6	24,5-49,0	42,8	30,0
UE	21,6-56,0	45,2	31,6	24,5-49,0	42,8	30,0
Australia/AS1	7,1-14,0	35,4	12,4	9,5-14,0	39,8	13,9
AS2	5,1-10,0	35,4	8,9	6,8-10,0	39,8	9,9
<b>Jenjang 3</b>						
K 20	52,7-84,5	103,9	67,6	61,8-61,8	95,0	61,8
UE	48,6-78,0	103,9	62,8	57,0-57,0	95,0	57,0
Australia/AS1	10,1-15,0	52,6	13,2	11,3-15,0	57,7	13,7
AS2	6,1-9,0	52,6	7,9	6,8-9,0	57,7	8,2
<b>Jenjang 4</b>						
K 20	78,2-532,4	186,9	112,1	150,0-210,0	164,6	98,7
UE	65,2-443,7	186,9	93,5	75,0-105,0	164,6	82,3
Australia/AS1	9,1-133,1	116,2	17,4	10,5-31,5	143,0	21,5
AS2	6,0-88,7	116,2	11,6	7,0-21,0	143,0	14,3

#### 4.5. Analisis Simulasi dengan Model Keseimbangan Umum ATPSM

##### 4.5.1. Dampak Resiprokal Berbagai Modalitas yang Diterapkan oleh Negara Pengekspor Utama ke Indonesia

Keikutsertaan Indonesia di dalam OPD selama kurun waktu 10 tahun telah memberi arti penting bagi peran Indonesia. Terbukti dengan ditetapkannya Indonesia sebagai koordinator kelompok negara 33/K 33 atau Group 33/G 33 yang terdiri dari negara-negara berkembang yang bertugas untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang,

khususnya menyangkut produk khusus dan mekanisme perlindungan khusus. Isu tarif dalam akses pasar telah mendominasi setiap pertemuan baik di tingkat komisi pertanian maupun Konferensi Tingkat Menteri (KTM).

Untuk melihat dampak modalitas penurunan ke tiga pilar PP, maka dirumuskan 7 skenario penurunan, yaitu (1) NM menurunkan BD 75 persen, NB tetap; (2) NM menurunkan BD 53 persen, NB tetap; (3) NM menurunkan BD 60 persen, NB tetap; (4) NM menurunkan BD 100 persen, NB tetap; (5) NM dan NB menurunkan BD 75 persen dan 50 persen; (6) NM dan NB menurunkan BD 53 persen dan 35 persen; dan (7) NM dan NB menurunkan BD 60 persen dan 40 persen (lihat Bab Metodologi).

Hasil simulasi ATPSM atas ketujuh skenario tersebut kemudian dianalisa dampaknya terhadap distribusi kesejahteraan bagi mitra dagang Indonesia di negara maju dan negara berkembang secara agregat dan Indonesia sendiri serta terhadap harga dunia atas komoditas pertanian (Tabel 51).

Tabel 51. Dampak Beberapa Skenario terhadap Harga Dunia dan Distribusi Kesejahteraan (dalam juta AS\$)

Skenario	Kelompok Negara	Surplus Konsumen	Surplus Produsen	Kesejahteraan Total	Perubahan Harga Dunia (%)
NM menurunkan BD 75%, NB tetap	NM	32.088,54	- 48.336,40	11.210,30	69
	NB	447,92	1.836,71	2.043,38	
	Indonesia	- 442,96	391,03	- 47,41	
NM menurunkan BD 53%, NB tetap	NM	32.146,38	- 39.770,48	10.478,71	69
	NB	495,32	1.791,48	2.049,98	
	Indonesia	- 440,83	389,04	- 47,31	
NM menurunkan BD 60%, NB tetap	NM	32.127,98	- 42.521,14	10.687,90	69
	NB	480,23	1.805,87	2.0477,88	
	Indonesia	- 441,51	389,67	- 47,34	
NM menurunkan BD 100%, NB tetap	NM	15.440,04	- 46.893,04	8.826,74	68
	NB	16.029,85	- 9.043,06	5.137,30	
	Indonesia	- 495,43	444,73	- 47,92	
NM dan NB menurunkan BD 75% dan 50%	NM	32.088,53	- 48.336,40	11.210,30	69
	NB	447,89	- 2.322,16	2.313,88	
	Indonesia	- 442,96	391,03	- 47,41	
NM dan NB menurunkan BD 53% dan 35%	NM	32.146,38	- 39.770,47	10.478,71	69
	NB	495,30	- 1.175,68	2.182,22	
	Indonesia	- 440,83	389,04	- 47,31	
NM dan NB menurunkan BD 60% dan 40%	NM	32.127,97	- 42.521,14	10.687,90	69
	NB	480,21	- 1.563,85	2.220,76	
	Indonesia	- 441,51	389,67	- 47,34	

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Secara umum hasil semua skenario tersebut mempunyai arah yang sama untuk NM, NB dan Indonesia. Dari besarnya dampak terhadap

distribusi kesejahteraan juga tidak banyak berbeda, meskipun pada beberapa skenario NB juga telah menurunkan BDnya.

Apabila NM melakukan liberalisasi dengan penurunan BD sebesar 75 persen atas produk eksportnya sedangkan negara berkembang tetap (penurunan tarif menurut Proposal Harbinson dan SE tidak diturunkan), berdampak positif bagi konsumen di negara maju dan negara berkembang, karena mereka menikmati peningkatan surplus sebesar 32 milyar dolar AS dan 447 juta dolar AS. Namun, bagi konsumen Indonesia kebijakan ini berdampak negatif karena surplusnya turun sebesar 442 juta dolar AS. Dari sisi produsen, kebijakan ini justru mendatangkan kerugian di negara maju, mereka harus kehilangan surplus sebesar 48,34 milyar dolar. Hasil ini menunjukkan bahwa sungguh sangat besar perlindungan dalam bentuk BD yang diberikan oleh NM kepada produsennya dan inilah yang menjadi penyebab timbulnya ketidakadilan pasar dan antar pelaku ekonomi di pasar internasional. Sebagai contoh, tahun 1999-2000 BD di negara Uni Eropa mencapai 87,89 milyar dolar AS. Di Indonesia, penurunan BD NM ini mendatangkan keuntungan bagi produsen dalam negeri dengan meningkatnya surplus sebesar 391 juta dolar AS. Kondisi ini dapat menjadi insentif bagi produsen/pengusaha Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri yang menjadi komoditas ekspor. Bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, liberalisasi ini mendatangkan kerugian sebesar 47 juta dolar AS.

Tidak berbeda dengan penurunan BD oleh negara maju sebesar 75 persen, liberalisasi penurunan BD sebesar 53 persen, 60 persen dan 100 persen memberikan dampak yang sama. Kesimpulannya juga sama apabila dilakukan kombinasi penurunan BD antara NM dan NB sesuai usulan K 20, AS, dan UE. Tampaknya, negara-negara berkembang harus terus berjuang menyerukan penurunan BD oleh negara maju agar tercipta keadilan bagi pelaku ekonomi di pasar global. Telah saatnya juga NM membuka pasar domestiknya dengan mengurangi bahkan menghapuskan sama sekali BDnya terutama dalam kotak jingga (*Amber box*) yang menjadi komponen utama di dalam model ATPSM.

Semua skenario alternatif kebijakan liberalisasi menyebabkan peningkatan harga dunia, namun besarnya perubahan harga tersebut cenderung sama, yaitu sebesar 69 persen. Bila harga dunia naik, tentunya juga akan merugikan konsumen di negara pengimpor termasuk Indonesia yang juga masih sebagai pengimpor sebagian komoditas pertanian. Sebaliknya, produsen atau negara pengekspor sangat diuntungkan. Oleh karena itu, Indonesia harus dapat memperbaiki kinerja perdagangannya dengan meningkatkan jumlah dan mutu produksi dalam negeri, agar pada tingkat tertentu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa menggantungkan kebutuhan dari pasar dunia. Hasil simulasi ini juga seiring dengan studi yang menyimpulkan bahwa liberalisasi memberi dampak yang besar terhadap peningkatan harga dunia (Diao *et al.*, 2001 dalam Vanzetti).

#### **4.5.2. Dampak Berbagai Modalitas terhadap Kinerja Ekspor, Impor, Produksi dan Konsumsi Komoditas Penting di Indonesia**

Penelitian perdagangan internasional dengan model ATPSM untuk kasus Indonesia belum banyak dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh model ATPSM yang bersifat statis karena model ini tidak dapat menghitung keuntungan dan kerugian dalam distribusi kesejahteraan yang dinamik (kesejahteraan yang dihasilkan masih secara relatif). Di samping itu model ini juga belum memasukkan peubah pendapatan (*income*) yang dapat menjadi indikator agregat untuk mengukur manfaat ekonomi perubahan suatu kebijakan perdagangan. Tiga skenario yang dicoba dalam subbagian ini adalah: (1) Harbinson 1\*, tanpa pemotongan SE dan BD; (2) Harbinson 2\*, dengan pemotongan SE (NM = 80 persen; NB = 70 persen), BD (NM = 60 persen; NB = 20 persen); dan (3) Usulan K 20\*\*.

#### ***Dampak terhadap Produksi Pertanian Indonesia***

Dampak liberalisasi pemberlakuan atas tiga alternatif skenario seperti yang telah disebut di muka terhadap produksi komoditas pertanian ditampilkan pada Tabel 52.

Semua skenario memberikan dampak yang positif terhadap produksi pertanian Indonesia, meskipun simulasi skenario Harbinson 1 (tanpa penurunan terhadap BD dan SE) dan Usulan K 20 memberikan hasil yang sama baik arah dan besaran untuk semua komoditas. Perbedaan jenjang dan pemotongan tarif yang tidak besar antara NM dan NB tidak memberikan pengaruh yang nyata. Perubahan produksi akibat perubahan kebijakan perdagangan dengan skenario Harbinson 2 (dengan penurunan BD dan SE untuk negara maju dan negara berkembang) lebih besar dari Harbinson 1.

Terdapat tiga komoditas penting yang mengalami perubahan yang nyata dalam produksinya, yaitu tomat, jeruk dan gula halus. Apabila penurunan tarif menurut Harbinson tanpa penurunan BD dan SE diberlakukan, akan terjadi kenaikan produksi tomat (2,30 persen), jeruk (2,09 persen), dan gula halus (2,16 persen), dan masing-masing sebesar 2,35 persen, 2,14 persen, dan 2,12 persen apabila penurunan tarif menurut Harbinson 2 disertai penurunan BD dan SE diterapkan. Kenaikan produksi ini disebabkan turunnya harga secara global akibat penurunan tarif bea masuk di NM dan NB sekaligus. Namun, daging sapi, gandum, apel, tembakau (primer dan olahan) serta komoditas karet yang menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia tidak menunjukkan perubahan produksi sama sekali.

Tabel 52. Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Produksi Pertanian Indonesia (%)

Komoditas	Harbinson 1	Harbinson 2	K 20
Binatang hidup	0,42	0,53	0,42
Daging sapi	0,00	0,00	0,00
Daging kambing/domba	0,69	0,58	0,69
Daging babi	0,56	0,87	0,56
Unggas	0,70	0,83	0,70
Susu konsentrat	0,49	1,96	0,49
Gandum	0,00	0,00	0,00
Beras	0,51	0,58	0,51
Jagung	0,30	0,48	0,30
Kacang-kacangan	0,47	0,49	0,47
Tomat	2,30	2,35	2,30
Umbi-umbian	0,71	0,79	0,71
Apel	0,00	0,00	0,00
Jeruk	2,09	2,14	2,09
Pisang	1,36	1,48	1,36
Gula kasar	1,48	2,12	1,48
Gula halus	2,16	3,14	2,16
Biji kopi	0,05	0,08	0,05
Kopi bubuk	0,47	0,48	0,47
Biji coklat	0,03	0,05	0,03
Coklat halus	0,23	0,33	0,23
Teh	0,35	0,56	0,35
Daun tembakau	0,00	0,37	0,00
Tembakau olahan	0,00	0,00	0,00
Minyak kelapa	0,19	0,16	0,19
Karet	0,00	0,00	0,00
Minyak nabati	0,13	0,14	0,13

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

### **Dampak terhadap Konsumsi Pertanian Indonesia**

Di Indonesia, penerapan ketiga skenario liberalisasi perdagangan tidak menguntungkan bagi konsumen seperti ditunjukkan dengan perubahan yang bernilai negatif (Tabel 53). Penurunan yang tajam terjadi pada komoditas gandum (4,13%), susu konsentrat (2,61%), dan pisang (2,53%) pada skenario Harbinson 1 tanpa penurunan BD dan SE. Sedangkan bila disertai dengan penurunan BD sebesar 60 persen oleh NM dan 20 persen oleh NB serta penurunan SE 80 persen oleh NM dan 70 persen oleh NB (Harbinson 2), konsumsi atas beberapa komoditas akan menurun secara tajam, yaitu: susu konsentrat (10,62%), gandum (5,38%), dan teh (3,44%). Telah dikemukakan di muka, produksi pertanian akan meningkat dengan kedua kebijakan ini, sementara keadaan sebaliknya berlaku di sisi konsumsi. Semestinya penurunan tarif, bantuan domestik dan subsidi ekspor menyebabkan harga yang diterima konsumen menjadi lebih murah sehingga konsumsi juga meningkat. Namun berbeda kondisinya untuk barang impor, dengan penurunan bantuan domestik dan subsidi ekspor oleh negara maju, menyebabkan harga produsen menjadi lebih mahal yang akhirnya mempengaruhi harga impor bagi negara pengimpor barang yang bersangkutan. Hal inilah mungkin menjadi suatu kelemahan dari model ATPSM. Di dalam model ini tidak dirinci

secara jelas apakah Indonesia sebagai pengeksport atau pengimpor karena simulasi dilakukan bagi agregat komoditas pertanian dan mitra dagangnya juga bersifat agregat, NM dan NB. Untuk melihat dampak secara rinci, pada penelitian yang akan datang perlu mencermati komoditas khusus dan mitra dagang khusus serta bentuk perjanjian (skema penurunan tarif, BD dan SE) yang telah disepakati.

Tabel 53. Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Konsumsi Pertanian Indonesia (%)

Komoditas	Harbinson 1	Harbinson 2	K 20
Binatang hidup	-0,08	-0,09	-0,08
Daging sapi	-0,92	-2,51	-0,92
Daging kambing/domba	-1,76	-1,44	-1,76
Daging babi	-0,99	-1,46	-0,99
Unggas	-1,51	-1,77	-1,51
Susu konsentrat	-2,61	-10,62	-2,61
Gandum	-4,13	-5,38	-4,13
Beras	-0,54	-0,69	-0,54
Jagung	-0,42	-0,67	-0,42
Kacang-kacangan	-0,39	-0,40	-0,39
Tomat	-1,00	-1,02	-1,00
Umbi-umbian	-1,19	-1,31	-1,19
Apel	-2,19	-2,38	-2,19
Jeruk	-0,88	-0,90	-0,88
Pisang	-2,53	-2,75	-2,53
Gula kasar	-1,16	-1,66	-1,16
Gula halus	-2,17	-3,14	-2,17
Biji kopi	-0,02	-0,08	-0,02
Kopi bubuk	-0,37	-0,27	-0,37
Biji coklat	-0,02	-0,03	-0,02
Coklat halus	0,00	0,00	0,00
Teh	-1,99	-3,44	-1,99
Daun tembakau	-0,88	-0,93	-0,88
Tembakau olahan	0,00	0,00	0,00
Minyak kelapa	-1,10	-1,09	-1,10
Karet	0,00	0,00	0,00
Minyak nabati	-0,60	-0,67	-0,60

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

### **Dampak terhadap Ekspor Pertanian Indonesia**

Pemberlakuan kebijakan perdagangan atas ketiga skenario tersebut efektif bagi kinerja ekspor Indonesia karena mendatangkan dampak yang positif dengan peningkatan volume ekspor yang sangat tajam, terutama pada skenario Harbinson 1. Penurunan tarif di negara maju dan negara berkembang tanpa disertai penurunan BD dan SE saja telah mendorong volume ekspor Indonesia. Bila Indonesia ingin melindungi petani produsen dalam negeri, tampaknya harus lebih giat untuk memperjuangkan penurunan tarif di berbagai fora OPD.

Hasil simulasi liberalisasi perdagangan memperlihatkan ekspor pertanian Indonesia melebihi 100 persen, bahkan ada yang mencapai ribuan persen. Volume ekspor daging babi meningkat tajam sebesar 202 ribu persen (Tabel 54). Hal ini dapat dipahami, mengingat daging babi ini juga merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang memiliki pangsa yang besar. Komoditas lain yang mengalami peningkatan dalam volume ekspornya adalah pisang (59.000 %), daging kambing/domba (31.000%), gula halus (6.000%), gula kasar (4.000 %), dan jeruk (1.500%). Analisa *trend* ekspor Indonesia selama 10 tahun dari 1993–2003 juga memperlihatkan bahwa pisang segar juga adalah komoditas utama ekspor Indonesia, oleh karena itu perhatian khusus terhadap komoditas ini sangat diperlukan terutama di dalam upaya peningkatan mutu. Temuan lainnya adalah ternyata kebijakan ini kurang efektif bagi komoditas perkebunan kita, yaitu coklat, teh, dan tembakau, bahkan untuk komoditas karet tidak berpengaruh sama sekali yang ditunjukkan oleh perubahan ekspor yang bernilai nol.

Tabel 54. Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Ekspor Pertanian Indonesia (%)

Komoditas	Harbinson 1	Harbinson 2	K 20
Binatang hidup	670,11	0,53	670,11
Daging sapi	92,00	0,91	92,00
Daging kambing/domba	31.593	18.340	31.593
Daging babi	201.916	299.176	201.916
Unggas	1.230	1.380	1.230
Susu konsentrat	2,86	1,96	2,86
Gandum	756,44	0,00	756,44
Beras	539,17	0,58	539,17
Jagung	388,87	0,48	388,87
Kacang-kacangan	31,99	0,49	31,99
Tomat	1.355	1.058	1.355
Umbi-umbian	14,24	6,05	14,24
Apel	595,38	0,00	595,38
Jeruk	1.543	2,14	1.543
Pisang	59.025	64.143	59.025
Gula kasar	4.857	6.935	4.857
Gula halus	6.409	3,14	6.409
Biji kopi	0,08	0,08	0,08
Kopi bubuk	3,10	0,48	3,10
Biji coklat	0,04	0,05	0,04
Coklat halus	0,30	0,33	0,30
Teh	2,92	0,56	2,92
Daun tembakau	3,52	0,37	3,52
Tembakau olahan	0,00	0,00	0,00
Minyak kelapa	53,49	0,16	53,49
Karet	0,00	0,00	0,00
Minyak nabati	0,83	0,38	0,83

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa hasil simulasi skenario Harbinson 1 dan Usulan K 20 adalah sama, simulasi ini skenario

Harbinson 2 memberikan hasil yang lebih besar namun arah dan jenis komoditas yang terbesar adalah sama. Oleh karena itu pilihan akan salah satu kebijakan ini akan sangat efektif untuk kinerja ekspor Indonesia dan secara keseluruhan informasi ini juga sangat bermanfaat bagi kita bila perhitungan di dalam model ATPSM bersifat dinamis sehingga dapat memutuskan kebijakan secara konsisten.

### **Dampak terhadap Impor Pertanian Indonesia**

Berbeda dengan kinerja ekspor, semua skenario liberalisasi perdagangan menyebabkan turunnya impor Indonesia (Tabel 55). Di satu sisi volume ekspor kita meningkat tajam dan disisi lain impor kita juga menurun. Tentunya kondisi ini yang kita inginkan karena kenaikan volume ekspor kita disertai juga dengan menurunnya impor sehingga akan mengurangi ketergantungan kita terhadap suplai dunia yang akhirnya dapat menghemat devisa kita.

Tabel 55. Dampak Liberalisasi terhadap Kinerja Impor Pertanian Indonesia (%)

Komoditas	Harbinson 1	Harbinson 2	K 20
Binatang hidup	-0,07	-8,06	-0,07
Daging sapi	0,00	-2,48	0,00
Daging kambing/domba	-1,76	-100,00	-1,76
Daging babi	-0,99	-100,00	-0,99
Unggas	-1,51	-100,00	-1,51
Susu konsentrat	0,00	-4,63	0,00
Gandum	0,00	-5,35	0,00
Beras	-0,54	-60,55	-0,54
Jagung	-0,42	44,07	-0,42
Kacang-kacangan	-0,39	-8,58	-0,39
Tomat	-1,19	-100,00	-1,19
Umbi-umbian	-1,00	-100,00	-1,00
Apel	0,00	-2,37	0,00
Jeruk	-0,18	-21,01	-0,18
Pisang	-2,53	-100,00	-2,53
Gula kasar	0,80	-100,00	0,80
Gula halus	-2,17	-13,64	-2,17
Biji kopi	-0,02	-6,02	-0,02
Kopi bubuk	-0,37	-21,93	-0,37
Biji coklat	-0,22	-0,31	-0,22
Coklat halus	0,00	-0,80	0,00
Teh	-1,99	-16,00	-1,99
Daun tembakau	-0,88	-3,77	-0,88
Tembakau olahan	0,00	0,00	0,00
Minyak kelapa	0,06	-45,59	0,06
Karet	0,00	0,00	0,00
Minyak nabati	-0,60	-100,00	-0,60

Sumber: Hasil Simulasi ATPSM versi 3.

Dampak yang besar diperoleh bila liberalisasi dengan skenario Harbinson 2 diterapkan, artinya disamping melakukan penurunan tarif juga menurunkan BD dan SE. Hasil simulasi memperlihatkan penurunan volume impor Indonesia untuk beberapa komoditas penting menurun drastis sampai 100 persen terutama komoditas peternakan yang terdiri dari daging kambing/domba, daging babi dan unggas; buah-buahan meliputi tomat, umbi-umbian dan pisang, gula halus dan minyak nabati. Informasi ini sangat berguna bagi industri gula di dalam negeri karena kebijakan ini dapat memperbaiki kinerja pergulaan nasional kita dengan tidak ada impor gula sama sekali. Jelaslah bahwa bantuan domestik oleh negara maju dan negara berkembang terhadap industri gulanya cukup tinggi.

Penurunan impor terhadap komoditas beras juga sangat berarti (60,55%) bagi Indonesia dengan penerapan kebijakan Harbinson 2. Penurunan tarif yang tidak disertai dengan penurunan BD dan SE seperti yang diusulkan oleh Harbinson 1 dan K 20 tidak memberi arti penting bagi perberasan nasional kita. Itulah sebabnya komoditas gula dan beras termasuk yang sangat dilindungi dan masuk dalam daftar sensitif tinggi di lingkungan ASEAN termasuk Indonesia yang jadwal penurunan tarifnya ditunda sampai tahun 2010 dan ditentukan secara spesifik.

### ***Dampak terhadap Distribusi Kesejahteraan***

Di dalam model ATPSM kesejahteraan total dihitung berdasarkan penjumlahan dari surplus produsen, surplus konsumen dan penerimaan pemerintah. Anak bagian bab ini menjelaskan ringkasan dari dampak semua skenario alternatif kebijakan yang telah dikemukakan di muka menyangkut surplus produsen dan surplus konsumen terhadap tiga kelompok negara (NM, NB, dan Indonesia).

Liberalisasi perdagangan lebih banyak memberikan keuntungan bagi NM, melalui peningkatan kesejahteraan total terutama skenario Harbinson 2. Sebaliknya negara berkembang dirugikan. Penurunan tarif bea masuk akan menurunkan surplus produsen negara yang mengenakan tarif, sebaliknya konsumen mendapatkan keuntungan melalui peningkatan surplusnya dan kerugian produsen ini dapat diimbangi keuntungan konsumen. Hal ini akan dialami NM, mengingat tingginya tarif bea masuk komoditas pertanian yang mereka terapkan selama ini. Melalui mekanisme internal pendistribusian pendapatan di NM dengan sistem fiskal dan moneter yang efektif, sesungguhnya kerugian produsen hampir pasti akan mereka atasi kalau saja liberalisasi perdagangan mereka lakukan secara konsekuen. Namun, bagi petani produsen di negara berkembang termasuk Indonesia, liberalisasi ini membawa keuntungan (Tabel 56), seperti ditunjukkan oleh perubahan surplus yang bernilai positif, tetapi secara total seluruh skenario kebijakan liberalisasi ini berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apabila mekanisme internal pendistribusian pendapatan belum efektif sebagaimana umumnya terjadi di NB, kesenjangan manfaat ini akan

menimbulkan dampak sosial. Hal inilah mungkin yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan liberalisasi perdagangan pertanian ditolak berbagai pihak. Jadi, dapatlah dikatakan liberalisasi perdagangan lebih menguntungkan NM dibanding NB. Oleh karena itu, agar liberalisasi memberikan manfaat yang seimbang bagi NM dan NB maka semua anggota OPD harus mempunyai tekad yang sama dan tindakan nyata dalam mewujudkan tekad ini dalam perumusan kebijakan-kebijakannya. Untuk itu Indonesia bersama-sama dengan anggota K 33 harus berupaya mempengaruhi NM agar melakukan reformasi kebijakan perdagangan mereka, antara lain melalui partisipasi aktif dalam setiap forum perundingan pertanian.

Tabel 56. Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Perubahan Kesejahteraan (dalam Juta AS\$)\*

Skenario	Perubahan Kesejahteraan	Negara Maju	Negara Berkembang	Indonesia
Harbinson 1	Surplus Konsumen	32.324,74	-1.382,12	-439,20
	Surplus Produsen	-18.236,33	3.576,12	387,44
	Kesejahteraan Total	9.654,73	1.774,98	-47,03
Harbinson 2	Surplus Konsumen	40.583,99	-8.761,84	-557,55
	Surplus Produsen	-50.806,25	8.419,94	469,34
	Kesejahteraan Total	16.188,19	1.087,89	-100,35
Usulan Kelompok 20	Surplus Konsumen	32.324,74	-1.382,12	-439,20
	Surplus Produsen	-18.236,33	3.576,12	387,44
	Kesejahteraan Total	9.645,73	1.775,98	-47,03

Sumber: Simulasi ATPSM Versi 3.

Tabel 41. Pemilihan PK dengan 5 Indikator

Komoditas/Produk Olahan	HS 2 s.d. 4 Digit	NI atau NE1 <sup>1)</sup>	Pangsa	Pangsa	Pangsa	Pangsa	Produk Khusus
			thd GDP Pert. (%) <sup>2)</sup>	thd Total Kalori (%) <sup>2)</sup>	thd Total Protein (%) <sup>2)</sup>	thd TK Pert. (%) <sup>2)</sup>	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
P a d i dan beras	1006	NI	28,8	51,6	44,59	28,79	*
J a g u n g dan pakan ternak	1108	NI	5,51	1,39	1,28	5,92	*
K e d e l e dan olahannya	1201	NI	3,55	2,8	9,66	2,49	*
Sayur-sayuran	07 & 20	NI	7,23	1,74	4,32	13,92	*
Buah-buahan	08	NI	12,18	0,28	0,82	12,25	*
T e b u dan gula	1701	NI	2,72	5,58	0,16	2,35	*
T e m b a k a u dan tembakau olahan	2403	NI	12,52	0,00	0,00	1,63	*
Ternak dan hasil-hasilnya kecuali susu segar dan daging/jeroan sejenisnya dan daging olahan/awetan	02	NI	5,24	0,38	2,29	3,99	*
Unggas dan hasil-hasilnya	0105, 0407 & 0408	NE&NI	9,67	2,46	6,06	3,67	*
Minyak hewani dan minyak nabati	15	NI	5,57	0	0,01	0,48	*
Makanan lainnya dan minman beralkohol	2208	NI(?)	6,25	1,12	1,93	0,34	*
Kapuk bersih dan benang	5203 & 5206	NI	21,41	0	0	0,78	*
Ketela pohon	0714	NE	2,65	1,95	0,41	2,13	
Ubi jalar dan umbi2 lainnya	0714 & 0601	NE	5,31	0,69	0,37	6,43	
Kacang tanah	1202	NI	1,74	0,41	0,92	2,62	
Kacang-kacangan lainnya	1207	NE	0,51	0,44	0,45	0,71	
Padi-padian dan bahan makanan lainnya	1008	NI	0,05	0,02	0,01	0,42	
K a r e t	40	NE	4,91	0	0	1,28	
K e l a p a dan kopra	1503 & 1203	NE	14,35	7,11	1,04	1,75	
Kelapa sawit	1511	NE	2,05	5,59	0,00	1,52	
Hasil tanaman serat		NE(?)	0,17	0	0	0,09	
K o p i, kopi giling dan kupasan	0901	NE	1,40	0,67	1,21	1,89	
T e h dan the olahan	0902	NE	2,37	0,15	0,81	0,76	
C e n g k e h	0907	NE	0,76	0,00	0,00	0,68	

Tabel 41. Lanjutan

Komoditas/Produk Olahan	HS 2 s.d. 4 Digit	NI atau NE1 <sup>1)</sup>	Pangsa	Pangsa	Pangsa	Pangsa	Produk Khusus
			thd GDP Pert. (%) <sup>2)</sup>	thd Total Kalori (%) <sup>2)</sup>	thd Total Protein (%) <sup>2)</sup>	thd TK Pert. (%) <sup>2)</sup>	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K a k a o, coklat dan kembang gula	18	NE	3,32	0,02	0,02	0,35	
Jambu mete	0801	NE	1,13	0,29	0,62	0,21	
Hasil perkebunan lainnya		NE	1,05	0,66	0,67	0,10	
Hasil pertanian lainnya		?	0,35	0,16	0,00	0,13	
Susu segar	0401	NI	0,30	0,03	0,08	0,18	
Hasil pemeliharaan hewan lainnya	0410	?	0,09	0,00	0,02	0,07	
Makanan dan minuman terbuat dari susu	0402, 0403, 0404, 0405, 0406	NI	0,66	0,97	1,29	0,27	
Buah-buahan dan sayur-sayuran olahan dan awetan	0812,0814, 2002,2004, 2005	NI	1,92	0,28	0,35	0,14	
Tepung terigu	1101	NI	0,75	0,52	0,51	0,12	
Tepung lainnya	1105	NE(?)	1,68	0,02	0,71	0,06	
Roti, biskuit dan sejenisnya	19	NE	1,71	4,53	3,26	0,36	
Mie, makaroni dan sejenisnya			1,13	2,84	2,4	0,25	
Biji-bijian kupasan	1104	NI	1,2	0	0	0,05	
	Jumlah		12	4	3	5	12

Keterangan:

1) NI = Net impor, NE = Net ekspor, untuk yang tidak jelas posisinya dibuat tanda tanya (?), deskripsi produk/komoditas sesuai dengan Buku Tarif 2004.

2) Nilainya &gt; 5%

## **V. RANGKUMAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

### **5.1. Perdagangan Bilateral dan Regional**

Negara tujuan ekspor Indonesia didominasi oleh Singapura dan Malaysia untuk kawasan ASEAN dan negara China dan Jepang di luar ASEAN. Jenis produk/komoditas yang diekspor ke kawasan ASEAN lebih banyak berbentuk primer, yang terbesar adalah babi hidup, sedangkan ke luar ASEAN berbentuk primer dan olahan, yaitu minyak kelapa (termasuk minyak kopra). Perdagangan dengan Singapura dan Malaysia, serta dengan Jepang dan China memberikan arti penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini merupakan potensi dan peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan produksi kelapa dalam negeri (dari hulu hingga hilir), sehingga ekspor minyak kelapa ke China juga meningkat di masa mendatang. Namun, Indonesia perlu mengantisipasi kemungkinan penurunan harga di pasar global dengan diliberalisasikannya perdagangan bilateral Indonesia dan China yang akan mempengaruhi daya saing minyak kelapa domestik. Oleh karena itu, kekonsistenan kebijakan sangat diperlukan di dalam merumuskan pola perdagangan bilateral di kawasan ASEAN dan di luar ASEAN.

Perdagangan bilateral Indonesia-China, Indonesia-Jepang, dan Indonesia-Korea Selatan yang dilatarbelakangi ciri makroekonomi yang berbeda telah menunjukkan adanya kesenjangan teknologi dan daur produk. Kesenjangan teknologi tercermin dari adanya produk ekspor Indonesia ke China, Jepang, dan Korea Selatan berupa produk mentah/primer, dan diimpor kembali oleh Indonesia dalam bentuk semi-olahan, dan olahan. Produk yang mengalami defisit perdagangan dengan China didominasi oleh produk primer dan dua produk olahan, berasal dari hasil peternakan (HS 0502 dan 4104), hortikultura (HS 0703, 0805, dan 0808), tanaman pangan (HS 1001, 1005, 1006, 1201, dan 1202), serta perkebunan (HS 2401). Sementara produk olahan berupa kelompok produk tanaman pangan (HS 1101), produk perkebunan (HS 1702, 4011, dan 4012). Kelompok surplus juga terdiri dari produk primer dan olahan, yaitu meliputi produk hortikultura (HS 0803), produk peternakan (HS 4106), produk perkebunan (HS 1801 dan 4001). Produk HS 4002 merupakan produk industri sebagai substitusi perkebunan juga mengalami surplus. Produk olahan yang mengalami surplus antara lain adalah produk tanaman pangan (HS 1507) yang berbahan baku yang diimpor dari China, produk perkebunan (HS 1511, 1513, 1520, dan 2905). Kelompok produk bukan-pertanian yang berpotensi pasar cukup baik di China antara lain produk perikanan (HS 0306), produk industri (HS 2915, 2917, dan 3204), dan produk kehutanan (HS 4407).

Secara umum perdagangan Indonesia dengan China dalam kondisi surplus dan program EHP bilateral Indonesia-China mendatangkan peluang yang lebih besar bagi produk domestik yang dapat bersaing dengan produk sejenis dari pengekspor dunia di pasar China. Namun,

Indonesia harus meningkatkan daya saing produknya karena pemerintah telah menyepakati EHP bilateral dengan China untuk menurunkan tarif impor. Selain itu Indonesia juga perlu mewaspadasi terjadinya ketergantungan industri olahan dalam negeri terhadap bahan baku yang berasal dari China, misalnya minyak kacang kedelai yang tercermin dari kinerja perdagangannya menurun drastis.

Impor jagung dari China untuk industri pakan juga cenderung meningkat, sehingga dapat menimbulkan kerentanan sektor peternakan domestik terhadap pasokan bahan baku pakan dari China. Hal serupa juga ditunjukkan oleh impor kacang kedelai dan kacang tanah. Ketergantungan Indonesia baik dengan China maupun pengeksportir bahan baku pangan dan pakan lainnya dapat menimbulkan dampak ikutan yang lebih besar, melibatkan banyak sektor dan menyebabkan ketahanan ekonomi industri olahan dan ketahanan pangan di dalam negeri menjadi rentan pula terhadap gejolak ekonomi dunia.

Khusus untuk komoditas biji kakao yang mengalami penurunan nilai ekspor akibat perbedaan perlakuan oleh Malaysia yang mengeksportir kembali olahan biji kakao kepada negara pengimpor yang selama ini menjadi pasar ekspor kita (bahan bakunya berasal dari Indonesia) perlu mendapat perhatian para pengambil kebijakan dengan memasukkan biji kakao dalam agenda *Early Harvest Package* (EHP) ASEAN maupun EHP ASEAN dengan China.

Kebijakan yang diperlukan adalah meningkatkan tingkat swasembada pangan dan bahan baku industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan dan kerentanan industri hilir domestik terhadap fluktuasi ekonomi negara partner dan ekonomi dunia. Sehubungan dengan potensi produk yang berpangsa besar di China dan telah disertakan dalam EHP diperlukan peningkatan daya saing agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa ekspor di China khususnya, dan pasar internasional pada umumnya. Sementara untuk produk yang berpotensi pasar, namun belum disertakan dalam EHP, mendesak untuk diagendakan dalam EHP agar tidak mengalami diskriminasi lebih lanjut dibandingkan eksportir pesaing lainnya. Meskipun hanya terdapat satu produk yang disertakan dalam EHP bilateral Indonesia-China (minyak kelapa/kopra dan kernel kelapa sawit), maka diperlukan peningkatan daya saing dengan mengembangkan industri olahan dan produk turunannya. Produk yang tidak disertakan dalam EHP bilateral Indonesia-China, namun kinerja perdagangannya baik adalah biji kakao, sehingga mendesak dimasukkan dalam program tersebut, sehingga tidak terus mengalami diskriminasi dengan produk yang sama dari pesaing lain.

Produk pertanian Indonesia yang mengalami defisit perdagangan dengan Jepang adalah kelompok produk primer berupa produk pertanian (HS 0910, 0904, dan 1005), produk perkebunan (HS 1511, 1703, dan 4002), produk perikanan (HS 0303, 0305 dan 0306), sementara produk olahan berupa produk perkebunan dan tanaman pangan (HS 0901, dan

1902). Produk yang mengalami surplus berupa produk primer dan produk olahan sekunder dan tersier, yaitu produk primer tanaman pangan (HS 0704, 0709, 0714, 0902, dan 1006) dan produk perkebunan (HS 4001), produk samping dari pengolahan tanaman pangan (HS 1806 dan 2008), produk perikanan (HS 1604), dan produk olahan pertanian tersier (yaitu HS 2905, dan 2207).

Selain produk pertanian terdapat beberapa sektor yang memerlukan perhatian baik dari sisi ekspor maupun impornya. Produk yang berpotensi ekspor meliputi produk perikanan (HS 2301), produk kehutanan (HS 4401, 4407, 4409 4413, 4415, 4418, 4420, dan 4421), serta produk industri kimia primer (HS 2207, 2902, 2905, dan 2922), dan produk industri kimia olahan (HS 3101, 3102, 3204, 3401, 3402, dan 3505). Sementara produk impor yang cukup besar volume dan nilainya dari Jepang adalah produk tanaman pangan (HS 1006, 0910), produk olahan dari pertanian (HS 1702, dan 1902), produk kimia (HS 2905, 2929, dan 3204) dan pengolahan industri kimia yaitu pupuk.

Peningkatan pendapatan nasional perkapita Jepang juga meningkatkan daya beli domestik akan produk-produk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dari segi peluang, Indonesia perlu memanfaatkan kerjasama perekonomian melalui Perjanjian Kerjasama Ekonomi/PKE atau *Economic Partnership Agreement/EPA* yang telah disepakati oleh kedua pemimpin negara pada Juli 2005. Kebijakan dalam negeri yang diperlukan adalah peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan terpadu guna meningkatkan efisiensi pengolahan produk pertanian dan nilai tambah domestik. Selain itu untuk menghadapi perdagangan bebas melalui KPE yang akan dimulai pada tahun 2007 Indonesia perlu menghasilkan inovasi produk olahan seperti produk ubi kayu yang memiliki pasar yang potensial tidak hanya dapat diolah untuk tepung kasava, akan tetapi dapat bahan untuk farmasi sehingga menaikkan nilai jualnya.

Melalui ASEAN+3 kerjasama bilateral Indonesia-Jepang perlu dimanfaatkan sehingga tidak terjadi kesenjangan teknologi dan membuka pasar domestik masing-masing secara adil dan berkesinambungan. Industri dalam negeri juga perlu untuk mempersiapkan diri dengan melakukan integrasi dari hulu sampai hilir, sehingga tidak memiliki ketergantungan terhadap industri Jepang. Selain itu ragam kelompok komoditas yang diperdagangkan juga perlu dikembangkan dengan membuka kemudahan dalam hal penurunan tarif, fleksibilitas spesifikasi kualitas produk yang diperdagangkan, karena Jepang sangat ketat dalam menentukan mutu produk pertanian. Investasi Jepang untuk industri pengolahan produk pertanian primer di Indonesia juga sebaiknya ditingkatkan.

Kelompok produk yang mengalami defisit perdagangan dengan Korea Selatan berupa produk primer maupun olahan, yaitu produk primer peternakan (HS 4104), sementara produk olahan berupa produk perkebunan (HS 1701, 4002, 4005, dan 4010). Selain itu terdapat defisit produk olahan yang berasal dari semua sektor baik tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, maupun peternakan yang tergolong dalam HS 2106. Produk yang mengalami surplus berupa produk primer dan produk olahan sekunder dan tersier, seperti produk tanaman pangan (HS 0714) dan produk perkebunan (HS 0901 dan 4001). Produk olahan berupa produk utama olahan perkebunan (yaitu HS 1513), produk samping dari pengolahan tanaman pangan dan perkebunan (yaitu HS 1703, 2302, dan 2306), dan produk olahan pertanian tersier (yaitu HS 2905).

Selain produk pertanian terdapat beberapa sektor yang memerlukan perhatian baik dari sisi ekspor maupun impornya. Produk yang berpotensi ekspor meliputi produk perikanan (HS 0303), produk kehutanan (HS 4402, 4407, 4409, 4411, 4412, 4413, dan 4418), serta produk industri kimia. Sementara produk impor yang cukup nyata besaran volume dan nilainya dari Korea Selatan adalah produk bahan galian, yaitu semen.

Kebijakan dalam negeri yang diperlukan adalah peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan terpadu guna meningkatkan efisiensi pengolahan produk pertanian dan nilai tambah domestik. Selain itu untuk menghadapi era perdagangan bebas Indonesia-Korea Selatan pada awal bulan Juli 2006 mendatang, diperlukan iklim upaya yang kondusif bagi industri domestik agar dapat mengoptimalkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Sebagai contoh, ubi kayu akan mengalami peningkatan nilai tambah yang maksimal apabila tidak hanya diolah menjadi tepung kasava, namun lebih jauh diproses sebagai bahan baku bioetanol yang merupakan bahan baku industri farmasi yang bernilai tinggi, sehingga nilai jualnya lebih tinggi.

Namun, pemberlakuan skema penurunan tarif di ASEAN yang mensyaratkan tarif menjadi nol persen tahun 2005 melalui Kawasan Perdagangan Bebas/KPB atau *Free Trade Area/FTA*, menyebabkan dampak berbeda terhadap produsen komoditas dan konsumen di dalam negeri. Kesepakatan ini diprakirakan akan menyebabkan produsen/petani Indonesia mengalami kehilangan surplusnya yang dicerminkan oleh penurunan produksi akibat anjloknya harga ekspor, khususnya atas komoditas kelapa dan minyak kelapa, cerutu, biji kakao, dan jagung. Lebih lanjut diperlihatkan bahwa liberalisasi perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN hanya memberikan keuntungan kepada konsumen di dalam negeri. Jadi, apabila pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan produsen/petani sebaiknya tidak perlu terlalu berambisi melaksanakan liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN.

Perdagangan bebas ASEAN dalam skema AFTA dengan tiga negara Asia Timur (China, Jepang, dan Korea Selatan) yang disebut dengan AFTA+3 diprakirakan tidak membawa pengaruh yang berarti bagi Indonesia, karena nilai surplus produsen, konsumen dan penerimaan pemerintah adalah sama. Oleh karena itu, kebijakan ini kurang efektif bagi peningkatan perekonomian Indonesia. Liberalisasi ini hanya menguntungkan negara Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea

Selatan dan tidak berarti sama sekali kepada negara Laos, Thailand, dan Myanmar. Namun, KPB antara ASEAN termasuk Indonesia dengan Jepang secara bersama-sama berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat baik di negara pengekspor (Indonesia) maupun pengimpor (Jepang). Demikian juga penerapan KPB ASEAN (termasuk Indonesia) dengan China dan dengan Korea Selatan. Penghapusan tarif (semula lima persen menjadi nol persen) memang menyebabkan harga ekspor menjadi lebih murah, sehingga surplus produsen juga berkurang di satu pihak, dan di pihak lain konsumen domestik diuntungkan melalui peningkatan surplusnya. Peningkatan surplus konsumen jauh lebih besar dari pada penurunan surplus produsen baik di negara pengekspor maupun di negara impor. Tampaknya kebijakan ini dapat menjadi alternatif bagi pengambil kebijakan di Indonesia yang harus diiringi oleh peningkatan mutu komoditas ekspor Indonesia sehingga dapat menutupi kehilangan surplus tersebut, terutama KPB dengan Korea Selatan yang masih dalam tahap perencanaan.

Perdagangan produk pertanian Indonesia baik di kawasan maupun di luar kawasan ASEAN tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dan faktor pendorong ekspor pertanian Indonesia saat ini masih didominasi oleh populasi, baik di Indonesia maupun di negara tujuan.

Dengan berlakunya kesepakatan AFTA nilai ekspor produk pertanian Indonesia lebih rendah dari sebelum adanya kesepakatan itu tetapi nilai ekspor sejak AFTA khusus di kawasan ASEAN meningkat dibandingkan dari waktu sebelumnya. Peningkatan pendapatan per kapita di negara-negara ASEAN menyebabkan nilai ekspor pertanian Indonesia menurun. Di luar ASEAN, ekspor produk pertanian ke China dan Jepang meningkat setelah berlangsungnya AFTA, dan dari peningkatan pendapatan di wilayah ini Jepang menunjukkan prospek yang baik dalam peningkatan impor, sementara China dan Korea Selatan tidak potensial. Sebaliknya dari pertumbuhan populasi, China, dan Korea Selatan menunjukkan prospek pasar ekspor yang baik, sementara Jepang sebaliknya.

Penentuan komoditas pertanian yang sebaiknya diikutsertakan dalam skema penurunan tarif atau dalam EHP sebaiknya dikaji secara mendalam, mengingat perbedaan dampak yang ditimbulkan antara satu komoditas dengan komoditas lain. KPB Indonesia dengan China, Jepang, dan Korea Selatan bagi komoditas tertentu seperti minyak kelapa yang juga diatur dalam skema EHP, langsung berdampak terhadap turunnya harga ekspor yang mengakibatkan penurunan volume ekspor Indonesia akibat anjloknya produksi dalam negeri. Di dalam negeri, konsumen diuntungkan dengan turunnya harga beli. Sebaliknya berlaku bagi komoditas minyak kedelai, penghapusan tarif bea masuk justru menyebabkan kenaikan harga baik di tingkat konsumen maupun produsen, sehingga produksi di dalam negeri meningkat. Namun, keseluruhan KPB ini tidak banyak mempengaruhi kinerja produksi minyak kedelai di dalam negeri. Selanjutnya, khusus untuk kopi KPB

Indonesia masing-masing dengan Jepang dan Korea Selatan juga tidak efektif dalam peningkatan harga produsen dan volume ekspor. Berhubung KPB ini masih dalam tahap peninjauan, maka disarankan pengambil kebijakan sebaiknya mengkajinya secara hati-hati dan tidak perlu terburu-buru merealisasikannya.

Apabila kesepakatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang yang disebut dengan Perjanjian Kerjasama Ekonomi/PKE atau *Economic Partnership Agreement/EPA* diberlakukan khususnya terhadap komoditas kopi olahan akan berdampak pada penurunan produksi dalam negeri akibat turunnya harga, sehingga insentif produsen/petani juga tidak ada, demikian juga halnya terhadap komoditas ubi kayu dan minyak kelapa. Sama halnya dengan KPB Indonesia dengan Jepang, KPE ini juga tidak memberikan dampak yang positif bagi kinerja sektor pertanian Indonesia. Pengamatan dan tinjau ulang terhadap kebijakan KPB ini perlu dilakukan, mengingat potensi dampak negatif yang ditimbulkannya terutama terhadap penurunan volume ekspor minyak kelapa yang sangat drastis.

Indonesia perlu memelihara kekonsistenan pasokan komoditas ke negara mitra dagangnya di ASEAN+3 tersebut, melalui kebijakan perdagangan dan ekonomi yang konsisten pula. Apabila hal ini terganggu, prospek ekspor pertanian akan terganggu pula. Semua pemangku kepentingan pada komoditas ini harus sepakat menghasilkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan masyarakat dalam negeri.

## 5.2. Perdagangan Multilateral

Nilai Kotak Hijau/KH atau *Green Box* pertanian Indonesia tahun 2001 hingga 2003 menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2004 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya Bantuan Domestik pertanian Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan senilai Rp. 9,08 Trilyun pada tahun 2004 (setara dengan AS \$ 1.016,91 Juta). Data ini menunjukkan bahwa jika pada 2001–2003 nilai KH terus menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2004 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Proses penyaringan Produk Khusus/PK atau *Special Products/SP* sebaiknya dilakukan secara luwes dan diserahkan pada masing-masing anggota dengan ketersediaan data yang dimilikinya. Namun, indikator yang telah dipilih oleh suatu negara harus dipakai secara konsisten sepanjang waktu sampai ada kesepakatan yang baru.

Dengan menggabungkan lima indikator bagi komoditas, yaitu sebagai *net import*, **sumbangannya** terhadap PDB pertanian, kalori, protein, dan tenaga kerja, penelitian ini menetapkan bahwa terdapat 12 produk/komoditas yang berhak mendapatkan PK. Komoditas pertanian ini adalah: beras, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan, gula, tembakau, daging ternak besar, unggas, minyak hewani/nabati, makanan lainnya/minuman beralkohol, dan kapuk/benang. Namun, dengan

melakukan pemilihan secara bertahap dengan keterbatasan data dan indikator yang ada, Indonesia sebaiknya mengusulkan Produk Khusus/PK pertaniannya sebanyak duapuluh komoditas, yaitu: Padi; Jagung; Kedelai; Kacang Tanah; Cabe; Tomat; Kentang; Pisang; Jeruk; Sayuran dan Buah-buahan lainnya; Kelapa dan Kelapa sawit; Kopi; Cengkeh; Tanaman Rempah dan Obat; Kapuk, Kapas dan Tanaman Serat; Tanaman Pertanian Lainnya; Ternak Kecuali Susu Segar; Susu Segar; Unggas dan hasil-hasilnya.

Penggunaan indikator yang berbeda dan *threshold* yang berbeda akan diperoleh ratusan kombinasi komoditas yang potensial dimasukkan sebagai PK. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kombinasi komoditas pertanian yang sesuai dengan harapan petani dan masyarakat pada umumnya, dimana komoditas ini nantinya mendapat perhatian lebih dalam program pengembangannya di dalam negeri, semua pihak pemangku kepentingan perlu menetapkan suatu kesepakatan dalam pemilihan indikator dan *threshold* tersebut.

Dari 44 negara anggota K 33, tercatat sejumlah 16.540 pos tarif yang ada dengan kisaran dari 0 persen sampai dengan 887,4 persen dan dengan rata-rata 63,96 persen. Lima negara dengan jumlah pos tarif terbanyak adalah Indonesia (1.341 pos tarif), Korea Selatan (1.239 pos), China (977 pos), Guatemala (812 pos), dan El Salvador (764 pos).

Lima kelompok komoditas yang memiliki pos tarif terbanyak adalah Kelompok 15 (Lemak dan Minyak Hewani dan Nabati dan berbagai Produknya dengan 1.426 pos, disusul Kelompok 7 (Sayuran yang Dapat Dimakan dan Beberapa Jenis Umbi-umbian), 1.188 pos; Kelompok 12 (Biji-bijian dan Buah-buahan yang Mengandung Minyak dan Tanaman Obat-obatan, 1.096 pos; Kelompok 8 (Buah-buahan dan Kacang-kacangan yang Dapat Dimakan dan Kulit Buah Sitrus dan Melon), 1.077 pos; dan Kelompok 20 (Olahan Sayuran, Buah-buahan, Kacang-kacangan atau Bagian dari Tanaman), 1.010 pos.

Dengan menggunakan usulan K 20 sebagai penentu banyaknya jenjang dan rentang tarif, di jenjang 1, China memiliki pos tarif yang terbanyak dibanding negara-negara lain anggota K 33 dengan jumlah 855 pos (17,5%) dari jumlah tarif di jenjang termaksud) dengan rata-rata 15,3 persen; Indonesia di jenjang 2 dengan jumlah 1,250 pos (21,8%) dengan rata-rata 42,8 persen; Pakistan di jenjang 3 dengan 671 pos (14,0%) dengan rata-rata 100,00 persen; dan India di jenjang 4 dengan 249 pos (22,5%) dengan rata-rata 165,7 persen.

Khusus di Indonesia, lima komoditas dengan rata-rata tarif tertinggi di jenjang 1 adalah komoditas 13 (lak; getah, damar dan sap serta ekstrak nabati lainnya) dan 23 (residu dan sisa dari industri makanan; olahan makanan hewan) dengan rata-rata sebesar 30 persen dan masing-masing hanya 1 pos tarif; komoditas 10 (sereal), 35 (zat albumina; pati dimodifikasi; enzim) dan 52 (kapas) dengan rata-rata sebesar 27 persen dan jumlah pos tarif berturut-turut 5, 3 dan 1.

Usulan dari Australia dan AS memberikan hasil penurunan tarif yang sangat drastis dibandingkan dengan usulan UE apalagi K-20 di setiap jenjang baik bagi Indonesia maupun K-33. Berhubung NB, terutama yang ada dalam K-33 masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam memodernisasikan ekonominya, maka usulan Australia dan AS ini agaknya akan lebih berisiko daripada usulan UE apalagi usulan K-20. Oleh karena itu, dengan memperbandingkan hasil-hasil tersebut usulan K-20 ini adalah lebih baik bagi Indonesia dan juga K-33 untuk disetujui. Kalau tidak K-33 perlu mengkaji secara saksama modalitas ini untuk mendapatkan suatu usulan yang lebih tepat mewakili K-33.

Dari semua skenario yang telah dibuat diketahui bahwa liberalisasi perdagangan lebih menguntungkan bagi NM. Rumus penurunan tarif yang diusulkan oleh kelompok negara 20/K-20 atau G-20 yang notabene anggotanya adalah NB atau negara berkembang yang telah lebih maju, juga berpihak kepada NM dan bukan untuk NB.

Perlindungan yang diberikan NM dalam bentuk Bantuan Domestik (BD) kepada produsennya sangat besar nilainya dan inilah yang menjadi penyebab ketidakadilan antar pelaku ekonomi di pasar internasional. Penurunan tarif yang disertai penurunan BD hanya oleh negara maju dengan tidak mengubah Subsidi Ekspor/SEnya, menyimpulkan bahwa kebijakan ini tidak memberi dampak nyata bagi Indonesia. Penurunan BD domestik oleh negara maju hanya menguntungkan konsumen di negara maju tersebut dan sebaliknya merugikan produsennya.

Kebijakan liberalisasi menyebabkan peningkatan harga dunia, namun besarnya perubahan harga tersebut cenderung sama. Apabila harga dunia naik, konsumen di negara pengimpor, seperti Indonesia akan dirugikan, sebaliknya, produsen atau pengekspor sangat diuntungkan. Oleh karena itu, Indonesia harus dapat memperbaiki kinerja perdagangannya dengan meningkatkan mutu dan jumlah produksi dalam negeri, terutama untuk produk pangan sehingga pada tingkat tertentu dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menggantungkan kebutuhan dari pasar dunia.

Penurunan tarif tanpa disertai penurunan BD dan SE di NM dan NB dan penurunan tarif usulan Kelompok 20 memberikan dampak yang sama terhadap produksi, konsumsi, ekspor dan impor komoditas pertanian. Penurunan tarif dengan yang disertai dengan penurunan BD dan SE NM dan NB sekaligus memberikan dampak yang lebih besar terhadap keempat indikator kinerja sektor pertanian tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak positif bagi kinerja sektor pertanian karena meningkatkan produksi pertanian Indonesia, ekspor pertanian, dan mengurangi volume impor Indonesia. Namun, pihak konsumen dalam negeri menderita kerugian.

Terdapat tiga komoditas penting yang mengalami perubahan yang nyata dalam produksinya, yaitu tomat, jeruk dan gula halus. Namun, daging sapi, gandum, apel, tembakau (primer dan olahan) serta komoditas

karet yang menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia tidak menunjukkan perubahan produksi sama sekali.

Liberalisasi perdagangan lebih banyak memberikan keuntungan bagi NM, terutama bagi konsumennya sementara produsennya menderita kerugian, tetapi kerugian produsen dapat diimbangi oleh keuntungan konsumennya. Namun, di NB termasuk di Indonesia pihak konsumen akan dirugikan dan produsen akan diuntungkan. Bagi Indonesia, kerugian konsumen itu tidak dapat diimbangi oleh keuntungan yang diperoleh produsen. Oleh karena itu, agar liberalisasi memberikan manfaat yang seimbang bagi NM dan NB maka semua anggota OPD harus mempunyai tekad yang sama dan tindakan nyata dalam mewujudkan tekad ini dalam perumusan kebijakan-kebijakannya. Untuk itu Indonesia bersama-sama dengan anggota K 33 harus berupaya mempengaruhi NM agar melakukan reformasi kebijakan perdagangan mereka, yaitu dengan aktif berpartisipasi di dalam perundingan pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Profil Jepang. [www.Bexi.co.id/](http://www.Bexi.co.id/) (On Line) 2002.
- Agroindonesia. 2005. *Gov't to Lobby China on Cacao Tariffs*. Selasa, 3 Mei 2005. [www.agroindonesia.com/](http://www.agroindonesia.com/) (on line). 19 Mei 2005.
- Aitken, N. D. 1973. "The Effect of the EEC and EFTA on European Trade: A Temporal Cross-Section Analysis," *American Economic Review* 63 (5): 881-892.
- Alamsyah, Andi Nur. 2005. *Virgin Coconut Oil Minyak Penakluk Aneka Penyakit*. Penerbit Agromedia. Jakarta.
- Balistreri, E. J. and R. H. Hillberry. 2004. *Trade Frictions and Welfare in the Gravity Model: How much of the Iceberg Melts?*, Mimeograph.
- Basri, F.H. 1991. *Perkembangan Terbaru Teori Perdagangan Internasional*. Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia. No. 1 Tahun VI, 1991. Hal. 219 – 245.
- Bikker, J. A. 1987. "An International Trade Flow Model with Substitution: An Extension of the Gravity Model," *Kyklos* 40 (3): 315-337.
- Brada, J. C. and J. A. Mendez. 1983. "Regional Economic Integration and the Volume of Intra-regional Trade: A Comparison of Developed and Developing Country Experience," *Kyklos* 36 (4): 589-603.
- Brulhart, Marius. 2002. *Marginal Intra – Industry Trade: Towards A Measure of Non-Disruptive Trade Expansion*. Ecole des HEC. University of Lausanne. Switzerland. [www.hec.unil.ch/mbrulhar/papers](http://www.hec.unil.ch/mbrulhar/papers) (on line). 18 Mei 2005.
- Chacoliades, M. 1990. *International Economics*. International Edition. McGraw-Hill. Singapore.
- Cheng, I-Hui and H.J. Wall. 2005. *Controlling for Heterogeneity in Gravity Models of Trade and Integration*. Review, January/February. Federal Reserve Bank of St. Louis.
- Cheng, I-Hui and H.J. Wall. 2005. *Controlling for Heterogeneity in Gravity Models of Trade and Integration*. Federal Reserve Bank of St. Louis.
- CIE. 1997. *Economic Benefits from an AFTA-CER Free Trade Area*. Centre for International Economics Canberra&Sydney Commitments" Revision (TN/AG/W/Rev.1), 18 Maret 2003.
- Departemen Keuangan RI. 2004. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia – China Free Trade Area (FTA)*.
- Departemen Keuangan. 2001 – 2005. *Data Base Anggaran Pembangunan. Direktorat Pembiayaan I*. Direktorat Jenderal Anggaran.
- Diaz-Bonilla, E, M. Thomas, S.Robinson (2002), "On Boxes, Contents, and Users.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2005. *Surat Edaran Nomor: se- 10/bc/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Asean-China Free Trade Area (FTR) dan dalam Rangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA*. Departemen Keuangan Republik. [www.beacukai.go.id/](http://www.beacukai.go.id/) (on line). 10 Mei 2005.

- Dixit, P.T., Josling, and D. Blandford. 2001. *The Current WTO Agriculture Negotiations: Option for Progress, Syntesis*. International Agricultural Trade Research Consortium Commissioned paper No. 18.
- FAO. 2005. *FAOSTAT-Agriculture*. [www.fao.org/](http://www.fao.org/) (on line). 12 Desember 2005.
- Feridhanusetyawan, T. 2003. *ASEAN – China FTA: A View from Jakarta*. Centre for Strategic and International Studies. Jakarta. [www.mof.go.jp.chu/](http://www.mof.go.jp.chu/) (on line). 10 Mei 2005.
- Food Security and the WTO Negotiations”, IFPRI, TMD Discussion Paper.
- Frenkel, J. A. 1997. *Regional Trading Blocks in the World Economic System*. Institute for International Economics. Washington, D.C.
- Hadi, Prajogo Utomo, Ahmad Husni Malian, Adi Mesra Djulin, Adang Agustian, Sri Hastuti Suhartini dan Sri Hery Susilowati. 2002. *Kajian Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian Indonesia Tahun 2001*. Laporan Penelitian. Tidak dipublikasikan. Puslitbangsosek Pertanian. Bogor.
- Hadi, Prajogo Utomo, J. Situmorang, B. Wiryono, Rita N.S., T. Nurasa, dan S. Nuryanti. 2004. *Strategi dan Kebijakan Perdagangan Pertanian Pasca AoA – WTO*. Laporan Penelitian. Tidak dipublikasikan. Puslitbangsosek Pertanian. Bogor.
- Hutabarat, B. dan B. Rahmanto. 2004. *Kerangka Pemikiran Penerapan Mekanisme Perlindungan Keamanan Khusus (Special Safeguard Mechanism) Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Hutabarat. B., M. Husein Sawit, Supriyati, Bambang Rahmanto, Adi Setyanto dan Helena J. Purba, 2005. *Penyusunan bahan Advokasi Delegasi Indonesia dalam Perundingan Multilateral*. Laporan Akhir. Pusat penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Kalbasi, H. 2005. *The Gravity Model and Global Trade Flows*. Mimeograph.
- Kenen, Peter B. 1989. *The International Economy*. 2<sup>nd</sup> ed. Englewood Cliffs. N.J.: Prentice-Hall International Inc.
- Krugman, P. R. and M. Obstfeld. 2000. *International Economics: Theory and Policy*. Fifth Edition. International Edition Addison-Wesley Publishing Company. Massachusetts.
- Lily Yulianti Farid, 2005. *Susilo Bambang Yodoyono dan Investor Jepang*. [www.Kompas.Com/](http://www.Kompas.Com/) (On Line) 2 Juni 2005.
- McCallum, J. 1995. *National Borders Matters: Canada-U.S. RRegional Trade Patterns*, *American Economic Review* 63 (5): 881-892.
- Murphy, S and S. Suppan (2003), *“Introduction to the Development Box: Finding no.82 (revised July 2002)*.
- Perkembangan ASEAN. 2001. [www.indonesianembassy.org.uk](http://www.indonesianembassy.org.uk). 6 Desember 2005.
- Poonyth, Daneswar, and Ramesh Sharma, 2003. *The Impact od The Doha Development Round of Trade Negotiations on Developing Countries: Results From ATPSM*. Commodity Market Review 2003-2004. FAO, Rome.
- PTRI. 2005. *Laporan Pertemuan Cairns Group dasn G-20 di Jenewa pada tanggal 25 – 27 September 2005*.

- S. Pushpanathan, 2004. *Scaling New Heights in ASEAN-Japan Ties*. Head, ASEAN Plus Three Relation. [www.aseansec.org/](http://www.aseansec.org/) (on line) 12 desember 2004.
- Sanso, M., R. Cuarian, and F. Sanz. 1993. "Bilateral Trade Flows, the Gravity Equation, and Functional Form," *Review of Economics and Statistics* 75 (2): 266-275.
- Sawit, M.H. 2003. *Indonesia dalam Perjanjian Pertanian WTO: Proposal Harbinson. Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol 1 (1).
- Sawit, M.H., 2003. *Perkembangan Perundingan Pertanian WTO: Proposal Harbinson dan Kepentingan Indonesia*. Paper. Tidak dipublikasikan. Disampaikan pada Seminar "Road to Cancun: Kesiapan Indonesia Menghadapi KTM V WTO, diselenggarakan oleh Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Departemen Luar Negeri, 23 April 2003, Jakarta.
- Sawit, M.H., 2004a. *Penurunan Tarif buat Produk Pertanian Indonesia: Penerapan Blended Formula*. Paper. Tidak dipublikasikan. Pusat penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Sawit, M.H., 2004b. *Penggunaan Tiered Formula untuk Pemotongan Tarif buat Produk Pertanian Indonesia*. Paper. Tidak dipublikasikan. Pusat penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Sawit, M.H., A. Setiyanto, H.J. Purba, dan Supriyati, 2004. *Penyaringan SP (Special/Strategic Products) dengan Metoda I-O untuk Indonesia*. Makalah. Tidak dipublikasikan. Puslitbangsosek. Badan Litbang. Departemen Pertanian. Bogor.
- Sawit, M.H., B. Hutabarat, A. Setiyanto, H.J. Purba, Sri Nuryanti, dan Juni Hestina. 2005. *Fleksibilitas Pemilihan Special Products (SP) Usulan Indonesia: Mampukah Mencapai Sasarannya?* Makalah. Tidak dipublikasikan. Puslitbangsosek. Badan Litbang. Departemen Pertanian. Bogor. Space for Development Concerns in the WTO's Agriculture Negotiations".
- Sawit, M.H., Kiki Partini, dan Agus D.I. 2003. *Notifikasi Produk Pertanian Indonesia di WTO dan Deminimis Untuk Beras*. *Jurnal Ekonomi Keuangan Indonesia* Vol. 51 (3), hal 271 – 289.
- Syafa'at, N., 2004. *Laporan Mengikuti Sidang Perundingan Khusus Pertanian (CoA) di WTO - Jeneva 12 - 18 Desember 2004*. Memo Dinas. Tidak dipublikasikan. Puslitbangsosek Pertanian. Bogor.
- Tay, S. S.C., J. Estanislao, and H. Soesastro. 2000. *A New ASEAN In A New Millennium*. CSIS. Jakarta.
- UNCTAD. 2005. *ATPSM*. [www.unctad.org/](http://www.unctad.org/) (on line). 20 Mei 2005.
- Vanzetti, D., and Brett Graham. 2002. *Simulating Agriculturaal Policy Reform with ATPSM*. Paper. Trade Analysisi Branch, UNCTAD, Geneva.
- Vanzetti, D., and Ralf Peters. 2003. *An Analysis of the WTO, US and EU Proposals on Agricultural Reform*. Paper. Trade Analysisi Branch, UNCTAD, Geneva.
- Wall, H. J. 1999. "Using the Gravity Model to Estimate the Costs of Protection," *Review*, January/February. Federal Reserve Bank of St. Louis.

- Wei, S.-J. and J. A. Frenkel. 1997. "Open versus Closed Trading Blocs," In T. Ito and A. O. Krueger (Eds). *Regionalism versus Multilateral Trade Arrangements*: pp. 119-139. University of Chicago Press, Chicago.
- World Bank. 2005. *Countries At A Glance Data*. [www.worldbank.org/](http://www.worldbank.org/) (on line). 11 Juli 2005.
- WTO. 2000. *Agriculture: the WTO Agreements Series 3*, Secretariat WTO, Geneva.
- WTO. 2003. "Preparation for the 5<sup>th</sup> Session of the Ministerial Conference: Draft Cancun Ministerial Text", Second Revision (JOB(03)/150/Rev.2), 13 September 2004.
- WTO. 2003. "Preparation for the 5<sup>th</sup> Session of the Ministerial Conference: Draft Cancun Ministerial Text", Second Revision (JOB(03)/150/Rev.2), 13 September 2004.
- WTO. 2003a. "Negotiation on Agriculture: First Draft of Modalities for the Further.
- WTO. 2003b. "Preparation for the 5<sup>th</sup> Session of the Ministerial Conference: Draft .
- WTO. 2003c. *The Legal Texts. The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*. Cambridge University Press, United Kingdom.
- WTO. 2004. *WTO Agriculture Negotiations: The Issues and Where We are Now*. [www.wto.org/](http://www.wto.org/) (online). 1 Maret 2004.
- WTO. 2004a. "Summary Report on the 22nd Meeting of CoA Special Session", note.
- WTO. 2004b, "Doha Work Programme: Decision Adopted by the General Council on 1 August 2004". ([http/www.wto.org/](http://www.wto.org/)).

## Lampiran. Kerangka Dasar Agricultural Trade Policy Simulation Model (ATPSM)

Model ini mempunyai ciri bahwa harga dalam negeri adalah fungsi harga pasar dunia dan perlindungan perbatasan atau aturan-aturan pendukung dalam negeri yang khusus. Semua aturan proteksi dinyatakan dalam setara nilai tarif. Dengan mengasumsikan bahwa sebuah negara seringkali adalah pengimpor atau pengekspor satu (agregat) barang, tarif gabungan dihitung untuk menentukan harga konsumsi dan produksi dalam negeri. Angka ini diperoleh dengan membagi volume ke dalam tiga kelompok, impor, ekspor, dan produksi yang ditawarkan ke pasar dalam negeri ( $S_d$ ). Pertama, tarif pasar dalam negeri ( $t_d$ ) dihitung sebagai rata-rata terbobot dua pajak perdagangan, angka subsidi ekspor ( $t_x$ ) dan tarif impor ( $t_m$ ), dimana pembobotnya adalah ekspor ( $X$ ) dan impor ( $M$ ):

$$t_d = (X t_x + M t_m) / (M + X); \quad (L1)$$

Kemudian tarif konsumsi (pasar dalam negeri) dihitung sebagai rata-rata terbobot tarif impor ( $t_m$ ) dan tarif pasar dalam negeri ( $t_d$ ) dimana pembobotnya adalah impor ( $M$ ) dan penawaran dalam negeri ( $S_d$ ):

$$t_c = (M t_m + S_d t_d) / D; \quad (L2)$$

Dengan cara yang sama, tarif penawaran (pasar dalam negeri) dihitung sebagai rata-rata terbobot tarif impor ( $t_m$ ) dan tarif pasar dalam negeri ( $t_d$ ) dimana pembobotnya adalah ekspor ( $X$ ) dan penawaran dalam negeri ( $S_d$ ) ditambah tarif penawaran dalam negeri ( $t_p$ ):

$$t_s = (X t_x + S_d t_d) / S + t_p; \quad (L3)$$

Dengan demikian sistem persamaan untuk semua negara sebenarnya adalah empat persamaan berikut ini, yang memperlihatkan konsumsi dalam negeri, produksi, ekspor, dan impor:

$$\widehat{D}_{i,r} = \varepsilon_{i,i,r} [\widehat{P}_{wi} + (1 + \widehat{t}_{Ci,r})] + \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^J \varepsilon_{i,j,r} [\widehat{P}_{wj} + (1 + \widehat{t}_{Cj,r})] \quad (L4)$$

$$\widehat{S}_{i,r} = \mu_{i,i,r} [\widehat{P}_{wi} + (1 + \widehat{t}_{Pi,r})] + \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^J \mu_{i,j,r} [\widehat{P}_{wj} + (1 + \widehat{t}_{Pj,r})] \quad (L5)$$

$$X_{i,r} = S_{i,r} \quad (L6)$$

$$M_{i,r} = D_{i,r} \widehat{D}_{i,r} - S_{i,r} \widehat{S}_{i,r} + X_{i,r} \quad (L7)$$

dimana  $\Delta D$ ,  $\Delta S$ ,  $\Delta X$  dan  $\Delta M$  masing-masing melambangkan permintaan, penawaran, ekspor dan impor,  $\Lambda$  melambangkan perubahan relatif dan  $\Delta$  perubahan mutlak,  $P_w$  melambangkan harga dunia,  $t_c$  tarif konsumsi dalam negeri dan  $t_s$  tarif produksi dalam negeri,  $\varepsilon_{i,j,r}$  elastisitas penawaran dan  $\eta_{i,j,r}$  elastisitas permintaan  $i$  dan  $j$  adalah indeks komoditas dan  $r$  adalah indeks negara. Dengan mengolah  $D$ ,  $S$ ,  $X$  dan  $M$  dan  $P_w$  ke dalam vektor berdimensi 6300 ( $175 * 36$ ) kali 1, sistem persamaan di atas dapat disederhanakan dan diselesaikan melalui pembalikan matriks.

Lampiran Tabel 1. Jadwal Penurunan Tarif Program EHP Bilateral Indonesia–China

Kategori Produk	Deskripsi	Tidak lebih dari 1/1/04	Tidak lebih dari 1/1/05	Tidak lebih dari 1/1/06
1	Produk dengan tingkat tarif umum lebih tinggi dari 15% untuk China dan Indonesia	10%	5%	0%
2	Produk dengan tingkat tarif umum antara 5%-15% untuk China dan Indonesia	5%	0%	0%
3	Produk dengan tarif umum lebih rendah dari 5% untuk China dan Indonesia	0%	0%	0%

Sumber: [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

Lampiran Tabel 2. Daftar Produk Spesifik Kode HS Empat Digit *Early Harvest Package* Indonesia–China *Free Trade Area*

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk	Jumlah Pos Tarif
1	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapa pun	1
2	15.13	Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia	11
3	15.16	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut	15
4	15.17	Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati	8
5	18.06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao	1
6	34.01	Sabun; produk dan preparat aktif permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak	5
7	40.16	Barang lain dari karet divulkanisasi selain karet keras	1
8	70.11	<i>Glass envelope</i> (termasuk bulb dan tabung), terbuka, dan bagiannya dari kaca, tanpa alat kelengkapan untuk lampu listrik, tabung sinar katoda atau sejenisnya	2
9	94.01	Tempat duduk, dapat diubah menjadi tempat tidur, maupun tidak dan bagiannya	1
10	94.03	Perabotan lain dan bagiannya	1

Sumber: Departemen Keuangan RI, 2004.

Lampiran Tabel 3. Kelompok Produk Impor dari China ke Indonesia dengan Pangsa Pasar Terbesar\*, 1996–2003

Tahun	Kode HS Kelompok Produk									
1996	0703	1701	2401	1202	3201	2931	3105	2941	3103	2526
	(13,09)	(11,07)	(8,80)	(5,34)	(4,73)	(3,97)	(3,00)	(2,45)	(2,32)	(2,20)
1997	1005	2401	0703	3204	3104	4407	2510	2941	2909	2933
	(15,52)	(14,57)	(12,25)	(5,92)	(5,81)	(1,90)	(1,89)	(1,81)	(1,80)	(1,74)
1998	1006	0703	3204	1005	2401	1701	3104	2935	2933	0502
	(24,24)	(9,37)	(9,22)	(9,20)	(6,07)	(5,69)	(2,44)	(1,98)	(1,75)	(1,25)
1999	1006	2401	1005	1701	0703	3104	3204	3103	2510	1201
	(37,06)	(8,66)	(7,05)	(4,60)	(4,41)	(3,67)	(3,31)	(2,35)	(1,66)	(1,51)
2000	1006	1005	2401	3204	0703	0808	0805	4011	1701	3105
	(16,07)	(15,81)	(8,05)	(6,23)	(5,33)	(4,55)	(3,06)	(2,13)	(2,04)	(1,86)
2001	2401	0703	1005	0808	3204	0805	2921	3105	2933	4002
	(14,02)	(8,45)	(7,19)	(7,12)	(6,71)	(2,64)	(2,55)	(2,41)	(2,15)	(1,94)
2002	1005	0808	0703	3204	2401	1006	0805	3105	1101	1001
	(15,77)	(8,67)	(6,75)	(5,78)	(5,17)	(3,49)	(2,91)	(2,65)	(2,46)	(2,07)
2003	1005	0808	0703	3204	2401	0805	1101	4104	3105	2921
	(21,97)	(7,40)	(6,63)	(4,96)	(4,41)	(2,96)	(2,24)	(1,74)	(1,68)	(1,58)

\*) Angka dalam kurung adalah persentase pangsa produk terhadap total impor produk dari China ke Indonesia

Sumber: Analisa Data Sekunder, 2005.

Lampiran Tabel 4. Kelompok Produk Ekspor Indonesia ke China dengan Pangsa Pasar Terbesar\*, 1996–2003

Tahun	Kode HS Kelompok Produk									
1996	0303	0306	0803	1511	1520	1801	3102	4001	4412	4418
	(41,96)	(12,50)	(11,93)	(7,58)	(2,80)	(2,68)	(2,17)	(1,95)	(1,89)	(1,73)
1997	0303	0306	1507	1511	1513	1801	2915	4001	4412	4418
	(34,50)	(27,22)	(7,01)	(5,17)	(3,34)	(3,28)	(2,62)	(2,28)	(1,88)	(1,72)
1998	0303	0306	0803	1511	1801	2905	4001	4106	4412	4418
	(41,68)	(11,73)	(6,87)	(5,30)	(4,42)	(3,48)	(2,42)	(2,34)	(2,26)	(1,91)
1999	0303	0306	1511	2905	2915	2917	4001	4409	4412	4418
	(21,00)	(16,55)	(9,56)	(6,88)	(6,57)	(5,59)	(4,23)	(2,82)	(2,24)	(2,15)
2000	1511	1513	2902	2905	2915	2917	4001	4409	4412	4418
	(18,76)	(16,25)	(10,41)	(9,57)	(6,24)	(5,78)	(3,23)	(2,85)	(2,58)	(2,08)
2001	1511	1513	2902	2905	2917	4001	4407	4409	4412	4418
	(11,97)	(11,12)	(9,36)	(9,09)	(7,79)	(7,77)	(5,89)	(5,14)	(3,85)	(3,64)
2002	1511	2917	4412	4409	2902	4407	4418	2905	1513	4001
	(17,17)	(15,47)	(9,41)	(7,64)	(7,30)	(6,39)	(5,70)	(4,38)	(3,22)	(2,94)
2003	0303	1511	1513	2902	2905	2917	4001	4409	4412	4418
	(22,79)	(13,63)	(9,64)	(6,80)	(6,35)	(6,07)	(4,72)	(4,06)	(3,93)	(3,09)

\*) Angka dalam kurung adalah persentase pangsa produk terhadap total ekspor produk Indonesia ke China

Sumber: Analisa Data Sekunder, 2005.

Lampiran Tabel 5. Uraian Kelompok Produk Kode HS Empat Digit yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia dan China <sup>\*)</sup>, 1996-2003

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk <sup>*)</sup>
1	03.03	Ikan beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang
2	03.06	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, kering, asin atau dalam air garam
3	05.02	Bulu atau bulu kasar dari babi, babi ternak dan babi hutan; bulu berang-berang dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat
4	07.03	Bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya segar atau dingin
5	08.03	Pisang, termasuk plantain, segar atau kering
6	08.05	Buah jeruk, segar atau kering
7	08.08	Apel, pir, dan quince, segar
8	10.01	Gandum dan meslin
9	10.04	Oat
10	10.05	Jagung
11	10.06	Beras
12	11.01	Tepung gandum, atau tepung meslin
13	12.01	Kacang kedelai, pecah maupun tidak
14	12.02	Kacang tanah, tidak digongseng atau dimasak secara lain, dikuliti, atau pecah maupun tidak
15	15.07	Minyak kacang kedelai dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia
16	15.11	Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia
17	15.13	Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia
18	15.20	Gliserol, kasar; air gliserol dan larutan alkali gliserol
19	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat
20	17.02	Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat
21	18.01	Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau digongseng
22	24.01	Tembakau belum dipabrikasi; sisa tembakau
23	25.10	Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat
24	25.26	Steatit alam, talc
25	29.02	Hidrokarbon siklik
26	29.05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya
27	29.09	Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alcohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida
28	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidrida, halida, peroksida, dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya

Lampiran Tabel 5.Lanjutan

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk*)
29	29.17	Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya
30	29.21	Senyawa berfungsi amina
31	29.31	Senyawa organo-anorganik lainnya
32	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen
33	29.35	Sulfonamida
34	29.41	Antibiotik
35	31.02	Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen
36	31.03	Pupuk mineral atau kimia, mengandung fosfat
37	31.04	Pupuk mineral atau kimia, mengandung kalium
38	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua tau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya
39	32.04	Bahan pewarna organik sintetis
40	40.01	Karet alam, balata, getah perca, gyaule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
41	40.02	Karet sintetik dan factice diperoleh dari minyak, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
42	40.11	Ban bertekanan, baru, dari karet
43	40.12	Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki lagi, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet
44	41.04	Jangat atau kulit dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda yang disamak atau crust, tanpa bulu, dibelah maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut
45	41.06	Jangat atau kulit dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, dibelah maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut
46	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i> maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm
47	44.09	Kayu dibentuk tidak terputus, sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas, atau <i>end-jointed</i> maupun tidak
48	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu
49	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk kayu seluler, rakitan panel lantai papan, atau sirap dan shake

\*) Sumber: Buku Tarif Bea Masuk Indonesia, 2004.

Lampiran Tabel 6. Perkembangan Indeks Grubel-Lloyd menurut Kode HS Empat Digit Kelompok Produk Pertanian yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia-China<sup>\*)</sup>, 1996–2003

Kode HS 4 Digit	Tahun							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
05.02	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
07.03	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
08.03	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
08.05	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
08.08	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
10.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,00)
10.05	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,24 (0,17)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
10.06	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
11.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
12.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
12.02	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,02)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)
15.07	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
15.11	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
15.13	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,02 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
15.20	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
17.02	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,55 (0,62)	0,00 (0,00)	0,74 (0,17)	0,08 (0,08)	0,00 (0,00)
18.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,07 (0,08)	0,00 (0,00)	0,16 (0,27)
24.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
40.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)	0,00 (0,00)
40.02	0,04 (0,04)	0,83 (0,99)	0,48 (0,62)	0,63 (0,75)	0,58 (0,76)	0,85 (0,66)	0,95 (0,80)	0,66 (0,85)
40.11	0,72 (0,58)	0,04 (0,34)	0,44 (0,59)	0,03 (0,10)	0,01 (0,03)	0,02 (0,04)	0,01 (0,03)	0,05 (0,24)
40.12	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,36 (0,51)	0,01 (0,03)	0,95 (0,67)	0,00 (0,00)
41.04	0,00 (0,00)	0,00 (0,02)	0,80 (0,70)	0,47 (0,29)	0,07 (0,07)	0,08 (0,10)	0,10 (0,17)	0,20 (0,23)
41.06	0,00 (0,01)	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)	0,00 (0,00)	0,08 (0,11)	0,00 (0,00)	0,01 (0,00)	0,21 (0,22)

<sup>\*)</sup> Angka di bagian atas adalah IGL dari volume dan di dalam kurung adalah IGL dari nilai produk.

Lampiran Tabel 7. Kelompok Produk Impor dari Jepang ke Indonesia dengan Pangsa Pasar Terbesar\*), 1996–2003

Tahun	Kode HS Kelompok Produk									
1996	2917	4002	2905	2902	2933	2916	3204	4011	2915	2901
	(15,90)	(8,85)	(8,38)	(8,01)	(6,85)	(4,17)	(3,92)	(3,55)	(2,83)	(2,59)
1997	2902	2905	2917	4002	2933	2901	2916	3204	2915	4011
	(14,38)	(9,35)	(7,56)	(6,51)	(4,95)	(4,64)	(4,27)	(3,41)	(3,29)	(3,13)
1998	2902	2905	2933	4002	2917	3204	4011	2915	3403	3402
	(13,94)	(9,80)	(8,88)	(6,51)	(6,03)	(4,36)	(3,94)	(3,72)	(3,27)	(2,77)
1999	1006	2902	2905	2933	4011	4002	3204	2915	3403	2907
	(26,27)	(15,59)	(6,94)	(4,76)	(3,53)	(3,32)	(3,15)	(2,61)	(2,36)	(1,78)
2000	2902	2905	2933	4002	3204	4016	4011	2915	3403	1006
	(11,08)	(9,21)	(6,30)	(6,24)	(4,46)	(4,01)	(3,51)	(3,35)	(3,14)	(3,01)
2001	2902	2933	4016	4002	2905	4011	3204	3403	2915	2929
	(11,13)	(6,75)	(6,58)	(5,98)	(5,33)	(4,71)	(3,96)	(3,91)	(3,31)	(2,71)
2002	2902	4016	4002	2933	3204	4011	3403	2905	4009	1006
	(10,11)	(6,02)	(5,34)	(4,70)	(4,55)	(4,24)	(3,89)	(3,75)	(2,90)	(2,84)
2003	2902	4016	2933	2905	4011	4002	2915	3403	3204	4009
	(11,69)	(6,20)	(6,19)	(5,85)	(4,78)	(4,72)	(3,53)	(3,36)	(3,19)	(2,68)

\*) Angka dalam kurung adalah persentase pangsa produk terhadap total impor produk dari Jepang ke Indonesia

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2005.

Lampiran Tabel 8. Kelompok Produk Ekspor Indonesia ke Jepang dengan Pangsa Pasar Terbesar\*), 1996–2003

Tahun	Kode HS Kelompok Produk									
1996	4412	0306	4413	4418	4001	0901	4407	0302	0305	0303
	(42,50)	(21,77)	(5,05)	(4,11)	(3,98)	(3,19)	(2,25)	(1,82)	(1,74)	(1,04)
1997	4412	0306	4413	4001	4418	0901	0302	4407	0305	0303
	(43,41)	(22,93)	(3,60)	(3,60)	(3,35)	(3,21)	(2,42)	(2,13)	(1,59)	(1,54)
1998	0306	4412	0901	4418	4001	0302	0305	0303	1604	2922
	(0,33)	(0,28)	(0,05)	(0,05)	(0,03)	(0,03)	(0,02)	(0,02)	(0,02)	(0,02)
1999	4412	0306	0901	4413	4418	4001	0302	0305	2905	1604
	(21,00)	(16,55)	(9,56)	(6,88)	(6,57)	(5,59)	(4,23)	(2,82)	(2,24)	(2,15)
2000	4412	0306	4413	4418	4001	0901	0302	2905	4409	0305
	(34,85)	(25,30)	(4,48)	(4,28)	(3,78)	(3,09)	(2,87)	(1,94)	(1,29)	(1,28)
2001	4412	0306	4418	4413	4001	0302	0901	2905	0305	4011
	(33,52)	(25,27)	(4,45)	(3,89)	(3,72)	(2,98)	(2,22)	(1,68)	(1,66)	(1,54)
2002	0302	0305	0306	0901	4001	4011	4409	4412	4413	4418
	(33,18)	(22,68)	(7,13)	(4,00)	(3,56)	(3,46)	(2,49)	(2,16)	(1,85)	(1,52)
2003	4412	0306	4001	4413	4418	0302	4011	0901	4409	2905
	(28,90)	(21,84)	(9,81)	(4,02)	(3,52)	(3,14)	(2,88)	(2,25)	(2,19)	(1,78)

\*) Angka dalam kurung adalah persentase pangsa produk terhadap total impor produk dari Jepang ke Indonesia

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2005.

Lampiran Tabel 9. Uraian Kelompok Produk Kode HS Empat Digit yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia dan Jepang \*), 1996–2003

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk*)
1	03.02	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04
2	03.03	Ikan beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang
3	03.05	Ikan, kering, asin atau dalam air garam, ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan ; tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan yang layak untuk dikonsumsi manusia
4	03.06	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, kering, asin atau dalam air garam
5	07.04	Kubis, bunga kol, kohlrabi, kale dan brassica sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin
6	07.09	Sayuran lainnya, segar atau dingin
7	07.14	Ubi kayu
8	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak
9	09.02	Teh, diberi rasa maupun tidak
10	09.04	Lada dari genus <i>piper</i> ; kering atau dihancurkan atau buah yang digiling dari genus <i>capsicum</i> atau dari genus <i>pimenta</i>
11	09.10	Jahe, saffron, turmeric ( <i>curcuma</i> ), thyme, daun salam, kari dan rempah-rempah lainnya
12	10.05	Jagung
13	10.06	Beras
14	15.11	Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia
15	15.20	Gliserol, kasar; air gliserol dan larutan alkali gliserol
16	16.04	Ikan diolah atau diawetkan, kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan
17	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat
18	17.02	Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi, dalam bentuk padat
19	17.03	Tetes dari hasil ekstraksi atau permurnian gula
20	18.04	Mentega, lemak dan minyak kakao
21	18.06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao
22	19.02	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak(dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spageti, makarani, mie, lasagna,gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, diolah maupun tidak
23	20.08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya, yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau tambahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya
24	22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadsar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya ; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.

Lampiran Tabel 9. Lanjutan

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk*)
25	23.01	Tepung, tepung kasar dan pellet, dari daging atau sisanya dari ikan atau krustasea, moluska dan inventebarata air lainnya, tidak layak untuk dikonsumsi manusia, greaves.
26	23.02	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari serelia atau tanaman dari polongan
27	23.06	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati selain dari pos 23.04 dan 23.05
28	25.03	Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloidal.
29	25.07	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak
30	29.01	Hidrokarbon asiklik
31	29.02	Hidrokarbon siklik
32	29.03	Turunan halogenasi dari hidrokarbon
33	29.05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya
32	29.07	Fenol ; Fenol alkohol
33	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidrida, halida, peroksida, dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya
34	29.16	Asam monokarboksilat asiklik tidak jenuh, asam monokarboksilat siklik, anhidrida, halide paroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitronisasinya.
35	29.17	Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya
36	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen
37	29.29	Senyawa dan fungsi nitrogen lainnya
38	29.33	Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen
39	31.01	Pupuk hewani atau nabati, dicampur bersama atau diolah secara kimia maupun tidak, pupuk yang dihasilkan dengan mencampur atau mengolah secara kimia dari produk hewani atau nabati
40	31.02	Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen
41	32.04	Bahan pewarna organik sintesis , mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; produk organik sintesis dari jenis yang digunakan sebagai bahan pencemerlang fluoresen atau sebagai luminofor, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak
42	34.01	Sabun, produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentuk yang dicetak, mengandung sabun ataupun tidak, produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun ataupun tidak, kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
43	34.02	Bahan aktif permukaan organik (selain sabun)

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk*)
44	34.03	Preparat pelumas (termasuk preparat minyak pemotong, preparat pelepas baut atau mur, preparat anti karat atau anti korosi, preparat pelepas cetakan, dengan bahan dasar pelumas)
45	35.05	Dekstrin dan pati yang diakomodasi lainnya (misalnya, pati yang dipregelatinisasi atau yang diestefifikasi); perekat yang terbuat dari pati yang dimodifikasi lainnya
46	40.01	Karet alam, balata, getah perca, gyaule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
47	40.02	Karet sintetik dan factice diperoleh dari minyak, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
48	40.09	Tabung, pipa dan selang dari karet divulkanisasi, selain karet keras dengan atau tanpa alat kelengkapannya (misalnya, penghubung, siku, flensa)
49	40.11	Ban bertekanan, baru, dari karet
50	40.13	Ban dalam dari karet
51	40.16	Barang lain dari karet, divulkanisasi selain karet keras
52	44.01	Kayu bakar berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dalam sisa bekas serta skrap kayu, diaglomerasi maupun tidak berbentuk log, briket, pelet, atau bentuk semacam itu.
53	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i> maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm
54	44.09	Kayu dibentuk tidak terputus, sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas, atau <i>end-jointed</i> maupun tidak
55	44.12	Kayu lapis panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu
56	44.13	Kayu dpadatkan, berbentuk balok, pelat, strip atau profil
57	44.15	Peti, Kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu, gelondong kabel dari kayu, palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya
58	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk kayu seluler, rakitan panel lantai papan, atau sirap dan shake
56	44.20	Tatakan kayu dan kayu bertatah, kotak dan peti untuk perhiasan atau barang tajam atau barang semacam itu, dari kayu; patung dan ornament lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk bab 94
60	44.21	Barang lainnya dari kayu lainnya

\*) Sumber: Buku Tarif Bea Masuk Indonesia, 2004

Lampiran Tabel 10. Perkembangan Indeks Grubel-Lloyd menurut Kode HS Empat Digit Kelompok Produk Pertanian yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia-Jepang\*, 1996-2003

Kode HS 4 Digit	Tahun							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
03.02	0,00 (0,00)	0,01 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,00)	0,00 (0,00)	0,02 (0,01)	0,00 (0,01)	0,01 (0,01)
03.03	0,07 (0,05)	0,04 (0,02)	0,02 (0,02)	0,02 (0,05)	0,26 (0,15)	0,16 (0,15)	0,03 (0,05)	0,07 (0,08)
03.05	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,01 (0,00)	0,03 (0,00)	0,07 (0,01)	0,02 (0,01)	0,01 (0,00)	0,04 (0,02)
03.06	0,00 (0,00)	0,01 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
09.01	0,02 (0,05)	0,01 (0,01)	0,06 (0,06)	0,01 (0,01)	0,06 (0,05)	0,03 (0,04)	0,17 (0,22)	0,15 (0,31)
10.06	0,00 (0,00)	0,02 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,00)
16.04	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)	0,01 (0,00)	0,01 (0,00)	0,01 (0,00)	0,01 (0,02)	0,01 (0,00)	0,01 (0,01)
29.01	0,32 (0,12)	0,74 (0,00)	0,31 (0,54)	0,00 (0,23)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,02 (0,02)	0,00 (0,00)
29.02	0,36 (0,14)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,02)	0,00 (0,03)	0,02 (0,02)	0,21 (0,27)
29.05	0,44 (0,46)	0,53 (0,47)	0,93 (0,67)	0,72 (0,79)	0,70 (0,86)	0,49 (0,87)	0,40 (0,77)	0,37 (0,83)
29.07	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,02)	0,00 (0,01)	0,01 (0,05)	0,08 (0,09)
29.15	0,51 (0,42)	0,50 (0,47)	0,48 (0,58)	0,49 (0,65)	0,41 (0,49)	0,57 (0,46)	0,45 (0,44)	0,15 (0,22)
29.16	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,28 (0,22)	0,98 (0,73)	0,66 (0,82)	0,34 (0,87)	0,84 (0,44)	0,76 (0,69)
29.17	0,00 (0,00)	0,12 (0,10)	0,24 (0,18)	0,04 (0,03)	0,06 (0,05)	0,14 (0,11)	0,85 (0,70)	0,97 (0,79)
29.22	0,07 (0,28)	0,24 (0,30)	0,05 (0,16)	0,04 (0,74)	0,04 (0,25)	0,03 (0,21)	0,06 (0,31)	0,04 (0,24)
29.29	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,02 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
29.33	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)	0,02 (0,02)	0,08 (0,07)	0,25 (0,15)	0,36 (0,23)	0,44 (0,32)	0,95 (0,30)
32.04	0,08 (0,04)	0,24 (0,16)	0,10 (0,06)	0,18 (0,10)	0,26 (0,14)	0,28 (0,14)	0,56 (0,33)	0,96 (0,78)
34.03	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)
40.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,02)	0,00 (0,03)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
40.02	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,02)	0,01 (0,00)	0,05 (0,03)	0,09 (0,06)
40.09	0,09 (0,02)	0,01 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,02 (0,01)	0,03 (0,02)	0,95 (0,02)	0,08 (0,03)
40.11	0,67 (0,46)	0,59 (0,50)	0,66 (0,43)	0,89 (0,83)	0,73 (0,97)	0,60 (0,86)	0,47 (0,66)	0,31 (0,54)
40.16	0,34 (0,36)	0,24 (0,37)	0,21 (0,35)	0,41 (0,53)	0,46 (0,38)	0,36 (0,32)	0,48 (0,44)	0,62 (0,64)

Lampiran Tabel 10. Lanjutan

Kode HS 4 Digit	Tahun							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
44.09	0,00 (0,00)	0,00 (0,02)	0,80 (0,70)	0,47 (0,29)	0,07 (0,07)	0,08 (0,10)	0,10 (0,17)	0,20 (0,23)
44.12	0,00 (0,01)	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)	0,00 (0,00)	0,08 (0,11)	0,00 (0,00)	0,01 (0,00)	0,21 (0,22)
44.13	0,57 (0,61)	0,86 (0,78)	0,62 (0,76)	0,35 (0,74)	0,32 (0,89)	0,06 (0,26)	0,01 (0,08)	0,05 (0,15)
44.18	0,21 (0,37)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,01)	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)	0,00 (0,01)

\*) Angka di bagian atas adalah IGL dari volume dan di dalam kurung adalah IGL dari nilai produk.

Lampiran Tabel 11. Kelompok Produk Impor dari Korea Selatan ke Indonesia dengan Pangsa Pasar Terbesar\*), 1996–2003

Tahun	Kode HS Kelompok Produk									
1996	1701 (28,98)	2523 (10,74)	2901 (9,65)	2902 (5,95)	2917 (4,68)	3204 (4,61)	3506 (3,07)	4002 (2,99)	4005 (2,48)	4104 ( )
1997	2901 (22,29)	2902 (10,64)	2917 (9,45)	3105 (7,53)	3204 (6,20)	3506 (4,13)	4002 (3,12)	4005 (2,73)	4010 (2,55)	4104 (2,19)
1998	1701 (28,20)	2901 (15,44)	2902 (10,76)	2907 (5,79)	2917 (5,46)	3204 (3,95)	3402 (2,92)	3506 (2,78)	4002 (1,88)	4104 (1,27)
1999	2902 (25,42)	4104 (21,37)	2917 (7,67)	4002 (5,26)	2901 (4,25)	3204 (2,72)	3102 (2,17)	1701 (2,13)	2915 (1,88)	3402 (1,78)
2000	1701 (33,01)	2901 (17,65)	2902 (7,74)	2905 (5,44)	2917 (2,54)	2929 (2,24)	3204 (2,11)	3506 (1,94)	4002 (1,90)	4104 (1,78)
2001	2901 (35,98)	2902 (17,34)	2905 (5,30)	2917 (4,51)	3105 (3,53)	3204 (2,74)	3402 (2,07)	3506 (2,01)	4002 (1,86)	4104 (1,73)
2002	2902 (30,24)	2917 (12,69)	2929 (6,80)	2934 (4,93)	3102 (2,91)	3105 (2,73)	3402 (2,50)	3506 (2,36)	4002 (2,34)	4104 (2,23)
2003	2106 (18,12)	2901 (10,17)	2902 (9,74)	2915 (5,23)	2929 (3,73)	3102 (3,39)	3105 (3,20)	3506 (2,94)	4002 (2,93)	4104 (2,40)

\*) Angka dalam kurung adalah persentase pangsa produk terhadap total impor produk dari Korea Selatan ke Indonesia

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2005.

Lampiran Tabel 12. Kelompok Produk Ekspor Indonesia ke Korea Selatan dengan Pangsa Pasar Terbesar\*), 1996–2003

Tahun	Kode HS Kelompok Produk									
1996	09001	1513	2302	2306	4001	4402	4407	4412	4413	4418
	(36,99)	(16,26)	(14,70)	(4,46)	(3,28)	(2,37)	(2,30)	(2,24)	(2,07)	(1,48)
1997	0901	1513	1703	2302	2306	4001	4407	4412	4413	4418
	(30,20)	(17,90)	(15,01)	(4,58)	(3,79)	(3,09)	(2,89)	(2,81)	(1,79)	(1,4)
1998	0714	0901	1513	2302	2306	2934	3102	4001	4412	4418
	(22,76)	(18,03)	(7,07)	(6,39)	(4,97)	(4,79)	(4,22)	(3,53)	(3,19)	(3,18)
1999	0901	1513	2302	2905	2934	4001	4402	4409	4412	4418
	(27,28)	(12,11)	(10,64)	(4,49)	(4,03)	(3,96)	(3,39)	(2,97)	(2,47)	(2,18)
2000	1503	2302	2905	4001	4402	4409	4411	4412	4413	4418
	(23,34)	(10,60)	(9,68)	(4,75)	(3,31)	(3,29)	(3,26)	(3,14)	(3,12)	(2,78)
2001	2302	2905	2922	2934	4001	4409	4411	4412	4413	4418
	(27,29)	(11,40)	(7,80)	(4,83)	(4,34)	(4,07)	(3,92)	(3,92)	(3,90)	(1,91)
2002	2302	2905	2934	3102	4001	4409	4411	4412	4413	4418
	(11,73)	(11,34)	(10,25)	(5,73)	(5,29)	(4,18)	(3,76)	(3,70)	(3,61)	(2,94)
2003	0303	1511	1513	2902	2905	2917	4001	4409	4412	4418
	(22,79)	(13,63)	(5,08)	(4,69)	(4,66)	(3,91)	(3,62)	(3,48)	(3,21)	(3,07)

\*) Angka dalam kurung adalah persentase pangsa produk terhadap total ekspor produk Indonesia ke Korea Selatan

Sumber: Analisa Data Sekunder, 2005.

Lampiran Tabel 13. Uraian Kelompok Produk Kode HS Empat Digit yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia dan Korea Selatan \*), 1996–2003

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk*)
1	03.03	Ikan beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang
2	07.14	Ubi kayu
3	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak
4	15.13	Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia
5	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat
6	17.03	Tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula
7	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci
8	23.02	Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pellet maupun tidak, berasal dari pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari sereal atau dari tanaman polongan
9	23.06	Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pellet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati selain dari kacang kedelai dan kacang tanah
10	25.23	Semen Portland, semen alumina, semen terak, semen super sulfat dan semen hidrolis semacam itu, berwarna maupun tidak atau belum dalam bentuk clinker
11	29.01	Hidrokarbon asiklik
12	29.02	Hidrokarbon siklik
13	29.05	Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya
14	29.07	Fenol, fenol alkohol
15	29.15	Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidrida, halida, peroksida, dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya

Lampiran Tabel 13. Lanjutan

No	Kode HS 4 Digit	Uraian Produk*)
16	29.17	Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasinya
17	29.22	Senyawa amino berfungsi oksigen
18	29.29	Senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya
19	29.34	Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak, senyawa heterosiklik lainnya
20	31.02	Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen
21	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua tau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya
22	32.04	Bahan pewarna organik sintetis
23	34.02	Bahan aktif permukaan organik (selain sabun)
24	35.06	Perekat olahan dan ahesif olahan lainnya
25	40.01	Karet alam, balata, getah perca, gyaule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
26	40.02	Karet sintetik dan factice diperoleh dari minyak, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
27	40.05	Karet campuran, tidak divulkanisir, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip
28	40.10	Ban atau belting pengangkut atau penggerak dari karet divulkanisasi
29	41.04	Jangat atau kulit dari hewan jenis lembu (termasuk kerbau) atau hewan jenis kuda yang disamak atau crust, tanpa bulu, dibelah maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut
30	44.02	Arang kayu
31	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau <i>end-jointed</i> maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm
32	44.09	Kayu dibentuk tidak terputus, sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas, atau <i>end-jointed</i> maupun tidak
33	44.11	Papan fiber dari kayunatau bahan mengandung lignin lainnya
34	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu
35	44.13	Kayu dipadatkan, berbentuk balok, pelat, strip atau profil
36	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk kayu seluler, rakitan panel lantai papan, atau sirap dan shake

\*) Sumber: Buku Tarif Bea Masuk Indonesia, 2004.

Lampiran Tabel 14. Perkembangan Indeks Grubel-Lloyd Menurut Kode HS Empat Digit Kelompok Produk Pertanian yang Mendominasi Ekspor dan Impor Indonesia–Korea Selatan<sup>\*)</sup>, 1996–2003

Kode HS 4 Digit	Tahun							
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
07.14	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
09.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,01)
15.13	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
17.01	0,00 (0,00)	0,40 (0,08)	0,21 (0,03)	0,39 (0,16)	0,00 (0,00)	0,04 (0,10)	0,04 (0,01)	0,01 (0,01)
17.03	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,49 (0,02)	0,37 (0,01)	0,10 (0,01)	0,00 (0,00)
21.06	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,09 (0,08)	0,08 (0,07)	0,01 (0,00)	0,00 (0,00)
23.02	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
23.26	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,02)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
40.01	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,00 (0,01)
40.02	0,01 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,11 (0,08)	0,11 (0,07)	0,22 (0,11)	0,00 (0,01)	0,02 (0,02)
40.05	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,01 (0,00)	0,01 (0,00)	0,06 (0,02)	0,05 (0,01)	0,75 (0,00)	0,31 (0,11)
40.10	0,00 (0,00)	0,04 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1,00 (0,42)	0,58 (0,12)	0,08 (0,01)	0,02 (0,01)
41.04	0,01 (0,01)	0,00 (0,00)	0,00 (0,01)	0,01 (0,01)	0,01 (0,01)	0,04 (0,04)	0,06 (0,06)	0,05 (0,05)

<sup>\*)</sup> Angka di bagian atas adalah IGL dari volume dan di dalam kurung adalah IGL dari nilai produk.

Lampiran Tabel 15. Hasil Analisis Indikator Kriteria *Food Security*

No	Komoditas	Indikator Kriteria				
		SS (%)	PK (%)	KK (%)	KP (%)	KI (%)
1	Padi dan Beras	92,98	97,71	51,60	44,59	7,02
2	Jagung Pipilan Kering	81,04	5,15	1,46	1,28	34,01
3	Biji Gandum	0,00	45,39	7,89	6,17	100,00
4	Padi-padian lainnya	89,91	11,93	0,82	0,72	11,22
5	Ubikayu	91,03	35,85	3,01	0,77	0,00
6	Ubi Jalar dan Umbi-umbian Lainnya	97,10	26,30	1,00	1,11	0,03
7	Kedelai	49,73	40,92	2,80	9,96	33,58
8	Kacang Tanah	99,36	16,62	0,41	0,92	4,87
9	Kacang Hijau, Kacang Merah dan Kacang-kacangan lainnya	94,12	10,32	0,44	0,45	0,00
10	Cabe Merah Besar, Keriting dan Rawit	99,17	66,13	0,20	0,31	7,61
11	Tomat	99,39	57,42	0,06	0,56	25,50
12	Bawang Merah, Bawang Putih dan Bawang Daun	87,48	58,94	0,21	0,26	0,00
13	Kentang	99,77	20,14	0,22	0,87	78,35
14	Kol/Kubis	71,93	21,70	0,12	0,52	0,00
15	Pisang	99,69	39,95	3,78	2,24	1,88
16	Mangga	88,66	1,22	0,02	0,02	14,07
17	Jeruk	99,25	9,00	0,10	0,07	9,09
18	Nenas	99,95	1,41	0,02	0,02	4,74
19	Durian	87,67	1,68	0,14	0,04	14,07
20	Sayuran dan Buah-buahan lainnya	99,24	68,74	3,11	1,17	2,40
21	Kelapa	99,66	48,82	7,11	1,04	4,09
22	Kelapa sawit	99,92	52,33	5,80	0,01	0,01
23	Tebu dan Gula	73,07	96,10	5,58	0,16	0,00
24	Karet	78,50	0,00	0,00	0,00	2,22
25	Kopi	96,18	58,15	0,81	1,21	2,96
26	Teh	99,98	68,57	0,16	0,81	0,01
27	Kakao	99,67	1,24	0,02	0,02	0,28
28	Jambu Mete	99,98	0,34	0,29	0,62	0,05
29	Cengkeh	48,69	31,67	0,00	0,00	17,14
30	Tembakau	100,00	67,05	0,00	0,00	0,00
31	Tanaman Rempah dan Obat	96,22	53,57	0,68	0,72	7,78
32	Kapuk, Kapas dan Tanaman Serat	12,71	69,78	0,00	0,00	70,09
33	Tanaman Pertanian Lainnya	99,23	43,64	1,81	0,45	1,16
34	Ternak Kecuali Susu Segar	96,14	41,84	0,64	2,29	12,22
35	Susu Segar	27,18	17,97	0,97	1,37	28,56
36	Unggas dan hasil-hasilnya	86,72	48,15	2,62	6,84	0,00
37	Hasil Peternakan lainnya	58,09	0,72	0,00	0,02	73,31

Keterangan:

SS = Self Sufficiency; PK = Partisipasi Konsumsi; KK = Konsumsi Kalori; KP = Konsumsi Protein; KI = Ketergantungan Impor

Sumber: Badan Pusat Statistik (2002) diolah

Lampiran Tabel 16. Hasil Valuasi Penentuan Produk Khusus menurut Masing-masing Indikator pada Kriteria *Food Security*

No	Komoditas	Indikator Kriteria					Hasil Valuasi
		SS (%)	PK (%)	KK (%)	KP (%)	KI (%)	
1	Padi dan Beras	#	#	#	#	#	*
2	Jagung Pipilan Kering	#	#	#	#	#	*
3	Biji Gandum	#	#	#	#	#	*
4	Padi-padian lainnya	#	#	#	#	#	*
5	Ubikayu	#	#	#	#	#	*
6	Ubi Jalar dan Umbi-umbian Lainnya	#	#	#	#	#	*
7	Kedelai	#	#	#	#	#	*
8	Kacang Tanah	#	#	#	#	#	*
9	Kacang Hijau, Kacang Merah dan Kacang-kacangan lainnya	#	#	#	#	#	*
10	Cabe Merah Besar, Keriting dan Rawit	#	#	#	#	#	*
11	Tomat	#	#	#	#	#	*
12	Bawang Merah, Bawang Putih dan Bawang Daun	#	#	#	#	#	*
13	Kentang	#	#	#	#	#	*
14	Kol/Kubis	#	#	#	#	#	*
15	Pisang	#	#	#	#	#	*
16	Mangga	#	#	#	#	#	*
17	Jeruk	#	#	#	#	#	*
18	Nenas	#	#	#	#	#	*
19	Durian	#	#	#	#	#	*
20	Sayuran dan Buah-buahan lainnya	#	#	#	#	#	*
21	Kelapa	#	#	#	#	#	*
22	Kelapa sawit	#	#	#	#	#	*
23	Tebu dan Gula	#	#	#	#	#	*
24	Karet	#	#	#	#	#	*
25	Kopi	#	#	#	#	#	*
26	Teh	#	#	#	#	#	*
27	Kakao	#	#	#	#	#	*
28	Jambu Mete	#	#	#	#	#	*
29	Cengkeh	#	#	#	#	#	*
30	Tembakau	#	#	#	#	#	*
31	Tanaman Rempah dan Obat	#	#	#	#	#	*
32	Kapuk, Kapas dan Tanaman Serat	#	#	#	#	#	*
33	Tanaman Pertanian Lainnya	#	#	#	#	#	*
34	Ternak Kecuali Susu Segar	#	#	#	#	#	*
35	Susu Segar	#	#	#	#	#	*
36	Unggas dan hasil-hasilnya	#	#	#	#	#	*
37	Hasil Peternakan lainnya	#	#	#	#	#	*
	Treshold dan Jumlah Komoditas Hasil Valuasi	75%	2,00%	1,00%	1,00%	2,00%	23

Keterangan:

SS = Self Sufficiency; PK = Partisipasi Konsumsi; KK = Konsumsi Kalori; KP = Konsumsi Protein; KI = Ketergantungan Impor

Sumber: Badan Pusat Statistik (2002) diolah

Lampiran Tabel 17. Hasil Analisis Indikator Kriteria *Livelihood Security* pada Penentuan Produk Khusus

No	Komoditas	% GDP	% Skala Kecil	% TK	% Lahan/ Ternak	Lahan/ TK	Nilai Tambah (Jt rp /Org)	Jumlah TK (Org)
1	Padi	27,30	96,65	27,95	33,21	0,95	1,11	12.248.829
2	Jagung	4,81	69,45	6,07	9,78	1,26	1,03	2.521.413
3	Gandum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486
4	Padi-padian lainnya	0,10	15,84	0,41	0,36	0,70	0,33	169.857
5	Ubikayu	1,56	41,78	2,90	3,65	0,91	0,70	1.204.352
6	Ubi Jalar dan Umbi-umbian Lainnya	0,54	91,61	3,93	0,53	0,11	0,18	1.632.236
7	Kedelai	0,86	66,42	2,04	2,30	0,68	0,55	847.248
8	Kacang Tanah	1,00	71,95	3,63	1,87	0,39	0,36	1.508.916
9	Kacang Hijau, Kacang Merah dan Kacang-kacangan lainnya	0,61	94,16	2,33	1,03	0,36	0,34	966.225
10	Cabe Merah Besar, Keriting dan Rawit	1,24	72,65	2,59	0,46	0,15	0,62	1.076.995
11	Tomat	0,54	63,25	0,74	0,13	0,15	0,94	308.794
12	Bawang Merah, Bawang Putih dan Bawang Daun	2,05	80,73	2,10	0,39	0,16	1,27	871.071
13	Kentang	1,12	93,09	1,03	0,18	0,15	1,42	425.935
14	Kol/Kubis	0,36	94,35	1,03	0,18	0,15	0,45	426.921
15	Pisang	2,23	80,00	1,70	0,22	0,11	1,71	705.416
16	Mangga	1,79	98,94	2,29	0,29	0,11	1,01	952.590
17	Jeruk	1,21	91,67	0,84	0,11	0,11	1,86	350.043
18	Nenas	0,15	99,65	1,28	0,16	0,10	0,15	529.740
19	Durian	1,62	83,61	0,76	0,10	0,10	2,77	316.212
20	Sayuran dan Buah-buahan lainnya	6,02	91,27	11,50	1,96	0,14	0,68	4.775.459
21	Kelapa	3,19	74,90	2,15	10,04	3,23	1,93	893.531
22	Kelapa sawit	4,54	59,98	1,00	10,96	8,18	5,87	416.821
23	Tebu	6,58	61,45	1,51	1,05	0,35	3,27	1.052.929
24	Karet	0,84	95,89	1,02	10,00	3,91	1,07	424.492
25	Kopi	1,55	78,91	1,25	3,54	2,19	1,61	517.852
26	Teh	0,31	78,00	0,51	0,45	0,59	0,79	213.873
27	Kakao	1,37	82,72	0,59	2,08	2,31	3,02	244.899

Lampiran Tabel 17. Lanjutan

No	Komoditas	% GDP	% Skala Kecil	% TK	% Lahan/ Ternak	Lahan/ TK	Nilai Tambah (Jt rp /Org)	Jumlah TK (Org)
29	Cengkeh	0,75	96,92	0,94	1,21	0,99	1,03	392.418
30	Tembakau	2,33	62,98	1,24	0,62	0,22	2,45	513.865
31	Tanaman Rempah dan Obat	10,73	62,81	2,27	1,09	0,33	6,12	944.738
32	Kapuk, Kapas dan Tanaman Serat	1,09	89,93	1,27	0,11	0,03	1,11	528.040
33	Tanaman Pertanian Lainnya	0,46	52,89	0,31	0,38	0,79	1,89	130.195
34	Ternak Kecuali Susu Segar	6,23	76,92	5,01	3,95	16,87	1,61	2.082.354
35	Susu Segar Unggas dan	0,29	94,53	0,36	0,03	1,10	1,06	149.455
36	hasil- hasilnya	10,03	40,82	5,31	95,89	292,24	2,45	2.206.531
37	Hasil Peternakan lainnya	0,60	60,12	0,20	0,13	13,70	3,87	82.977

Sumber: Badan Pusat Statistik (2002) diolah

Lampiran Tabel 18. Hasil Valuasi Penentuan Produk Khusus berdasarkan Indikator-indikator pada Kriteria *Livelihood Security*

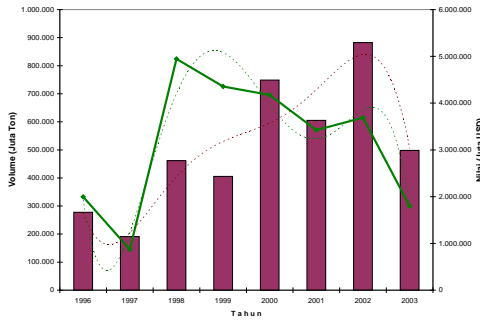
No	Komoditas	% GDP	% Skala Kecil	% TK	% Laha/ Ternak	Lahan/ TK	Nilai Tambah (Jt rp/Org)	Jumlah TK (Org)	Hasil Valuasi
1	Padi	#	#	#	#	#	#	#	*
2	Jagung	#	#	#	#	#	#	#	*
3	Gandum					#	#		
4	Padi- padian lainnya					#	#	#	*
5	Ubikayu			#	#	#	#	#	*
6	Ubi Jalar dan Umbi- umbian Lainnya		#	#		#	#	#	*
7	Kedelai		#	#	#	#	#	#	*
8	Kacang Tanah		#	#		#	#	#	*
9	Kacang Hijau, Kacang Merah dan Kacang- kacangan lainnya		#	#		#	#	#	*
10	Cabe Merah Besar, Keriting dan Rawit		#	#		#	#	#	*
11	Tomat		#			#	#	#	*
12	Bawang Merah, Bawang Putih dan Bawang Daun	#	#	#	#	#	#	#	*
13	Kentang		#			#	#	#	*
14	Kol/Kubis		#			#	#	#	*
15	Pisang	#	#			#	#	#	*
16	Mangga		#	#		#	#	#	*
17	Jeruk		#			#	#	#	*
18	Nenas		#			#	#	#	*
19	Durian		#			#	#	#	*
20	Sayuran dan Buah- buahan lainnya	#	#	#	#	#	#	#	*
21	Kelapa	#	#	#	#	#	#	#	*
22	Kelapa sawit	#	#		#		#	#	*
23	Tebu	#	#			#	#	#	*
24	Karet		#		#	#	#	#	*
25	Kopi		#		#	#	#	#	*
26	Teh		#			#	#	#	*

Lampiran Tabel 18. Lanjutan

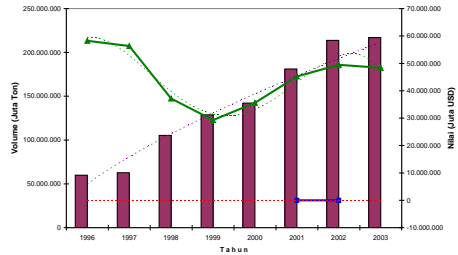
No	Komoditas	% GDP	% Skala Kecil	% TK	% Laha/ Ternak	Lahan/ TK	Nilai Tambah (Jt rp/Org)	Jumlah TK (Org)	Hasil Valuasi
27	Kakao		#		#	#	#	#	*
28	Jambu Mete		#			#	#	#	*
29	Cengkeh		#			#	#	#	*
30	Tembakau	#	#			#	#	#	*
31	Tanaman Rempah dan Obat	#	#	#		#	#	#	*
32	Kapuk, Kapas dan Tanaman Serat		#			#	#	#	*
33	Tanaman Pertanian Lainnya		#		#	#	#	#	*
34	Ternak Kecuali Susu Segar	#	#	#	#		#	#	*
35	Susu Segar		#			#	#	#	*
36	Unggas dan hasil- hasilnya	#		#	#	#	#	#	*
37	Hasil Peternakan lainnya		#			#	#	#	*
		2,00%	45%	2,00%	2,00	< 5 Ha	< 10 Jt	> 50000	36

Sumber: Badan Pusat Statistik (2002) diolah

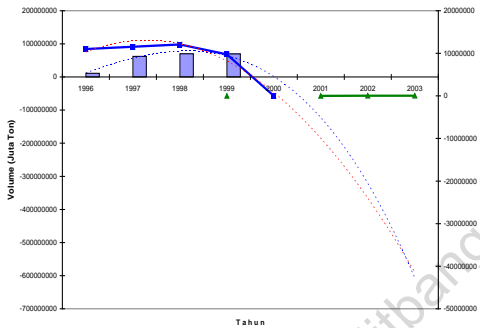
Lampiran Grafik 1. Grafik Dinamika Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Kelompok Produk HS Empat Digit Produk Pertanian yang Mendominasi Perdagangan Indonesia-China, 1996-2003



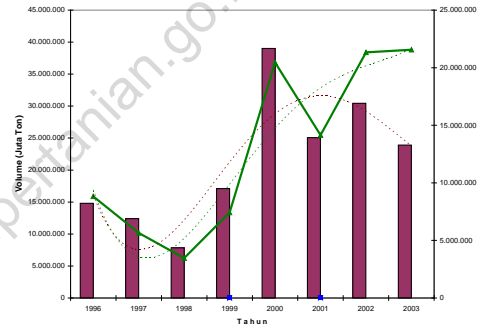
HS 05.02



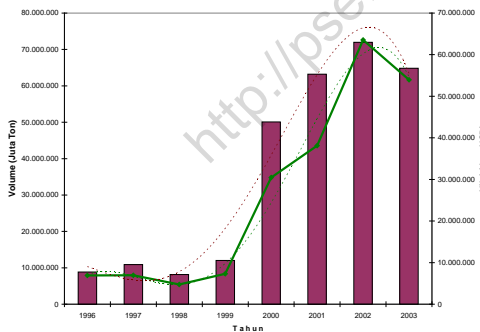
HS 07.03



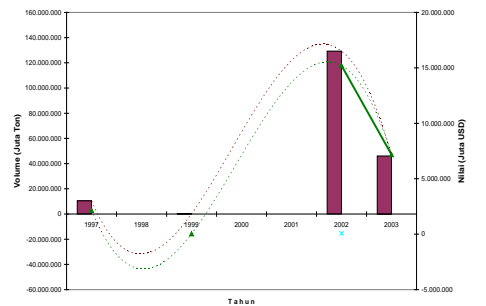
HS 08.03



HS 08.05

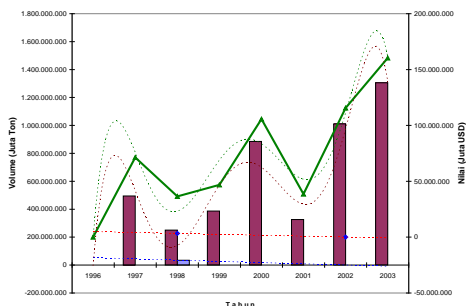


HS 08.08

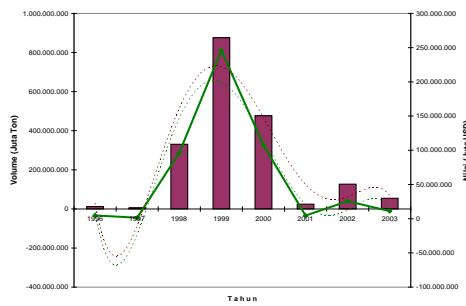


HS 10.01

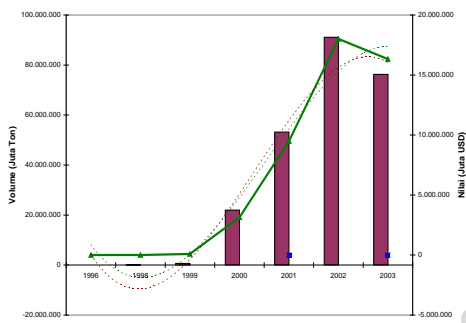
Lampiran Grafik 1. Lanjutan



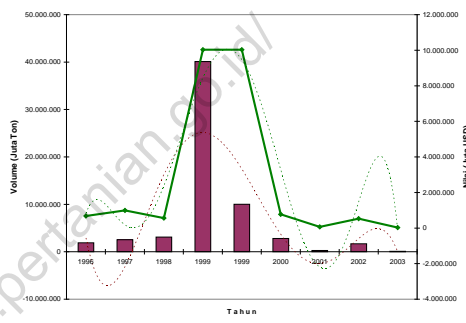
HS 10.05



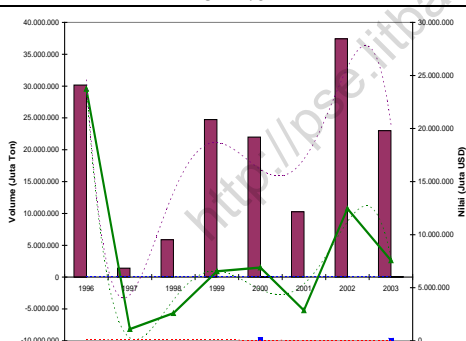
HS 10.06



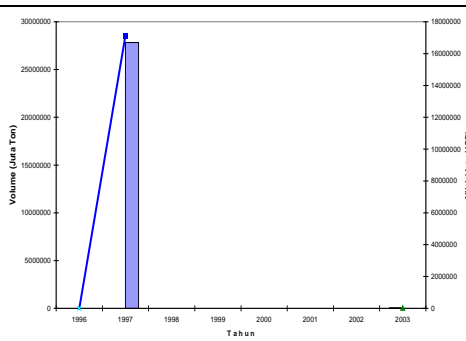
HS 11.01



HS 12.01

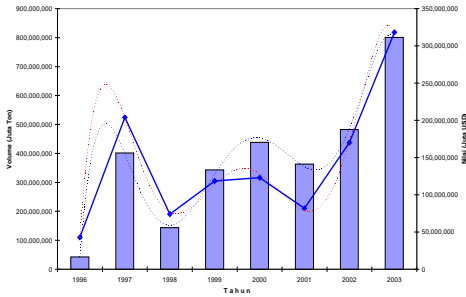


HS 12.02

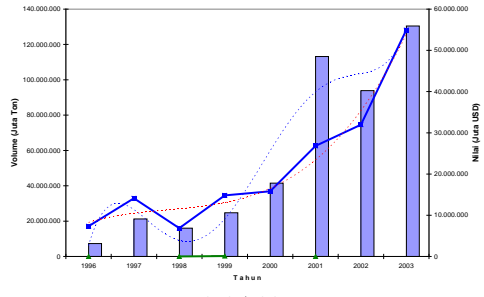


HS 15.07

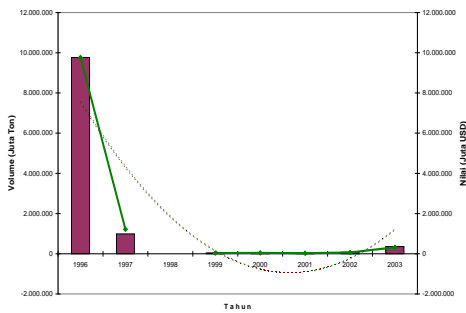
Lampiran Grafik 1. Lanjutan



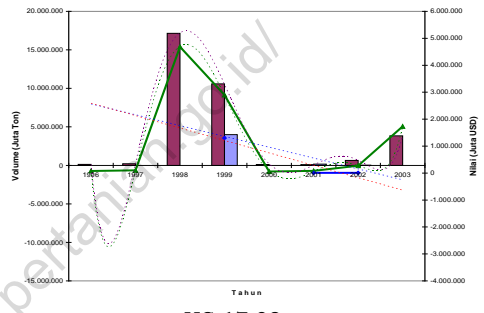
HS 15.11



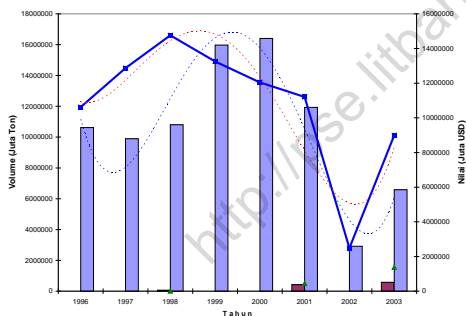
HS 15.13



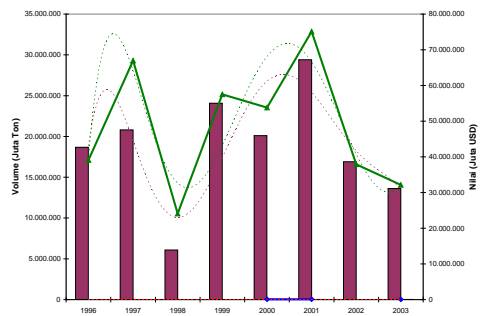
HS 15.20



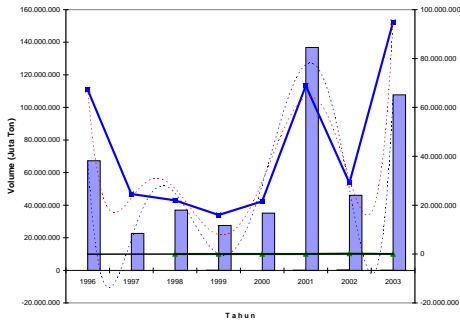
HS 17.02



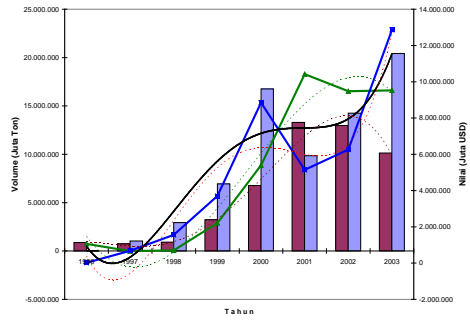
HS 18.01



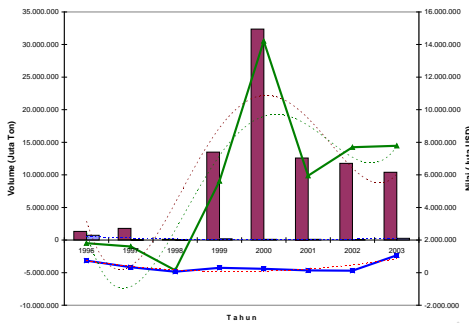
HS 24.01



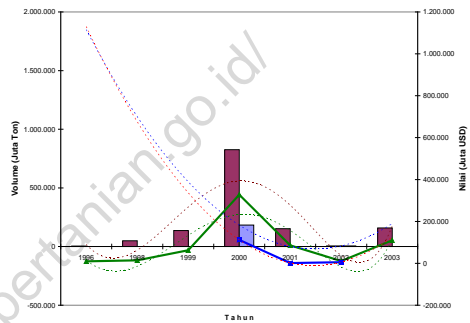
HS 40.01



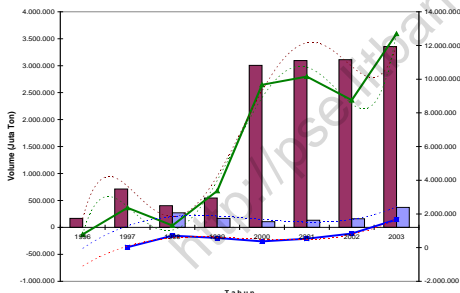
HS 40.02



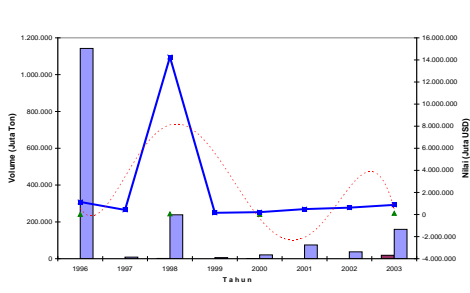
HS 40.11



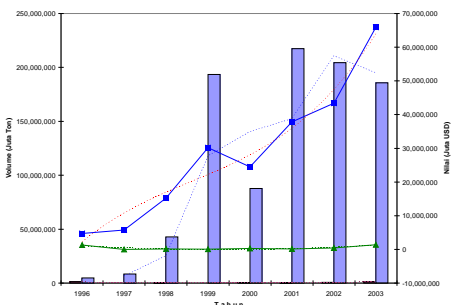
HS 40.12



HS 41.04



HS 41.06

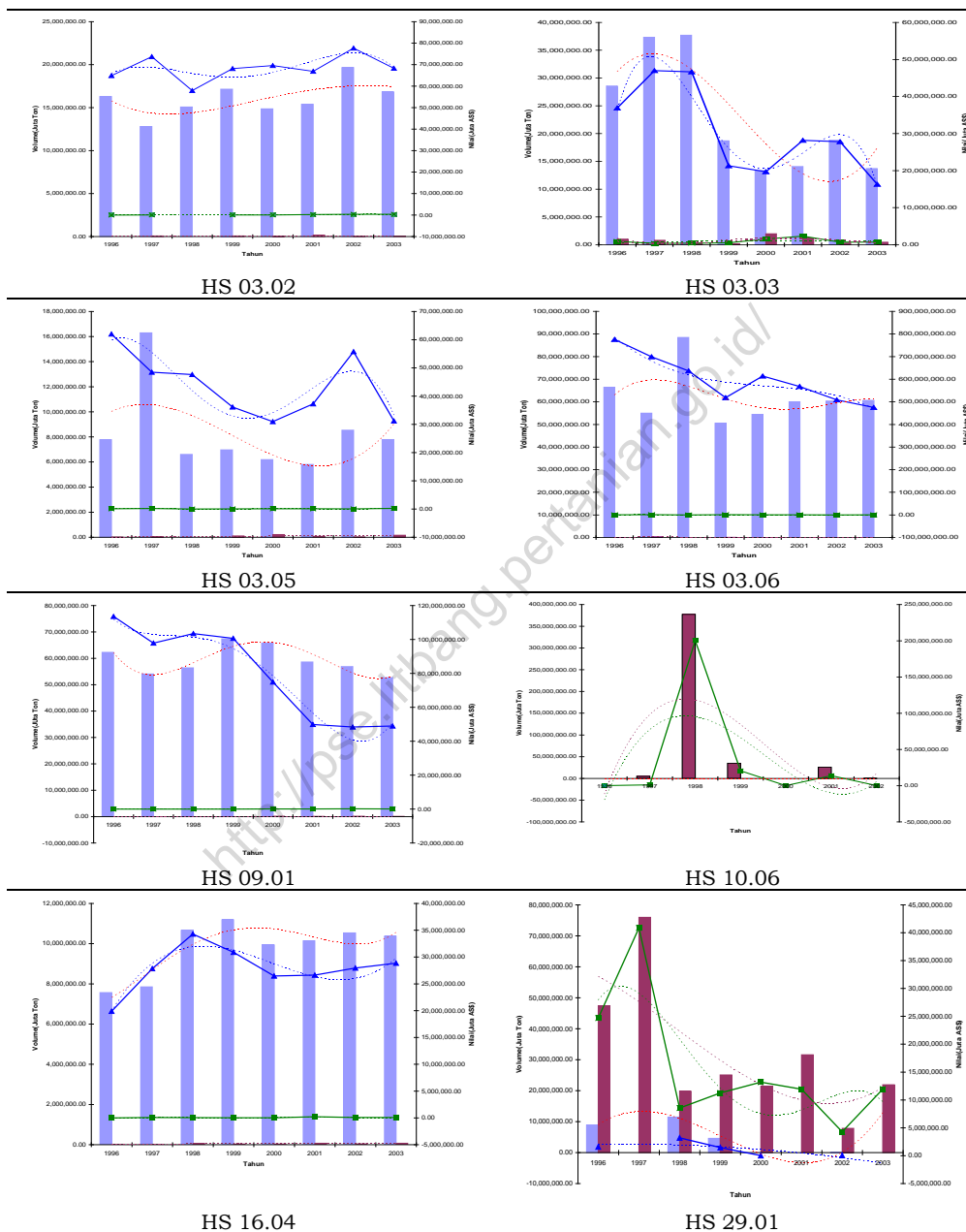


HS 29.05

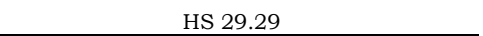
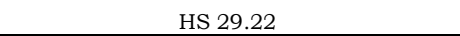
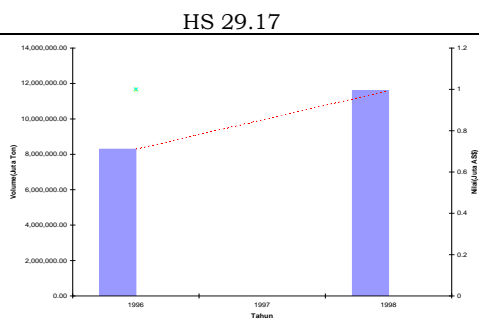
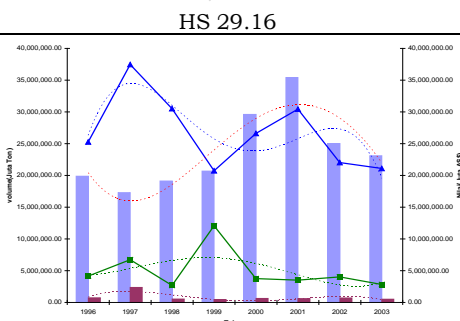
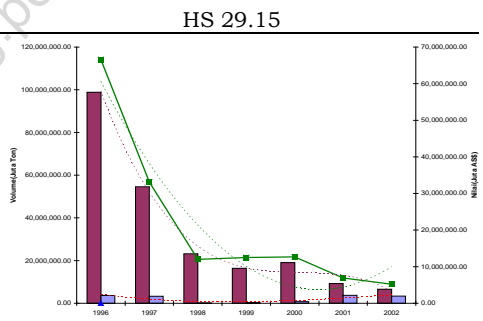
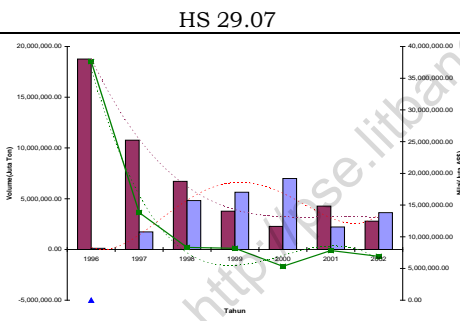
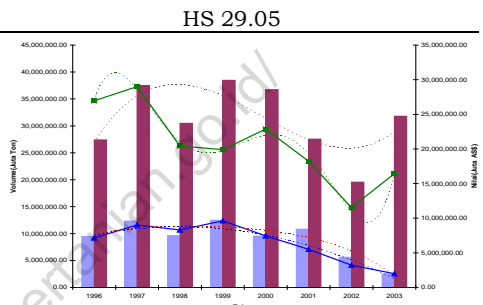
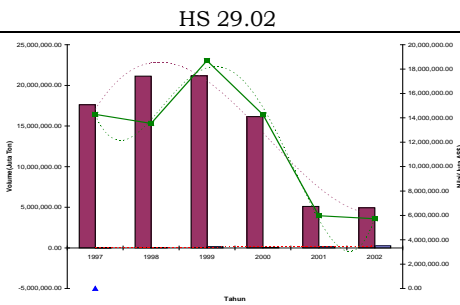
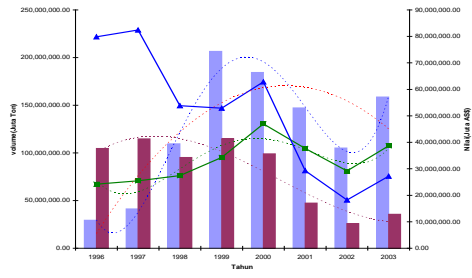
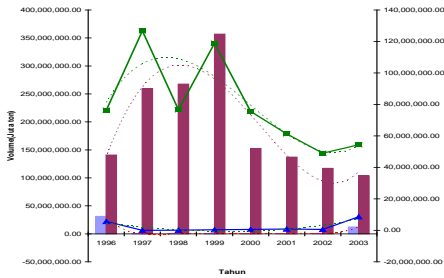
**Keterangan:**

- : Volume impor
- : Garis *trend* volume impor
- : Nilai impor
- : Garis *trend* nilai impor
- : Volume ekspor
- : Garis *trend* volume ekspor
- : Nilai ekspor
- : Garis *trend* nilai ekspor

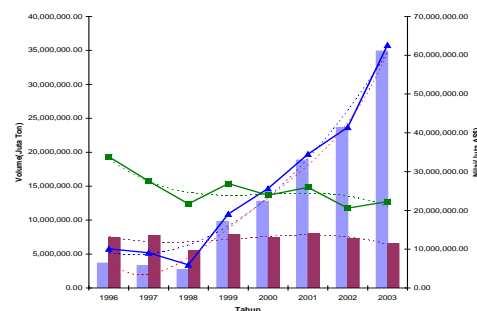
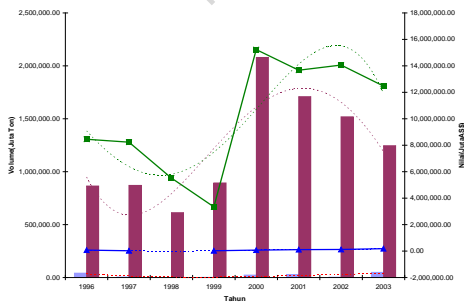
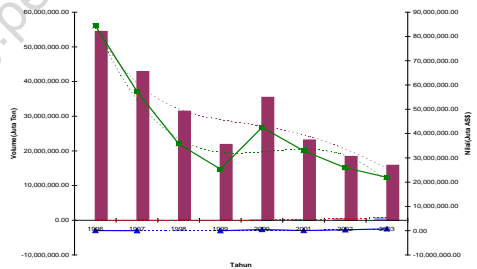
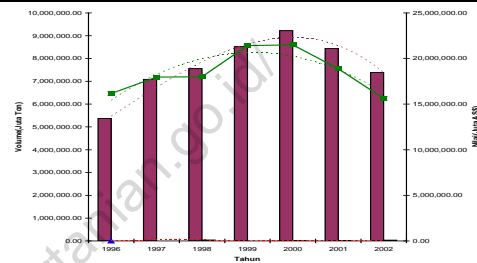
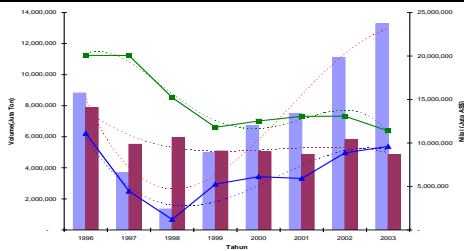
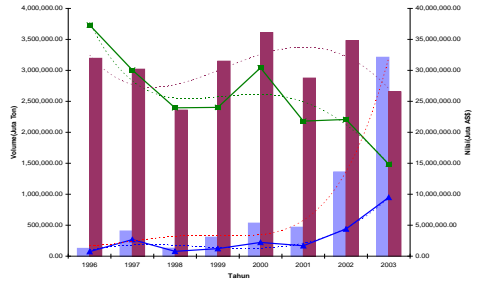
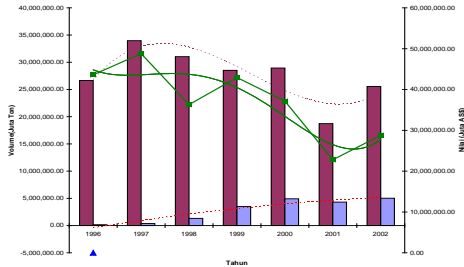
Lampiran Grafik 2. Grafik Dinamika Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Kelompok Produk HS Empat Digit Produk Pertanian yang Mendominasi Perdagangan Indonesia-Jepang, 1996-2003



Lampiran Grafik 2. Lanjutan



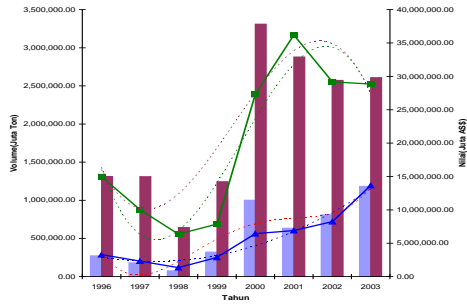
Lampiran Grafik 2. Lanjutan



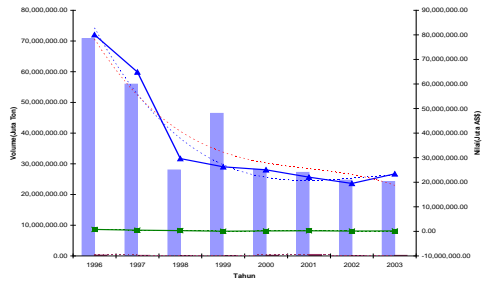
HS 40.09

HS 40.11

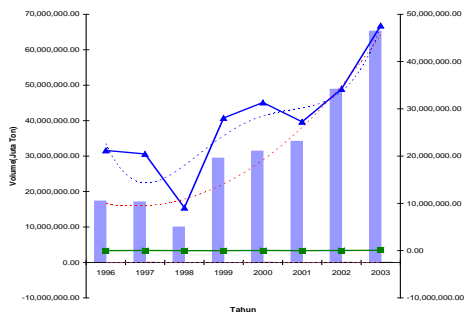
Lampiran Grafik 2. Lanjutan



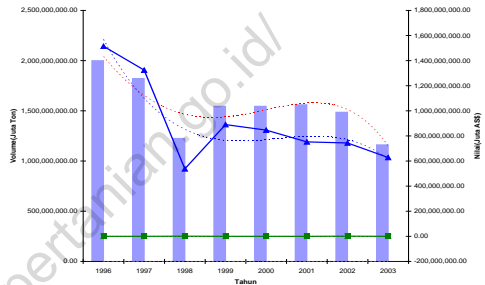
HS 40.16



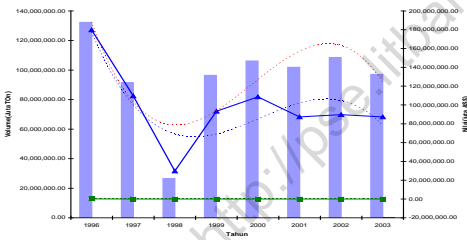
HS 44.07



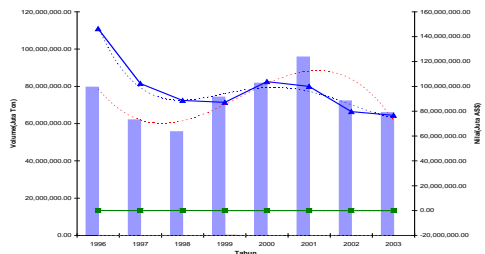
HS 44.09



HS 44.12



HS 44.13



HS 44.18

Keterangan:



: Volume Impor



: Garis Trend Volume Impor



: Nilai Impor



: Garis Trend Nilai Impor



: Volume Ekspor



: Garis Trend Volume Ekspor

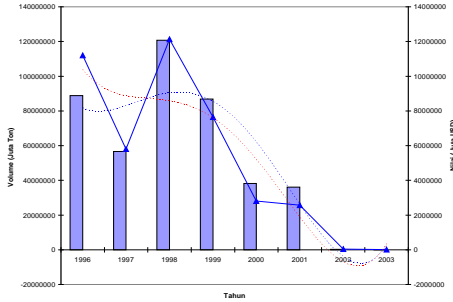


: Nilai Ekspor

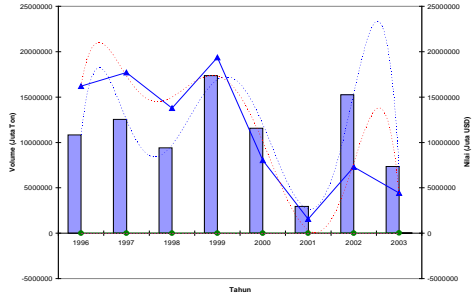


: Garis Trend Nilai Ekspor

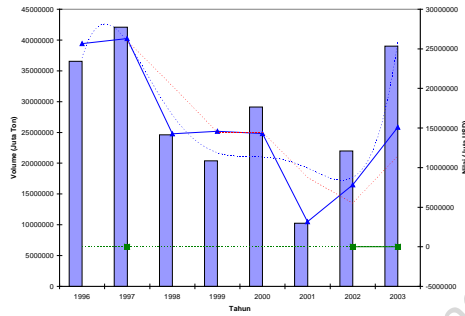
Lampiran Grafik 3. Grafik Dinamika Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Kelompok Produk HS Empat Digit Produk Pertanian yang Mendominasi Perdagangan Indonesia-Korea Selatan, 1996-2003



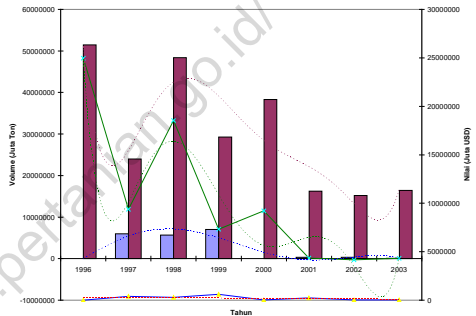
HS 07.14



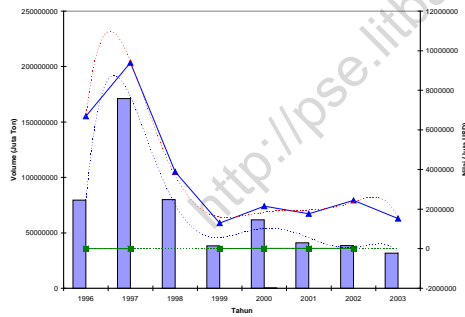
HS 09.01



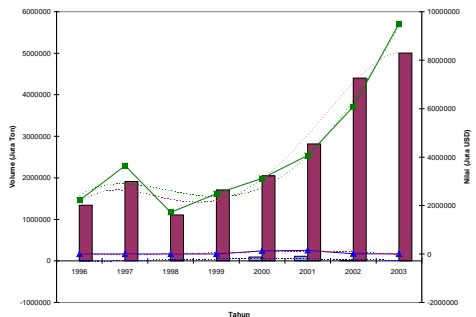
HS 15.13



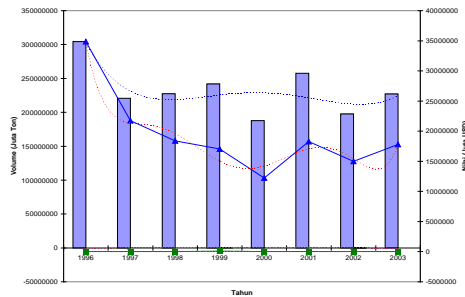
HS 17.01



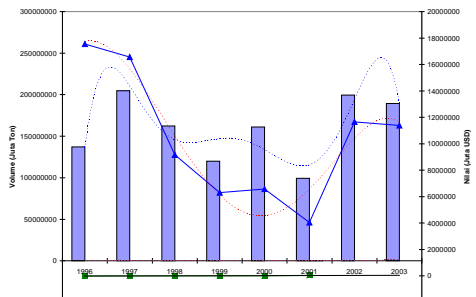
HS 17.03



HS 21.06

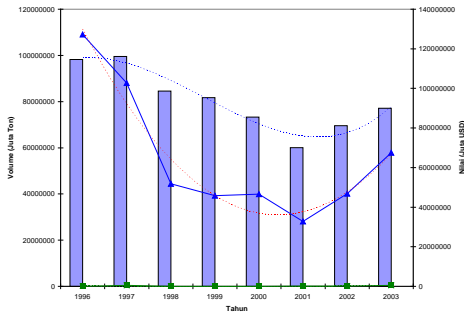


HS 23.02

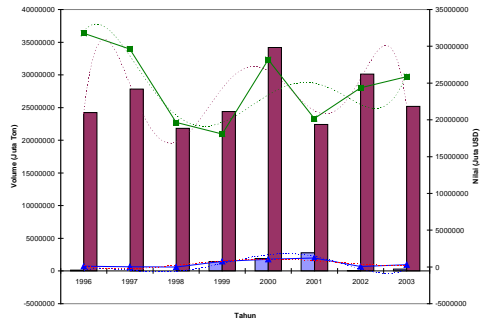


HS 23.06

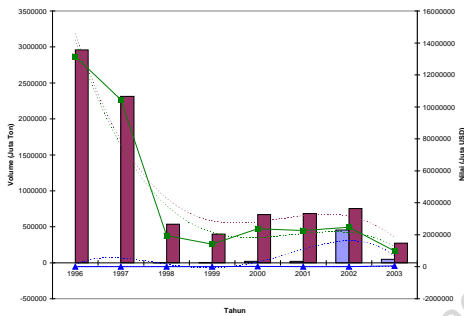
Lampiran Grafik 3. Lanjutan



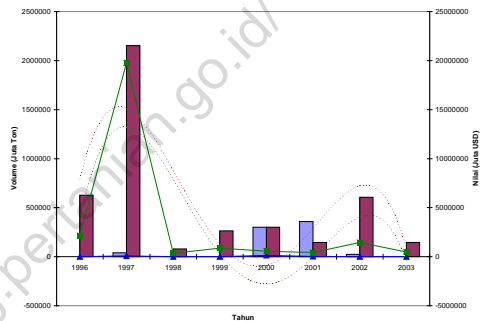
HS 40.01



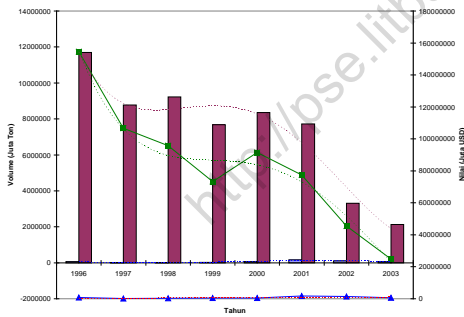
HS 40.02



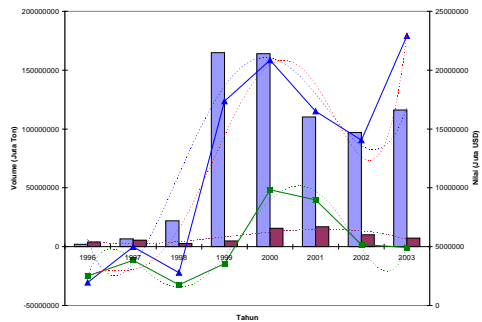
HS 40.05



HS 40.10



HS 41.04



HS 29.05

Keterangan:

- : Volume Impor
- : Garis *Trend* Volume Impor
- : Nilai Impor
- : Garis *Trend* Nilai Impor
- : Volume Ekspor
- : Garis *Trend* Volume Ekspor
- : Nilai Ekspor
- : Garis *Trend* Nilai Ekspor

